



**Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju**

**LAMPIRAN
PIDATO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA
HUT KE-80
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIRGAHAYU
REPUBLIK
INDONESIA**

LAMPIRAN PIDATO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PADA SIDANG TAHUNAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA DAN
SIDANG BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA HUT KE-80 PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA



**Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju**

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



TAHUN INDONESIA

8 Ukiran Kontribusi Kekal dari 8 Presiden Indonesia

Soekarno
(1945–1967)



- Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bersama Mohammad Hatta.
- Membangun sistem pemerintahan awal, termasuk penyusunan UUD 1945 bersama BPUPKI dan pembentukan lembaga-lembaga negara bersama PPKI.
- Menyatukan beragam etnis, agama, dan bahasa ke dalam satu identitas: Indonesia.
- Penggagas Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 yang menjadi dasar solidaritas negara-negara berkembang untuk merdeka dan perlawanan terhadap kolonialisme.
- Memprakarsai pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB) untuk menyuarakan aspirasi negara berkembang dan memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai.

Soeharto
(1967–1998)



- Selama pemerintahan Orde Baru, rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun (terutama 1970-an hingga 1990-an).
- Dengan Program Bimas dan Inmas, serta revolusi hijau, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984
- Persentase penduduk miskin turun dari sekitar 60% pada awal 1970-an menjadi sekitar 11,30% pada 1996.
- Mendirikan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), SD Inpres di seluruh pelosok tanah air, serta menggagas program transmigrasi.
- Menginisiasi trilogi pembangunan (stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan).

BJ Habibie (Mei 1998–Oktober 1999)



- Membuka ruang kebebasan pers dan menghapus kontrol ketat terhadap media.
- Menyelenggarakan Pemilu Terbuka Pertama tahun 1999.
- Mengesahkan UU Otonomi Daerah yang memperkuat kewenangan pemerintah daerah (UU No. 22 / 1999 dan UU No. 25 / 1999).
- Melakukan stabilisasi ekonomi yang relatif cepat, pasca krisis ekonomi 1997-1998.
- Mendorong *good governance* dan penegakan HAM.

Abdurrahman Wahid (Oktober 1999–Juli 2001)



- Mencabut larangan aktivitas budaya Tionghoa, termasuk perayaan Imlek yang kemudian dijadikan hari libur nasional.
- Mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk memberi ruang bagi kelompok minoritas.
- Melindungi hak-hak kelompok rentan dan masyarakat adat, termasuk Papua dan Aceh, melalui pendekatan dialog dan desentralisasi.
- Mengubah "Irian Jaya" menjadi "Papua" untuk menghormati budaya dan identitas masyarakat Papua.
- Pembela pluralisme dan toleransi, serta diakui sebagai "Bapak Demokrasi Pluralistik".



TAHUN INDONESIA

8 Ukiran Kontribusi Kekal dari 8 Presiden Indonesia

Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001–20 Oktober 2004)



- Sukses menjaga pertumbuhan ekonomi, sekitar 4-5% pertahun setelah masa krisis.
- Menyiapkan dan melaksanakan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
- Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan melalui UU No. 30 / 2002.
- Menjaga posisi Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Islam dan anggota penting Gerakan Non-Blok (GNB).
- Menandatangani Deklarasi Cessation of Hostilities Agreement (COHA) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2002.

Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)



- PDB Indonesia meningkat hampir 3 kali lipat, dari sekitar USD 256 miliar (2004) menjadi lebih dari USD 890 miliar (2014).
- Menjadikan Indonesia anggota aktif G20 sejak 2008.
- Menjembatani Dunia Barat dan Islam, termasuk dalam forum seperti APEC, ASEAN, dan PBB.
- Menyelesaikan konflik panjang di Aceh melalui Perjanjian Helsinki (2005) dengan GAM.
- Meluncurkan Program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Joko Widodo (2014–2024)



- Membangun ribuan kilometer jalan tol, dua puluhan bendungan besar, pelabuhan laut, serta bandara di berbagai daerah.
- Mendorong hilirisasi komoditas dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
- Meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH).
- Menetapkan dan memulai pembangunan IKN sebagai langkah strategis pemerataan pembangunan dan transformasi ekonomi.
- Menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas dan masuk dalam 20 negara dengan perekonomian terbesar di dunia.

Prabowo Subianto 300 hari pertama (2024–sekarang)



- Menginisiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi anak serta pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi lokal.
- Berhasil menegosiasikan tarif barang masuk ke AS lebih rendah dari Vietnam dan Tiongkok, menyelesaikan kerjasama dagang dengan Uni Eropa, serta menjadikan Indonesia anggota BRICS.
- Sekolah Unggulan dan digitalisasi pendidikan untuk menjawab tantangan pendidikan di abad teknologi kecerdasan buatan.
- Membentuk Danantara dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menyuarakan dan secara aktif membantu proses kedaulatan negara Palestina.
- Memperluas akses pendidikan dan partisipasi sekolah anak dari keluarga miskin melalui pengembangan Sekolah Rakyat.



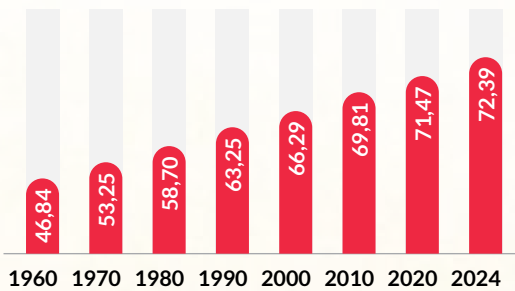
TAHUN DATA CAPAIAN INDONESIA



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025, diolah



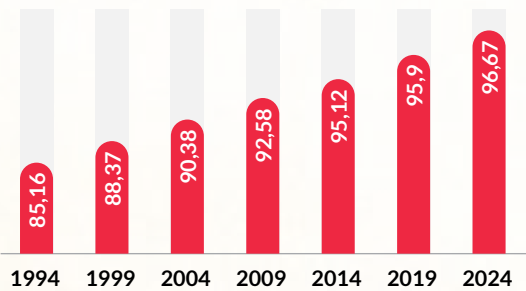
UMUR HARAPAN HIDUP (UHH)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025, diolah

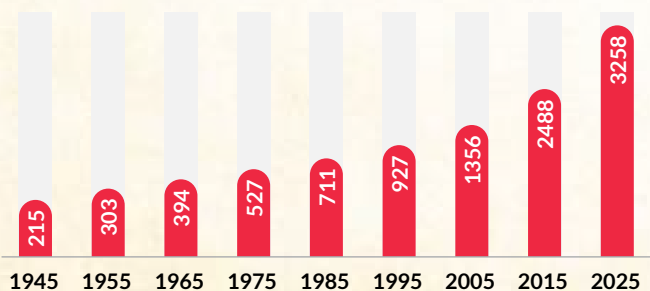


ANGKA MELEK HURUF (AMH) PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS TAHUN 1994-2024 (PERSEN)



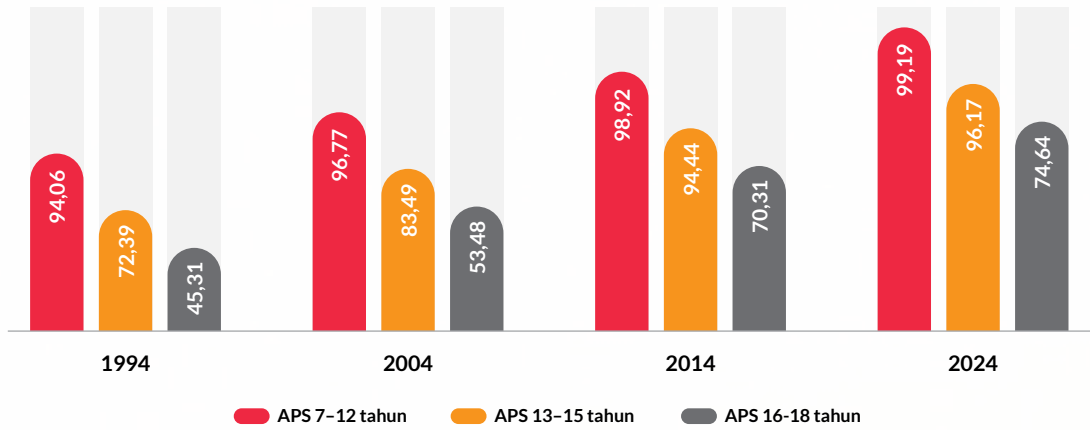
Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025, diolah

PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT TAHUN 1945-2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025, diolah

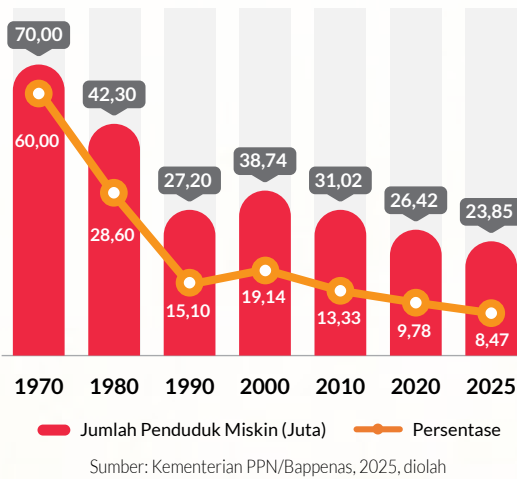
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 1994-2024 (PERSEN)



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025, diolah



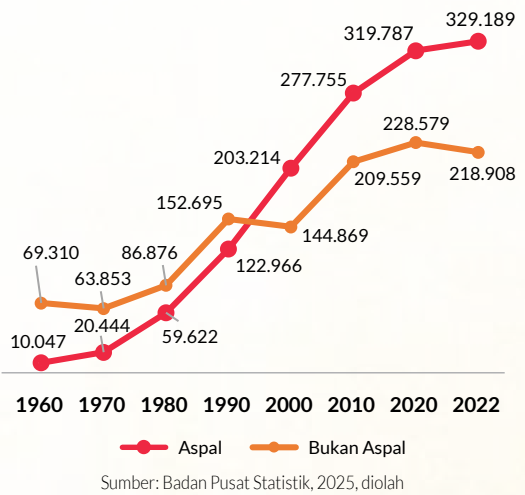
PROFIL KEMISKINAN INDONESIA 1970-2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025, diolah



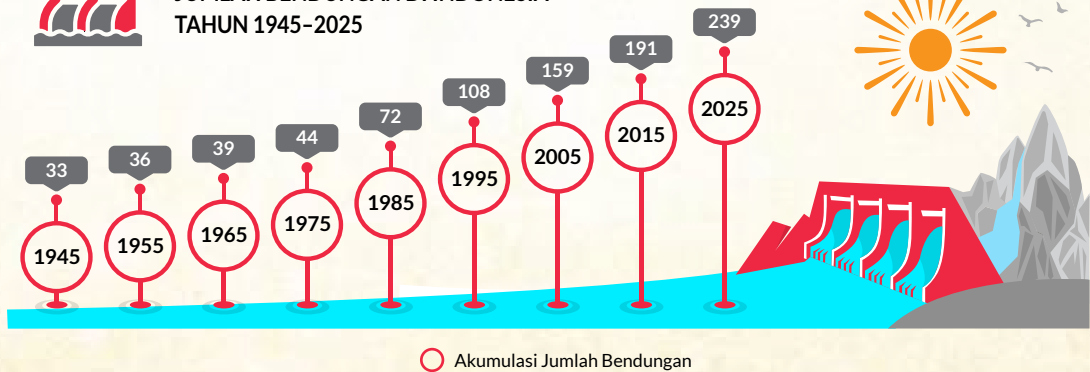
PANJANG JALAN MENURUT JENIS PERMUKAAN (KM) TAHUN 1970-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah



JUMLAH BENDUNGAN DI INDONESIA TAHUN 1945-2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025, diolah

► DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN			1-1
BAB 2	80 TAHUN INDONESIA: BERSATU BERDAULAT, RAKYAT SEJAHTERA, INDONESIA MAJU			2-1
BAB 3	ASTA CITA 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	3.1 3.2 3.3	Demokrasi Indonesia Hak Asasi Manusia Ideologi Pancasila	3-1 3-6 3-8
BAB 4	ASTA CITA 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14	Pertumbuhan Ekonomi Fiskal Moneter dan Sektor Keuangan Jasa Keuangan Swasembada Pangan Swasembada Energi Swasembada Air Ekonomi Digital Ekonomi Hijau Ekonomi Biru Kerja Sama Internasional Badan Usaha Milik Negara Pertahanan dan Keamanan Ekonomi Syariah	4-1 4-7 4-10 4-17 4-21 4-26 4-30 4-36 4-39 4-45 4-51 4-55 4-57 4-61
BAB 5	ASTA CITA 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Infrastruktur Transportasi Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengembangan Destinasi Pariwisata	5-1 5-4 5-9 5-12 5-17

	5.6	Koperasi dan UMKM	5-21	
	5.7	Ekonomi Kreatif	5-24	
	5.8	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	5-27	
	5.9	Proyek Strategis Nasional (PSN)	5-30	
<hr/>				
BAB 6	ASTA CITA 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	6.1	Indeks Pembangunan Manusia	6-1
		6.2	Kesehatan	6-4
		6.3	Pendidikan	6-6
		6.4	Iptek dan Inovasi	6-9
		6.5	Ketenagakerjaan	6-11
		6.6	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6-15
		6.7	Kualitas Keluarga	6-17
		6.8	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	6-21
		6.9	Perlindungan Anak	6-24
		6.10	Manajemen Talenta Nasional	6-27
		6.11	Pemuda dan Olahraga	6-30
		6.12	Perpustakaan	6-36
<hr/>				
BAB 7	ASTA CITA 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	7.1	Hilirisasi Industri	7-1
		7.2	Perikanan	7-7
		7.3	Kelautan	7-11
		7.4	Perdagangan	7-13
		7.5	Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus	7-16
		7.6	Investasi	7-17
<hr/>				
BAB 8	ASTA CITA 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	8.1	Kependudukan	8-1
		8.2	Kesejahteraan Sosial dan Penurunan Kemiskinan	8-3
		8.3	Penurunan Ketimpangan Antar kelompok Masyarakat	8-6

	8.4	Kemandirian Masyarakat	8-8
	8.5	Kawasan Perkotaan	8-10
	8.6	Perdesaan, Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Transmigrasi	8-14
	8.7	Pengembangan Wilayah	8-17
<hr/>			
BAB 9	ASTA CITA 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	9.1 Reformasi Politik 9.2 Politik Luar Negeri 9.3 Reformasi Birokrasi 9.4 Penegakan Hukum 9.5 Pemerintah Digital 9.6 Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	9-1 9-4 9-8 9-11 9-15 9-19
<hr/>			
BAB 10	ASTA CITA 8: Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	10.1 Agama 10.2 Kebudayaan 10.3 Kearsipan 10.4 Mitigasi Bencana	10-1 10-4 10-8 10-11
<hr/>			
BAB 11	PENUTUP		11-1
<hr/>			

► DAFTAR GAMBAR

BAB 2	Gambar 2.1	Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2-10
	Gambar 2.2	Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	2-10
	Gambar 2.3	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	2-14
BAB 4	Gambar 4.1	Peta Sebaran Pembangunan Bendungan Tahun 2022-2025	4-31
	Gambar 4.2	Peta Sebaran Skor Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 2025	4-46
	Gambar 4.3	Tahapan Akses OECD	4-52
BAB 5	Gambar 5.1	Sebaran Lokasi UT Akses Internet yang Terintegrasi Layanan Satria-1 per 1 Juli 2025	5-3
	Gambar 5.2	Peta Jaringan Transmisi Gas Bumi Nasional Tahun 2024	5-9
	Gambar 5.3	Peta Sebaran Rasio Elektrifikasi (RE) Triwulan I 2025	5-11
	Gambar 5.4	Peta Sebaran Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Tahun 2024	5-15
	Gambar 5.5	Peta Sebaran Akses Air Minum Aman Tahun 2023	5-16
	Gambar 5.6	Peta Sebaran Akses Sanitasi Aman Tahun 2024	5-16
	Gambar 5.7	Perkembangan Capaian PSN Tahun 2020-2025	5-30
BAB 7	Gambar 7.1	Nilai Realisasi Investasi 15 Komoditas Prioritas Hilirisasi Semester I 2025 (Rp. Triliun)	7-3
	Gambar 7.2	Realisasi Investasi Berdasarkan Pulau Semester I 2025 (Rp. Triliun)	7-20
BAB 9	Gambar 9.1	Indeks Integritas Partai Politik tahun 2024	9-3
	Gambar 9.2	Tiga Komponen Penilaian EGDI	9-16
	Gambar 9.3	Peta Representasi Geospasial Sulawesi	9-18

► DAFTAR GRAFIK

BAB 3	Grafik 3.1	Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2020–2025	3-2
	Grafik 3.2	Capaian Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021–2024	3-2
	Grafik 3.3	Capaian Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Tahun 2019–2025	3-3
	Grafik 3.4	Tren Capaian RANHAM Tahun 2021–2024	3-6
	Grafik 3.5	Jumlah Aduan yang Diterima Komnas HAM Tahun 2021–Juni 2025	3-7
	Grafik 3.6	Capaian IAP Nasional Tahun 2021–2025	3-9
	BAB 4	Grafik 4.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen, yoy) Tahun 2020 – Semester I 2025
Grafik 4.2		Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (persen, yoy) Tahun 2023 – Triwulan II 2025	4-4
Grafik 4.3		Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha (persen, yoy) Tahun 2023 – Triwulan II 2025	4-6
Grafik 4.4		Perkembangan Keseimbangan Primer dan Surplus/Defisit (persen PDB) Tahun 2022 – Semester I 2025	4-9
Grafik 4.5		Perkembangan Laju Inflasi Beberapa Negara (persen, yoy) Tahun 2022 – Semester I Juni 2025	4-11
Grafik 4.6		Perkembangan Inflasi Umum Bulanan (persen, yoy) Tahun 2022 – Semester I Juni 2025	4-12
Grafik 4.7		Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (persen, yoy) Tahun 2022 – Semester I Juni 2025	4-12
Grafik 4.8		Perkembangan Laju Pergerakan Penguatan/Pelemahan Nilai Tukar Beberapa Negara (persen, ytd) Tahun 2022 – Semester I Juni 2025	4-14
Grafik 4.9		Perkembangan Nilai Tukar (Rupiah/US\$) Tahun 2022 – Semester I Juni 2025	4-14
Grafik 4.10		Jumlah dan Pertumbuhan Uang Beredar (M2) (Rp Triliun) Tahun 2022 – Mei 2025	4-15
Grafik 4.11		Kinerja Penghimpunan DPK dan Penyaluran Kredit Tahun 2022 – Mei 2025	4-16
Grafik 4.12		Total Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan 2024-2025 (Triliun Rupiah)	4-18
Grafik 4.13		Perkembangan IHSG dan Kapitalisasi Pasar 2024-2025	4-19
Grafik 4.14		Perkembangan Outstanding Obligasi (Triliun Rupiah) 2024-2025	4-20

Grafik 4.15	Cadangan Beras Pemerintah (juta ton) Tahun 2023 – 2025	4-22
Grafik 4.16	Konsumsi Ikan Tahun 2020 – 2024 (kg/kapita/tahun)	4-23
Grafik 4.17	Luas Kawasan Hutan yang dikelola Masyarakat melalui Perhutanan Sosial Tahun 2020 – 2025	4-23
Grafik 4.18	Hasil Produksi Pangan dari Kawasan Hutan Tahun 2024	4-24
Grafik 4.19	Tren Peningkatan Indeks Ketahanan Energi Tahun 2022 – 2025	4-26
Grafik 4.20	Capaian Pembangunan Bendungan dan Embung (Unit) Tahun 2022 – 2025	4-31
Grafik 4.21	Capaian Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun 2022 – 2025 (ha)	4-32
Grafik 4.22	Capaian Tambahan Kapasitas Air Baku Tahun 2022 – 2025 (m ³ /detik)	4-34
Grafik 4.23	Capaian Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2020 – 2025 (ribu ha)	4-35
Grafik 4.24	Skor IMD World Digital Competitiveness Tahun 2024 – 2025	4-37
Grafik 4.25	PDB Triwulanan dan Laju Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi ADHB Triwulan I 2024 - Triwulan II 2025	4-37
Grafik 4.26	Tenaga Kerja Sektor Informasi dan Komunikasi Tahun 2020 – 2025	4-38
Grafik 4.27	Capaian Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2020 – 2025	4-40
Grafik 4.28	Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2021 – 2025	4-40
Grafik 4.29	Capaian Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahun 2020 – 2025	4-41
Grafik 4.30	Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan Tahun 2020 – Semester I 2025	4-42
Grafik 4.31	Capaian IKLH Tahun 2020 – 2025	4-43
Grafik 4.32	Capaian Kinerja Utama Ekonomi Biru Tahun 2023 – 2025	4-45
Grafik 4.33	Luas Kawasan Konservasi Tahun 2020 – 2024 (juta ha)	4-48
Grafik 4.34	Capaian Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2020 – 2024 (Kawasan)	4-48
Grafik 4.35	Investasi BUMN (Triliun Rupiah) Tahun 2024 – 2025	4-56
Grafik 4.36	Laba Bersih BUMN (Triliun Rupiah) Tahun 2024 – 2025	4-56
Grafik 4.37	Pembangunan Rumah Prajurit Tahun 2024 – 2025	4-58
Grafik 4.38	Capaian Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2023 – 2024	4-59
Grafik 4.39	Capaian Indeks P4GN Tahun 2021 – 2024	4-59
Grafik 4.40	Capaian IKLN Tahun 2023 – 2024	4-60
Grafik 4.41	Peringkat Indonesia dalam Global Islamic Economic Index (GIEI) Tahun 2019 – 2025	4-62
Grafik 4.42	Nilai Expor Halal Indonesia (US\$ Miliar) Tahun 2019 – 2024	4-62

Grafik 4.43	Perkembangan Aset Keuangan Syariah Nasional (Rp Triliun) Tahun 2021 – 2025	4-64
Grafik 4.44	Perkembangan Nilai ZIS-DSKL (Rp Triliun) Tahun 2020 – 2024	4-64

BAB 5

Grafik 5.1	Perkembangan Proyek KPBU yang Beroperasi pada Tahun 2020 – 2025	5-28
------------	---	------

BAB 6

Grafik 6.1	Tren Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 – 2024	6-3
Grafik 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 – 2025	6-11
Grafik 6.3	Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA)	6-24
Grafik 6.4	Proporsi Perempuan Umur 20-24 tahun yang Berstatus Menikah atau Hidup Bersama Sebelum Usia 18 Tahun	6-25
Grafik 6.5	Grafik Capaian Utama MTN Bidang Olahraga Tahun 2024 – 2025	6-29
Grafik 6.6	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2021 – 2025	6-31
Grafik 6.7	Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	6-31
Grafik 6.8	Prestasi Olahraga Indonesia pada Olympic Games Tahun 2012 – 2024	6-32
Grafik 6.9	Prestasi Olahraga Indonesia pada Paralympic Games Tahun 2012 – 2024	6-34
Grafik 6.10	Peringkat dan Poin FIFA Tim Sepak Bola Putra Indonesia 2024 – 2025	6-34
	Peringkat dan Poin FIFA Tim Sepak Bola Putri Indonesia 2024 – 2025	6-34
Grafik 6.11	Capaian Nilai Budaya Literasi	6-36
Grafik 6.12	Sebaran Penerima Bantuan Perpustakaan Desa/Kelurahan Tahun 2024	6-37

BAB 7

Grafik 7.1	Unit Pengolahan Ikan Menengah Besar berdasarkan Provinsi Semester I 2025	7-8
Grafik 7.2	Unit Pengolahan Ikan Menengah Besar berdasarkan Jenis Olahan Utama Semester I 2025	7-8
Grafik 7.3	Capaian Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2020 – Triwulan I 2025	7-9
Grafik 7.4	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2020 – 2025	7-10
Grafik 7.5	Produksi Rumput Laut Tahun 2020 – Triwulan II 2025 (Juta Ton)	7-11
Grafik 7.6	Volume Ekspor Rumput Laut Tahun 2020 – Triwulan I 2025 (Ribu Ton)	7-12
Grafik 7.7	Produksi Garam Tahun 2020 – 2024 (Juta Ton)	7-12
Grafik 7.8	Perkembangan Realisasi Investasi Semester I 2025 (Rp Triliun)	7-18

BAB 8

Grafik 8.1	Kondisi Kemiskinan Indonesia Tahun 2015-2025	8-3
Grafik 8.2	Capaian Rasio Gini 2021-2025	8-6
Grafik 8.3	Capaian Kegiatan Redistribusi Tanah (Bidang Tanah) Tahun 2020-2025	8-9

BAB 9

Grafik 9.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	9-4
Grafik 9.2	Jumlah Kegiatan dan Pendanaan KSST (Miliar Rupiah) Tahun 2020 – 2024	9-6
Grafik 9.3	Perbandingan Kasus Pelindungan WNI yang Ditangani dan Diselesaikan Tahun 2020 – 2024	9-7
Grafik 9.4	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024	9-9
Grafik 9.5	Capaian Indeks Pembangunan Hukum 2020 – 2029	9-11
Grafik 9.6	Capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2020 – 2025	9-12
Grafik 9.7	Capaian Indeks Integritas Nasional dan Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2020 – 2025	9-13
Grafik 9.8	Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2020 – 2024	9-17
Grafik 9.9	Capaian Indeks GWPP tahun 2024	9-20
Grafik 9.10	Capaian Indeks SPM tahun 2022 – 2024	9-21
Grafik 9.11	Capaian Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB	9-22

BAB 10

Grafik 10.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2020 – 2025	10-2
Grafik 10.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021 – 2025	10-5
Grafik 10.3	Perkembangan Jumlah Arsip yang Diselamatkan Tahun 2020 – 2025	10-8
Grafik 10.4	Kinerja Penerapan SRIKANDI Tahun 2025	10-10
Grafik 10.5	Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2020 – 2024	10-12
Grafik 10.6	Grafik Perkembangan IKD Tahun 2020 – 2024	10-12
Grafik 10.7	Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat Dampak Perubahan Iklim terhadap PDB (%) Tahun 2020 – 2024	10-13
Grafik 10.8	Capaian Pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Tahun 2022 – 2025 (Km)	10-14
Grafik 10.9	Capaian Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Tahun 2022 – 2025 (Km)	10-14

► DAFTAR TABEL

BAB 3	Tabel 3.2	Capaian IAP Dimensi Sila Tahun 2021 – 2025	3-9
BAB 4	Tabel 4.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara Tahun 2022 – Semester I 2025	4-8
	Tabel 4.2	Capaian Kinerja Pembangunan Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan	4-27
	Tabel 4.3	Capaian Kinerja Utama Ekonomi Biru Aspek Pertumbuhan dan Nilai Tambah Tahun 2023 – 2025	4-47
	Tabel 4.4	Capaian Kinerja Utama Ekonomi Biru Aspek Lingkungan Tahun 2023 – 2025	4-49
	Tabel 4.5	Capaian Kinerja Utama Ekonomi Biru Aspek Sosial dan Inklusivitas Tahun 2023 – 2025	4-50
	Tabel 4.6	Capaian Indikator Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Tahun 2020 – 2025	4-51
	Tabel 4.7	Capaian Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Tahun 2024 – 2025	4-58
BAB 5	Tabel 5.1	Capaian Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024 – 2025	5-3
	Tabel 5.2	Capaian Infrastruktur Konektivitas dan Layanan Transportasi Periode Tahun 2020 – 2025	5-6
	Tabel 5.3	Capaian Indikator Subsektor Infrastruktur Ketenagalistrikan Tahun 2022 – 2025	5-10
	Tabel 5.4	Capaian Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	5-15
	Tabel 5.5	Capaian Pembangunan Destinasi Pariwisata	5-19
	Tabel 5.6	Capaian Indikator Pembangunan Utama	5-21
	Tabel 5.7	Koperasi Aktif berdasarkan Sektor Usaha 2025	5-21
	Tabel 5.8	Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Tahun 2024 – 2025	5-25
	Tabel 5.9	Jumlah dan Nilai Proyek KPBU Tahun 2024 dan 2025	5-29
BAB 6	Tabel 6.1	Capaian Komponen Indikator Penyusun Nilai Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020 – 2024	6-3
	Tabel 6.2	Capaian Pembangunan Bidang Kesehatan	6-5
	Tabel 6.3	Capaian Indikator Pembangunan Bidang Pendidikan	6-7
	Tabel 6.4	Capaian Indikator Pembangunan Bidang Iptek dan Inovasi	6-9

Tabel 6.5	Capaian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6-15
Tabel 6.6	Capaian Indikator Pembangunan Keluarga	6-17
Tabel 6.7	Capaian Indikator Pembangunan Bidang Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	6-20
Tabel 6.8	Capaian Pembangunan Bidang Perlindungan Anak	6-23
Tabel 6.9	Capaian Utama MTN Bidang Riset dan Inovasi	6-27
Tabel 6.10	Capaian Utama MTN bidang Seni Budaya	6-28

BAB 7

Tabel 7.1	Capaian Indikator Pembangunan Lingkup Industri dan Hilirisasi Tahun 2024 – 2025	7-2
Tabel 7.2	Produksi Hasil Perikanan Tahun 2024 – Triwulan II 2025 (Juta Ton)	7-7
Tabel 7.3	Capaian Indikator Pembangunan Lingkup Perdagangan Tahun 2023 – Triwulan I 2025	7-14
Tabel 7.4	Capaian Indikator Pembangunan terkait KI/KEK Prioritas	7-17
Tabel 7.5	Capaian Indikator Pembangunan Lingkup Investasi Tahun 2024 – Semester I 2025	7-19

BAB 8

Tabel 8.1	Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2020 – 2025	8-2
Tabel 8.2	Realisasi Bantuan Sosial dalam Program Penurunan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 – 2025	8-5
Tabel 8.3	Capaian Penurunan Tertinggi Rasio Gini Provinsi Tahun 2024 – 2025	8-7
Tabel 8.4	Capaian Indikator Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Tahun 2023 – 2025	8-11
Tabel 8.5	Capaian Pembangunan IKN Triwulan II Tahun 2025	8-13
Tabel 8.6	Capaian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Transmigrasi Tahun 2024	8-14
Tabel 8.7	Realisasi Pertumbuhan PDRB Wilayah KBI dan KTI (persen, yoy) Tahun 2020 – 2025	8-17
Tabel 8.8	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Wilayah (persen, yoy) Tahun 2020 – 2025	8-19

BAB 9

Tabel 9.1	Perbandingan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Sebelum dan Pasca Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024	9-2
Tabel 9.2	Pertemuan Bilateral Presiden RI dan Highlight Capaian Kesepakatan Kerja Sama Tahun 2024 – 2025	9-5
Tabel 9.3	Perbandingan Capaian Penyelesaian Permohonan KI Tahun 2024 dan Semester I 2025	9-14

80



Kunjungan Kerja Presiden Prabowo Subianto ke Turkiye
Sumber: Kementerian Sekretariat Negara

BAB 1

Pendahuluan



Panen Raya Nasional di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka
Sumber: Kementerian Sekretariat Negara



BAB 1

Pendahuluan

Setiap langkah pembangunan merupakan upaya konkret mewujudkan cita-cita bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Delapan dekade telah berlalu sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia mulai memasuki fase penting dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 yang menjadi tujuan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Tahun 2025 merupakan tahun krusial bagi bangsa Indonesia dalam mengimplementasikan tahap awal RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang memuat Asta Cita Presiden sebagai prioritas pembangunan. Tahun 2025 memiliki peran strategis sebagai fondasi awal pembangunan dan bentuk mitigasi berbagai tantangan. Hal ini sejalan dengan tema RKP 2025 yakni “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, yang menggambarkan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi transformasi pembangunan melalui berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat

dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” merupakan tema peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, yang merefleksikan komitmen pemerintah dalam memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa, serta mengakselerasi kesejahteraan rakyat menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih baik, pemerintah terus berupaya menghadapi berbagai tantangan di antaranya ketidakpastian ekonomi dunia, dinamika geopolitik, perubahan iklim, perkembangan teknologi, hingga kesenjangan sosial dan wilayah di dalam negeri melalui respons kebijakan yang adaptif, progresif, dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah realokasi anggaran yang difokuskan untuk program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

« Bab 1.



Peresmian Terminal Haji di Bandara Soekarno Hatta
Sumber: Kementerian Sekretariat Negara

Pemerintah meyakini bahwa perekonomian yang inklusif tidak akan terwujud tanpa penguatan ekonomi kerakyatan dan dukungan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, program prioritas pembangunan difokuskan pada: (1) peningkatan kualitas gizi anak-anak dan peserta didik sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui makan bergizi gratis; (2) perluasan akses pendidikan berbasis komunitas melalui pengembangan sekolah rakyat; (3) pemberdayaan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; (4) peningkatan nilai tambah ekonomi nasional dan memperkuat ketahanan industri dalam negeri melalui hilirisasi industri; (5) mendorong kualitas lingkungan hidup yang lebih baik melalui penanganan persampahan; hingga (6) peningkatan kapasitas produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan secara mandiri melalui swasembada pangan.

Untuk memahami secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai capaian, tantangan, dan upaya pembangunan yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2025, disusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pidato tersebut.

Lampiran pidato diawali dengan penjelasan mengenai pelaksanaan transformasi struktural menuju Indonesia Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, dan Indonesia Maju yang diikuti dengan pendalaman capaian, tantangan dan upaya pelaksanaan Asta Cita.

Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi referensi yang komprehensif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bentuk gambaran kebijakan dan capaian pembangunan nasional yang telah dilakukan hingga saat ini.



Meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

BAB 2

**80 Tahun Indonesia: Bersatu Berdaulat,
Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju**



Para pelajar meyambut kedatangan Presiden
Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden



BAB 2

80 Tahun Indonesia: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju

Visi Indonesia Emas 2045 merupakan strategi besar pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang bersatu, berdaulat, dengan kualitas hidup rakyat sejahtera, dan maju, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045.



Tahun 2025 • 2-1

Bab 2.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, RPJPN juga memuat 20 upaya transformatif super prioritas yang menjadi *game changer* pembangunan.

Transformasi Sosial

- ▶ Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) serta efektivitas pengalokasian dan pemanfaatan anggaran wajib pendidikan.
- ▶ Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
- ▶ Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
- ▶ Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan *stunting*, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kusta).
- ▶ Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.



Transformasi Ekonomi

- ▶ Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri.
- ▶ Industrialisasi : hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
- ▶ Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
- ▶ *Superplatform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
- ▶ Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.
- ▶ Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).



Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- ▶ Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- ▶ Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
- ▶ Ketahanan energi dan air serta kemandirian menuju kedaulatan pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).



Transformasi Tata Kelola

- ▶ Transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), pemberantasan korupsi, dan pembentukan lembaga pengelola tunggal regulasi.
- ▶ Penguatan tata kelola partai politik.



Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- ▶ Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocaat Generaal*.
- ▶ Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional.
- ▶ Reformasi perencanaan dan fiskal : perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi perencanaan dan fiskal.
- ▶ Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.



Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan dalam periode 2025 hingga 2029 yang berpedoman pada RPJMN 2025-2029. Program pembangunan RPMN 2025-2029 mengintegrasikan agenda pembangunan RPJPN 2025-2045 dengan visi, misi dan program presiden terpilih (Asta Cita).

Dalam prosesnya, penyusunan RPJMN juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Berbagai forum dimanfaatkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang holistik dan integratif, diantaranya forum konsultasi publik dan musyawarah pembangunan nasional.



8 Asta Cita

Agenda Pembangunan



Prioritas Nasional 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).



Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia



Prioritas Nasional 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.



Transformasi Ekonomi
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi



Prioritas Nasional 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.



Transformasi Ekonomi



Prioritas Nasional 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.



Transformasi Ekonomi
Transformasi Sosial
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi



Prioritas Nasional 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



Transformasi Ekonomi



Prioritas Nasional 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.



Transformasi Sosial
Transformasi Ekonomi



Prioritas Nasional 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.



Transformasi Ekonomi
Transformasi Tata Kelola
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia



Prioritas Nasional 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

◀ Bab 2.



Presiden memberikan arahan dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029
Sumber: Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden

Sebagai penjabaran visi, misi dan program presiden, RPJMN 2025-2045 juga memuat program hasil terbaik cepat yang menjadi prioritas utama dalam menjawab permasalahan serta tantangan utama pembangunan.





RPJMN 2025-2029 secara khusus juga menekankan pada strategi menurunkan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Setiap strategi diturunkan lebih detail menjadi program dan kegiatan yang menyentuh langsung pada masyarakat. Program-program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia di antaranya yaitu:

Makan Bergizi Gratis - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan prioritas pembangunan yang ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini memiliki nilai strategis tinggi karena diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian Trisula Pembangunan Nasional 2029, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

Program MBG berfokus pada pemenuhan gizi, penguatan ketahanan dan kemandirian pangan berbasis pangan lokal, peningkatan akses pendidikan berkualitas, penguatan ekonomi lokal, serta penurunan kemiskinan melalui perluasan lapangan kerja. Tujuan utamanya adalah menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif sebagai fondasi bagi Indonesia Emas 2045. Program ini tidak hanya memberikan makanan bergizi gratis kepada masyarakat, tetapi juga berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, dan BUM Desa. Program ini diharapkan menjadi salah satu landasan dalam membentuk generasi sehat yang menjadi pilar kekuatan bangsa di masa depan.

Program MBG dilaksanakan dengan prinsip tepat sasaran, sesuai dengan kecukupan gizi dan menu berbasis preferensi lokal, diversifikasi pangan lokal, jaminan keamanan, mutu, dan higienitas makanan, serta pemberdayaan melalui koperasi, BUM Desa, dan UMKM. Pada tahun 2025, intervensi utama mencakup (1) penyediaan makan bergizi bagi peserta didik PAUD-SMA sederajat, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; (2) edukasi gizi dan promosi pola makan sehat; (3) pelaksanaan UKS dan skrining kesehatan; (4) penyusunan standar tata kelola, manajemen risiko, dan sistem informasi pemantauan gizi; serta (5) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu dilakukan juga dukungan teknis yang meliputi pengukuran antropometri, air bersih dan sanitasi, manajemen limbah, pemanfaatan pangan lokal, pemberdayaan UMKM/BUM Desa, serta peningkatan produksi pangan domestik.

Program MBG diharapkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima pada akhir 2025. Hingga 12 Agustus 2025, Program MBG telah menjangkau 10.083.647 penerima manfaat melalui 5.018 SPPG yang tersebar di seluruh provinsi. Program MBG adalah program pemerintah yang didukung oleh keterlibatan masyarakat yang tinggi mulai dari mitra SPPG, pemasok bahan pangan, serta relawan selaku pengelola makanan.

Program MBG memberikan dampak signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Hingga saat ini, total tenaga kerja yang terlibat di seluruh SPPG mencapai sekitar 250 ribu orang. Selain itu, sebanyak 30.018 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) *batch* 3 telah selesai dilatih pada 14 Juli 2025 dan siap

Bab 2.

ditugaskan di seluruh Indonesia. Program ini juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi lokal melalui kemitraan strategis dengan 719 koperasi, 169 BUM Desa, 20 BUM Desa Bersama, dan 3.724 UMKM dalam penyediaan bahan baku pangan untuk SPPG.

Dalam upaya memperkuat tata kelola Program MBG, saat ini sedang disusun regulasi tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Regulasi ini dirancang sebagai landasan pelaksanaan program yang komprehensif bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan hukum, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, regulasi ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyediaan sarana dan prasarana, serta mengatur mekanisme kerja sama antara instansi pemerintah dan nonpemerintah guna memastikan sinergi, efektivitas, dan keberlanjutan implementasi program di berbagai tingkat pemerintahan.

Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Program MBG diharapkan tidak hanya menjadi intervensi teknis, melainkan juga fondasi transformasional dalam memperkuat pembangunan manusia Indonesia. Dukungan kebijakan yang solid, pelibatan multipihak, serta tata kelola yang adaptif akan menjadi kunci dalam mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Implementasi Program MBG mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan program yang berpihak pada kelompok rentan dan berkontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan kesehatan bangsa.

Swasembada Pangan - Swasembada Pangan merupakan program yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, peningkatan produksi, kesejahteraan petani/nelayan, serta

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program Swasembada Pangan mempunyai sasaran strategis antara lain (1) meningkatkan ketersediaan pangan secara berkelanjutan berbasis lumbung pangan; (2) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, dan penanganan kerawanan pangan; serta (3) meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan tata kelola sistem pangan. Prioritas pembangunan yang mendukung Swasembada Pangan adalah pencetakan dan peningkatan produktivitas lahan pertanian, serta optimalisasi lumbung pangan di tingkat desa, daerah, dan nasional.

Pada tahun 2025, intervensi difokuskan pada (1) pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan, termasuk pangan lokal, pangan hewani, dan pangan akuatik (*blue food*); (2) penguatan Cadangan Pangan Pemerintah; (3) efisiensi distribusi, perluasan cakupan, dan perbaikan kebijakan subsidi pupuk; (4) pengurangan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR); (5) stabilisasi harga pangan; (6) bantuan pangan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan; serta (7) penanganan penyakit dan perkarantina hewan, tumbuhan, dan ikan.

Pelaksanaan intervensi tersebut didukung dengan penerbitan regulasi, yaitu (1) PP No. 6/2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi; (2) PP No. 10/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah; (3) Inpres No. 2/2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan; (4) Inpres No. 3/2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Percepatan Swasembada Pangan; (5) Inpres No. 6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/



Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah; serta (6) Inpres No. 11/2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Pada tahun 2025, Program Swasembada Pangan menunjukkan capaian dan perkembangan yang cukup baik, antara lain (1) pertumbuhan PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan I 2025 sebesar 10,52 persen (yoy); (2) penguatan cadangan beras pemerintah sebesar 4,23 juta ton per semester I 2025; serta (3) peningkatan produksi padi semester I 2025 sebesar 36,66 juta ton atau lebih tinggi 3,68 persen dibanding semester I 2024. Dengan perkembangan tersebut, pembangunan Swasembada Pangan pada akhir tahun 2025 diharapkan dapat mencapai target: (1) Indeks Ketahanan Pangan menjadi 73,20; (2) pertumbuhan PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,20 persen; (3) Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi menjadi 94; (4) prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi 7,21 persen; serta (5) Indeks Kesejahteraan Petani menjadi 0,7745.

Program Swasembada Pangan mempunyai keterkaitan kuat dan saling mendukung dengan prioritas pembangunan lainnya. Program ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lain. Oleh karena itu, terus diupayakan langkah-langkah integrasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, lintas bidang, lintas sumber pembiayaan, dan lintas pelaku.

Kemiskinan - Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang merupakan salah satu sasaran Visi Indonesia Emas 2045, selaras dengan semangat perayaan kemerdekaan Indonesia ke-80, Indonesia Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tahun 2025 telah menjadi *milestone* (tonggak capaian) pengentasan kemiskinan Indonesia, dengan tingkat kemiskinan nasional berhasil dioptimalkan pada angka 8,47% (per Maret 2025) dan berhasil mengentaskan kurang lebih 200.000 masyarakat dari garis kemiskinan (periode September 2024-Maret 2025). Sepanjang tahun 2025, pemerintah telah menyusun regulasi untuk (1) mewujudkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi; serta (2) mendorong sinergi dan keterpaduan antarprogram sebagai langkah akselerasi pengentasan kemiskinan nasional. Perluasan penargetan bantuan sosial serta peningkatan cakupan jaminan sosial juga terus diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian positif dan upaya akseleratif yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025 menjadi fondasi awal untuk mendukung perwujudan terhapusnya kemiskinan, turunnya ketimpangan, dan terpenuhinya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekolah Rakyat - Negara yang besar adalah negara yang memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tetap mendapatkan pendidikan terbaik, karena dari merekalah masa depan dibentuk. Salah satu tantangan krusial dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah partisipasi sekolah anak dari keluarga miskin dan rentan yang masih perlu ditingkatkan. Penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat merupakan implementasi

Bab 2.

dari Inpres No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Sekolah Rakyat juga berperan untuk memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Selain itu, sekolah rakyat juga diarahkan untuk mendorong pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Sekolah Rakyat merupakan pendekatan pendidikan berbasis asrama pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga pendidikan karakter, akses kesehatan, pengasuhan intensif, dan ekosistem pendidikan yang mendukung. Pada tahun 2025, program ini menargetkan 20.000 siswa di 200 lokasi Sekolah Rakyat Rintisan. Sekolah Rakyat Rintisan tersebut mengoptimalkan fasilitas milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, Sekolah Rakyat permanen akan dibangun di lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.

Hingga bulan Agustus 2025, sebanyak 100 Sekolah Rakyat telah beroperasi bersamaan dengan tahun ajaran baru. Operasional Sekolah Rakyat didukung oleh proses rekrutmen kepala sekolah dan rekrutmen guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang telah dilaksanakan. Sejumlah 9.775

siswa terdaftar serta sebanyak 3.390 tenaga pendidik dan 1.554 guru siap untuk mengawal proses pembelajaran. Selain itu, dalam rangka penguatan operasionalisasi Sekolah Rakyat, saat ini sedang disusun regulasi sebagai payung hukum pembagian tugas dan kewenangan antarpemangku kepentingan.

Sekolah Rakyat merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan melalui investasi pendidikan secara lebih inklusif bagi kelompok miskin dan rentan. Selain itu, Program Sekolah Rakyat juga akan diintegrasikan dengan program lainnya, yaitu Pemberdayaan Keluarga Siswa. Sekolah Rakyat diharapkan dapat pemeratakan pembangunan SDM dan memperluas peluang kehidupan yang lebih baik, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan.

Revitalisasi Sekolah dan Madrasah -

Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pemenuhan sarana dan prasarana yang layak di seluruh satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai wujud nyata kesungguhan dalam membangun pendidikan berkualitas yang merata, pelaksanaan program ini dituangkan dalam Inpres No. 7/2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran. Inpres ini menjadi panduan strategis sekaligus penggerak sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan revitalisasi sarana



dan prasarana sekolah dan madrasah yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan.

Untuk memastikan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas memiliki daya ungkit yang kuat, sasaran revitalisasi difokuskan pada satuan pendidikan yang memiliki bangunan rusak sedang hingga berat, terutama di wilayah afirmasi dan daerah dengan partisipasi pendidikan rendah, serta mencakup kecamatan yang belum memiliki layanan PAUD maupun SD Negeri. Pada tahun 2025, program ini dilaksanakan di 13.807 sekolah dan 1.419 madrasah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan nilai investasi sebesar Rp22,04 triliun. Ruang lingkup revitalisasi sarana dan prasarana antara lain rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas dan ruang penunjang baru, serta pengadaan sarana pendidikan seperti perangkat TIK, peralatan laboratorium, buku, alat praktik utama, dan alat permainan edukatif.

Pelaksanaan revitalisasi ini dilandaskan pada prinsip ketuntasan dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), guna menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Kebijakan ini bertujuan memastikan setiap peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, layak, serta memastikan tidak ada lagi sekolah dan madrasah yang rusak. Intervensi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga menjadi representasi nyata keberpihakan

negara terhadap keadilan sosial di sektor pendidikan. Melalui ruang-ruang belajar yang fungsional dan representatif, diharapkan tumbuh semangat belajar yang kuat serta pembentukan karakter peserta didik yang unggul. Dengan demikian, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing, serta wujud nyata komitmen menuju Indonesia yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan implementasi dari Inpres No. 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk mempercepat penguatan ekonomi rakyat. Pada tanggal 21 Juli 2025, telah dilakukan peluncuran kelembagaan 80.081 KDKMP yang berbadan hukum dengan realisasi yang melebihi target awal sebesar 80.000 koperasi.

Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pengembangan potensi lokal, akses pembiayaan, serta peningkatan nilai tambah produk. Program ini juga didukung dengan Keppres No. 9/2025 tentang Satgas Percepatan Pembentukan KDKMP yang bertugas mengoordinasikan kebijakan, regulasi, pemetaan potensi, hingga pendampingan teknis untuk memastikan terbentuknya KDKMP.

Gambar 2.1
Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



Sumber: Kementerian Koperasi

Pembentukan KDKMP menunjukkan komitmen pemerintah dalam penguatan peran koperasi, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hadir sebagai instrumen transformasi ekonomi rakyat yang berakar pada nilai-nilai gotong royong, kemandirian, dan solidaritas sosial. Unit usaha KDKMP, seperti pengadaan bahan kebutuhan pokok, pergudangan, dan logistik, dapat memperpendek rantai distribusi

dan memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat desa/kelurahan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dapat menjadi *hub* dari berbagai lembaga ekonomi lokal seperti BUM Desa, Koperasi Unit Desa (KUD), serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melakukan kolaborasi usaha yang akan memperkuat simpul ekonomi rakyat.

Gambar 2.2
Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pangan



Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu mendorong praktik ekonomi yang nyata dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai entitas bisnis berperan memfasilitasi kebutuhan dasar warga desa dan kelurahan, berpotensi menciptakan lapangan kerja dan membuka ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas, termasuk bagi perempuan dan kelompok rentan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi katalisator dalam pembangunan ekosistem ekonomi lokal yang modern dan adaptif, melalui penguatan struktur kelembagaan koperasi serta integrasi layanan ekonomi pada tingkat desa dan kelurahan.

Hilirisasi Industri - Penguatan industrialisasi menjadi penggerak utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 dan membawa Indonesia keluar dari *middle income trap* sebelum tahun

2045. Salah satu arah kebijakan akselerasi industrialisasi adalah melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam guna mendorong penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri serta pendayagunaan komponen dalam negeri secara terpadu dan inklusif. Dengan demikian, industri pengolahan Indonesia secara bertahap akan bertransformasi dari komoditas bahan mentah menjadi industri manufaktur berteknologi menengah-tinggi yang berbasis riset, teknologi, dan inovasi.

Dalam lima tahun ke depan, agenda hilirisasi akan difokuskan pada lima belas komoditas prioritas yang meliputi sumber daya alam hayati, maritim, serta sumber daya mineral dan pertambangan. Komoditas prioritas hilirisasi tersebut mencakup (1) nikel; (2) tembaga; (3) bauksit; (4) besi dan baja; (5) timah; (6) pasir silika; (7) kelapa sawit; (8) kelapa; (9) minyak bumi; (10) gas bumi; (11) garam; (12) ikan tuna, cakalang, tongkol (TCT); (13) rumput laut; (14) ikan tilapia; dan (15) udang.



Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan

Bab 2.

Sebagai langkah awal dalam mendorong percepatan hilirisasi, pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan strategis, yaitu (1) PP No. 8/2025 tentang Perubahan atas PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam yang mendukung akses permodalan bagi pelaku industri untuk berinvestasi dalam proyek hilirisasi; (2) PP No. 28/2025 tentang Reformasi Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) yang memperjelas dan memudahkan perizinan usaha; dan (3) Keppres No. 1/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang memiliki tugas utama mendorong koordinasi kebijakan dan *debottlenecking* regulasi antarinstansi.

Serangkaian kebijakan dan upaya pemerintah dalam mendorong akselerasi hilirisasi di dalam negeri memberikan dampak positif bagi investasi di industri hilir. Pada semester I 2025, nilai realisasi investasi untuk lima belas komoditas hilirisasi telah mencapai Rp239,7 triliun, atau setara dengan 25,4 persen dari total realisasi investasi dan diharapkan masih akan terus meningkat. Salah satunya adalah Proyek Industri Baterai Listrik Terintegrasi di Provinsi Jawa Barat dan Maluku Utara, yang telah diresmikan oleh Presiden pada tanggal 29 Juni 2025. Proyek pembangunan rantai pasok kendaraan listrik tersebut mencakup pengolahan nikel sebagai bahan baku utama hingga produksi *battery cell*, dengan kapasitas produksi mencapai 6,9 GWh (ditargetkan mulai beroperasi akhir tahun 2026) dan ditingkatkan hingga 15 GWh dalam lima tahun ke depan. Nilai investasi proyek ini ditargetkan sebesar US\$5,9 miliar dan diperkirakan menghasilkan nilai tambah hingga US\$48-49 miliar per tahun. Proyek ini diharapkan dapat menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 tenaga kerja tidak langsung, sehingga

dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Pada bulan Juni 2025, pemerintah melakukan peresmian Pabrik Panel Surya Terintegrasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal. Pembangunan pabrik ini telah menelan investasi sebesar Rp1,5 triliun dengan kapasitas produksi sebesar 1,4 juta lembar panel surya per tahun. Pabrik tersebut diharapkan dapat menjadi katalis percepatan hilirisasi produk seperti *wafer*, *ingot*, dan *smelter polisilikon* dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan di dalam negeri. Selain itu, pada bulan Maret 2025, pemerintah meresmikan KEK Industropolis Batang di Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya berstatus sebagai Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pengembangan kawasan ini didukung oleh infrastruktur strategis, antara lain akses langsung ke jalan tol, jalur kereta api yang terintegrasi dengan fasilitas *super dry port* berkapasitas tiga puluh rangkaian kereta kontainer, serta pengembangan pelabuhan baru yang saat ini tengah dalam tahap konstruksi. Pengembangan status kawasan menjadi KEK dan kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi arus barang, sekaligus memperkuat daya saing KEK Industropolis Batang sebagai hub industri dan logistik di koridor tengah Pulau Jawa.

Sejumlah capaian tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah dalam mendorong akselerasi hilirisasi sebagai pilar utama penguatan struktur industri nasional sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berkomitmen untuk terus mempercepat agenda hilirisasi melalui penguatan kebijakan fiskal, penyempurnaan regulasi investasi, peningkatan infrastruktur pendukung, serta penguatan riset dan inovasi di sektor pengolahan dan manufaktur.



Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperdalam struktur industri, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, serta memperkuat daya saing produk industri Indonesia di pasar internasional dalam menghadapi dinamika perubahan lanskap ekonomi global.

Cek Kesehatan Gratis - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sekaligus kegiatan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. CKG merepresentasikan komitmen pemerintah dalam rangka transformasi paradigma pelayanan kesehatan nasional, dengan menitikberatkan pengembangan deteksi dini untuk memperkuat upaya promotif dan preventif melalui edukasi gaya hidup sehat serta pencegahan penyakit katastrofik. CKG dirancang berdasarkan pendekatan siklus hidup yang menasar seluruh kelompok usia—mulai dari balita, pelajar, dewasa, hingga lansia. Program CKG bukan sekadar upaya menurunkan beban penyakit, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan serta mengurangi beban biaya penanganan penyakit di masa depan.

Program CKG mencakup tiga jenis layanan, yaitu CKG Ulang Tahun yang diberikan pada masyarakat yang berulang tahun, CKG Sekolah yang menasar peserta didik usia 7-17 tahun di sekolah, dan CKG Khusus ibu hamil dan balita. Sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025, partisipasi masyarakat mengikuti program CKG terus meningkat. Hingga 3 Agustus 2025, CKG telah dilaksanakan di seluruh provinsi dengan jumlah pendaftar mencapai 17.096.971 orang dan 16.309.265 orang di antaranya telah melakukan pemeriksaan. Selain itu, sebanyak 10.027 Puskesmas telah memberikan pelayanan CKG. Dalam upaya

meningkatkan cakupan CKG, perluasan pelaksanaan di lingkungan sekolah menjadi salah satu strategi utama, di samping terus mendorong partisipasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta dalam penyelenggaraan CKG. Pemerintah juga terus menyediakan barang medis habis pakai (BMHP) di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan program CKG dapat terlaksana.

Pengelolaan Sampah - Pengelolaan sampah berkontribusi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian alam, sekaligus menciptakan nilai tambah melalui ekonomi sirkular serta pemanfaatan hasil pengolahan sebagai sumber energi. Upaya ini penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan, mendorong penerapan ekonomi hijau, serta menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

Fokus kegiatan utama pengelolaan sampah meliputi (1) perubahan perilaku dan penguatan tata kelola pengelolaan sampah; dan (2) peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Lahan Urug Residu (LUR). Hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 20.587 Bank Sampah Unit (BSU) dan 341 Bank Sampah Induk yang berhasil mengelola 872,93 ton sampah dengan nilai ekonomi sebesar Rp1,44 miliar, serta menjangkau lebih dari 674.505 nasabah aktif berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA).

Beberapa capaian perbaikan sistem pengelolaan sampah antara lain (1) pemberian surat peringatan kepada pemerintah daerah di 343 kabupaten/kota/provinsi yang masih mengoperasikan TPA secara *open dumping* di tahun 2025; (2) percepatan penyelesaian permasalahan sampah di daerah-daerah dengan timbulan sampah lebih dari 1.000 ton/

Bab 2.

hari melalui teknologi ramah lingkungan; serta (3) penanganan sampah laut di pesisir, pulau-pulau kecil, dan badan air.

Pada tahun 2023, timbulan sampah mencapai 56,63 juta ton dengan pengelolaan sampah terkelola mencapai 39,01 persen (22,09 juta ton) dan penurunan kebocoran sampah laut sebesar 41,68 persen dari target 70 persen pada tahun 2025. Untuk memastikan keberhasilan seluruh upaya tersebut, diperlukan kebijakan dan strategi tata kelola yang lebih komprehensif mencakup

(1) peningkatan dalam aspek perencanaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, serta kelembagaan; (2) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; (3) peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur; (4) peningkatan pembinaan dan pengawasan; (5) pengelolaan data; serta (6) penegakan hukum yang lebih tegas, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten, pihak swasta termasuk *offtaker*, serta masyarakat luas.

Gambar 2.3
Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

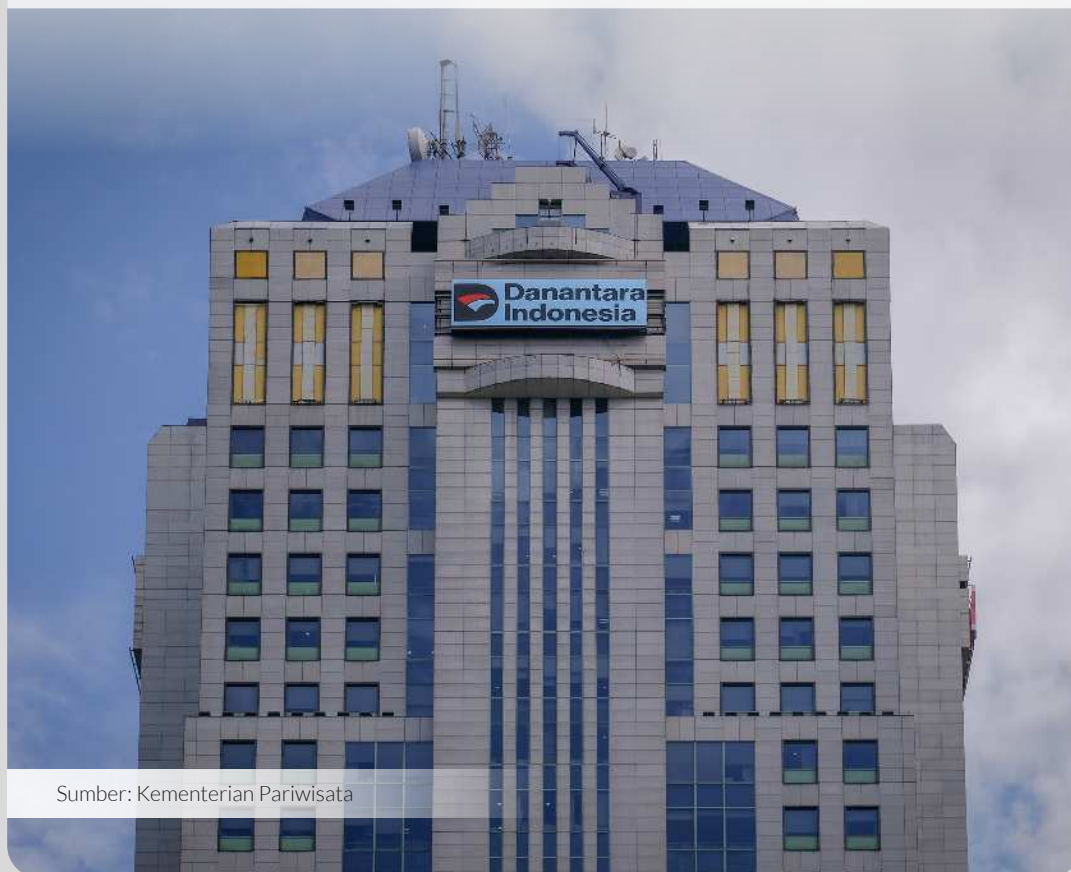


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024



Pembentukan Danantara - Untuk meningkatkan dan menggerakkan investasi strategis dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, telah dibentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui UU No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Danantara dibentuk sebagai badan yang bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain. Total dana kelolaan Danantara ditargetkan mencapai lebih dari US\$1 triliun. Dari sisi pendanaan, hingga saat ini Danantara telah berhasil menghimpun pendanaan sebesar US\$17 miliar atau setara dengan Rp277,5 triliun. Dari total pendanaan tersebut, sekitar US\$10 miliar diperoleh melalui skema *revolving credit* dari 12 (dua belas) bank asing dan sekitar US\$7 miliar diperoleh dari sejumlah *Sovereign Wealth Funds* negara mitra.

Lebih lanjut, Danantara juga telah melaksanakan beberapa kerjasama melalui Nota Kesepahaman (NK), yaitu: (1) NK terkait hilirisasi *EV battery* dan hilirisasi mineral strategis; (2) NK dengan *China Investment Corporation* (CIC) terkait hilirisasi industri hijau dan manufaktur berat; (3) NK dengan *ACWA Power* terkait energi terbarukan dan industrialisasi hijau; (4) NK dengan *JBIC* terkait *green energy* dan efisiensi rantai pasok energi; (5) NK dengan *Qatar Investment Authority* terkait investasi multi sektor berbasis *co-investment*; (6) NK dengan *Future Fund Australia* terkait kolaborasi kelembagaan dan tata kelola investasi; (7) NK dengan perusahaan Perancis terkait sektor pangan dan logistik strategis; dan (8) NK dengan *Russian Direct Investment Fund* (RDIF) terkait *co-Investment* sektor infrastruktur berat. Selain itu Danantara juga melakukan Transformasi Garuda Indonesia dengan fokus pada reformasi industri aviasi dan efisiensi aset BUMN. Melalui Danantara, Indonesia tidak hanya membangun lembaga pengelola investasi yang transparan dan kredibel secara global, tetapi juga menjadikannya kendaraan transformasional untuk mendukung hilirisasi, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045.



Sumber: Kementerian Pariwisata



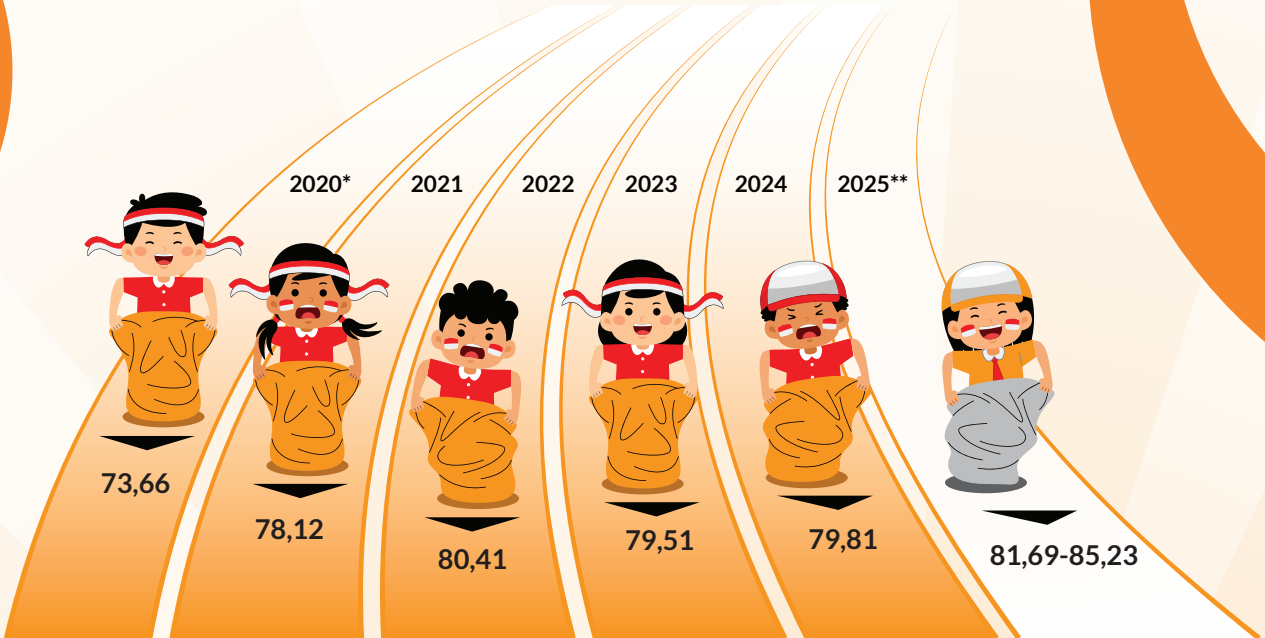
Rekrutmen Paskibraka
Sumber: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

BAB 3

ASTA CITA 1

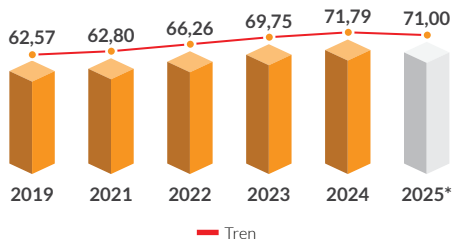
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

CAPAIAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) TAHUN 2020–2025



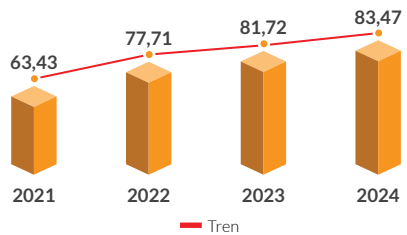
*) Capaian IDI Metode Lama dan **) Angka target

CAPAIAN INDEKS PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (PIKP) TAHUN 2019–2025

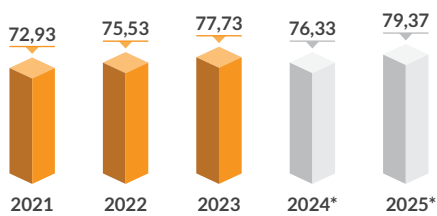


*) Angka target

TREN CAPAIAN RANHAM TAHUN 2021–2024



CAPAIAN IAP NASIONAL TAHUN 2021-2025



*) Angka target





BAB 3

ASTA CITA 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Demokrasi Indonesia tetap terjaga selama beberapa tahun terakhir, ditunjukkan dengan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang relatif stabil. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan nilai Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP), serta upaya pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM) melalui berbagai kebijakan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan perumahan rakyat, dan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Selain itu, Indonesia turut berkomitmen untuk lebih berperan aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global. Kondisi ini diharapkan dapat terus terjaga menuju Indonesia yang Bersatu Berdaulat.

3.1 Demokrasi Indonesia

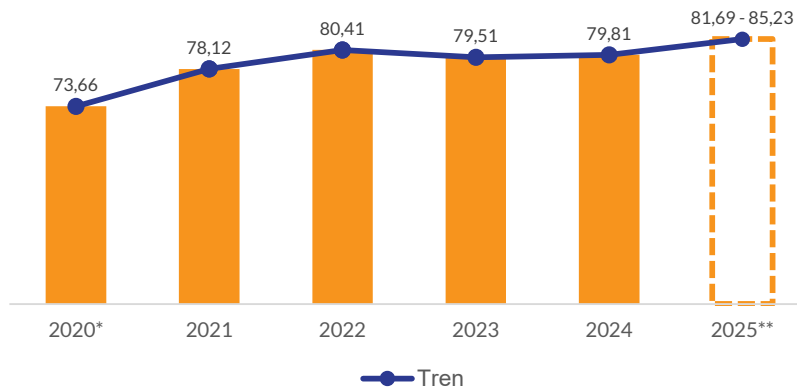
3.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Demokrasi Indonesia menunjukkan stabilitas nilai yang relatif baik, hal ini mencerminkan kedewasaan demokrasi Indonesia dalam menghadapi dinamika politik dan tata kelola pemerintahan. Selama periode 2020-2024, capaian kinerja demokrasi Indonesia konsisten

berada pada kategori sedang (60-80), dengan capaian tertinggi (>80) pada tahun 2022. Skor IDI 2024 mencapai nilai 79,81 (kategori sedang) yang menunjukkan kualitas demokrasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan selangkah menuju kategori tinggi.

Bab 3.

Grafik 3.1
Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

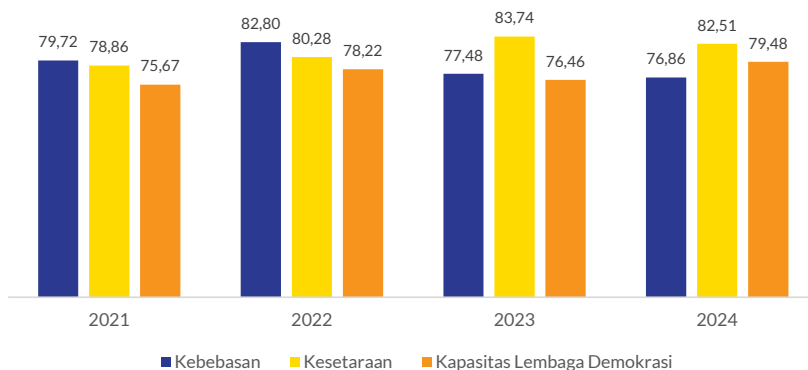
Keterangan: *) Capaian IDI Metode Lama dan **) Angka target

Peningkatan skor IDI memperlihatkan bahwa pilar-pilar utama demokrasi, seperti kebebasan, kesetaraan, dan lembaga demokrasi tetap terjaga di tengah kompleksitas perubahan sosial dan tekanan global. Capaian ini menunjukkan ketangguhan demokrasi Indonesia yang mampu bertahan dan beradaptasi, sekaligus menjadi pengingat untuk terus memperkuat kualitas demokrasi yang lebih substantif.

Capaian IDI tahun 2024 menunjukkan catatan positif, antara lain: (1) pada aspek kebebasan terjadi penguatan kerukunan

antarumat beragama dan berbagai kebijakan yang menjamin kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berkeyakinan; (2) pada aspek kesetaraan terjadi peningkatan akses masyarakat terhadap perlindungan dan jaminan sosial serta informasi publik; dan (3) pada aspek kapasitas lembaga demokrasi terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas fungsi legislasi dalam pembuatan produk hukum, peningkatan kualitas kebijakan publik yang berpedoman pada hukum administrasi negara, serta profesionalitas dan netralitas penyelenggaraan birokrasi.

Grafik 3.2
Capaian Aspek Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

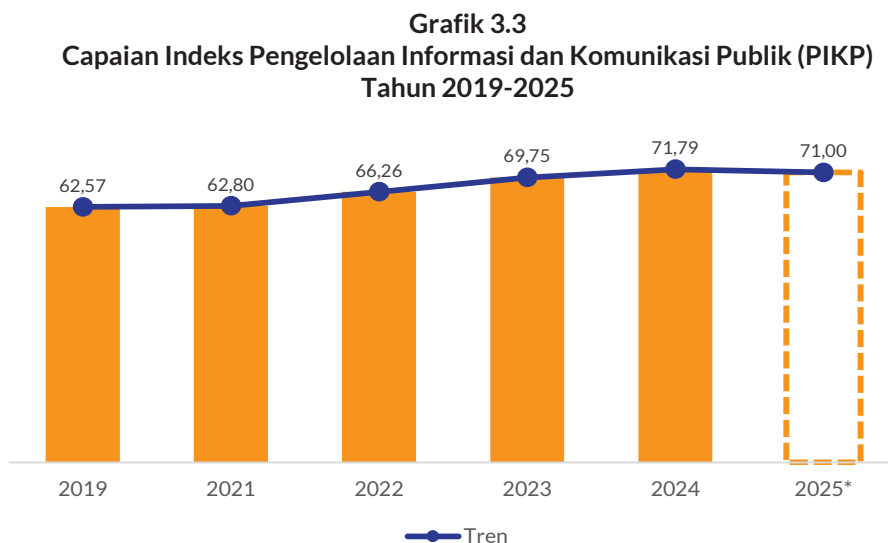


Adanya perhatian dan upaya kolaboratif antarpemangku kepentingan dalam perawatan demokrasi tidak dapat dipungkiri menjadi motor penggerak kenaikan kinerja demokrasi pada beberapa hal di atas. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama *stakeholder* terkait, antara lain: (1) perluasan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan/regulasi di tingkat nasional; (2) pelaksanaan program penguatan dan konsolidasi demokrasi dengan memanfaatkan basis data IDI; serta (3) peningkatan peran Pokja IDI provinsi pada perumusan dan pelaksanaan intervensi kebijakan penguatan demokrasi di daerah, pengumpulan data hingga penghitungan IDI di daerah.

Kemajuan di bidang komunikasi publik dan media merupakan upaya mewujudkan partisipasi publik yang lebih bermakna serta kebebasan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S). Pelaksanaan pembangunan komunikasi publik, salah satunya dengan menyusun regulasi terkait

Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN). Hal ini diperkuat dengan peran Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang telah menjangkau 891 kecamatan di wilayah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T), dan Transmigrasi dalam diseminasi informasi program dan kebijakan. Diseminasi juga dilakukan melalui media komunikasi resmi pemerintah, antara lain indonesia.go.id, GPR TV, dan Forum Merdeka Barat 9. Pemerintah turut melibatkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai sambung tangan pemerintah dalam mengomunikasikan program dan kebijakan kepada masyarakat.

Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) terus meningkat selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, nilai Indeks PIKP sebesar 71,79 (naik 2,04 poin dari tahun 2023) dan berada pada kategori sedang. Hal tersebut berperan penting dalam pembentukan opini dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta berpengaruh pada peningkatan kepuasan masyarakat atas informasi publik.



Sumber: Buku Indeks PIKP Kementerian Komunikasi dan Digital, 2024
Keterangan: *) Angka target



Pemilihan Kepala Daerah 2024
Sumber: Badan Pengawas Pemilihan Umum



Selanjutnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan skor nasional mencapai 75,65. Hal ini ditandai dengan 11 provinsi yang berkategori baik dan 19 provinsi melampaui rata-rata nasional dalam keterbukaan informasi publik. Capaian pelaksanaan penguatan pers dan media massa ditunjukkan oleh nilai Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) sebesar 3,22 pada tahun 2024 periode II (kategori berkualitas). Sebanyak enam dari delapan kategori program siaran televisi telah memenuhi standar berkualitas Komisi Penyiaran Indonesia (>3,00).

Nilai Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2024 sebesar 69,36 (kategori cukup bebas) menunjukkan resiliensi ekosistem pers sebagai elemen penting bagi demokrasi Indonesia. Hal ini merupakan dampak positif dari pelaksanaan fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diikuti oleh 1.779 orang, dengan jumlah peserta lulus sebanyak 1.604 orang (90,16 persen). Selain itu, pendataan dan verifikasi administrasi terhadap 181 perusahaan pers telah dilakukan, dengan 132 media (72,92 persen) dinyatakan berstatus terverifikasi administratif. Selanjutnya, dalam menjamin ekosistem media massa yang sehat, telah disusun Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Pemerintah juga meningkatkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika melalui *Digital Talent Scholarship* (DTS). Pada tahun 2024, DTS telah diikuti oleh 118.284 orang peserta, meningkat dari tahun 2023 dengan jumlah 111.409 orang peserta. Selanjutnya, sebanyak 21.871 orang peserta mengikuti

ujian sertifikasi tingkat global dengan 19.651 orang (89,85 persen) lulus sertifikasi. Angka tersebut meningkat 6,34 persen dari jumlah peserta yang tersertifikasi tahun 2023.

3.1.2 Tantangan dan Upaya

Beberapa tantangan dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi, antara lain: (1) masih terdapat ruang penguatan dalam menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam praktik warga negara; (2) prinsip kesetaraan dan representatif dalam proses perumusan kebijakan; (3) integritas dan akuntabilitas lembaga demokrasi sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan publik secara berkelanjutan; (4) keseimbangan pengaturan antara media massa dan platform digital menuju industri media yang sehat; (5) literasi dan kapasitas badan publik dan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik; (6) disinformasi, misinformasi, konten negatif, dan umpan klik (*clickbait*) dalam komunikasi publik; serta (7) penerapan Kode Etik Jurnalistik yang diimbangi dengan penguatan ekosistem.

Berbagai upaya pembangunan demokrasi yang dilakukan, antara lain: (1) perbaikan dan peningkatan regulasi, kelembagaan, dan budaya politik yang terstruktur dan berkelanjutan; (2) optimalisasi partisipasi masyarakat secara bermakna pada perumusan dan pengambilan kebijakan di setiap tahapan pembangunan; (3) penguatan tata kelola dan kapasitas lembaga demokrasi yang menekankan pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas; (4) percepatan penyelesaian revisi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dan tindak lanjut pengaturan platform digital; (5) peningkatan literasi keterbukaan informasi publik kepada badan publik dan masyarakat,

Bab 3.

serta percepatan penyelesaian revisi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (6) penguatan kualitas konten informasi dan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; serta (7) peningkatan kapasitas dan kompetensi insan pers melalui pelatihan dan penguatan ekosistem perusahaan pers yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri.

3.2 Hak Asasi Manusia

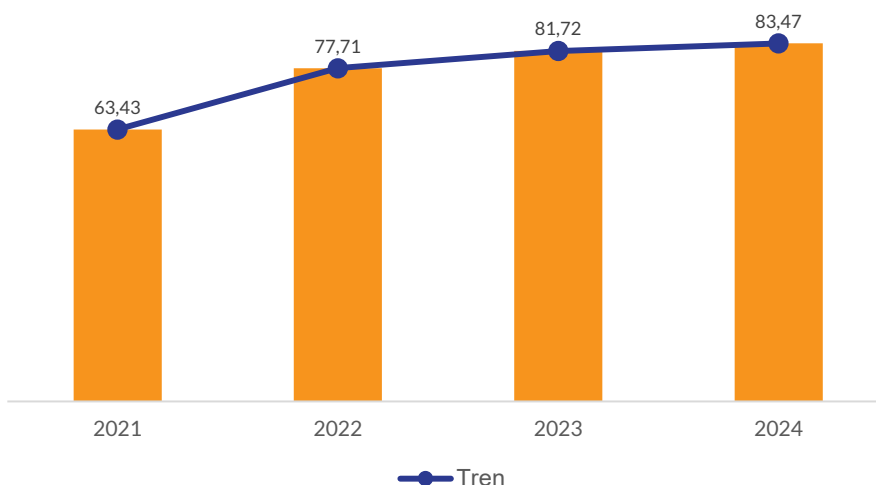
3.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah terus mengupayakan internalisasi nilai-nilai HAM baik kepada aktor negara maupun nonnegara. Pada periode

Oktober 2024-Juli 2025, Pemerintah telah melakukan peningkatan kapasitas HAM kepada 158 instansi pusat dan daerah. Di sisi lain, pemerintah juga telah berupaya untuk menanamkan nilai-nilai HAM yang difokuskan pada institusi pendidikan, dengan capaian 27.315 orang. Selain itu, penggunaan platform digital juga terus dioptimalkan.

Sepanjang empat tahun terakhir, capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Generasi V yang berfokus pada kelompok sasaran perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen pemerintah dalam mengoordinasikan dan mengendalikan implementasi RANHAM terus ditingkatkan.

Grafik 3.4
Tren Capaian RANHAM Tahun 2021-2024



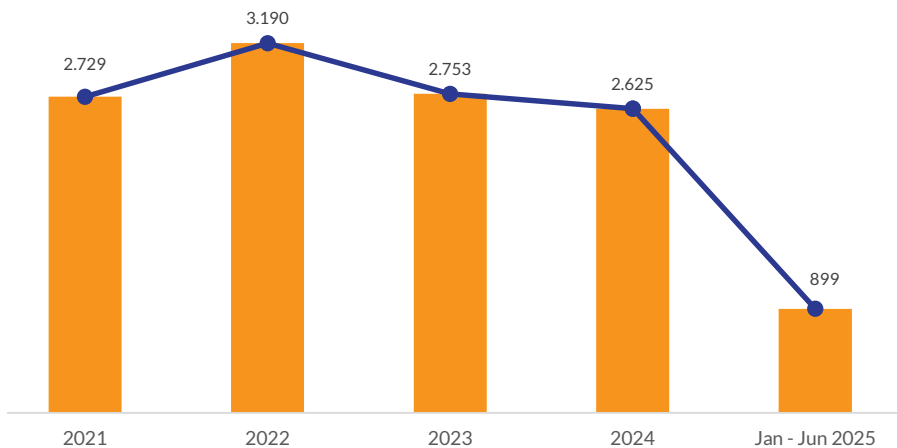
Sumber: Kementerian Hak Asasi Manusia, 2024



Capaian pelaksanaan aksi HAM tahun 2024 mencapai nilai tertinggi sepanjang RANHAM Generasi V, yaitu sebesar 83,47 (kategori tinggi). Capaian ini didukung oleh 30 kementerian/lembaga, 32 pemerintah daerah provinsi, dan 459 pemerintah daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan data jumlah aduan yang diterima Komnas HAM dari tahun 2021 hingga Juni 2025, terlihat adanya tren penurunan jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran HAM. Penurunan jumlah aduan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator positif atas upaya pemerintah dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Grafik 3.5
Jumlah Aduan yang Diterima Komnas HAM Tahun 2021 - Juni 2025



Sumber: Data Aduan Komnas HAM, 2021 - 2025

Sebagai bentuk pencegahan pelanggaran HAM, pada tahun 2024 telah ditetapkan dua dokumen Standar Norma Pengaturan (SNP). Dokumen tersebut merupakan penjabaran implementatif atas instrumen HAM baik internasional dan nasional serta norma-norma HAM yang terus berkembang, yaitu: (1) SNP tentang Hak Atas Pekerjaan yang Layak; dan (2) SNP tentang Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Dalam rangka memastikan hak asasi masyarakat terpenuhi, pemerintah juga secara kontinu melakukan pemantauan isu

dan situasi HAM di tingkat nasional. Selama periode Januari hingga Juli 2025, pemantauan sudah dilakukan di 13 titik yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sepanjang tahun 2024-2025, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap beberapa isu HAM di Papua, di antaranya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Papua, Daerah Otonomi Baru (DOB), penanganan pengungsi (seperti di Kabupaten Nduga dan Maybrat), serta penanganan perkara terhadap peristiwa atau kasus-kasus HAM yang mendapat atensi publik.

Bab 3.

Selama tahun 2024-2025, pemerintah juga telah berkomitmen ikut serta pada forum HAM internasional, seperti: (1) Sidang Regular Komite Hak Anak PBB; (2) Regional Dialogue on Human Rights and Anti-Corruption; (3) Annual Conference/Technical Working Group of South East Asia of National Human Rights Institutions (SEANF); (4) 13th United Nations Forum on Business and Human Rights; (5) Annual Meeting of The Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI); dan forum-forum lainnya.

3.2.2 Tantangan dan Upaya

Berbagai tantangan pembangunan HAM di Indonesia, antara lain: (1) penghayatan nilai-nilai HAM baik oleh aktor negara maupun nonnegara; dan (2) koordinasi antara instansi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk penyelesaian penanganan pelanggaran HAM yang berat, baik melalui upaya yudisial maupun nonyudisial.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan beberapa upaya pembangunan HAM ke depan, antara lain: (1) internalisasi HAM melalui penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM, humanis, inklusif, dan gender; (2) penguatan HAM bagi aktor negara dan nonnegara; (3) perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi terutama dan tidak terbatas pada kelompok rentan melalui penguatan tata kelola penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM; (4) penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme yudisial dan nonyudisial dengan kolaborasi seluruh institusi terkait; serta (5) penguatan pemantauan terhadap sektor-sektor strategis yang rentan terjadi dugaan pelanggaran HAM.

3.3 Ideologi Pancasila

3.3.1 Capaian Utama Pembangunan

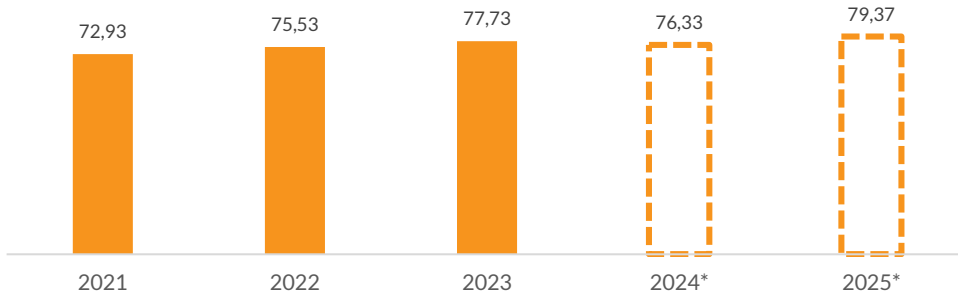
Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) digunakan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman akan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara komprehensif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diharapkan dapat mengurangi risiko timbulnya kasus-kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sedini mungkin.

Tahun 2021, dilakukan peninjauan terhadap indikator IAP sebagai dampak dari COVID-19 sehingga pada tahun 2022 dan seterusnya penghitungan sejumlah indikator menggunakan metode proyeksi. Pengukuran dengan menggunakan metode tersebut memberikan gambaran dinamika dari capaian IAP, baik secara umum dan regional berdasarkan dimensi dan indikator penyusunnya. Lebih lanjut, telah disusun rumusan indikator mandiri dan akan dilakukan uji coba pada bulan September 2025, sehingga indikator pembentuk IAP dapat lebih tajam dalam mencerminkan aktualisasi Pancasila.

Capaian IAP pada tahun 2022 meningkat 2,6 poin menjadi 75,53 dan terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi 77,73. Kondisi ini menunjukkan membaiknya pengamalan dan perwujudan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Sementara itu, nilai IAP tahun 2024 masih dalam proses penghitungan nilai indeks pada level provinsi dan diproyeksikan melampaui target, sedangkan nilai IAP tahun 2025 ditargetkan mencapai 79,37.



Grafik 3.6
Capaian IAP Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2025
Keterangan: *) Angka target

Tabel 3.1
Capaian IAP Dimensi Sila Tahun 2021-2025

Sila	2021	2022	2023	2024*	2025*
1 Ketuhanan yang Maha Esa	73,06	76,06	78,32	75,01	80,00
2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	76,93	81,32	81,46	79,42	83,00
3 Persatuan Indonesia	77,05	78,80	81,18	79,07	83,00
4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	72,51	74,47	79,35	75,43	81,00
5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	65,10	66,98	68,33	72,72	70,00

Sumber: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2025
Keterangan: *) Angka target

Peningkatan pengamalan dan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut ditopang oleh beberapa hal, antara lain (1) penyusunan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) tahun 2025-2029; (2) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan; (3) pemberian akreditasi lembaga dan sertifikasi pengajar pendidikan dan pelatihan PIP; (4) pembinaan kegiatan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila dengan capaian pengangkatan hingga semester I 2025 sebanyak 6.657 orang, yang terdiri dari 76 orang Purnapaskibraka di tingkat pusat

dan 6.581 orang Purnapaskibraka ditingkat provinsi dan kabupaten/kota; serta (5) penggunaan media sosial dan teknologi dalam penyebaran informasi, pengetahuan, dan edukasi tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan secara kreatif dan menarik.

Sejalan dengan capaian baik yang ditorehkan di level nasional, capaian IAP di level provinsi juga menunjukkan hal serupa. Selama rentang tahun 2022-2023 nilai Indeks Aktualisasi Pancasila level provinsi meningkat dan mengalami perubahan positif. Peningkatan tersebut terjadi atas kontribusi lima dimensi penyusun, khususnya pada sila kedua. Kualitas aktualisasi Pancasila di tingkat

Bab 3.

provinsi juga meningkat. Pada tahun 2023, terdapat 25 provinsi berada dalam kategori baik dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebagian besar provinsi berada dalam kategori cukup. Provinsi Bali menjadi satu-satunya provinsi yang berada pada kriteria amat baik dengan nilai 91,83.

3.3.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan dalam meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era modern dapat dilihat dalam beberapa aspek: (1) dalam aspek substantif, pemaknaan terhadap Pancasila perlu didorong agar lebih kontekstual dan membumi dalam kehidupan keagamaan, sehingga dapat memperkuat wawasan kebangsaan di tengah dinamika pandangan masyarakat yang beragam; (2) dalam aspek budaya, pembudayaan nilai-nilai Pancasila memerlukan penguatan yang lebih menyeluruh. Di tengah arus globalisasi, masyarakat dihadapkan pada nilai-nilai baru yang berpotensi memengaruhi perilaku sosial, seperti individualisme dan konsumerisme. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk menumbuhkan kembali semangat kebersamaan, gotong royong, dan kearifan lokal sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila; (3) dalam aspek kelembagaan, implementasi Pancasila sebagai dasar etika dan moral dalam

penyelenggaraan pemerintahan masih perlu diperkuat secara sistemik. Upaya perbaikan tata kelola dan peningkatan integritas birokrasi terus dilakukan agar nilai-nilai Pancasila lebih tecermin dalam kebijakan dan pelayanan publik; serta (4) secara teknis metodologi penghitungan, terdapat 18 indikator yang bersumber dari survei BPS (Podes dan MSBP) yang tidak dihitung setiap tahun sehingga menggunakan metode proyeksi nilai.

Guna mengatasi beberapa tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya: (1) peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila secara komprehensif dan masif khususnya pada pendidikan formal; (2) penguatan koordinasi dan pembagian peran yang lebih komprehensif antara kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, diperlukan kolaborasi dan koordinasi antara pemangku kebijakan dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengukuran IAP melalui berbagai program pembangunan yang tepat sasaran agar capaian IAP dapat selalu meningkat setiap tahunnya; dan (3) peningkatan kolaborasi dan integrasi muatan Peta Jalan PIP ke dalam dokumen perencanaan K/L dan pemerintah daerah.



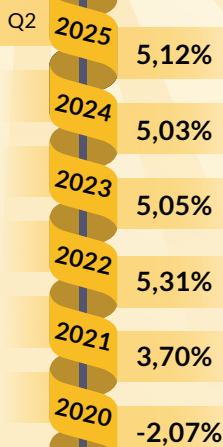
Kelompok Tani Hutan
Sumber: Kementerian Kehutanan

BAB 4

ASTA CITA 2

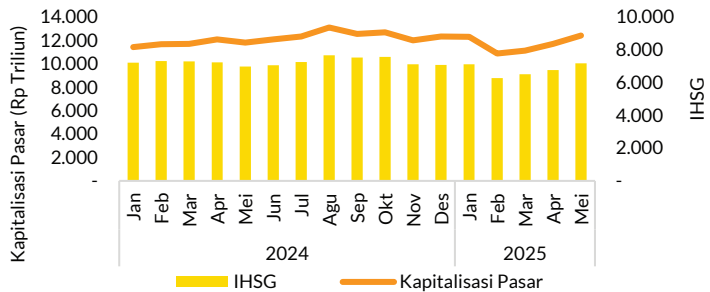
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2020- TW II 2025

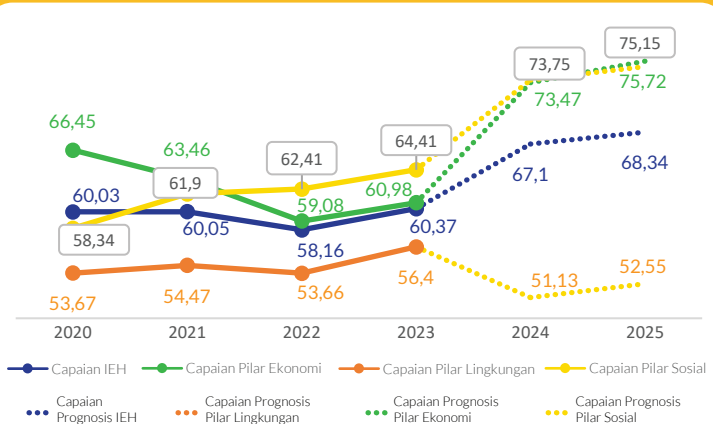


Keterangan:
Realisasi Kuartal II 2025 (yoy)

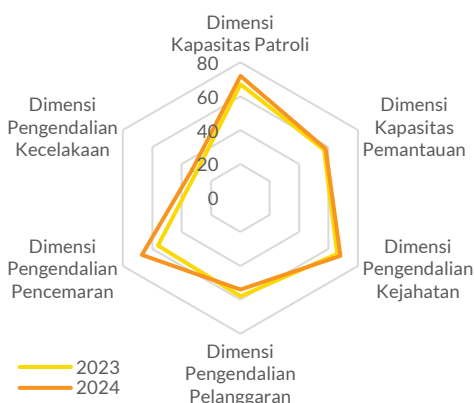
PERKEMBANGAN IHSG DAN KAPITALISASI PASAR TAHUN 2024-2025



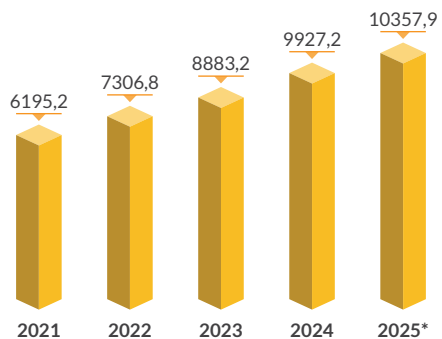
CAPAIAN INDEKS EKONOMI HIJAU TAHUN 2020-2025



CAPAIAN INDEKS KEAMANAN LAUT NASIONAL (IKLN) TAHUN 2023-2024



PERKEMBANGAN ASET KEUANGAN SYARIAH NASIONAL (RP TRILIUN) TAHUN 2021-2025



*Data per Mei 2025



BAB 4

ASTA CITA 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Upaya memantapkan keamanan nasional dan swasembada bidang ekonomi terus menunjukkan hasil nyata. Stabilitas ekonomi terjaga, pertumbuhan lebih solid, serta resiliensi sistem fiskal dan keuangan nasional. Ketahanan pangan, energi, dan air terus diperkuat sebagai pilar kemandirian nasional. Transformasi menuju ekonomi digital, hijau, dan biru semakin progresif. Peran BUMN semakin strategis, kerja sama internasional diperluas, dan pembangunan pertahanan diarahkan agar lebih adaptif dan profesional. Capaian tersebut menjadi fondasi penting untuk mempercepat terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera secara berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.

4.1 Pertumbuhan Ekonomi

4.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian akibat eskalasi tensi geopolitik dan perang dagang, Indonesia berhasil mempertahankan kinerja perekonomian domestik yang resilien. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga 2022 sebesar

2,35 persen dan pascapandemi tahun 2023 hingga triwulan II 2025 sebesar 5,03 persen. Realisasi tersebut menunjukkan Indonesia telah berhasil bangkit dari kondisi pandemi COVID-19 dan melanjutkan pemulihan yang lebih kuat untuk kinerja ekonomi yang lebih tinggi.

Pada tahun 2024, seluruh komponen sisi pengeluaran mampu tumbuh positif. Konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) tumbuh masing-masing sebesar 4,94 persen dan 12,48 persen (yoy). Capaian tersebut didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah, di antaranya penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang berkelanjutan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai Mitigasi Risiko Pangan (BLT MRP), dan pengendalian inflasi. Konsumsi ini juga didorong oleh peningkatan aktivitas lembaga non-profit seiring dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.



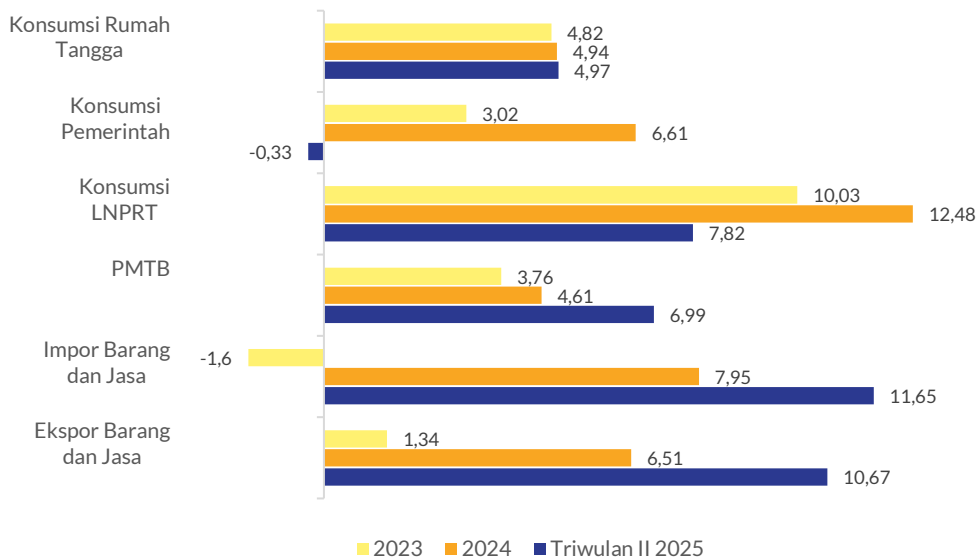
Konsumsi pemerintah tetap tumbuh, yang didorong oleh berbagai kebijakan prioritas pembangunan, penyaluran insentif fiskal, dan percepatan belanja pegawai serta belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun 2024 tumbuh sebesar 4,61 persen (yoy), yang didorong oleh peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta peningkatan pada subkomponen bangunan, mesin dan perlengkapan, dan peralatan lainnya. Beberapa kebijakan pendukung pertumbuhan investasi berupa implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan turunannya melalui penyederhanaan perizinan berusaha dan dukungan hilirisasi,

pemberian insentif fiskal melalui *tax holiday* dan *tax allowance*, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Ekspor dan impor barang dan jasa masing-masing tumbuh sebesar 6,51 dan 7,95 persen (yoy), didukung oleh berbagai kebijakan berupa perluasan pasar ekspor nontradisional, penyederhanaan proses dan layanan ekspor, melalui *Indonesia National Single Window* (INSW), serta pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal.

Pada triwulan II 2025, seluruh komponen PDB sisi pengeluaran menunjukkan pertumbuhan yang positif, kecuali konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi. Komponen konsumsi rumah tangga dan LNPR masing-masing tumbuh sebesar 4,97 dan 7,82 persen (yoy), didorong oleh Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta bertepatan dengan periode libur sekolah. Sementara investasi yang direfleksikan melalui komponen PMTB tumbuh sebesar 6,99 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan belanja modal pemerintah terutama pada mesin dan peralatan dan adanya peningkatan impor barang modal jenis mesin. Selanjutnya, ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 10,67 persen (yoy) didukung oleh peningkatan beberapa komoditas barang non-migas serta praktik *frontloading*, yaitu peningkatan perdagangan sebelum kenaikan tarif impor oleh AS, serta peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

Grafik 4.2
Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (persen, yoy)
Tahun 2023–Triwulan II 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2024. Sektor jasa lainnya serta sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 9,80 persen dan 8,69 persen (yoy). Sektor jasa lainnya tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan aktivitas rekreasi sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Hal ini seiring dengan pelaksanaan *event* internasional dan lokal dalam Karisma Event Nusantara (KEN) 2024 yang tersebar di 38 provinsi. Adapun pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan didukung oleh peningkatan jumlah penumpang dan barang seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lainnya.

Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terhadap PDB sebesar 18,98 persen dan mengalami pertumbuhan sebesar 4,43 persen (yoy). Pertumbuhan sektor industri pengolahan didukung oleh kinerja industri makanan dan minuman, industri kimia, industri logam dasar, dan industri barang logam yang utamanya ditopang oleh peningkatan permintaan domestik untuk konsumsi bahan baku industri dan permintaan luar negeri serta upaya hilirisasi yang difokuskan pada peningkatan nilai tambah produk logam melalui pemurnian di dalam negeri.

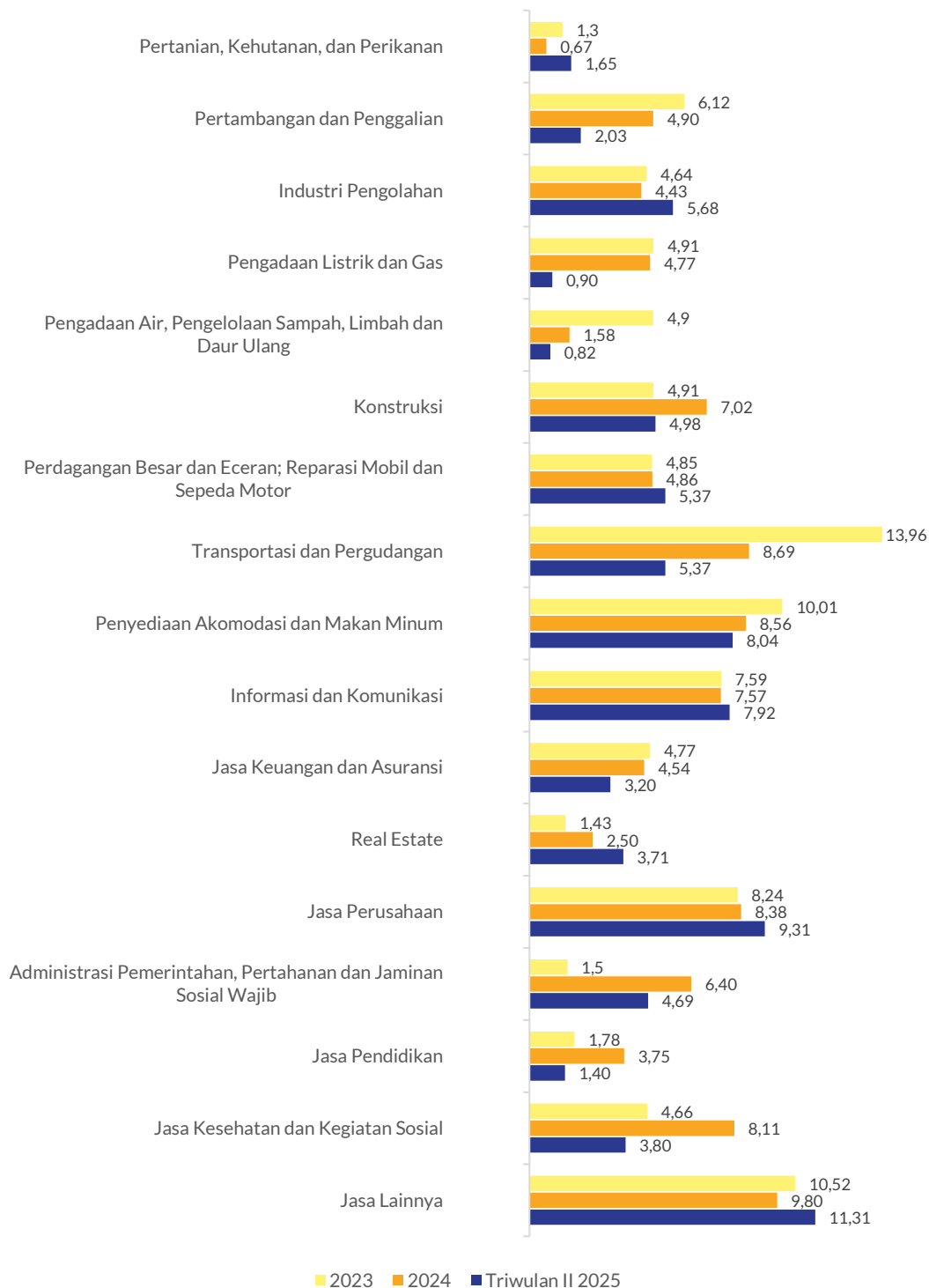
Beberapa dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan sektor industri di antaranya kebijakan pemerataan dan penguatan struktur industri melalui PP No.20/2024 tentang Perwilayahan Industri, percepatan Program Hilirisasi Industri dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta pemberian insentif fiskal untuk industri pionir seperti *tax holiday* dan *supertax deduction*.

Pada triwulan II 2025, seluruh lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sektor jasa lainnya dan jasa perusahaan

merupakan dua sektor dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 11,31 dan 9,31 persen (yoy), didorong oleh peningkatan pengunjung tempat rekreasi baik oleh wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, seiring dengan banyaknya periode hari libur pada triwulan II 2025. Industri pengolahan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB, tumbuh di atas level pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,68 persen (yoy) didorong oleh peningkatan kinerja industri makanan dan minuman, industri logam dasar, dan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional.



Grafik 4.3
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha (persen, yoy)
Tahun 2023–Triwulan II 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah

4.1.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan perekonomian domestik yang dihadapi Indonesia di antaranya: (1) eskalasi ketegangan geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina serta konflik Iran dan Israel yang berdampak pada disrupsi rantai pasok dan distribusi global, terutama akibat adanya petisi dari Iran untuk menutup Selat Hormuz. Hal ini akan membatasi jalur perdagangan internasional yang dapat menyebabkan terhambatnya distribusi komoditas; (2) penerapan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) pada negara-negara dengan surplus perdagangan dengan AS. Pengenaan tarif dapat berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia; (3) berlanjutnya perang dagang AS dan Tiongkok sebagai respon Tiongkok atas tarif tinggi yang dikeluarkan AS; (4) tekanan pada sektor manufaktur yang berpotensi berdampak pada sektor ketenagakerjaan; dan (5) produk ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Menghadapi berbagai tantangan di atas, Indonesia mengeluarkan kebijakan yang responsif dan adaptif, di antaranya: (1) penguatan kinerja ekspor melalui diversifikasi pasar dan produk, serta strategi sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan nontarif termasuk negosiasi untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas; dan (2) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjamin peningkatan gizi dan kualitas SDM, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta merangsang penciptaan lapangan kerja melalui rantai pasok lokal.

Adapun dari sisi lapangan usaha, upaya penguatan pertumbuhan akan dilakukan melalui: (1) hilirisasi SDA bernilai tambah tinggi melalui pemanfaatan teknologi dan pengembangan riset dan inovasi untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi menuju peningkatan *complexity economy*; (2) pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan menuju swasembada pangan; dan (3) pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

4.2 Fiskal

4.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Selama tahun 2022-2024, kinerja fiskal menunjukkan tren konsolidasi dalam rangka mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Negara dan Hibah terus meningkat secara nominal mencapai Rp2.850,60 triliun pada tahun 2024 atau tumbuh sebesar 2,40 persen (yoy) setara dengan 12,88 persen PDB. Peningkatan ini mencerminkan konsistensi upaya pemerintah untuk mendorong pendapatan negara (*collecting more*) secara berkelanjutan. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp2.231,80 triliun (10,08 persen PDB), meningkat secara nominal dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.154,21 triliun. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp584,30 triliun (2,64 persen PDB).

Realisasi Belanja Negara tahun 2024 mencapai Rp3.359,80 triliun (15,18 persen PDB), mengalami penyesuaian dibandingkan tahun 2023 (14,94 persen PDB). Dari sisi komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.496,20 triliun (11,28 persen PDB), serta Transfer ke Daerah (TKD)

Bab 4.

teralisasi sebesar Rp863,50 triliun (3,90 persen PDB). Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN tahun 2024 mencapai Rp509,2 triliun (2,30 persen PDB).

Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp554,90 triliun, lebih besar dari realisasi defisit sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun 2024 sebesar Rp45,7 triliun atau meningkat

dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp19,37 triliun. Realisasi keseimbangan primer sebesar Rp20,70 triliun (0,09 persen PDB), mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Sementara itu, rasio utang terhadap PDB mencapai 39,43 persen di tahun 2024, dan tetap terjaga di bawah 60 persen PDB (*debt rule*), yang mencerminkan pengelolaan utang yang hati-hati (*prudent*) di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Tabel 4.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara
Tahun 2022 – Semester I 2025

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	Semester I	
					2024	2025
Pendapatan Negara dan Hibah	% PDB	13,46	13,33	12,88		N/A ^{*)}
	Rp triliun	2.635,8	2.783,93	2.850,60	1.320,73	1.201,80
Penerimaan Perpajakan	% PDB	10,39	10,31	10,08		N/A ^{*)}
	Rp triliun	2.034,55	2.154,21	2.231,80	1.028,04	978,29
PNBP	% PDB	3,04	2,93	2,64		N/A ^{*)}
	Rp triliun	595,59	612,53	584,40	288,43	222,87
Belanja Negara	% PDB	15,81	14,94	15,18		N/A ^{*)}
	Rp triliun	3.096,23	3.121,22	3.359,80	1.398,05	1.406,04
Belanja Pemerintah Pusat	% PDB	11,64	10,72	11,28		N/A ^{*)}
	Rp triliun	2.279,98	2.239,78	2.496,20	997,92	1.003,56
Transfer ke Daerah	% PDB	4,17	4,22	3,90		N/A ^{*)}
	Rp triliun	816,25	881,43	863,50	400,13	402,47

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025, diolah

Keterangan: *) Data Persen PDB untuk Semester I tidak tersedia, karena PDB Nominal dirilis tahunan.



Kinerja APBN hingga semester I 2025 tetap resilien mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Pendapatan Negara dan Hibah hingga semester I 2025 terealisasi sebesar Rp1.201,80 triliun atau mengalami penyesuaian sebesar 9 persen (yoy). Dari sisi komponennya, penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp978,29 triliun atau berkontraksi sebesar 4,83 persen (yoy). Selanjutnya, dari sisi belanja negara, realisasi hingga semester I 2025 menunjukkan tren positif mencapai Rp1.406,04 triliun atau tumbuh sebesar 0,60 persen (yoy). Defisit APBN serta Keseimbangan Primer tetap

terjaga menunjukkan kesinambungan fiskal. Hingga semester I 2025, defisit APBN tercatat 0,84 persen PDB yang berada dalam batas aman dan terkendali, dengan Keseimbangan Primer mencatat Rp52,80 triliun, dimana defisit APBN 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen PDB.



Pada tahun 2025, kebijakan fiskal diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, berfokus pada agenda prioritas pembangunan, peningkatan kesejahteraan, serta mendorong percepatan konvergensi antardaerah.

Grafik 4.4
Perkembangan Keseimbangan Primer dan Surplus/Defisit (persen PDB)
Tahun 2022 – Semester I 2025



Sumber: Kementerian Keuangan, 2025, diolah

4.2.2 Tantangan dan Upaya

Kebijakan fiskal secara umum masih menghadapi beberapa tantangan. Dari sisi pendapatan, tantangan yang dihadapi mencakup (1) perubahan geopolitik dan menguatnya proteksionisme yang memicu perang dagang dan pelemahan harga komoditas; (2) belum semua sektor informal tercakup dalam sistem perpajakan; (3) struktur penerimaan pajak masih didominasi Pajak Penghasilan (PPH) Badan; (4) efektivitas reformasi perpajakan; serta (5) optimalisasi implementasi hukum perpajakan.

Dari sisi belanja negara, beberapa tantangan yang dihadapi yaitu (1) optimalisasi struktur belanja pemerintah pusat agar berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas; (2) masih tingginya pemenuhan *mandatory spending* yang berpotensi menyebabkan keterbatasan ruang fiskal untuk belanja negara; (3) tingginya kebutuhan belanja negara untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional; (4) peningkatan kemandirian fiskal daerah untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap TKD; serta (5) optimalisasi pemanfaatan TKD dalam mendorong belanja daerah yang berkualitas, produktif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi pembiayaan, APBN masih dihadapkan pada tantangan (1) menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang seiring dengan beban utang yang dihadapi; (2) volatilitas pasar keuangan yang berdampak pada kewajiban pembayaran utang dan perilaku investor dalam berinvestasi di instrumen Surat Berharga Negara (SBN); serta (3) tingkat inflasi yang tinggi di AS memicu terjadinya kondisi tingkat

bunga *higher for longer* yang berdampak pada risiko naiknya beban pembayaran bunga utang pemerintah.

Upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, di antaranya: (1) penggalan potensi penerimaan perpajakan dan PNBPN, khususnya non-SDA; (2) peningkatan efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan disertai peningkatan tenaga kerja formal; (3) peningkatan efektivitas kebijakan efisiensi belanja negara yang berdampak langsung kepada masyarakat; (4) percepatan penyaluran Belanja K/L dan Non-K/L; (5) percepatan penyaluran TKD disertai kesiapan kapasitas daerah dari sisi administrasi maupun pemanfaatan; (6) menjaga komposisi utang domestik dan valas pada tingkat yang aman; serta (7) pelaksanaan penerbitan pembiayaan dengan memperhatikan dinamika *cost of fund*, perkembangan kurs, serta faktor-faktor fundamental lainnya.

4.3 Moneter dan Sektor Keuangan

4.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Moneter - Devisa Hasil Ekspor (DHE) dapat menjadi sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan dan mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih kuat dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Melalui PP No. 8/2025 tentang Pelaksanaan Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam, mewajibkan eksportir untuk menyimpan 100 persen DHE di dalam negeri minimal 12 bulan di Sistem Keuangan Indonesia (SKI) untuk sektor non-migas dan untuk sektor migas paling sedikit 30 persen minimal selama 3 bulan. Penempatan dan pemanfaatan DHE

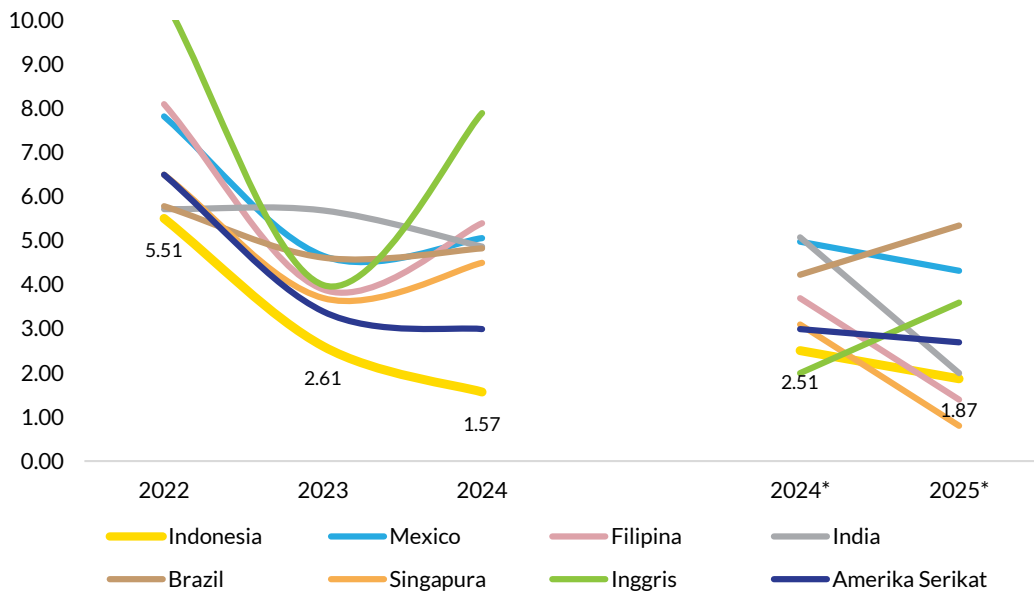


SDA memperkuat cadangan devisa dan memaksimalkan potensi devisa, menstabilkan dan memperkuat nilai tukar rupiah, serta mendukung ketahanan sektor eksternal.

Sementara itu, perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2022 sampai dengan Juni 2025 menunjukkan tren menurun dan terjaga dalam rentang sasaran. Pada 2022, inflasi IHK mencapai 5,51 persen (yoy). Pada perkembangan selanjutnya,

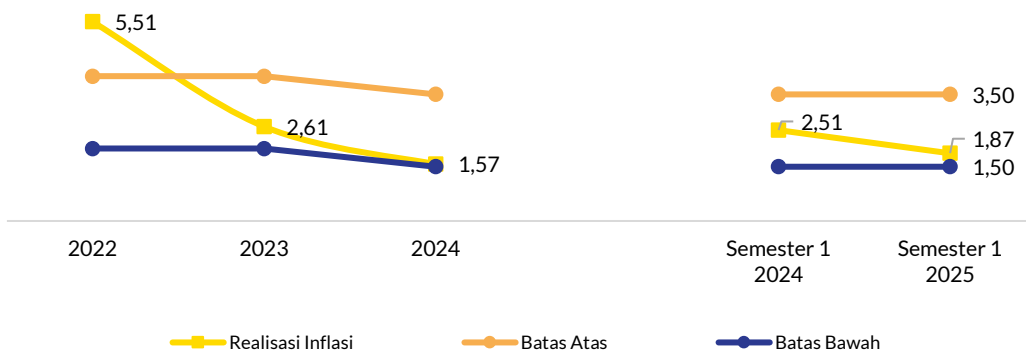
seiring dengan normalisasi harga energi dan pangan, kebijakan moneter yang lebih ketat, serta berbagai langkah pengendalian inflasi yang diambil oleh pemerintah, tekanan inflasi dapat dikendalikan dan secara gradual turun menjadi 2,61 persen pada akhir 2023 dan 1,57 persen pada akhir 2024. Hingga Juni 2025, tingkat inflasi Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara berkembang seperti Meksiko, India, dan Brazil, maupun negara maju seperti AS dan Inggris.

Grafik 4.5
Perkembangan Laju Inflasi Beberapa Negara (persen, yoy)
Tahun 2022 – Semester I Juni 2025



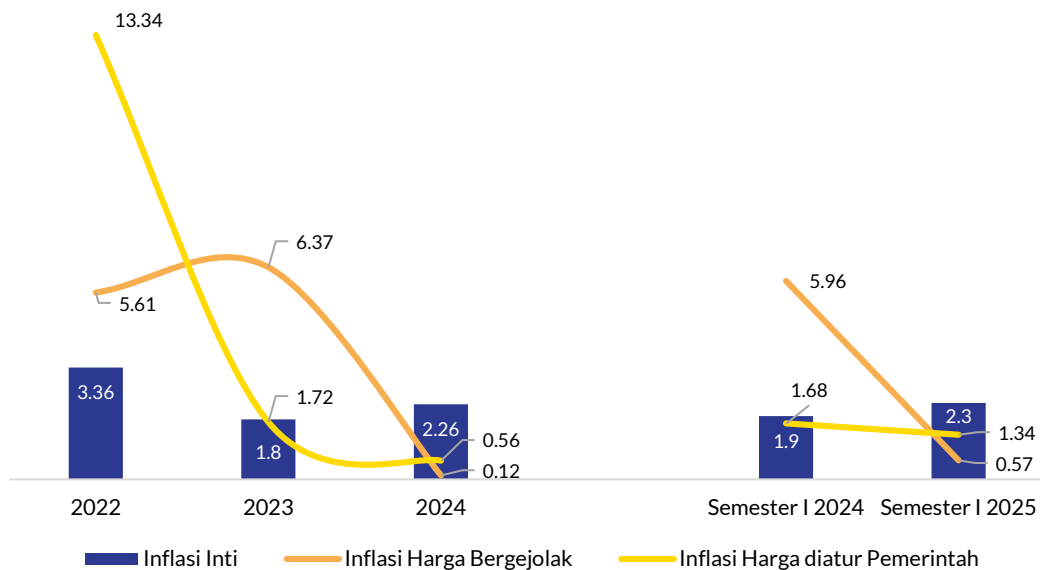
Sumber: Bloomberg, 2025, diolah

Grafik 4.6
Perkembangan Inflasi Umum Bulanan (persen, yoy)
Tahun 2022 – Semester I Juni 2025



Sumber : Bank Indonesia, 2025, diolah

Grafik 4.7
Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (persen, yoy)
Tahun 2022 – Semester I Juni 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah



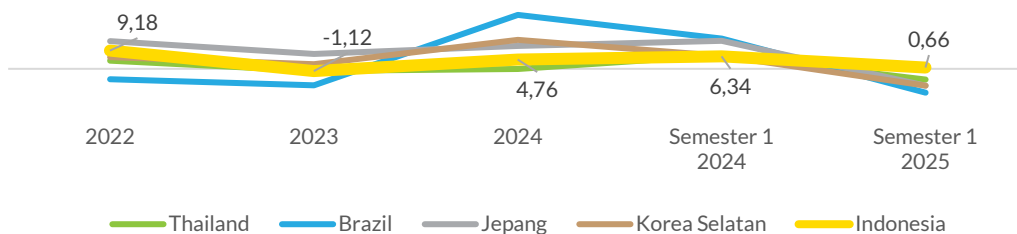
Perkembangan inflasi hingga semester I 2025 juga menunjukkan tren menurun dan terkendali dalam rentang sasaran. Pada Juni 2025, inflasi tercatat sebesar 1,87 persen (yoy), tetap berada dalam kisaran target pemerintah sebesar 1,50–3,50 persen, mencerminkan stabilitas harga yang terjaga. Berdasarkan komponen, inflasi pangan bergejolak mengalami tren penurunan pada tahun 2023–2025 seiring dengan dukungan kebijakan stabilisasi pasokan pangan, pengembangan kawasan pertanian, penguatan konektivitas, dan penguatan data pangan. Inflasi harga diatur pemerintah juga relatif terkendali hingga akhir semester I 2025, utamanya didukung oleh berbagai kebijakan subsidi energi dan tarif transportasi.

Inflasi yang terkendali merupakan hasil dari sinergi kebijakan pengendalian inflasi yang dijalankan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID). Kebijakan strategis yang telah diimplementasikan oleh pemerintah pusat diantaranya adalah pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari hingga Maret 2025 untuk konsumen dengan kapasitas 450-2.200 VA, diskon tarif transportasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional dan libur sekolah, penyaluran paket bantuan sosial untuk mendorong daya beli masyarakat, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui percepatan realisasi pengadaan dalam negeri, penguatan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), dan program mobilisasi pada sepuluh komoditas pangan melalui fasilitasi

distribusi pangan. Pada tingkat daerah, inflasi dikendalikan melalui Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah, pengembangan sentra produksi, optimalisasi pemanfaatan gudang dan *cold storage*, penguatan pengawasan terhadap kelancaran pasokan dan kualitas pangan, peningkatan kerja sama antardaerah, dan dukungan transportasi dari APBD.

Nilai tukar Rupiah sejak tahun 2022 hingga Juni 2025 cenderung stabil dengan rata-rata Rp15.591/US\$. Nilai tukar Rupiah sempat terkoreksi pada akhir tahun 2024 sebesar 4,76 persen (ytd), relatif lebih baik dibandingkan beberapa negara *peers*, seperti Brazil 27,2 persen (ytd) dan Korea Selatan 14,53 persen (ytd). Terkoreksinya nilai tukar Rupiah tersebut dipengaruhi oleh makin tingginya ketidakpastian global terutama terkait dengan arah kebijakan AS, ruang penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) yang lebih rendah, penguatan mata uang dolar AS secara luas, dan risiko geopolitik yang mengakibatkan berlanjutnya preferensi investor global untuk memindahkan alokasi portofolionya kembali ke AS. Namun demikian, nilai tukar Rupiah pada 2025 tetap terkendali dengan kecenderungan menguat sejak Mei 2025 didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan peningkatan pasokan valas oleh residen dan nonresiden. Pada semester I 2025, nilai tukar Rupiah terkoreksi sebesar 0,66 persen (ytd), lebih baik dibandingkan semester I 2024 yang terkoreksi lebih dalam sebesar 6,34 persen (ytd).

Grafik 4.8
Perkembangan Laju Pergerakan Penguatan/Pelemahan Nilai Tukar
Beberapa Negara (persen, ytd)
Tahun 2022 – Semester I Juni 2025

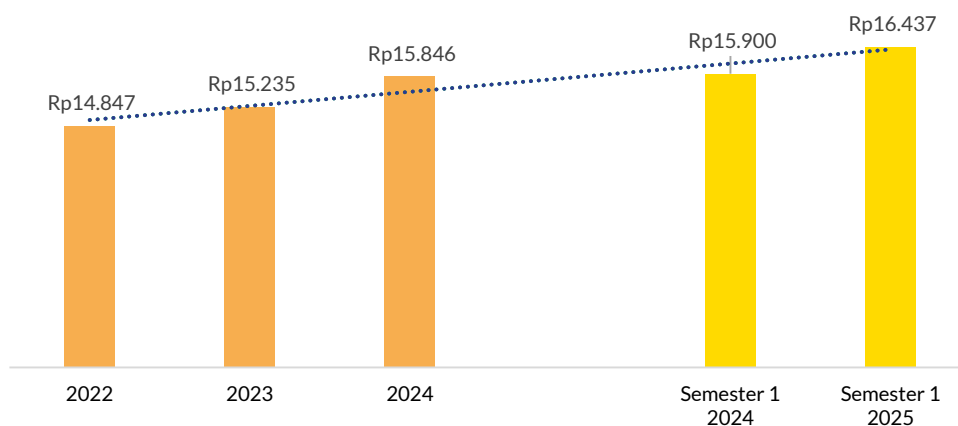


Sumber: Bloomberg, 2025, diolah

Bank Indonesia selaku otoritas moneter menjalankan bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah termasuk intervensi terukur di pasar *off-shore Non-Deliverable Forward* (NDF) dan strategi *triple intervention* pada transaksi spot, *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), dan SBN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan

strategi operasi moneter *pro-market* melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah.

Grafik 4.9
Perkembangan Nilai Tukar (Rupiah/US\$)
Tahun 2022 – Semester I Juni 2025



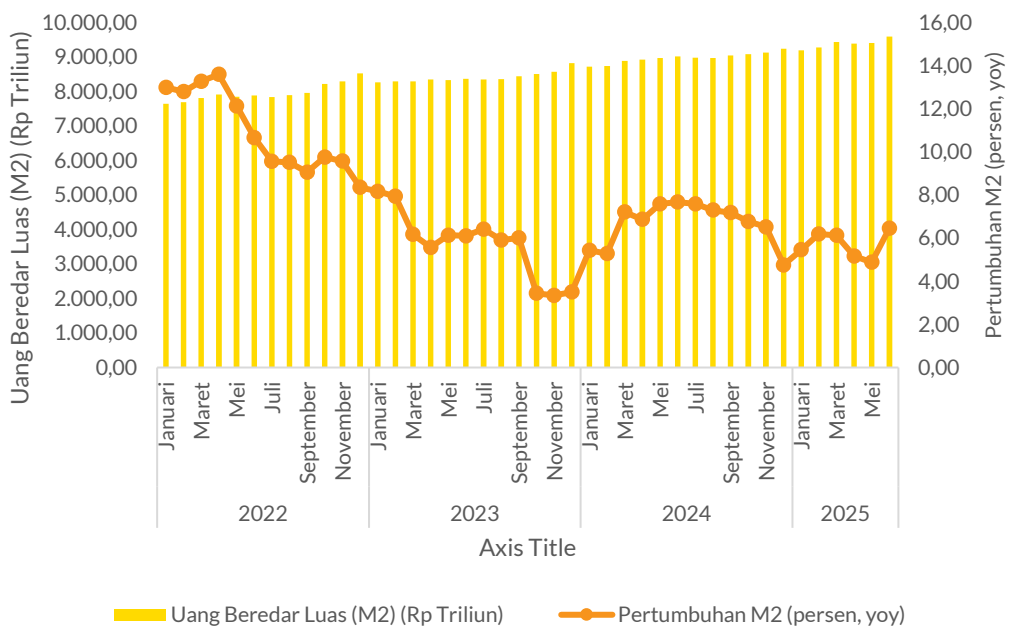
Sumber: Bloomberg 2025, diolah.



Sektor Keuangan - Sejak tahun 2022 hingga Mei 2025 sektor keuangan Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah tingginya tekanan global dan domestik. Hal ini terlihat dari peningkatan intermediasi/pendalaman serta inklusi sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan (*pro-growth*) dan stabilitas ekonomi (*pro-stability*).

Sementara itu, kinerja sektor keuangan didukung oleh likuiditas perekonomian yang tetap memadai, tercermin dari jumlah uang beredar dalam arti luas (M2). Pada Juni 2025, M2 tercatat sebesar Rp9.597,7 triliun, atau 6,5 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Mei 2025 sebesar 4,9 persen (yoy).

Grafik 4.10
Jumlah dan Pertumbuhan Uang Beredar (M2) (Rp Triliun)
Tahun 2022 - Juni 2025

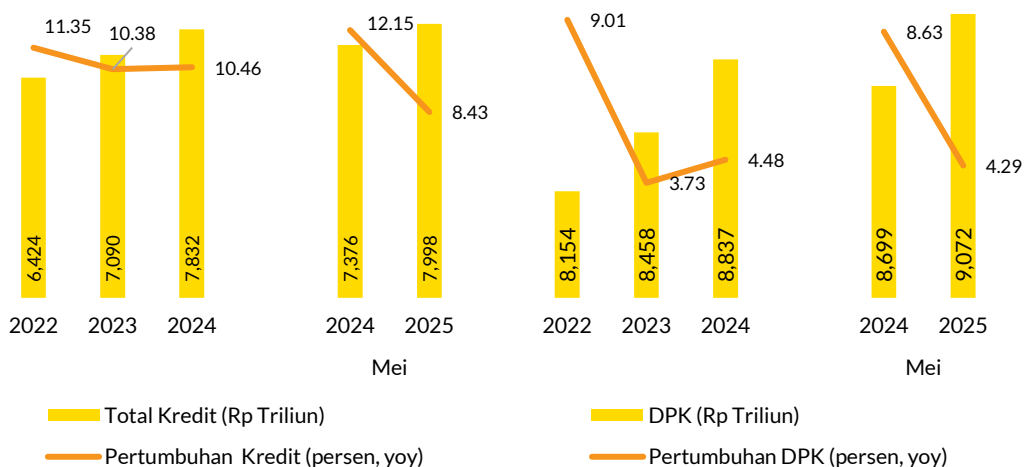


Sumber: Bank Indonesia, 2025, diolah

Peningkatan intermediasi tercermin dari pertumbuhan penyaluran kredit. Pertumbuhan kredit hingga Mei 2025 masih mencatatkan pertumbuhan positif dengan total kredit yang disalurkan mencapai Rp7.998 triliun. Perkembangan ini dipengaruhi oleh sikap kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit di tengah terkoreksinya pertumbuhan

Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi masih mencatatkan pertumbuhan tertinggi dibandingkan kredit konsumsi dan kredit modal kerja, di mana masing-masing tumbuh sebesar 13,74 persen (yoy), 8,82 persen (yoy), dan 4,94 persen (yoy) pada Mei 2025.

Grafik 4.11
Kinerja Penghimpunan DPK dan Penyaluran Kredit
Tahun 2022 – Mei 2025



Sumber: Bank Indonesia, 2025, diolah

Ketahanan sektor perbankan juga menunjukkan kinerja yang tetap kuat, didukung salah satunya oleh likuiditas perbankan yang terjaga, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 24,98 persen pada Mei 2025. Dengan kondisi ini, diharapkan penyaluran kredit perbankan tahun 2025 dapat tumbuh dalam kisaran 8-11 persen.

Pendalaman sektor keuangan menunjukkan peningkatan sejalan dengan kemajuan inklusi keuangan, tecermin dari Indeks Inklusi Keuangan sebesar 80,51 persen pada 2025, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 75,02 persen. Kenaikan ini didukung oleh perluasan jangkauan layanan keuangan, peningkatan pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat, perbaikan kualitas layanan, serta kemajuan teknologi digital yang mempercepat dan mempermudah akses terhadap produk dan layanan keuangan.

4.3.2 Tantangan dan Upaya

Moneter - Inflasi masih dihadapkan pada berbagai risiko yang perlu diwaspadai ke depan, terutama terkait ketersediaan pangan dan ketidakpastian global. Tantangan utama dalam pangan mencakup (1) risiko perubahan iklim ; dan (2) pola musiman saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dari sisi global, tantangan meliputi (1) ketegangan geopolitik di Timur Tengah; (2) kebijakan tarif resiprokal AS; (3) *imported inflation* akibat pelemahan rupiah; serta (4) pengetatan moneter berkepanjangan oleh The Fed.

Pengendalian inflasi 2025 difokuskan pada empat pilar, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi. Upaya tersebut mencakup (1) optimalisasi belanja pusat dan daerah untuk stabilisasi harga; (2) peningkatan produksi melalui akselerasi kawasan sentra



pangan serta penguatan cadangan dan tata niaga pangan; (3) penguatan infrastruktur dan konektivitas di wilayah pada daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan (3T) dan Perbatasan; serta (4) perbaikan kualitas data pangan, penguatan koordinasi TPIP/TPID sejak proses perencanaan.

Sementara nilai tukar rupiah masih dalam rentang fundamental, namun penguatannya relatif tertahan dibanding negara lain. Tantangan utamanya bersumber dari eksternal yang meliputi (1) ketegangan geopolitik dan tarif AS yang memicu kenaikan harga global; dan (2) sentimen negatif di pasar keuangan yang berpotensi mendorong *capital outflow*.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar 2025 diarahkan untuk memperkuat nilai tukar secara berkelanjutan melalui upaya (1) penguatan operasi moneter *pro-market*; (2) penetapan suku bunga *Bank Indonesia Rate* yang optimal; (3) mendorong percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing untuk menarik aliran modal asing masuk; serta (4) intervensi transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri, transaksi spot dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Sektor Keuangan - Tantangan dari sisi intermediasi di antaranya (1) optimalisasi penyaluran kredit pada sektor-sektor prioritas; (2) disparitas pertumbuhan antarsubsektor serta aksesibilitas pembiayaan bagi subsektor strategis kecil dan menengah; serta (3) penguatan insentif bagi sektor produktif.

Sementara, tantangan terkait inklusi yaitu (1) aksesibilitas layanan keuangan pada wilayah 3T dan perbatasan; serta (2) terbatasnya inovasi produk keuangan yang dibutuhkan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan berbagai upaya seperti: (1) segmentasi kredit berbasis prioritas sektor dan produktivitas; (2) pemberian insentif makroprudensial selektif dan pelonggaran likuiditas bagi kredit ke sektor prioritas; (3) penguatan infrastruktur kredit melalui perluasan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan integrasi data lintas sektor; serta (4) mendorong perluasan digitalisasi layanan untuk keuangan formal.

4.4 Jasa Keuangan

4.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Selama periode 2024-2025, kinerja sektor jasa keuangan tumbuh positif dan resilien di tengah ketidakpastian perekonomian global. Pencapaian ini didukung oleh fondasi permodalan yang kuat, likuiditas yang mencukupi, dan profil risiko yang terkelola dengan baik. Selain itu, pada 2025 Presiden telah meluncurkan sejumlah program strategis untuk memperkuat dan mereformasi sektor jasa keuangan seperti akselerasi kepemilikan rekening dan peluncuran layanan Bank Emas. Berbagai faktor tersebut mendorong sektor jasa keuangan terus berperan sebagai sumber pembiayaan bagi perekonomian nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.



Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) turut berperan dalam memperkuat akses keuangan mikro.

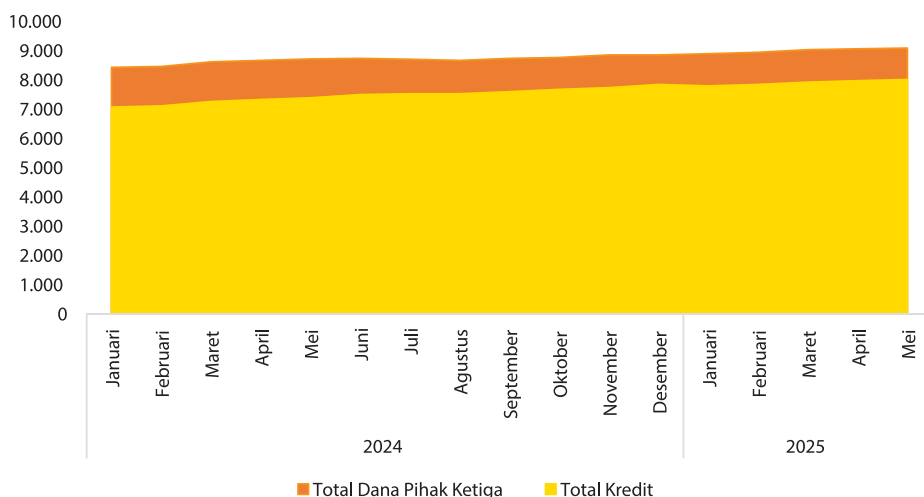
Bab 4.

Pada industri perbankan, hingga bulan Mei 2025, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) tercatat sebesar 25,51 persen, mencerminkan bank memiliki kecukupan modal yang memadai dalam menanggung risiko kerugian dari aset produktif atau kredit yang berisiko. Kualitas kredit juga tercatat membaik, dengan rasio *Non Performing Loan (NPL)* turun ke level 2,29 persen. Dari sisi likuiditas, *Loan to Deposit Ratio (LDR)* meningkat menjadi 88,16 persen, mencerminkan peningkatan fungsi intermediasi perbankan yang semakin optimal. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh positif sebesar 4,29 persen (yoy), mengindikasikan kapasitas perbankan dalam penyaluran kredit masih memadai dan kuat. Kredit perbankan tumbuh tinggi sebesar 8,43 persen (yoy), didukung oleh kredit Bank BUMN sebagai pendorong utama. Secara sektoral, penyaluran kredit produktif mencapai Rp5.742,88 triliun, dengan kontribusi terbesar dari sektor perdagangan (Rp1.197,55 triliun), industri pengolahan (Rp1.227,75 triliun), dan sektor pertanian (Rp530,68 triliun), yang masing-

masing tumbuh sebesar 2,64 persen (yoy); 8,79 persen (yoy); dan 5,28 persen (yoy).

Selanjutnya, pada industri keuangan non-bank (IKNB), kinerja industri terpantau resilien dan positif hingga Mei 2025. Total aset industri asuransi mencapai Rp1.163,62 triliun atau tumbuh 3,84 persen (yoy), dengan kecukupan modal industri asuransi terpantau sangat sehat (*Risk Based Capital/ RBC*) yaitu mencapai 480,77 persen pada asuransi jiwa dan 311,04 persen pada asuransi umum. Sama halnya dengan industri asuransi, aset industri dana pensiun juga mencatatkan pertumbuhan positif, dengan total aset mencapai Rp1.572,15 triliun atau tumbuh 9,20 persen (yoy), dengan jumlah kepesertaan sebanyak 28,84 juta peserta. Selanjutnya, *fintech peer-to-peer lending* terus mengalami pertumbuhan positif hingga triwulan I 2025. Jumlah pinjaman tersalurkan mencapai Rp1.130,56 triliun atau tumbuh 26,46 persen (yoy), utamanya di sektor perdagangan, reparasi kendaraan, dan akomodasi. Jumlah penerima pinjaman tumbuh 14,79 persen, dengan rasio kredit bermasalah (TWP 90) terjaga rendah di angka 2,77 persen.

Grafik 4.12
Total Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan 2024-2025 (Triliun Rupiah)



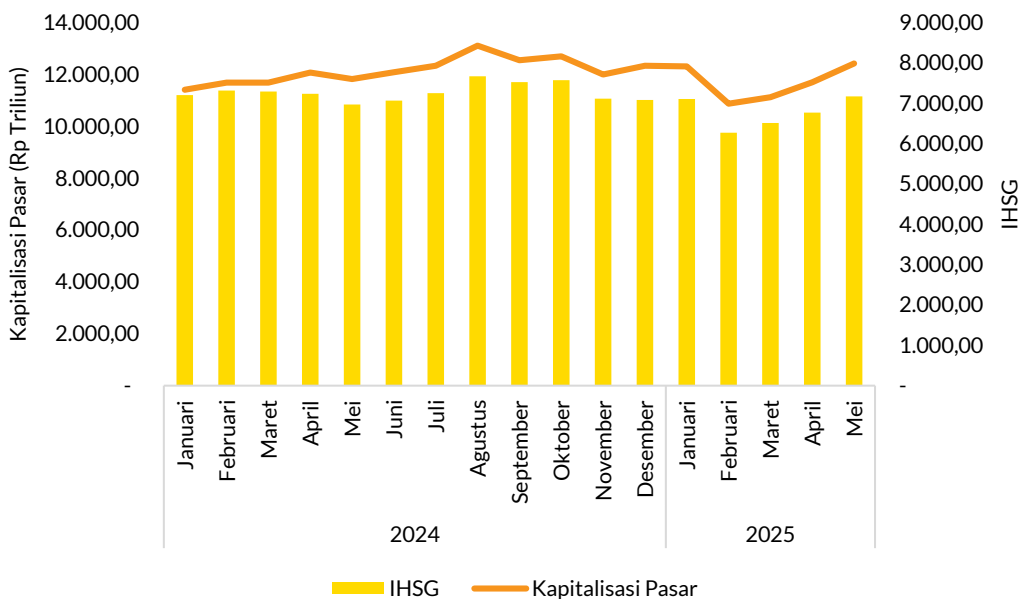
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025



Selanjutnya pada pasar modal, beberapa indikator pasar modal menunjukkan resiliensi meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal. Hal ini ditunjukkan oleh kapitalisasi pasar saham yang tumbuh positif pada Mei 2025 sebesar 5,03 persen (yoy), didukung oleh menguatnya basis investor domestik. Sektor obligasi juga menunjukkan tren positif, dengan nilai *outstanding* obligasi mencapai Rp6.817,42 triliun atau naik 5,67 persen (yoy), ditopang oleh penerbitan surat utang pemerintah dan korporasi. Hal ini mencerminkan peran pasar obligasi sebagai sumber pembiayaan

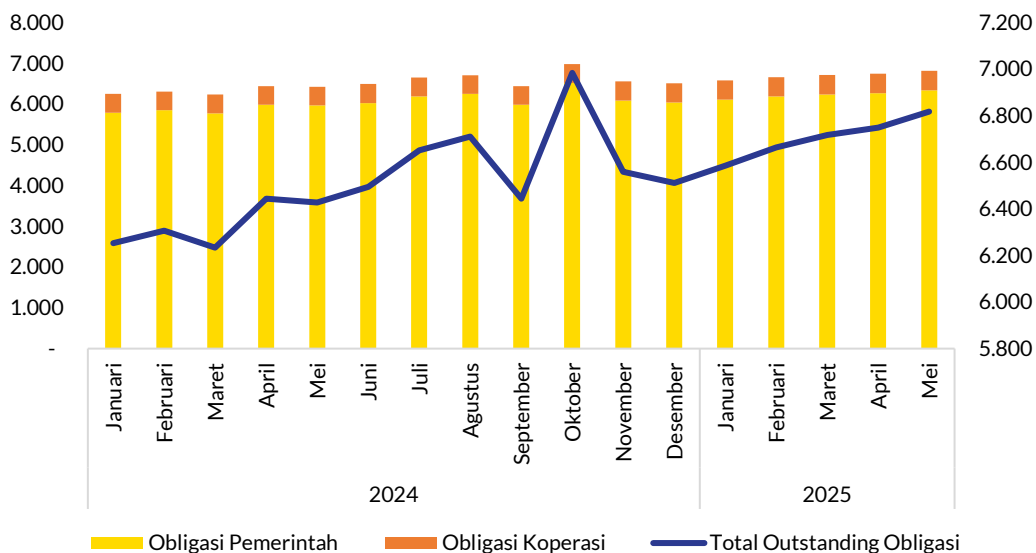
yang terus meningkat. Jumlah investor pasar modal juga menunjukkan peningkatan, yaitu mencapai 16,57 juta investor pada Mei 2025 atau tumbuh 28,09 persen (yoy). Dominasi investor reksa dana tetap tinggi dengan 15,66 juta investor, diikuti investor saham dan surat berharga negara (SBN) yang juga tumbuh signifikan. Kuatnya partisipasi investor domestik menyumbang 61 persen dari nilai rata-rata transaksi saham harian menjadi sinyal positif bagi kemandirian pasar keuangan nasional.

Grafik 4.13
Perkembangan IHSG dan Kapitalisasi Pasar 2024-2025



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, 2025, diolah

Grafik 4.14
Perkembangan Outstanding Obligasi (Triliun Rupiah) 2024-2025



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, 2025, diolah

4.4.2 Tantangan dan Upaya

Beberapa tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan antara lain: (1) pendalaman sektor jasa keuangan masih berfokus pada sektor jasa keuangan bank; (2) fungsi intermediasi yang bervariasi antardaerah di mana penyaluran kredit masih terpusat di Pulau Jawa dan beberapa sektor prioritas; (3) penetrasi dan densitas industri dana pensiun dan asuransi, serta diversifikasi produk yang masih terbatas; (4) basis investor dan instrumen investasi yang masih terbatas pada pasar modal; serta (5) disparitas antara inklusi keuangan dan literasi keuangan.

Sementara upaya yang dilakukan sebagai arah kebijakan sektor jasa keuangan ke depan antara lain: (1) penguatan peran perbankan melalui diversifikasi produk, optimalisasi fungsi

intermediasi ke sektor prioritas (termasuk UMKM dan penjaminannya), perluasan jangkauan wilayah, dan perbaikan struktur serta peningkatan efisiensi; (2) penguatan peran sektor jasa keuangan non-bank, seperti asuransi dan dana pensiun, melalui peningkatan penetrasi dan densitas, perbaikan tata kelola dan portofolio investasi, perbaikan sistem pensiun, serta diversifikasi produk. Pada pasar modal, didorong perluasan basis investor, penambahan produk termasuk instrumen derivatif, dan pengembangan instrumen berkelanjutan; serta (3) peningkatan inklusi dan literasi keuangan dilakukan melalui edukasi yang masif, perluasan akses keuangan, dan penambahan agen digital, diiringi oleh penguatan perlindungan konsumen untuk mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.



4.5 Swasembada Pangan

4.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Swasembada pangan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan keberlanjutan pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan di seluruh wilayah Indonesia. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) nasional menunjukkan peningkatan, dari 69,0 pada tahun 2023 menjadi 71,2 pada tahun 2024 dan ditargetkan naik menjadi 73,2 pada 2025. Perbaikan ini juga tecermin dari menurunnya jumlah wilayah dengan tingkat kerentanan pangan tinggi (prioritas 1–3) dari 68 kabupaten/kota pada tahun 2023 menjadi 62 kabupaten/kota pada tahun 2024. Pemerintah terus mencermati dan melakukan langkah nyata dalam mengatasi dan mengantisipasi daerah dan kelompok masyarakat yang rentan rawan pangan.

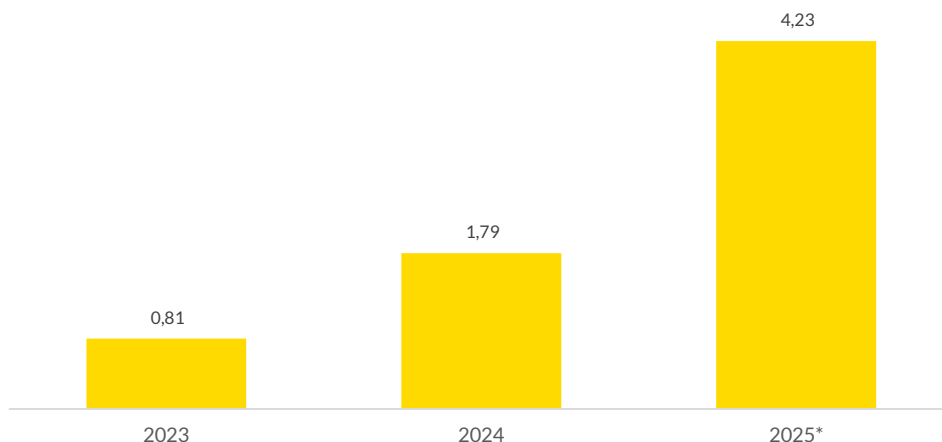
Pemenuhan kebutuhan energi pangan dan gizi masyarakat juga semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*), dari 10,53 persen pada tahun 2023 menjadi 8,27 persen pada tahun 2024. Angka PoU tersebut menunjukkan terjadinya penurunan persentase masyarakat yang belum mampu mencukupi kebutuhan minimum energi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif sesuai umur, jenis kelamin, dan kondisi fisiknya. Pada tahun 2025, ditargetkan angka PoU terus menurun menjadi sebesar 7,21 persen.

Kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat masih terjaga baik, dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2024 sebesar 93,5. Perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat terus ditingkatkan, terutama pada konsumsi sayur, buah, dan kacang-kacangan. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan langkah penganeekaragaman konsumsi bahan pangan masyarakat.

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan atas dasar angka konstan 2010 untuk periode 2022-2024 juga tetap mampu tumbuh positif, yaitu sebesar 1,30 persen ada tahun 2023 dan 0,67 persen pada tahun 2024. Pada triwulan II 2025, PDB sektor ini tumbuh sebesar 1,65 persen. Dengan capaian tersebut, PDB sektor ini ditargetkan tumbuh sebesar 2,20 persen dan berkontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) khususnya untuk komoditas beras terus meningkat. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah untuk menaikkan batas minimal stok akhir tahun dari 1,2 juta ton menjadi 2 juta ton pada tahun 2025. Total jumlah CPP juga ditargetkan naik dari 3,7 juta ton menjadi 5 juta ton pada tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, jumlah cadangan beras pemerintah naik dari 1,79 juta ton pada akhir 2024 menjadi 4,23 juta ton pada Juli 2025. Pengadaan cadangan beras pemerintah tersebut dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.

Grafik 4.15
Cadangan Beras Pemerintah (juta ton)
Tahun 2023-2025



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Keterangan: *) Data per Bulan Juli 2025

Produksi padi pada periode Januari hingga April 2025 tercatat sebesar 24,33 juta ton gabah kering giling (GKG), yang meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 19,22 juta ton GKG. Produksi jagung juga mengalami peningkatan pada periode Januari hingga April 2025 yang mencapai 6,01 juta ton pipilan kering, lebih tinggi daripada produksi pada periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 5,02 juta ton pipilan kering.

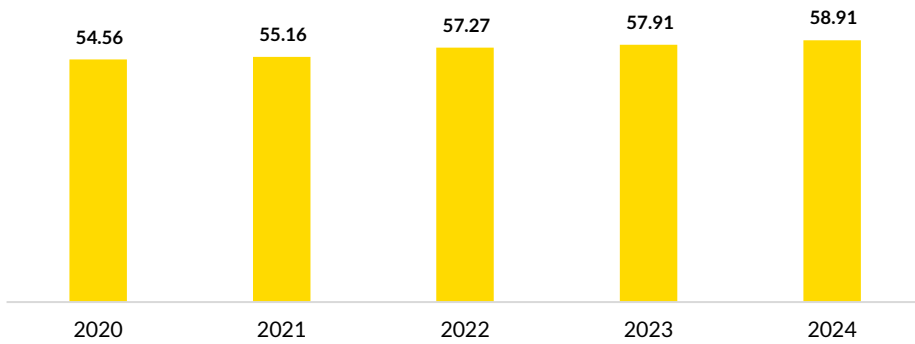
Pencapaian Program Swasembada Pangan didukung berbagai intervensi program strategis yaitu cetak sawah, optimasi lahan, penyaluran alat dan mesin pertanian, pupuk bersubsidi, penyediaan benih, dan kegiatan strategis lainnya. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2025, pemerintah telah melaksanakan kegiatan optimasi lahan

seluas 42.660 ha, cetak sawah seluas 6.991 ha, penyaluran alat dan mesin pertanian sebanyak 36.628 unit, serta penyaluran pupuk bersubsidi nasional 3,37 juta ton.

Saat ini, Indonesia menjadi salah satu produsen dan konsumen utama pangan akuatik dunia, dengan konsumsi nasional pada tahun 2024 mencapai 58,91 kg/kapita/tahun, atau dua kali lipat rata-rata global. Namun, potensi ini perlu terus didukung agar pemanfaatan spesies pangan akuatik bernilai gizi tinggi dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, mengurangi tekanan lingkungan dengan penangkapan dan budidaya yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesetaraan akses dan manfaat bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha skala kecil.



Grafik 4.16
Konsumsi Ikan Tahun 2020-2024 (kg/kapita/tahun)

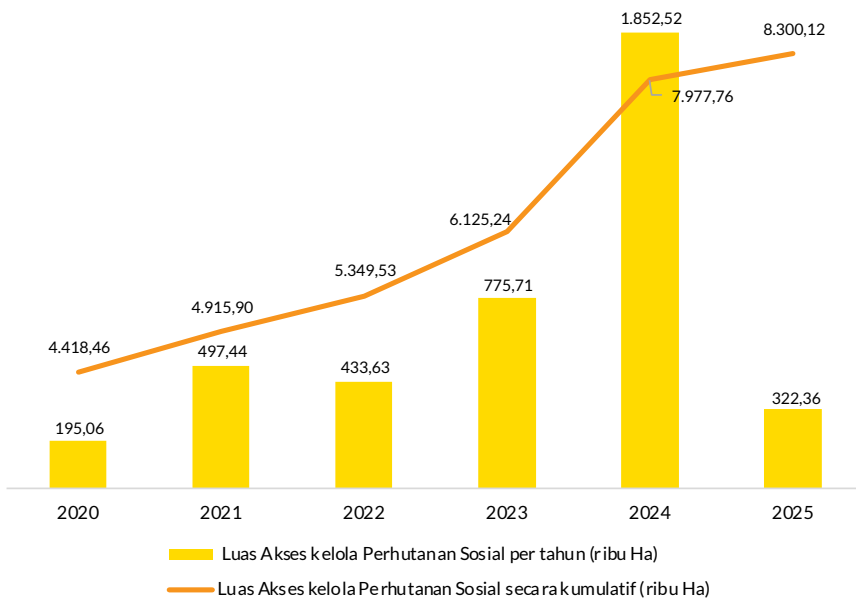


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025, diolah

Sementara itu, sektor kehutanan juga memiliki potensi besar dalam menyediakan berbagai macam sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui Program Perhutanan Sosial. Sampai dengan Juni 2025, pemerintah telah memberikan akses kelola kawasan hutan

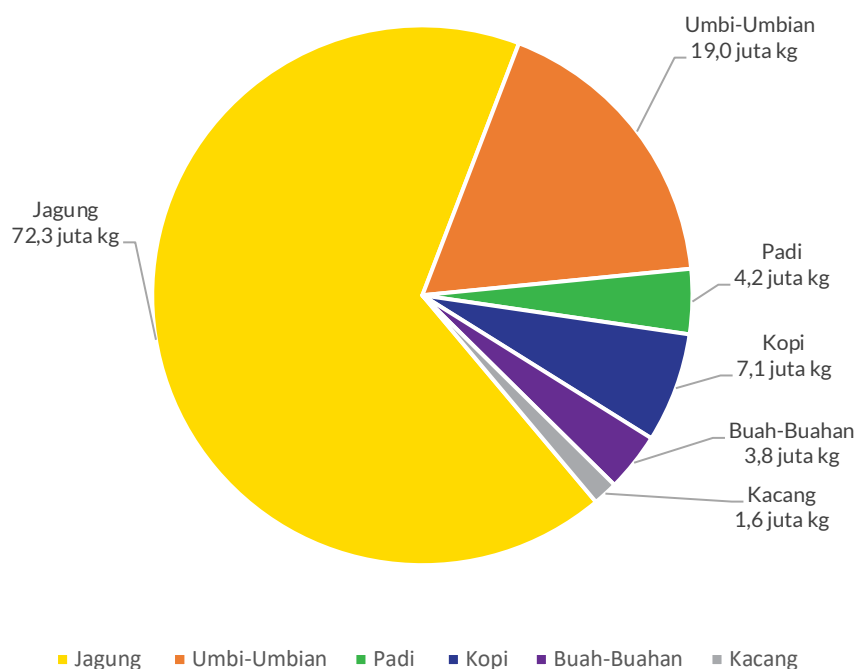
ke masyarakat seluas 8,3 juta ha untuk 1.408.729 kepala keluarga melalui 11.015 unit Surat Keputusan (SK). Kawasan hutan tersebut dikelola oleh 15.567 kelompok usaha perhutanan sosial. Komoditas tanaman pangan yang telah dihasilkan oleh kelompok usaha perhutanan sosial yaitu jagung, padi, dan umbi-umbian.

Grafik 4.17
Luas Kawasan Hutan yang dikelola Masyarakat melalui Perhutanan Sosial Tahun 2020 – 2025



Sumber: Kementerian Kehutanan, 2025, diolah

Grafik 4.18
Hasil Produksi Pangan dari Kawasan Hutan
Tahun 2024



Sumber: Kementerian Kehutanan, 2025, diolah
 Keterangan: *) Data per Bulan Juli 2025

4.5.2 Tantangan dan Upaya

Secara umum, upaya mencapai swasembada pangan menunjukkan kemajuan yang terus didorong untuk mencapai target tahun 2025. Namun demikian, pencapaian ini dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain: (1) kompleksitas faktor yang memengaruhi kerentanan pangan wilayah dan pola konsumsi pangan masyarakat; (2) dampak perubahan iklim, pergeseran musim, dan bencana alam; (3) dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang menuntut penguatan swasembada pangan dalam negeri; (4) tingkat kesejahteraan petani dan nelayan; (5) pemanfaatan dan

adopsi teknologi pertanian yang produktif dan berkelanjutan; (6) pengembangan riset dan inovasi; serta (7) optimalisasi kelembagaan petani dan nelayan.

Pelaksanaan ketahanan pangan di dalam kawasan hutan menghadapi tantangan di antaranya: (1) produktivitas tanaman pangan yang dihasilkan dari perhutanan sosial; (2) pemanfaatan kawasan perhutanan sosial pasca pemberian izin; (3) integrasi kegiatan antarsektor dalam mendukung perhutanan sosial; serta (4) kapasitas kelompok usaha perhutanan sosial dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan upaya yang komprehensif. Dari sisi penyediaan bahan pangan, upaya yang dilakukan meliputi (1) pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan, termasuk pangan lokal, pangan hewani, pangan akuatik, dan perhutanan sosial untuk swasembada pangan; (2) penyediaan input produksi dan prasarana pertanian, sistem irigasi, perbaikan tata kelola dan kebijakan subsidi input; (3) penguatan CPP; serta (4) akses pembiayaan. Sementara itu, dari aspek keterjangkauan dan konsumsi pangan, upaya yang dilakukan meliputi (1) penganekaragaman dan

peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat; (2) jaminan keamanan pangan, perkarantina hewan, ikan dan tumbuhan; (3) bantuan pangan bagi kelompok masyarakat rentan; serta (4) fortifikasi dan biofortifikasi pangan.

Sementara itu, upaya dalam meningkatkan ketahanan pangan di dalam kawasan hutan di antaranya: (1) kolaborasi dengan sektor lainnya dalam mendukung perhutanan sosial terutama untuk peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil; serta (2) pendampingan dan peningkatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.



Panen Raya Jagung di Yogyakarta
Sumber: Kementerian Pertanian

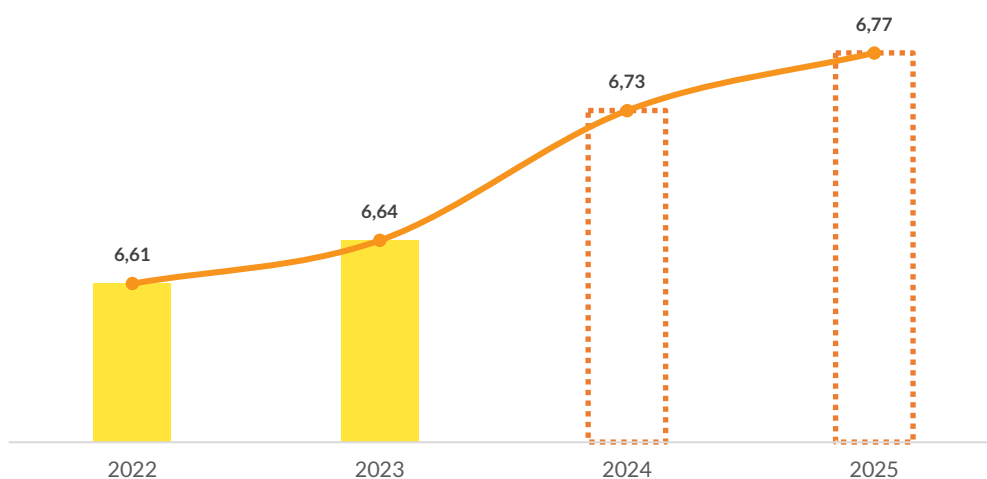
4.6 Swasembada Energi

4.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Kinerja pemerintah dalam sektor energi terus menunjukkan hasil yang positif sebagai langkah menuju swasembada energi. Hal ini ditandai dengan meningkatnya capaian porsi EBT dalam bauran energi primer dan konsumsi

listrik per kapita pada semester I 2025. Kebijakan swasembada energi diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi guna memenuhi kebutuhan energi nasional, serta memperkuat implementasi transisi energi berkeadilan. Capaian ketahanan energi diukur menggunakan Indeks Ketahanan Energi.

Grafik 4.19
Tren Peningkatan Indeks Ketahanan Energi
Tahun 2022-2025



Sumber : Dewan Energi Nasional, 2025

Keterangan: *) angka proyeksi sementara RPJMN 2025-2029.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indeks Ketahanan Energi Nasional menunjukkan tren yang positif dan stabil, serta secara konsisten berada pada kategori “Tahan”. Status tersebut mencerminkan kemampuan yang cukup baik dalam menjamin ketersediaan, akses, keterjangkauan, dan penerimaan energi oleh masyarakat. Tren peningkatan ini merupakan bukti nyata dari sinergi berbagai pihak dalam memperkuat fondasi ketahanan

energi nasional. Ke depan, indeks ketahanan energi diproyeksikan akan terus tumbuh, seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur energi dan pemanfaatan kemajuan teknologi di sektor tersebut.

Implementasi kebijakan ketahanan energi perlu diarahkan secara tepat, adaptif, dan berkelanjutan dalam rangka mempercepat tercapainya swasembada energi nasional.



Tabel 4.2
**Capaian Kinerja Pembangunan Lingkup Sumber Daya Energi,
Mineral, dan Pertambangan**

Indikator Program Prioritas	Satuan	2022	2023	2024	Capaian Semester I	
					2024	2025
Pasokan Energi Primer	MTOE	1.760	1.853	1.991	762 ^{a)}	755
Konsumsi Energi Final Per Kapita	BOE per kapita	4,04	4,38	4,53	1,77	1,61
Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer	%	11,86	13,29	14,68	13,93	15,23
Intensitas Energi Primer	SBM/miliar Rupiah	150,00	132,58	133,00	133,00	141,56
Jumlah <i>Lifting</i> Minyak bumi	ribu BOPD	664,98	605,54	580	648	572
Jumlah <i>Lifting</i> Gas Bumi	ribu BOEPD	941,16	1.041,98	1.017	982	1.000
Jumlah Produksi Batubara	juta ton	687,40	775,20	836,10	406,60	357,60
Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota	kumulatif sambungan rumah	902.027	922.776	943.708	943.708 ^{b)}	943.708
Jumlah Panjang Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi yang Difasilitasi	km	21.413	22.478	22.533	22.498	22.540
Jumlah Volume Penyaluran BBM Bersubsidi	juta kilo liter	18,10	18,06	18,13	8,66	8,95
Jumlah Volume Penyaluran BBM Non-Subsidi	juta kilo liter	30,14	32,47	35,09	16,49	15,06
Jumlah Pelanggan Listrik (Kumulatif)	ribu pelanggan	85.279	88.785	92.494	90.420	94.013
Konsumsi Biofuel	juta kilo liter	10,45	12,29	13,16	6,21	6,83
Produksi Listrik Energi Terbarukan	GWh	65.867	65.444	73.129	34.530	31.023
Penurunan Intensitas Energi Final	SBM/miliar Rupiah	1,16	0,89	1,04	1,04	0,96

Sumber: Kementerian ESDM 2025, diolah

Keterangan:a) Mei 2024; b) data tahunan

Bab 4.

Secara umum, terjadi peningkatan pada sejumlah indikator utama, seperti pasokan energi primer, jumlah *lifting* gas bumi, produksi batubara, produksi listrik dari energi terbarukan, serta konsumsi *biofuel*. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa ketersediaan sumber daya energi nasional semakin andal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mencerminkan aspek *availability* dalam kerangka penyediaan energi nasional menuju swasembada energi. Langkah strategis yang mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional adalah intensifikasi *lifting* minyak bumi untuk memenuhi pangsa pasar domestik. Salah satu capaiannya adalah peningkatan produksi Blok Cepu yang ditargetkan memberi kontribusi tambahan sebesar 30.000 barel per hari.

Kehadiran regulasi progresif seperti Permen ESDM No. 14/2025 merupakan instrumen penting dalam mendorong optimalisasi potensi sumur marginal oleh BUMD, koperasi, dan UMKM. Inisiatif ini bukan hanya membuka ruang partisipasi pelaku lokal, tetapi juga berpotensi mempercepat peningkatan *lifting* migas secara signifikan dalam skala nasional.

Di sisi lain, sejumlah indikator yang mencerminkan aspek *accessibility*, seperti jumlah sambungan rumah jaringan gas kota, jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi, jumlah pelanggan listrik kumulatif, serta konsumsi energi final per kapita, juga menunjukkan tren yang positif. Hal ini adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam memastikan pasokan energi yang merata dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional.

Lebih lanjut, aspek keterjangkauan harga energi (*affordability*) juga menjadi perhatian utama pemerintah. Keberhasilan pemerintah dalam menjaga harga energi agar tetap terjangkau oleh masyarakat terlihat dari peningkatan volume penyaluran BBM dari tahun ke tahun, baik subsidi maupun non-subsidi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa energi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi juga tecermin dari peningkatan pemanfaatan sumber daya energi yang bersih dan berkelanjutan. Peningkatan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transisi energi dari energi fosil ke energi bersih. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 1.114,63 MW pada tahun 2024, yang terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Hidro sebesar 486,55 MW, PLT Surya sebesar 311,56 MW, PLT Bioenergi sebesar 275,27 MW, dan PLT Panas Bumi sebesar 41,25 MW.

Selain itu, pemanfaatan bahan bakar nabati juga menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui kebijakan mandatori B35 menjadi B40 yang diimplementasikan sejak awal tahun 2025. Upaya tersebut didukung dengan perbaikan regulasi seperti penyediaan insentif fiskal dan non fiskal, implementasi *carbon credit* pada sektor energi, serta penetapan Kepmen ESDM No. 188/2025 tentang RUPTL 2025-2034 yang memuat rencana pembangunan PLT Energi Terbarukan sebesar 42,6 GW sampai dengan tahun 2034.



Kebijakan transisi energi melalui pendekatan energi berbasis kewilayahan juga mulai diimplementasikan secara berkeadilan dan inklusif. Lebih lanjut, pengembangan energi baru juga memperlihatkan kemajuan seperti pengembangan *piloting green hydrogen* dan penyiapan kelembagaan pengembangan nuklir untuk energi. Sementara itu, intensitas energi final menunjukkan penurunan, menandakan bahwa penggunaan energi nasional semakin efisien dengan tetap menjaga kestabilan PDB Nasional.

Dukungan sektor pertambangan dalam upaya mewujudkan ketahanan energi tecermin dengan pencapaian produksi batubara, yang hingga bulan Juli 2025 telah mencapai 53,43 persen dari target tahun 2025 atau sebesar 395,18 juta ton. Pertambangan mineral Indonesia juga telah secara bertahap bertransformasi dari pengekspor barang mentah menjadi barang bernilai tambah tinggi, terutama untuk mendukung agenda transisi energi, khususnya industri yang memperkuat rantai pasok ekosistem kendaraan listrik dan energi terbarukan. Lebih lanjut, sampai pertengahan tahun 2025, Indonesia telah berhasil meningkatkan kapasitas pengolahan mineral, salah satunya melalui pembangunan Smelter Tembaga di Gresik dan Sumbawa yang memiliki kapasitas output mencapai 870.000 ton. Pembangunan fasilitas pengolahan mineral akan terus dilakukan, dengan tiga smelter ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2025, yaitu (1) Smelter Alumina di Mempawah; (2) Smelter Aluminium di Kuala Tanjung; dan (3) Smelter Nikel untuk bahan baku industri baterai di Halmahera Timur. Dalam rangka mempercepat agenda hilirisasi pada tahun 2025 ini, pemerintah telah menetapkan Satuan

Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

4.6.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan dalam swasembada energi khususnya pada sektor migas di antaranya (1) intensifikasi produksi dan adaptasi terhadap volatilitas harga global; (2) aspirasi untuk mewujudkan kemandirian energi; (3) urgensi percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur migas; dan (4) komitmen terhadap transisi energi.

Upaya strategis yang dilakukan dalam pembangunan sektor migas antara lain: (1) peningkatan penyediaan energi melalui Proyek Strategis Nasional, diantaranya Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela dan *North Hub Development Project* Selat Makassar; (2) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi melalui Pembangunan Kilang *Grass Root Refinery* (GRR) Tuban, *Upgrading* Kilang Eksisting/*Refinery Development Master Plan* (RDMP), dan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon–Semarang (CISEM) Tahap II dan Ruas Dumai–Sei Mangkei (DUSEM); serta (3) komitmen terhadap penguatan implementasi transisi energi berkeadilan dengan berkontribusi melalui pembangunan Kilang *Biorefinery* Cilacap, Kilang *Biorefinery* Sumatera, dan lainnya.

Sementara itu, tantangan pada sektor EBT yang memiliki potensi hingga mencapai 3.687 GW antara lain: (1) penyediaan investasi yang memadai; (2) perluasan cakupan dan pemerataan infrastruktur kelistrikan; (3) penyelarasan perencanaan antara kebutuhan dan ketersediaan energi; (4) penguatan ketersediaan pasokan bahan baku untuk *biofuel*

Bab 4.

secara berkelanjutan; (5) penyempurnaan tata kelola regulasi, penyederhanaan perizinan, pengadaan lahan dan peningkatan kualitas data; serta (6) optimalisasi proses perencanaan dan pengadaan proyek dalam RUPTL.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini mencakup (1) mobilisasi pendanaan dan investasi proyek EBT; (2) restrukturisasi kebijakan subsidi energi fosil ke energi terbarukan; (3) penyederhanaan proses perizinan dan pengadaan di PT PLN; (4) penetapan RUU EBT; serta (5) penguatan kualitas data dan informasi terkait potensi/cadangan EBT.

Selain itu, tantangan yang terkait sektor minerba adalah (1) dinamika transisi energi; (2) optimalisasi peluang kemitraan strategis dengan investor asing untuk pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter); serta (3) penguatan aspek tata kelola lingkungan dalam pengawasan pelaksanaan reklamasi pascatambang dan penanganan praktik pertambangan ilegal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah mengupayakan langkah strategis melalui koordinasi kebijakan dan tata kelola yang terintegrasi, yang menyelaraskan kebijakan industri, energi, lingkungan, dan sosial, di antaranya: 1) memfasilitasi percepatan pembangunan fasilitas pemurnian komoditas minerba dan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi; 2) koordinasi percepatan peningkatan nilai tambah; 3) pengendalian produksi minerba untuk kebutuhan energi dan industri dalam negeri;

4) kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 5) membentuk perangkat penegakan hukum sektor pertambangan dan penertiban tambang ilegal; 6) meningkatkan eksplorasi cadangan mineral strategis; 7) menyusun Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Mineral; serta 8) pengawasan terhadap pelaksanaan pascatambang termasuk memastikan jaminan reklamasi dan transisi yang berkeadilan.

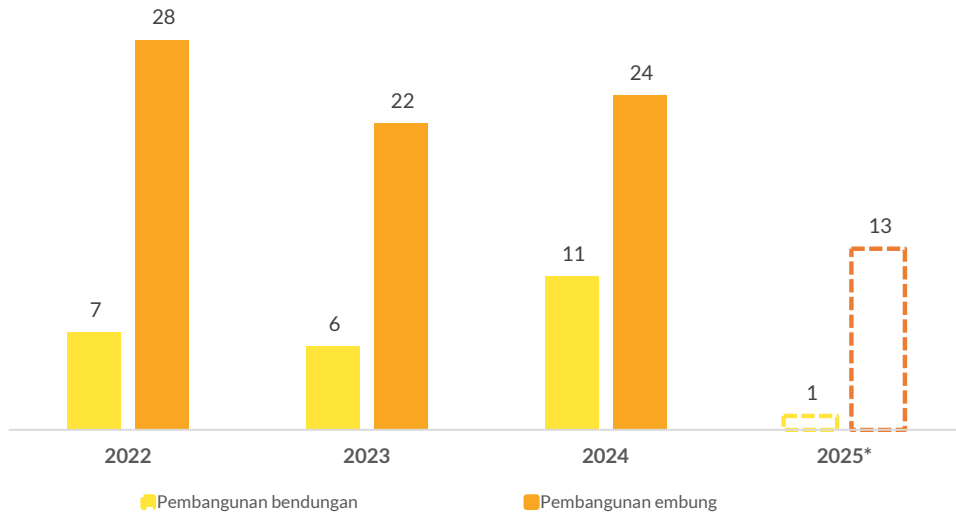
4.7 Swasembada Air

4.7.1 Capaian Utama Pembangunan

Swasembada air memiliki peran strategis untuk menjaga ketahanan sumber daya dan kedaulatan nasional. Pencapaian swasembada ini memerlukan integrasi antara pembangunan infrastruktur tampungan air, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, penyediaan pasokan air baku, dan konservasi sumber daya air.

Penyediaan tampungan air dilaksanakan melalui pembangunan bendungan multiguna dan embung untuk menjamin ketersediaan air. Selama periode 2015-2024, terdapat 53 bendungan dan 1.391 embung telah terbangun dengan total manfaat berupa layanan irigasi 352.712 ha, produksi air baku 38,96 m³/detik, reduksi banjir 11.749 m³/detik dan potensi listrik 190 MW. Pada tahun 2025, ditargetkan 1 bendungan dan 13 embung dapat diselesaikan. Pemanfaatan bendungan terbangun mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air.

Grafik 4.20
Capaian Pembangunan Bendungan dan Embung (Unit) Tahun 2022-2025



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2025
 Keterangan : *Angka Target

Gambar 4.1
Peta Sebaran Pembangunan Bendungan Tahun 2022-2025



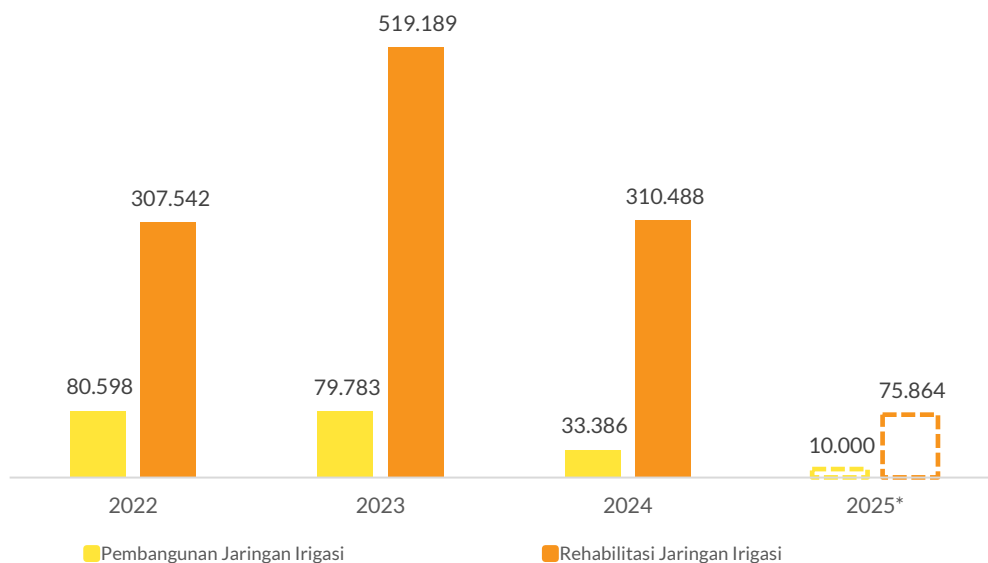
Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2025

Bab 4.

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan air sebagai dukungan untuk mencapai swasembada pangan. Selama periode 2015-2024, telah dilaksanakan pembangunan 238.410 ha dan rehabilitasi 1.726.652 ha. Pada tahun 2025, pembangunan 10.000 ha dan rehabilitasi 75.864 ha ditargetkan dapat dilaksanakan. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pada periode 2025-2029 diprioritaskan untuk mendukung pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) dan pemanfaatan bendungan terbangun. Salah satu *highlight* proyek pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi adalah rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Komerling yang mendukung KSPP Sumatera Selatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja irigasi pada DI kewenangan daerah, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 2/2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Sejak diterbitkan pada bulan Februari 2025, pelaksanaan Inpres No. 2/2025 telah memasuki tahap konstruksi untuk pekerjaan irigasi hasil identifikasi tahap I tahun anggaran 2025. Selain itu, pemerintah telah melaksanakan modernisasi irigasi pada sejumlah daerah irigasi seperti DI Jatiluhur, DI Pamukkulu, dan DI Kedungputri sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi air irigasi. Komponen program tersebut, terdiri atas (1) peningkatan dan revitalisasi infrastruktur irigasi dan drainase; (2) pengelolaan irigasi; (3) kelembagaan pengelolaan irigasi, dan (4) pengembangan sumber daya manusia

Grafik 4.21
Capaian Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun 2022-2025 (Ha)



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2025
Keterangan: *Angka Target



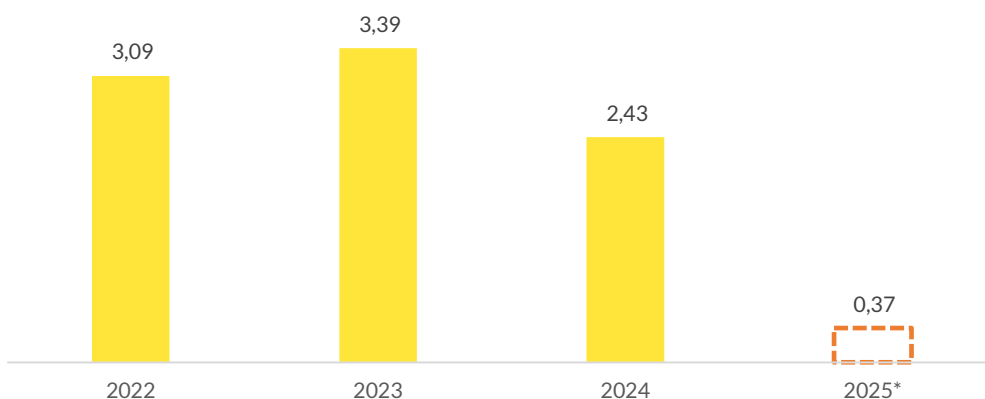
Bendungan Beringin Sila, Nusa Tenggara Barat
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

Bab 4.

Penyediaan air baku merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan air. Selama periode 2020-2024, telah dilaksanakan penambahan kapasitas air baku sebesar 16,00 m³/detik. Pada tahun 2025, ditargetkan tambahan kapasitas air baku sebesar 0,37 m³/detik yang bersumber dari pembangunan prasarana air baku Bendungan Karian, pembangunan penyediaan air baku Lobener

Kabupaten Indramayu, dan pembangunan penyediaan air baku Kotawaringin Barat. Fokus penyediaan air baku pada periode 2025-2029 adalah pemanfaatan bendungan terbangun dan pemenuhan kebutuhan air di lokasi prioritas seperti pulau kecil terluar, daerah 3T dan Perbatasan, kawasan pantura Jawa, kawasan perkotaan, kawasan rawan air, serta kawasan strategis.

Grafik 4.22
Capaian Tambahan Kapasitas Air Baku Tahun 2022-2025 (m³/detik)

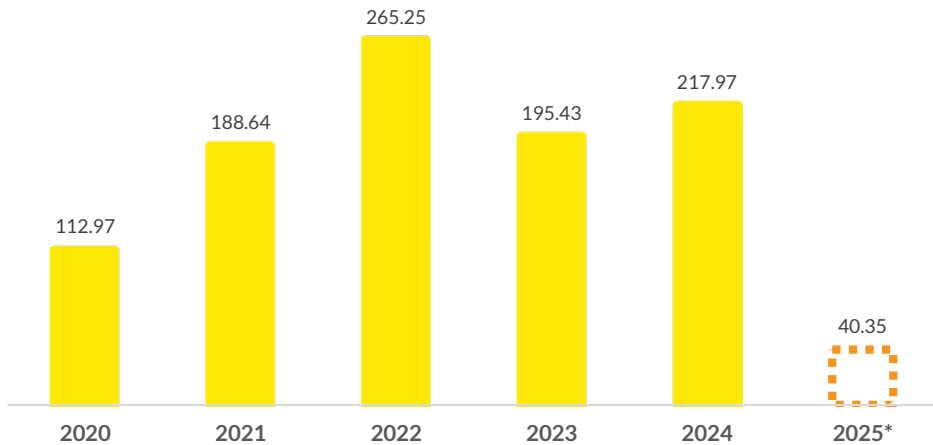


Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2025
Keterangan: *Angka Target

Dalam mendukung swasembada air diperlukan upaya peningkatan konservasi sumber daya air yang bertujuan untuk menjaga kondisi dan fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan kualitas air yang baik untuk memenuhi kebutuhan di berbagai sektor secara berkelanjutan. Salah satu upaya konservasi

sumber daya air dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di lahan kritis, termasuk lahan mineral dan mangrove. Pada tahun 2024, penanaman telah dilaksanakan pada lahan kritis seluas 217.970 ribu ha, serta dibangun 44.000 unit infrastruktur pengendali erosi dan sedimentasi.

Grafik 4.23
Capaian Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2020-2025 (ribu Ha)



Sumber : Kementerian Kehutanan, 2025

Keterangan : *) Capaian RHL mencakup penyediaan bibit dan benih berkualitas yang penanamannya dilaksanakan oleh masyarakat dan stakeholders lainnya; **) *Angka Target.

4.7.2 Tantangan dan Upaya

Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan swasembada air, antara lain: (1) kompleksitas koordinasi dan sinergi antarlembaga berdampak pada pengelolaan sumber daya air; (2) perubahan iklim menjadi tantangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan air; (3) peningkatan aset infrastruktur sumber daya air yang cukup pesat memerlukan penyesuaian komitmen operasi dan pemeliharaan; (4) kolaborasi peran pemerintah pusat dan daerah memiliki ruang yang luas untuk ditingkatkan dalam pengelolaan sumber daya air berkelanjutan; (5) meningkatnya luasan lahan kritis, khususnya di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi kendala dalam mempertahankan ketersediaan air dan debit sungai yang stabil sepanjang tahun; (6) ketersediaan data dan informasi DAS secara terpadu dalam mendukung proses perencanaan berbasis bukti dan evaluasi dampak; dan (7) partisipasi masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan DAS.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, antara lain: (1) forum koordinasi reguler berbasis tema spesifik dalam pengelolaan sumber daya air menjadi sarana strategis untuk memperkuat sinergi dan peran antarlembaga; (2) strategi pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan adaptasi iklim; (3) peningkatan komitmen operasi dan pemeliharaan disesuaikan secara teknis dan kelembagaan menurut karakteristik jenis aset terbangun; (4) fasilitasi kolaborasi peran pemerintah pusat dan daerah dalam forum perencanaan hingga implementasi; (5) meningkatkan upaya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL); (6) mengoptimalkan dan mengintegrasikan kegiatan pengelolaan DAS dari hulu ke hilir; (7) mengoptimalkan data dan informasi untuk perencanaan pengelolaan DAS; dan (8) mengoptimalkan peran forum DAS di tingkat daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

4.8 Ekonomi Digital

4.8.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan sektor ekonomi digital mendorong berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi sektor informal dan telekomunikasi seperti *e-commerce*, *telework*, dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Ekonomi digital bertujuan untuk mendorong transformasi di berbagai sektor strategis guna meningkatkan kualitas layanan digital serta mengakselerasi pengembangan ekosistem digital secara keseluruhan. Percepatan transformasi digital ini juga didukung oleh struktur demografi Indonesia yang didominasi generasi milenial dan generasi Z yang memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan cerdas (*digital savvy*).

Daya saing digital Indonesia semakin meningkat di tataran dunia. Dalam *World Digital Competitiveness Ranking* (WDCR) tahun 2024, Indonesia berada pada peringkat ke-43 dari 67 negara, naik dua peringkat dari posisi ke-45 pada tahun 2023. *World Digital Competitiveness Ranking* mengukur peringkat daya saing digital sebuah negara berdasarkan 3 (tiga) faktor, yaitu *knowledge*, *technology*, dan *future readiness*. Indonesia menempati peringkat satu pada subfaktor *capital* yang merupakan salah satu penilaian pada faktor

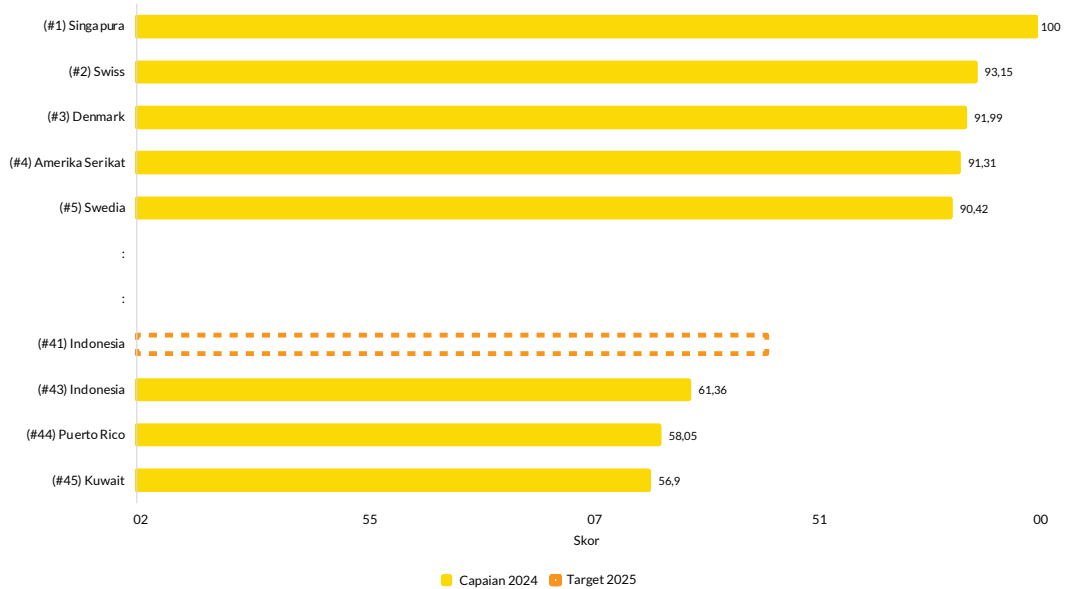
technology. Beberapa aspek yang unggul pada subfaktor tersebut, antara lain aspek perbankan dan layanan keuangan, *venture capital*, dan investasi di bidang telekomunikasi.

Indonesia meraih peringkat yang baik pada subfaktor *talent* yang merupakan salah satu komponen faktor *knowledge*. Hal ini dipengaruhi besarnya jumlah populasi Indonesia terutama pada generasi usia produktif yang didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Namun, capaian ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas dan daya saing dari kapasitas kemampuan digital individu, termasuk dari sisi jumlah lulusan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas talenta digital menjadi sangat penting. Sementara itu, pada subfaktor *scientific concentration* yang juga merupakan komponen faktor *knowledge*, Indonesia masih memerlukan dukungan berupa penguatan pada pendanaan riset serta percepatan adopsi hasil riset dalam penerapannya di sektor industri agar daya saing digital Indonesia dapat meningkat secara menyeluruh.

Adapun beberapa indikator *proxy* yang digunakan untuk mengukur pencapaian ekonomi digital di antaranya adalah indikator sektor informasi dan komunikasi serta jasa keuangan digital.

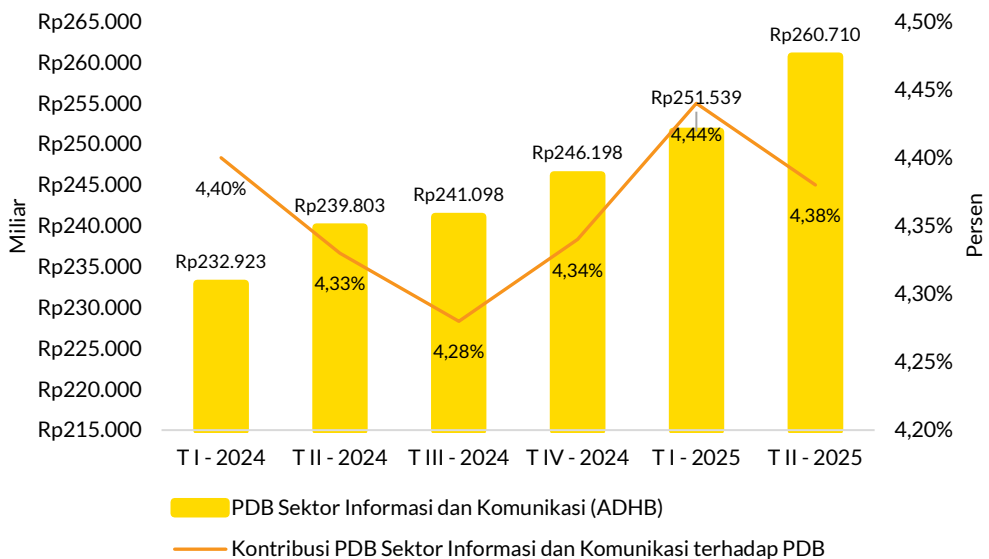


Grafik 4.24
Skor IMD World Digital Competitiveness Tahun 2024-2025



Sumber: Institute for Management Development (IMD), 2024, diolah
 Keterangan: *) *Angka Target

Grafik 4.25
PDB Triwulanan dan Laju Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi ADHB Triwulan I 2024 - Triwulan II 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 diolah

Bab 4.

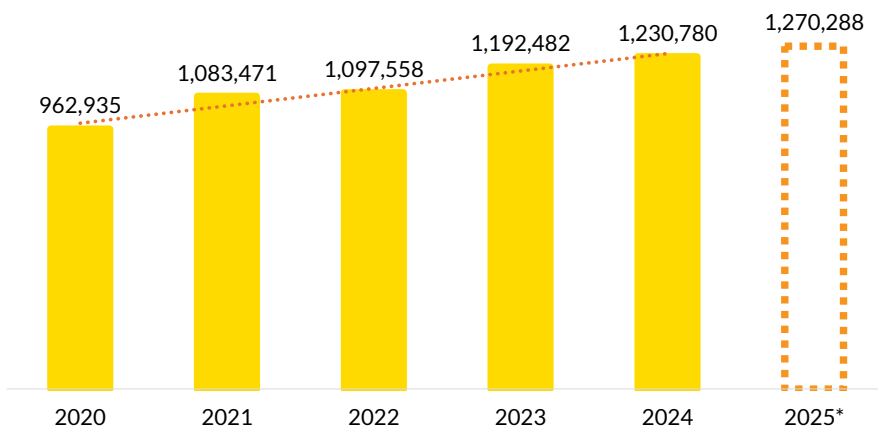
PDB sektor informasi dan komunikasi triwulan I 2024 hingga triwulan I 2025 menunjukkan peningkatan, yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tren adopsi teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) di berbagai sektor, permintaan layanan digital didorong oleh tingginya konsumsi konten, peningkatan investasi di sektor ini didukung dengan penguatan regulasi dalam negeri dan perluasan kerja sama regional di kawasan ASEAN, serta peningkatan infrastruktur digital yang mengakselerasi pertumbuhan pelayanan digital di daerah.

Kontribusi PDB sektor informasi dan komunikasi berfluktuasi pada setiap triwulan selama satu tahun terakhir. Penurunan tersebut disebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global akibat berbagai dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi tersebut berdampak pada perubahan perilaku masyarakat yang cenderung menahan pengeluaran untuk belanja, tingginya volatilitas pada sektor perdagangan daring, serta melambatnya industri digital yang ditandai dengan

terjadinya *tech winter*, yaitu gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor ekonomi digital. Di sisi lain, capaian kontribusi PDB sektor informasi dan komunikasi terakhir pada triwulan I 2025 sebesar 4,4 persen telah melampaui target tahun 2025 yaitu sebesar 4,3 persen.

Pada sektor jasa keuangan digital, penggunaan layanan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) terus mengalami pertumbuhan sejak diresmikan pada 17 Agustus 2019 oleh Bank Indonesia. Per kuartal I 2025, pengguna QRIS tercatat mencapai 56 juta orang dengan nilai transaksi tumbuh signifikan sebesar Rp 262 triliun. Setelah sebelumnya sukses menyepakati kerja sama QRIS antarnegara dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, pemerintah juga akan memperluas pemanfaatan QRIS di Jepang dan China secara resmi pada 17 Agustus 2025. Pengembangan ini ditujukan untuk mempermudah efisiensi transaksi bagi pelaku usaha dan wisatawan Indonesia di luar negeri serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem pembayaran digital global.

Grafik 4.26
Tenaga Kerja Sektor Informasi dan Komunikasi Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah
Keterangan: *) *Angka Target

Jumlah tenaga kerja sektor informasi dan komunikasi di Indonesia mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 ke tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja secara signifikan. Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli dan taraf hidup masyarakat pada sektor informasi dan komunikasi. Pandemi COVID-19 mendorong seluruh sektor untuk bertransformasi digital sebagai konsekuensi adanya pembatasan sosial.

4.8.2 Tantangan dan Upaya

Beberapa tantangan mendasar terkait dengan pengembangan ekonomi digital, antara lain: (1) disparitas kebutuhan industri digital terhadap kualitas dan kuantitas talenta khususnya terkait dengan digitalisasi dan teknologi maju; (2) masih terbukanya ruang untuk meningkatkan maturitas digital yang rendah melalui peningkatan adopsi digital di berbagai sektor strategis; (3) ketelusuran, kemutakhiran, dan integrasi data digital nasional masih terfragmentasi; dan (4) kebutuhan industri digital terhadap regulasi yang adaptif, kolaboratif, dan responsif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah mengupayakan langkah-langkah strategis seperti: (1) program pengembangan talenta dan penguatan alokasi dana riset digital; (2) program holistik untuk mendorong percepatan transformasi industri 4.0; (3) keberlanjutan pengintegrasian data lintas sektor melalui kebijakan Satu Data Indonesia (SDI); dan (4) penyusunan regulasi sektor digital yang adaptif dengan prinsip kolaboratif melalui keterlibatan pelaku industri dan akademisi.

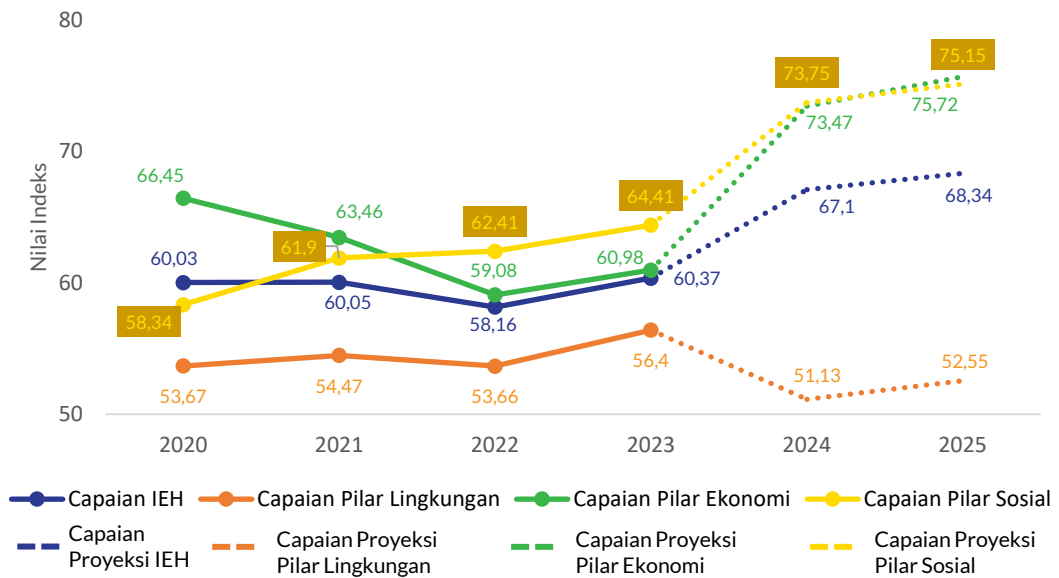
4.9 Ekonomi Hijau

4.9.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk tidak hanya tumbuh tinggi, tetapi juga berkelanjutan. Untuk itu salah satu pendekatan yang dilakukan adalah transformasi ekonomi hijau – peningkatan produktivitas ekonomi hijau yang diimplementasikan melalui Program Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Sirkular, Pembangunan Rendah Karbon, Pengelolaan Hutan Lestari, Tenaga Kerja Hijau, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, serta Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik. Ketercapaian transformasi tersebut diukur melalui capaian Indeks Ekonomi Hijau (IEH), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH).

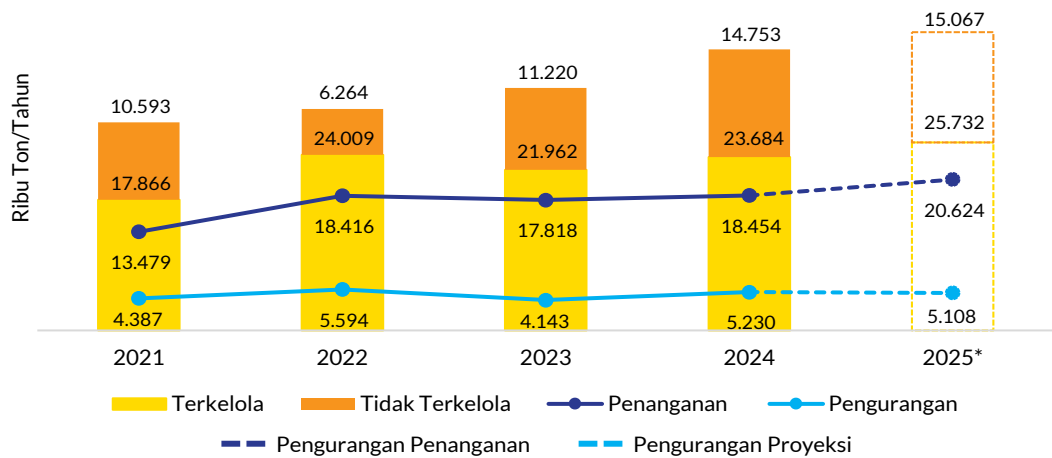
Capaian IEH tidak terlepas dari implementasi Program Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir. Kontribusi signifikan atas capaian ini berasal dari operasionalisasi 18.141 bank sampah, 3.876 Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) yang dalam kapasitas penuh mampu menghasilkan produksi RDF sebesar 1.961,5 ton per hari. Selain itu, capaian ini juga turut didukung oleh upaya penyadartahuan dan perubahan perilaku masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan sampah yang terus diupayakan.

Grafik 4.27
Capaian Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2020-2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Grafik 4.28
Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2021-2025



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 2025, diolah
Keterangan: *) Angka Proyeksi

Mendukung program prioritas Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, pengembangan Ekosistem Ekonomi Sirkular terus diakselerasi. Konsep ekonomi sirkular berfokus pada efisiensi sumber daya dan kandungan daur ulang pada

industri, pengelolaan susut dan sisa pangan, pengembangan produk ramah lingkungan, dan penguatan ekosistem daur ulang pada rantai nilai ekonomi sirkular.

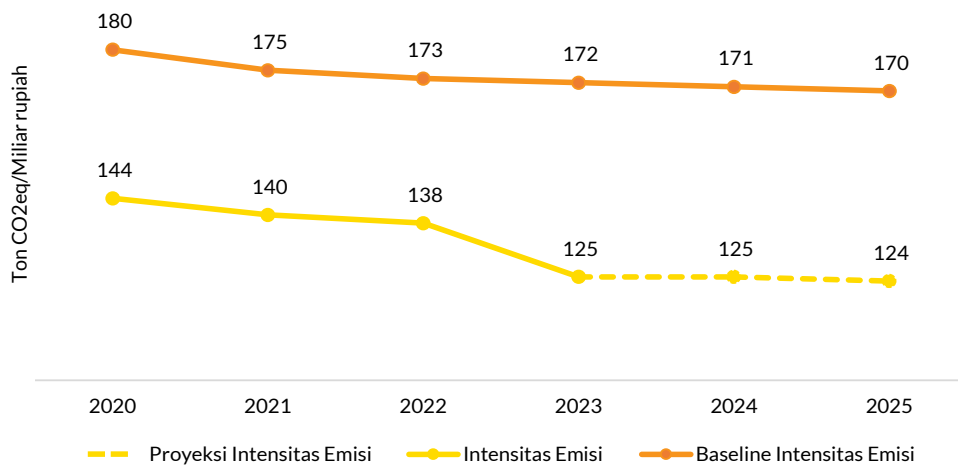


Peningkatan implementasi ekonomi sirkular ditunjukkan salah satunya oleh nilai ekonomi dari pemanfaatan Limbah B3 yang mencapai Rp5,81 triliun pada tahun 2024, sementara hingga semester I 2025 sudah mencapai Rp4,43 triliun. Selain itu, hingga Juli 2025 tercatat sebanyak 151 perusahaan telah memperoleh sertifikasi Standar Industri Hijau (SIH). Hal ini sejalan dengan disusunnya Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular pada tahun 2024, inisiatif ini diharapkan semakin berkembang.

Nilai IEH juga didorong melalui Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Tahun 2023, Indonesia menurunkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 125 ton CO₂e/miliar rupiah, setara dengan 35,62 persen terhadap *baseline*. Capaian ini hasil dari 30.000 lebih aksi mitigasi

yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pencapaian tersebut didukung oleh berlakunya Perpres No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional. Pengendalian ini dilaksanakan melalui penurunan Emisi GRK sektor energi, lahan, karbon biru, pertanian, sampah dan limbah, serta, dekarbonisasi industri. Percepatan pencapaian target ini didukung implementasi perdagangan karbon luar negeri yang telah diluncurkan secara resmi pada Januari 2025 melalui IDX Carbon dan melibatkan beberapa proyek energi strategis. Capaian ini menunjukkan komitmen Indonesia yang kuat dalam mengatasi perubahan iklim dan mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) sesuai dengan komitmen internasional.

Grafik 4.29
Capaian Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahun 2020 - 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Selain itu, sektor kehutanan juga berkontribusi mendukung pertumbuhan ekonomi hijau melalui peningkatan daya dukung daya tampung lingkungan melalui penyerapan

emisi dan menghindari emisi yang timbul dari aktivitas penggunaan lahan. Angka deforestasi neto tahun 2024 tercatat sebesar 175,4 ribu ha, lebih rendah dari rata-rata deforestasi satu dekade terakhir.

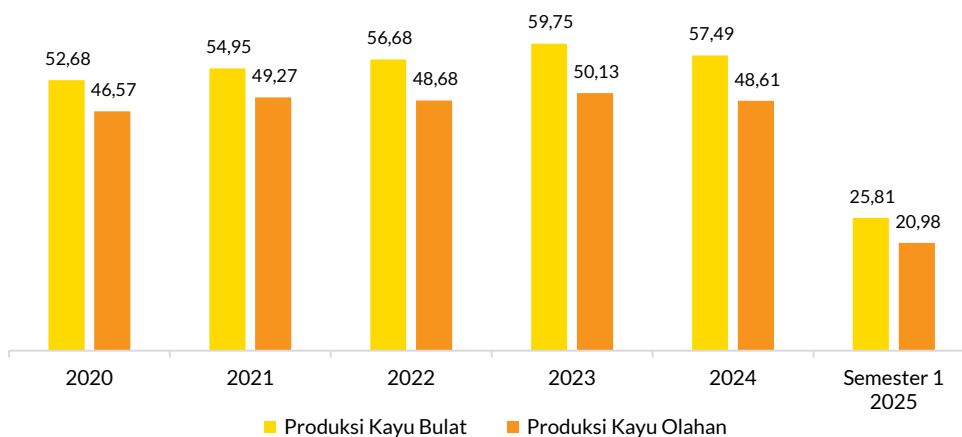
Bab 4.

Sementara itu, Indonesia menunjukkan capaian dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan tren penurunan yang signifikan dari 2023 sampai pertengahan 2025. Untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan akibat musim kemarau di semester kedua 2025, pemerintah menyiapkan langkah cepat dan terukur melalui kolaborasi multipihak melakukan intervensi lapangan dalam merespons kebakaran hutan melalui penguatan sistem komando darurat, percepatan mobilisasi sumber daya pemadaman, pemantauan/deteksi intensif terhadap titik panas, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara dan darat, serta pembasahan lahan gambut. Selain itu, pelibatan aktif masyarakat terus diperkuat melalui pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Selanjutnya, sektor kehutanan berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi

hijau melalui Program Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Indikator PHL diukur dari nilai pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan yaitu peningkatan produktivitas hasil hutan serta pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem. Hingga 2024, nilai PDB sektor Kehutanan tercatat mencapai Rp129,57 triliun. Perhitungan ini mencakup kegiatan pengelolaan hutan, pemanenan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu, dan jasa penunjang kehutanan. Hingga Juni 2025, produksi hasil hutan kayu mencapai 25,81 juta m³ dan hasil hutan bukan kayu sebesar 251.560 ton serta nilai ekspor sebesar 12,74 miliar USD. Pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan penggunaan kawasan menghasilkan PNBPN sebesar Rp8,13 triliun pada 2024. Selain itu, kelompok usaha perhutanan sosial dan kelompok tani hutan berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi desa, dengan nilai transaksi ekonomi mencapai Rp3,4 triliun di tahun 2024.

Grafik 4.30
Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan Tahun 2020 - Semester I 2025



Sumber: Kementerian Kehutanan, 2025, diolah

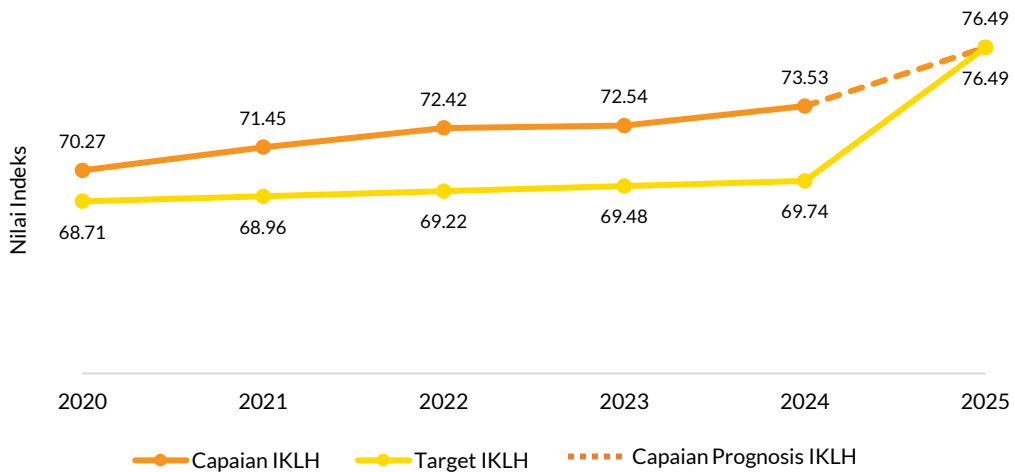


Lebih lanjut, pekerjaan hijau mendukung keberhasilan penerapan ekonomi hijau dengan mendorong penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan dengan tetap memenuhi kriteria kerja layak. Pada 2023, tercatat jumlah tenaga kerja hijau di Indonesia mencapai 3,66 juta orang atau sekitar 2,62 persen dari total tenaga kerja 139,85 juta. Sebagai langkah implementatif, pada April 2025 Peta Jalan Pengembangan Tenaga Kerja Hijau Indonesia telah diterbitkan untuk menjadi pedoman strategis bagi pemangku kepentingan dalam bersinergi menyiapkan tenaga kerja hijau yang produktif dan kompeten.

Implementasi Ekonomi Hijau turut diukur dengan IKLH. Pada tahun 2024, nilai IKLH mencapai 73,53 poin meningkat 0,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian

ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten serta melampaui target yang telah ditetapkan dalam Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Selain itu, cakupan provinsi yang memperoleh predikat “baik” dalam penilaian IKLH juga terus meluas mencapai 33 provinsi. Capaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya pengendalian pencemaran, antara lain pembangunan 225 fasilitas pengendalian pencemaran air, pemulihan fungsi ekosistem di 12 kawasan pesisir dan laut, pemulihan 6.030 ha kawasan hidrologi gambut yang terdegradasi, pemulihan 150,43 ha lahan rusak, serta tercapainya 3.245 usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian tersebut.

Grafik 4.31
Capaian IKLH Tahun 2020 - 2025



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2024, diolah

Pemerintah juga terus mendorong Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik

sebagai bagian dari penerapan Ekonomi Hijau. Komitmen ini tecermin dalam peningkatan target IPKH pada tahun 2025 menjadi

Bab 4.

0,44, dari capaian sebesar 0,35 pada tahun 2020. Target tersebut direncanakan dicapai melalui implementasi *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2025–2045 yang telah diterbitkan pada tahun 2024. Langkah-langkah strategis yang mulai diimplementasikan pada 2025 mencakup (1) perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta area bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (2) pengurangan status keterancamannya spesies tumbuhan, satwa dan biota perairan; (3) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (4) pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi; serta (5) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.

4.9.2 Tantangan dan Upaya

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Transformasi Ekonomi Hijau antara lain: (1) sektor industri penggerak ekonomi masih didominasi oleh sektor-sektor intensif karbon; (2) komposisi penyediaan listrik nasional masih didominasi penggunaan energi fosil, khususnya batu bara; (3) sistem pengelolaan dan pemilahan sampah yang bersumber dari rumah tangga masih mengandalkan pola kumpul–angkut–buang dan *open dumping* di TPA; (4) variasi tingkat pelaporan aksi PRK antardaerah; (5) pengawasan serta penanganan pengelolaan kualitas lingkungan hidup memerlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi antarsektor; (6) ketersediaan infrastruktur dan teknologi pengelolaan sampah dan limbah masih beragam; (7) produktivitas

hutan dipengaruhi oleh tingkat investasi serta penerapan teknologi dan inovasi masih memerlukan dukungan kebijakan dan sumber daya; (8) ekosistem pekerjaan hijau belum berkembang optimal ditunjukkan dengan belum koherennya regulasi dan minimnya investasi hijau; serta (9) pemerataan kompetensi tenaga kerja hijau dari sisi kualitas dan kuantitas.

Upaya penguatan Transformasi Ekonomi Hijau di antaranya: (1) peningkatan efisiensi penggunaan energi fosil yang mengadopsi teknologi tinggi ramah lingkungan dan *retirement* PLTU secara bertahap; (2) peningkatan pemanfaatan energi bersih dan biofuel untuk bahan bakar industri pengolahan dengan pengembangan transportasi ramah lingkungan; (3) pengoptimalan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir; (4) penguatan pelaporan aksi PRK di tingkat daerah serta metodologi perhitungan penurunan emisi GRK; (5) meningkatkan partisipasi antarsektor dalam pemantauan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (6) perlunya memperluas adopsi teknologi daur ulang sampah dan produk yang ramah lingkungan; (7) memperkuat upaya peningkatan investasi pemanfaatan sumber daya hutan, serta penerapan teknologi dan inovasi terutama untuk mendukung terwujudnya bioekonomi di sektor kehutanan; (8) mendukung pengembangan ekosistem pekerjaan hijau melalui penyesuaian regulasi dan mendorong investasi hijau; serta (9) meningkatkan mutu dan jumlah pendidikan serta pelatihan keterampilan hijau untuk mempersiapkan tenaga kerja hijau yang kompeten dalam menghadapi transisi ekonomi hijau.

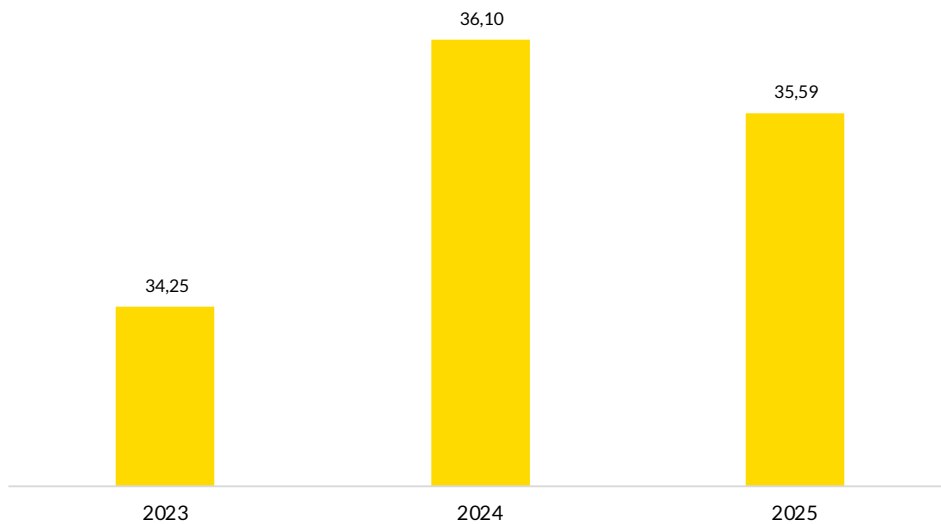
4.10 Ekonomi Biru

4.10.1 Capaian Utama Pembangunan

Ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut secara optimal tanpa merusak ekosistemnya yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan pangan sekaligus menjaga laut sebagai aset jangka panjang. Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber pertumbuhan baru menjadi salah satu prioritas pembangunan yang telah menunjukkan kinerja positif dan menjadi fondasi arah pembangunan jangka panjang ke depan.

Capaian Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) sebagai indikator utama untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi biru nasional selama tahun 2023 hingga 2025. Terdapat peningkatan pada nilai IBEI, dari 34,25 pada tahun 2023 menjadi 35,59 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan hasil positif dari implementasi program yang berfokus pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, penguatan konservasi ekosistem pesisir dan laut, serta integrasi aspek ekonomi sosial dan lingkungan dalam pembangunan wilayah pesisir. Hal ini juga menjadi indikasi bahwa arah kebijakan dan intervensi pembangunan di sektor kelautan telah mendorong pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Grafik 4.32
Capaian Kinerja Utama Ekonomi Biru Tahun 2023-2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Sebaran skor IBEI 2025 berdasarkan provinsi memperlihatkan kecenderungan geografis tertentu. Wilayah dengan kinerja tinggi (ditandai warna biru tua) umumnya terpusat

di kawasan tengah dan timur Indonesia, terutama di Pulau Sulawesi, Jawa, serta Kepulauan Maluku. Sementara itu, daerah dengan skor lebih rendah (berwarna jingga)

Bab 4.

tampak terkumpul di Kalimantan, Papua, dan beberapa bagian daratan Sumatera. Pola ini mencerminkan adanya ketimpangan

dalam tingkat perkembangan dan tantangan yang dihadapi masing-masing wilayah dalam menerapkan konsep ekonomi biru..

Gambar 4.2
Peta Sebaran Skor Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Laju pertumbuhan PDB perikanan pada 2024 meningkat dari 0,68 persen menjadi 2,25 persen (yoy), sejalan dengan total produksi perikanan dari 13,77 juta ton (2023) menjadi 24,57 juta ton (2024). Produksi ikan budidaya naik ke 10,24 juta ton, sedangkan rumput laut mencapai 8,01 juta ton, menguatkan Indonesia sebagai produsen skala global terdepan. Meskipun volume tangkapan sempat menurun menjadi 7,39 juta ton, namun beberapa kebijakan seperti zona larang tangkap (zona konservasi), pengawasan aktivitas *illegal fishing*, diupayakan untuk menjaga stok sehingga pendapatan nelayan tetap stabil.

Di sisi hilir, nilai ekspor kelautan-perikanan tumbuh 5,7 persen menjadi US\$5,95 miliar. Selain itu, efek dari industri penunjang seperti pembuatan kapal domestik naik ke 0,98 ribu DWT, reparasi kapal menyentuh 9,5 ribu DWT (Januari–November 2024) dan arus kapal di dermaga umum PT Pelindo meningkat menjadi 152.646 unit. Aktivitas logistik tersebut mendorong pertumbuhan PDB angkutan laut dari 2,42 persen (2024) ke 6,87 persen pada triwulan I 2025 menjadi sebuah lompatan penting bagi konektivitas nusantara.

Tabel 4.3
Capaian Kinerja Utama Ekonomi Biru Aspek Pertumbuhan dan Nilai Tambah
Tahun 2023 – 2025

No	Indikator	Satuan	2023	2024	2025
1	IBEI Pilar Ekonomi		18,04 ¹⁾	25,47 ¹⁾	24,75 ¹⁾
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (ADHK)	%	-	0,68 ²⁾	2,25 ^{*2)}
	Produksi perikanan (Total)	juta ton	13,77 ³⁾	24,57 ³⁾	-
3	a. Produksi Perikanan Tangkap	juta ton	8,17 ³⁾	7,39 ³⁾	-
	b. Produksi Budidaya (ikan)	juta ton	13,77 ³⁾	10,24 ³⁾	-
	c. Produksi Budidaya (Rumput Laut)	juta ton	9,75 ³⁾	8,01 ³⁾	-
4	Volume Produksi Olahan Perikanan	juta ton	3,62 ³⁾	-	-
5	Nilai ekspor kelautan-perikanan	US\$ miliar	5,63 ³⁾	5,95 ³⁾	-
6	Produksi Garam rakyat	juta ton	2,00 ³⁾	2,04 ³⁾	-
7	Produktivitas Lahan Garam Rakyat	ton/ha	83,00 ³⁾	61,40 ³⁾	-
8	Volume Reparasi Kapal	ribu DWT (kumulatif)	9,30 ³⁾	9,50 ³⁾	-
9	Volume Produksi Pembuatan Kapal	ribu DWT (kumulatif)	0,85 ³⁾	0,98 ³⁾	-
10	Arus Kapal Pelindo di Dermaga Umum (GT)	unit	150.437 ⁴⁾	152.646 ⁴⁾	-
11	Pertumbuhan PDB Angkutan Laut	%		2,42 ²⁾	6,87 ^{*2)}

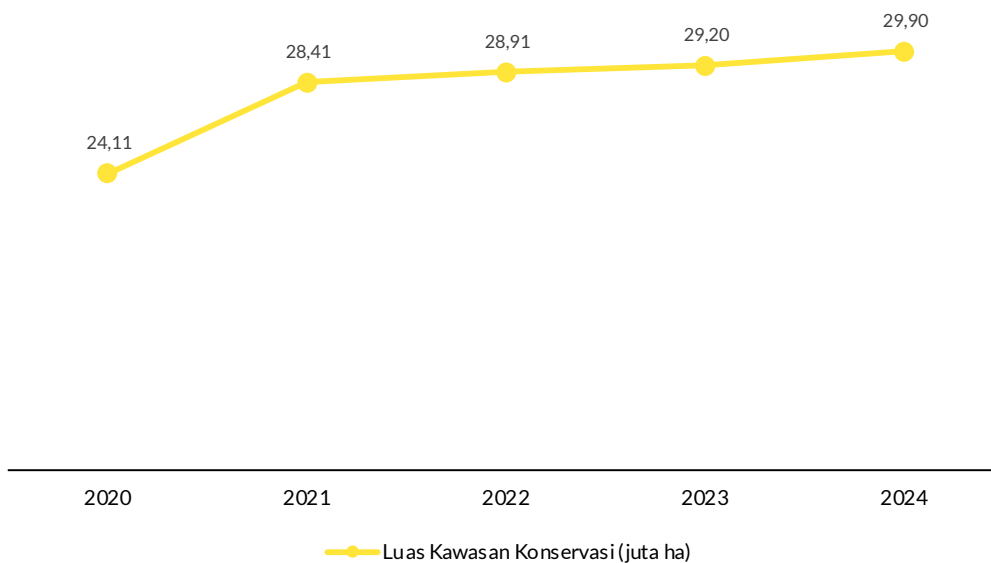
Sumber: 1) Kementerian PPN/Bappenas; 2) Publikasi Laporan Triwulanan Badan Pusat Statistik; 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4) Laporan Tahunan PT Pelindo
Keterangan: *) Triwulan I 2025

Lingkungan - Luas kawasan konservasi meningkat menjadi 29,9 juta ha (2024), kenaikan ini membantu regenerasi stok Ikan Karang dan mendukung target SDGs sebesar 30 persen area konservasi pada 2045. Program *reef rehabilitation* di Raja Ampat, Wakatobi, dan Kepulauan Anambas menggunakan transplantasi karang mikro dan *reef ball* menambah nilai ekowisata dan jasa lingkungan.

Sementara itu, jumlah rencana zonasi pesisir telah diselesaikan sebanyak 32 kawasan (2023) dan 21 kawasan (2024). Target Penyelesaian Penataan Ruang Laut selama

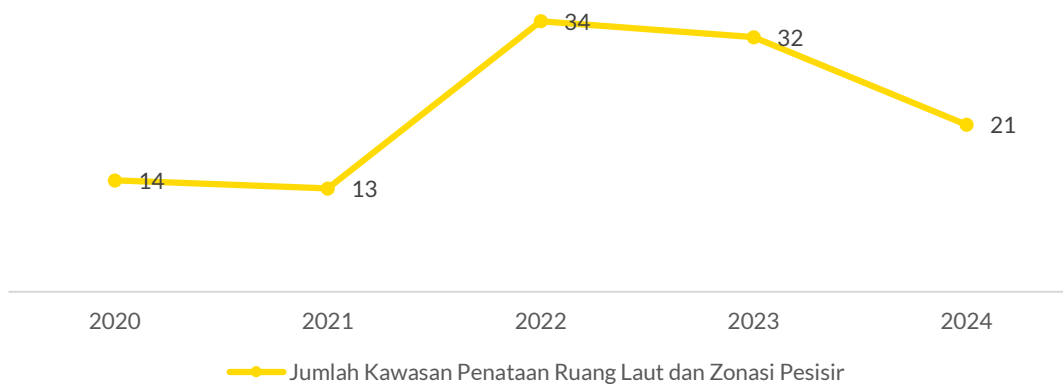
2020-2024 adalah 102 dokumen, sehingga meskipun menurun di 2024, target 5 tahunan sudah tercapai. Penataan ruang pesisir ini untuk memastikan setiap rencana tidak sekadar administratif, melainkan siap pakai bagi investasi energi laut, budidaya lepas pantai, maupun pariwisata berbasis ekowisata. Penataan ruang laut telah terintegrasi ke sistem perizinan *Online Single Submission* (OSS) agar calon investor mengetahui zonasi yang sesuai. Dengan demikian, laju investasi biru dapat dipacu tanpa mengorbankan fungsi ekosistem seperti padang lamun dan hutan mangrove, yang berperan sebagai penyerap karbon strategis.

Grafik 4.33
Luas Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 (juta ha)



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025

Grafik 4.34
Capaian Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2020-2024 (Kawasan)



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025



Tabel 4.4
Capaian Kinerja Utama Ekonomi Biru Aspek Lingkungan Tahun 2023-2025

No	Indikator	Satuan	2023	2024	2025
1	IBEI Pilar Lingkungan	Indeks (basis poin)	25,92 ¹⁾	25,59 ¹⁾	25,59 ¹⁾
2	Kawasan konservasi laut	juta ha	29,20 ²⁾	29,90 ²⁾	-
3	Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	kawasan	32,00 ²⁾	21,00 ²⁾	-
4	Luas Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (kumulatif)	juta ha	28,90 ²⁾	29,20 ²⁾	-

Sumber: 1) Kementerian PPN/Bappenas; 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sosial dan Inklusivitas - Tingkat penyerapan lulusan sekolah kelautan-perikanan (KP) dan program vokasi KP oleh dunia usaha pada tahun 2024 sebesar 75,35 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan kurikulum semakin selaras dengan kebutuhan pasar kerja modern mulai dari *remote-sensing fisheries* hingga *biofloc aquaculture*. Nilai Tukar Nelayan (NTN) menurun pada 2024 seiring kenaikan harga solar, namun *rebound* ke 103,36 (Mei 2025). Sementara itu, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) bertahan pada 101,79 dan Nilai Tukar Petambak Garam meningkat menjadi 103,75.

Rumah tangga perikanan budidaya tercatat 1,36 juta, sementara rumah tangga perikanan tangkap sebesar 1,28 juta. Skala masif ini menjadi fondasi ketahanan pangan sekaligus target Program *Climate-Smart Aquaculture* yang memadukan benih yang tahan penyakit, sensor kualitas air *real-time*, dan asuransi indeks cuaca. Di sisi lain, konsumsi ikan per kapita masyarakat meningkat menjadi 58,91 kg/kapita/tahun. Akses pembiayaan biru juga terus didorong melalui *Credit Guarantee Scheme* dan penerbitan *blue sukuk*. Dengan daya beli yang membaik, kompetensi SDM terangkat, dan jaringan pasar lebih efisien, masyarakat pesisir siap mengambil peran kunci dalam mengawal pertumbuhan ekonomi biru yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 4.5
Capaian Kinerja Utama Ekonomi Biru Aspek Sosial dan Inklusivitas
Tahun 2023-2025

No	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025
1	IBEI Pilar Sosial	Indeks (basis poin)	47,63 ¹⁾	70,52 ¹⁾	69,50 ¹⁾
2	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan KP yang terserap di DUDI	%	74,17 ²⁾	75,35 ²⁾	-
3	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks (2018=100)	105,40 ²⁾	101,76 ²⁾	103,36 ^{*) 2)}
4	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Indeks	104,92 ²⁾	101,79 ²⁾	-
5	Nilai Tukar Petambak Garam	Indeks	103,50 ²⁾	103,75 ²⁾	-
6	Rumah Tangga Perikanan (Budidaya)	rumah tangga	1.366,79 ²⁾	-	-
7	Rumah Tangga Perikanan (Tangkap)	rumah tangga	1.278,98 ²⁾	-	-
8	Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	57,91 ²⁾	58,91 ²⁾	-

Sumber: 1) Kementerian PPN/Bappenas; 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan
Keterangan: *) Publikasi Mei 2025

4.10.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan ekonomi biru yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan menghadapi beberapa tantangan yang perlu direspons secara adaptif, seperti (1) harmonisasi tata kelola; (2) integrasi data sumber daya; (3) pemerataan infrastruktur; (4) optimalisasi efisiensi pembiayaan proyek; (5) dinamika perubahan iklim; (6) peningkatan standar global; dan (7) peningkatan teknologi dan kapasitas SDM.

Merespon tantangan tersebut, peningkatan produktivitas ekonomi biru menjadi bagian penting dari strategi transformasi ekonomi nasional, dengan arah kebijakan difokuskan pada beberapa aspek, yaitu (1) pengembangan teknologi, inovasi, tata kelola, dan praktik berkelanjutan sebagai fondasi utama peningkatan efisiensi dan

daya saing sektor kelautan dan perikanan; (2) modernisasi pelabuhan menuju *green port* dan pembangunan delapan koridor rantai dingin bertenaga surya, yang berperan penting dalam menutup kesenjangan logistik di wilayah pesisir dan kepulauan; (3) pengembangan kluster industri rumput laut di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku, yang diarahkan menjadi pusat hilirisasi berbasis sumber daya lokal, khususnya komoditas rumput laut; (4) peningkatan luas kawasan konservasi dan rehabilitasi ekosistem laut; serta (5) peningkatan kapasitas SDM bidang kelautan, yang mencakup pelatihan tenaga terampil di bidang pengambilan dan pengolahan data kelautan untuk riset dan kebijakan, pengolahan sumber daya laut, energi terbarukan berbasis laut, serta pengelolaan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan laut.

4.11 Kerja Sama Internasional

4.11.1 Capaian Utama Pembangunan

Pada tahun 2024 dan 2025, Indonesia semakin memperkuat posisinya di internasional melalui penyelesaian perundingan, implementasi dari kesepakatan, serta upaya memperluas cakupan kesepakatan yang telah ada untuk mendukung kepentingan nasional, meningkatkan keterlibatan pada rantai pasok global, dan memperkuat pengaruh Indonesia baik secara ekonomi dan politik.



Melalui upaya negosiasi yang telah dilakukan oleh Indonesia, Amerika Serikat menurunkan tarif barang masuk Indonesia menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menyelesaikan negosiasi Indonesia-EU CEPA, menjadi anggota tetap BRICS, dan secara positif berproses dalam akses menjadi anggota OECD.

Secarabilateral, Indonesia telah menyelesaikan perundingan *Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICACEPA)* pada bulan Desember 2024, *Indonesia-Tunisia*

Preferential Trade Agreement (ITPTA) pada bulan Maret 2025, serta *Indonesia-EU CEPA* dan *Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) FTA* pada bulan Juli 2025. Selain itu, terdapat pula perundingan yang masih dalam proses awal negosiasi seperti *Indonesia-Sri Lanka PTA*, serta yang akan memasuki fase *review* kesepakatan pada akhir tahun 2025 yaitu *Indonesia-Australia CEPA*.

Pada lingkup regional, Indonesia terus berperan aktif dalam penyelesaian perundingan *ASEAN-Canada CEPA* yang ditargetkan oleh seluruh negara ASEAN untuk dapat diselesaikan pada tahun 2025. Beberapa perundingan regional yang dalam proses awal negosiasi di antaranya *Indonesia-Gulf Cooperation Council (GCC) CEPA* dan *Indonesia-Mercosur CEPA*. Untuk menjaga relevansi perjanjian dagang yang eksisting, Indonesia turut dalam upaya negosiasi untuk upgrading perjanjian *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*, *ASEAN-China FTA (ACFTA) 3.0*, *ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA)*, dan *ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA)*

Tabel 4.6
Capaian Indikator Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional
Tahun 2020-2025

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah FTA/PTA/CEPA yang ditandatangani	jumlah kesepakatan (per tahun)	3	2	5	4	3	4*
PTA/FTA/CEPA yang disepakati	jumlah kesepakatan (kumulatif)	23	25	34	38	41	45

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2025, diolah

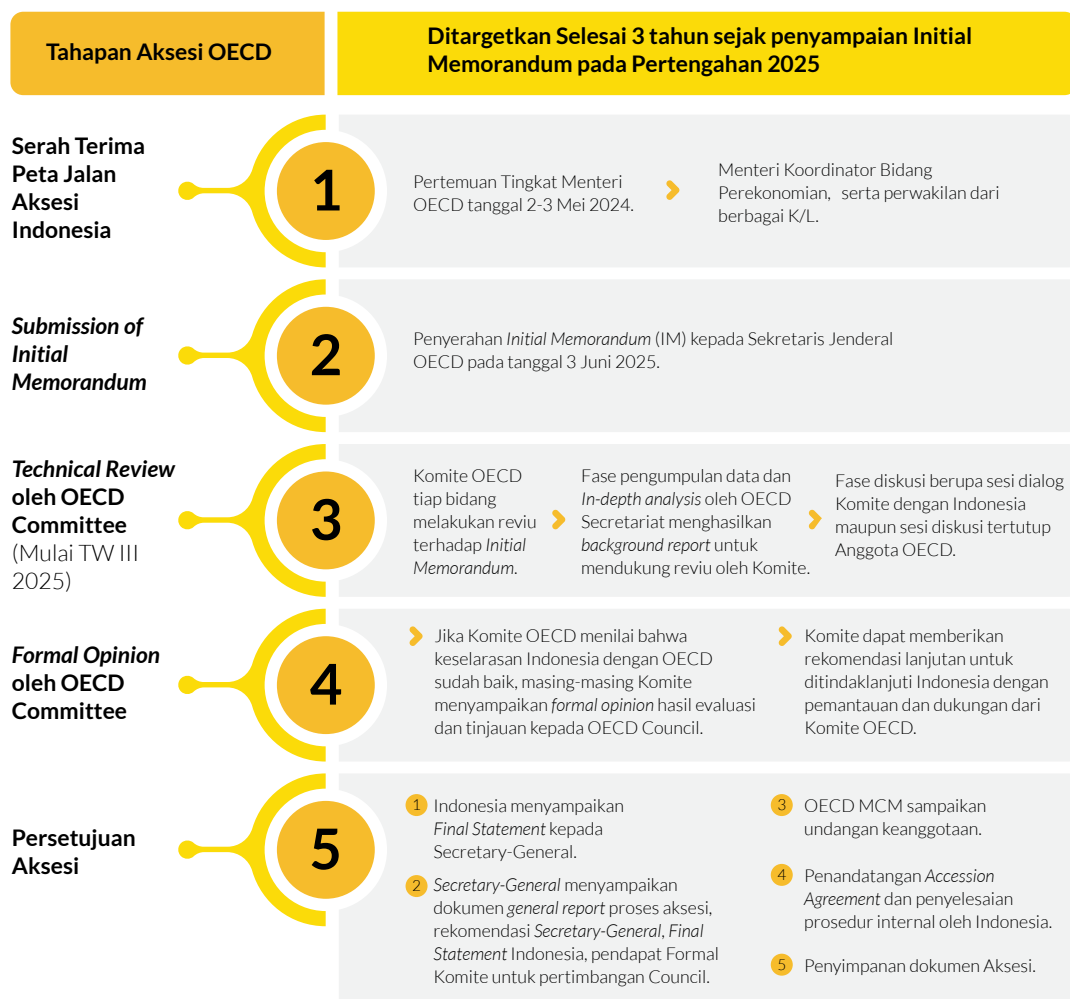
Keterangan: *) Untuk 4 (empat) PTA/FTA/CEPA pada tahun 2025 yaitu ICACEPA, ITPTA, IEAEUFTA, dan IEUCEPA telah selesai dirundingkan dan menunggu proses penandatanganan resmi oleh seluruh Pihak

Bab 4.

Kebijakan luar negeri Indonesia bersifat tidak memihak (*non-alignment*) dan mengusung pendekatan berbasis merit (*merit-based*) yang tecermin dengan keterlibatan aktif Indonesia pada forum regional, bilateral, dan multilateral. Pada tahun 2024 dan 2025, Indonesia berkomitmen mengawal keberlanjutan inisiatif dan komitmen yang dicapai pada keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Selain itu, Indonesia dalam proses menjadi anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dimana saat ini Indonesia telah selesai menyusun dan

menyampaikan *Initial Memorandum* kepada OECD *Secretariat* pada Juni 2025. Proses *technical review* akan dilakukan oleh OECD *Secretariat* pada semester II 2025, termasuk melalui penyampaian kuesioner hingga *fact finding missions*. Proses aksesi Indonesia ke OECD ditargetkan dapat diselesaikan paling cepat tiga tahun sejak proses *technical review*. Indonesia memanfaatkan proses aksesi ke OECD untuk meningkatkan daya saing nasional melalui reformasi birokrasi serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan selama proses tersebut.

Gambar 4.3
Tahapan Aksesi OECD



Posisi Indonesia yang bebas aktif juga diperkuat dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS pada awal tahun 2025. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan bentuk solidaritas dengan negara-negara *Global South* dan komitmen terhadap pembentukan tata kelola global yang lebih adil dan inklusif. Selaras dengan hal tersebut, Indonesia memaksimalkan kerja sama internasional dengan negara-negara anggota BRICS melalui dukungan terhadap reformasi tata kelola global, kolaborasi Selatan-Selatan, serta penguatan perdamaian, transisi energi yang adil dan kemitraan ekonomi strategis.

Indonesia juga telah menyampaikan surat intensi untuk bergabung ke dalam *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) pada 19 September 2024. Keikutsertaan Indonesia di dalam CPTPP ini akan mendorong hubungan dagang Indonesia dengan negara anggota CPTPP, terutama yang belum memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia seperti Meksiko, Peru, dan Britania Raya, serta membuka akses pemasaran produk-produk Indonesia di negara-negara tersebut.

Pada lingkup kerja sama antar pemerintah, Indonesia juga terus membangun kerja sama pada sektor perdagangan, investasi, industri, maritim, pertanian, *critical minerals and metals*, *sustainable forestry*, peningkatan gizi, ekonomi kreatif, ekonomi biru, ekonomi digital, dan *cybersecurity* dengan negara-negara seperti Britania Raya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Korea Selatan, Turkiye, Prancis, dan Uni Emirat Arab, baik dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) maupun bentuk kerja sama lainnya yang ditujukan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Selain itu, kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia ke beberapa negara seperti RRT, AS, Peru, Brasil, Britania Raya, Uni Emirat Arab, dan Mesir pada periode November–Desember 2024, yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Malaysia, India, Uni Emirat Arab, Turkiye, Mesir, Qatar, Yordania, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, Republik Ceko, Rusia, Arab Saudi, dan Brasil selama periode Januari hingga Juli 2025, mencerminkan semangat Indonesia dalam merangkul seluruh pihak tanpa memandang ideologi, afiliasi maupun pandangan politik.



Kunjungan Kerja Presiden Prabowo Subianto ke Turkiye
Sumber : Kementerian Sekretariat Negara

“

Presiden Prabowo Subianto:
"Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak."



Kunjungan Kerja Luar Negeri Presiden Prabowo ke Republik Rakyat Tiongkok
Sumber : Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden



4.11.2 Tantangan dan Upaya

Kerjasama internasional merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat pengaruh dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, serta meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai dan rantai pasok global. Berbagai tantangan internal maupun eksternal yang perlu menjadi perhatian, antara lain: (1) potensi pengaruh geopolitik dan geoekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi internal ekonomi dan pembangunan, serta kebijakan luar negeri Indonesia di bidang politik dan keamanan; (2) daya saing ekonomi nasional Indonesia yang perlu ditingkatkan untuk mengejar *peers* di BRICS, OECD, dan CPTPP; (3) munculnya proteksionisme global, seperti penerapan *friend-shoring*, *nearshoring*, dan tarif resiprokal, yang mendisrupsi stabilitas ekonomi internasional; serta (4) kapasitas mitigasi terhadap berbagai risiko internasional yang semakin dinamis akibat kekuatan utama global.

Adapun upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan di atas adalah (1) sinkronisasi diplomasi politik dan diplomasi ekonomi ke kawasan yang tengah berkembang pesat di Asia, Eropa Timur, dan Afrika; (2) peningkatan pemanfaatan kerjasama dan pengawalan kepentingan nasional terutama pada investasi berteknologi tinggi dan hilirisasi; (3) *upgrading* perjanjian dagang eksisting agar sesuai dengan perkembangan global dan prioritas Indonesia saat ini; serta (4) peningkatan fokus Indonesia pada kerjasama antar negara yang relatif setara dan berpihak pada kesejahteraan negara berkembang.

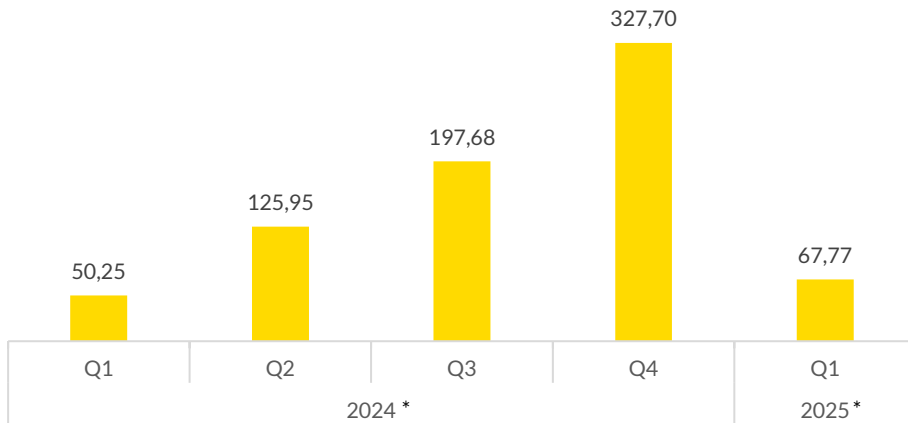
4.12 Badan Usaha Milik Negara

4.12.1 Capaian Utama Pembangunan

Tahun 2025 merupakan momentum penting dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seiring disahkannya UU No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini menjadi dasar hukum dalam pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain. Pembentukan BPI Danantara diharapkan dapat meningkatkan produktivitas BUMN untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, kinerja BUMN terus mengalami peningkatan. Pada triwulan I 2025, investasi BUMN mencapai Rp67,77 triliun, naik sebesar 34,87 persen dari investasi pada triwulan I 2024 yang mencapai Rp50,25 triliun. Investasi BUMN difokuskan pada prioritas pembangunan yang mencakup ekonomi berkelanjutan, ketersediaan pangan, swasembada energi, transformasi digital termasuk dukungan pengembangan super platform digital, infrastruktur pendukung konektivitas, pariwisata dan budaya, serta pembiayaan sektor strategis.

Grafik 4.35
Investasi BUMN (Triliun Rupiah)
Tahun 2024-2025

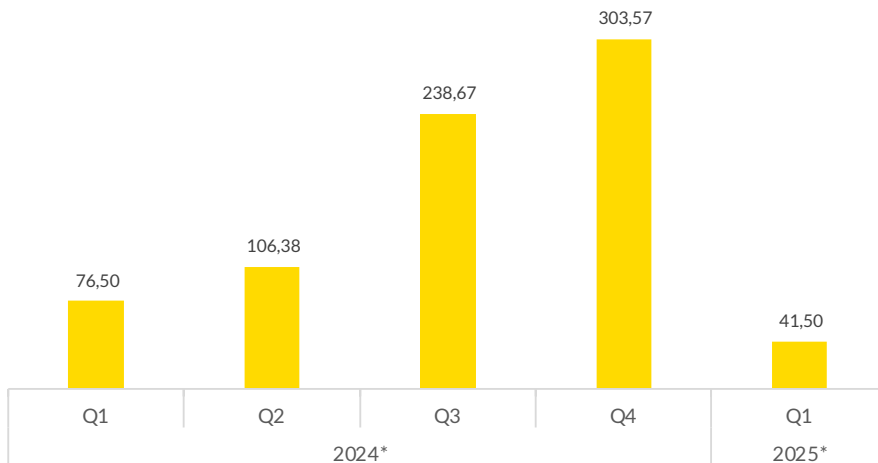


Sumber: Kementerian BUMN, 2025
 Keterangan: *) Data sementara

Dari sisi laba, BUMN mencatatkan laba bersih sebesar Rp41,50 triliun pada triwulan I 2025. Capaian ini mencerminkan kinerja yang cukup positif di tengah dinamika ekonomi global. BUMN terus menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan kinerjanya melalui berbagai kebijakan strategis seperti restrukturisasi,

pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi penggunaan infrastruktur digital. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan laba bersih BUMN dapat terus tumbuh hingga akhir tahun 2025.

Grafik 4.36
Laba Bersih BUMN (Triliun Rupiah)
Tahun 2024-2025



Sumber: Kementerian BUMN, 2025
 Keterangan: *) Data sementara

4.12.2 Tantangan dan Upaya

Dalam menjalankan perannya, BUMN menghadapi beberapa tantangan, di antaranya: (1) koordinasi antar pemangku kepentingan seiring dengan penyesuaian kebijakan dan regulasi pengelolaan BUMN; (2) daya saing BUMN di kancah internasional; dan (3) optimalisasi pengelolaan penugasan BUMN.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN antara lain: (1) sinergi antar *stakeholder* terkait perlu diperkuat agar pengelolaan BUMN selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional; (2) peningkatan daya saing BUMN melalui pengembangan inovasi, restrukturisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan infrastruktur digital, dan penguatan peran BUMN pada program strategis pembangunan; dan (3) peningkatan efisiensi peran BUMN dalam penugasan pemerintah melalui efisiensi pada program perintis dan penguatan peran dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).

4.13 Pertahanan dan Keamanan

4.13.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan serta melindungi keselamatan warga negara yang pelaksanaannya ditujukan untuk mewujudkan rasa aman di dalam diri masyarakat serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Capaian pembangunan tersebut didukung oleh serangkaian kebijakan, antara lain pembangunan postur pertahanan melalui modernisasi, pemeliharaan, dan perawatan alutsista yang melibatkan industri pertahanan dalam negeri, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan peningkatan pelayanan kepolisian yang profesional, pengembangan peralatan dan kapasitas *Computer Emergency Response Team* (CERT) serta penguatan infrastruktur dan jaringan yang dibarengi dengan peningkatan kapabilitas SDM Siber, sinergi pemerintah pusat dalam melaksanakan Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia untuk mengamankan Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, serta mengintensifkan pengimplementasian Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Tabel 4.7
Capaian Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Tahun 2024-2025

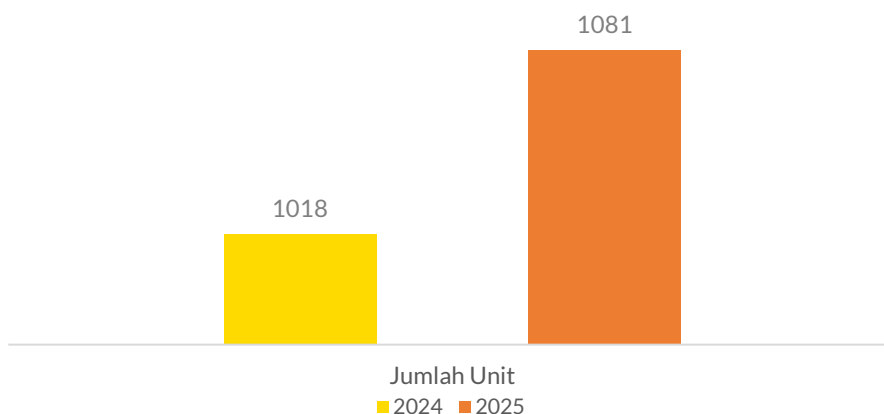
No	Indikator	Satuan	2024	2025
1	Asia Power Index (Military Capability)	nilai	15,70	16 ^{c)}
2	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	62,60 ^{a)}	62,60 ^{a)}
3	Global Cybersecurity Index	nilai	100	100
4	Indeks Keamanan Laut Nasional	nilai	59	60 ^{c)}
5	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	poin	1,73 ^{b)}	1,70 ^{c)}

Sumber: 1) Lowy Institute; 2) BPS; 3) *International Telecommunication Union (ITU)*; 4) Bakamla; 5) BNN
Keterangan: a) Capaian Tahun 2020; b) Capaian Tahun 2023; c) Target 2025

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan bidang pertahanan terlihat dari komitmen yang diberikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme prajurit melalui penyediaan rumah dinas bagi prajurit.

Pada tahun 2024, jumlah rumah dinas yang terbangun mencapai 1.018 unit dan pada tahun 2025 jumlah rumah dinas yang terbangun ditargetkan untuk meningkat, yaitu sebanyak 1.081 unit.

Grafik 4.37
Pembangunan Rumah Prajurit Tahun 2024-2025



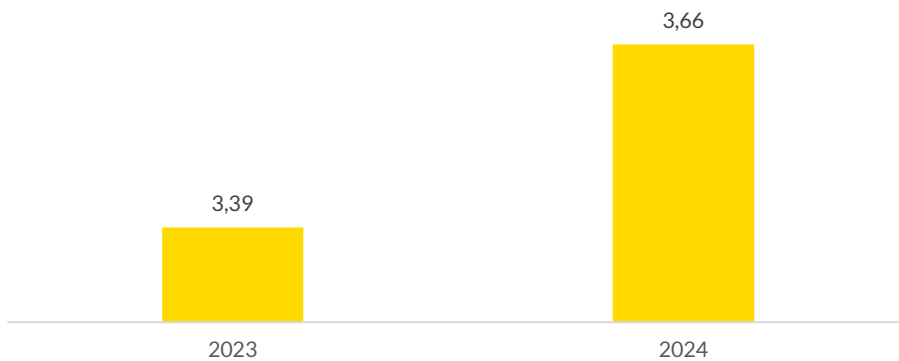
Sumber: Kementerian Pertahanan, 2025, diolah



Pada bidang keamanan, langkah pemerintah untuk meningkatkan Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memelihara keamanan dan ketertiban serta melaksanakan penegakan hukum yang tertuang dalam Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Indeks

Kamtibmas). Peningkatan kemampuan APH sejalan dengan capaian Indeks Kamtibmas dari 3,39 pada tahun 2023 menjadi 3,66 pada tahun 2024. Peningkatan kemampuan APH, juga diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan APH yang terlihat dari peningkatan Persentase Pelayanan Publik Polri yang Prima dari 3,96 persen menjadi 4,61 persen di tahun 2024.

Grafik 4.38
Capaian Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2023-2024

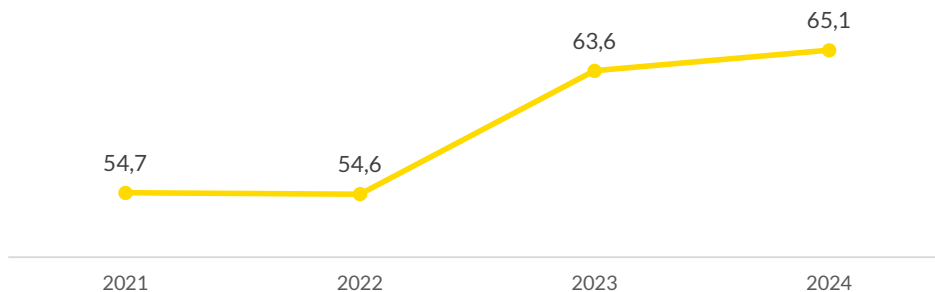


Sumber: Polri, 2024

Pembangunan di bidang keamanan turut dilakukan melalui pengentasan permasalahan narkoba yang dituangkan dalam angka prevalensi penyalahgunaan narkoba. Penurunan angka prevalensi penyalahgunaan

narkoba didukung dengan penguatan penyelenggaraan P4GN yang capaiannya menunjukkan kecenderungan meningkat dalam lima tahun terakhir

Grafik 4.39
Capaian Indeks P4GN Tahun 2021-2024

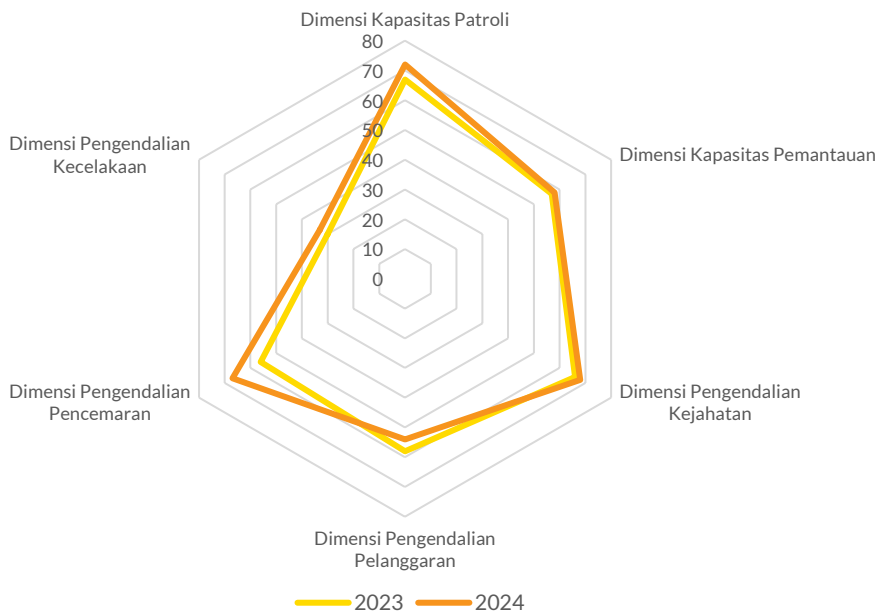


Sumber: Badan Narkotika Nasional, 2024

Bab 4.

Pada bidang keamanan laut, pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam mengamankan Wilayah Laut Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia melalui penetapan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang mengukur keamanan Wilayah Laut Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dari berbagai dimensi.

Grafik 4.40
Capaian IKLN Tahun 2023-2024



Sumber: Badan Keamanan Laut, 2024

Peningkatan capaian pada dimensi IKLN mengindikasikan bahwa kondisi keamanan di Wilayah Laut Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia semakin terkendali. Guna mendukung capaian tersebut, pemerintah Indonesia telah memperkuat pertukaran informasi melalui forum *daily brief* dan pengintegrasian sistem informasi keamanan laut antar Kementerian/Lembaga. Selain itu juga dilakukan pelibatan masyarakat secara aktif melalui pembentukan 1.200 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan pembentukan Relawan Penjaga Nusantara (Rapala) di empat daerah.

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan keamanan siber ditunjukkan melalui capaian *Global Cybersecurity Index (GCI)* yang menempatkan Indonesia pada *tier 1*, yaitu negara dengan capaian GCI 95-100 dengan kategori *role-modelling*. Peningkatan keamanan siber turut didukung dengan peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi melalui Pembentukan *Cyber Security Insiden Response Team (CSIRT)*, peningkatan Kematangan Keamanan Siber Penyelenggara Sistem Elektronik, dan penyusunan rekomendasi kebijakan petajalan perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) pada berbagai sektor yang meliputi pertahanan, keuangan, TIK dan transportasi, serta ESDM dan pangan.

4.13.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dihadapkan pada berbagai tantangan, yaitu (1) kondisi geopolitik global yang berdampak pada terbatasnya alutsista yang dapat diakuisisi; (2) luasnya wilayah perairan yang mencakup 63 persen total wilayah laut Indonesia; (3) berkembangnya bentuk dan jenis kejahatan; (4) tingginya jumlah pengguna narkoba yang berulang; dan (5) perkembangan teknologi yang begitu pesat dan ancaman siber yang tidak dapat terprediksi.

Dalam rangka menjawab tantangan dalam pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, beberapa upaya yang diambil pemerintah Indonesia meliputi (1) peningkatan kemandirian pertahanan melalui skema *spend to invest* dalam akuisisi alutsista dari luar negeri serta penelitian dan pengembangan alpalhankam oleh industri pertahanan dalam negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan; (2) penguatan sinergi pemerintah pusat dalam mengamankan Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; (3) peningkatan kompetensi APH dan peningkatan atas pemanfaatan data dan teknologi dalam menangani gangguan dan/atau kejahatan guna memperkuat dan meningkatkan kualitas proses bisnis layanan kepolisian; (4) peningkatan kualitas rehabilitasi; dan (5) peningkatan kapabilitas tata kelola siber serta peningkatan kualitas SDM siber guna mengantisipasi ancaman yang ada.

4.14 Ekonomi Syariah

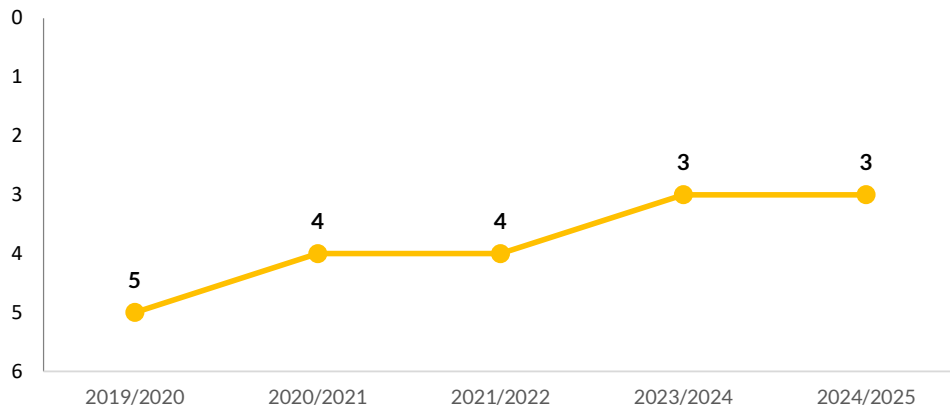
4.14.1 Capaian Utama Pembangunan

Indonesia berhasil mempertahankan posisi ketiga dunia dalam Global Islamic Economy Index (GIEI) untuk periode 2024-2025. Publikasi GIEI dalam *The State of Global Islamic Economy Report* (SGIER) menggambarkan posisi berbagai negara dalam pengembangan ekonomi syariah, meliputi sektor makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, media dan rekreasi berbasis syariah serta sektor keuangan syariah.

Capaian ini mengindikasikan masih stabilnya berbagai upaya multipihak dan kolaborasi lintas sektor di Indonesia dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi syariah dan meningkatkan kontribusinya bagi perekonomian nasional. Jika dilihat secara sektoral, capaian ini salah satunya didukung oleh capaian industri fesyen muslim (*modest fashion*) Indonesia yang berhasil meningkatkan peringkatnya dari posisi ketiga pada 2023-2024 menjadi posisi pertama dunia pada 2024-2025. Indonesia terus berupaya menjadi pusat fesyen muslim dunia, dengan menyelenggarakan berbagai pameran lokal dan internasional seperti Jakarta Muslim Fashion Week 2025 yang berhasil mengamankan potensi transaksi senilai US\$20,40 juta dengan partisipasi 239 merek dan lebih dari 1.000 koleksi. Indonesia juga memperkenalkan berbagai inisiatif seperti Indonesia Global Halal Fashion, yang bertujuan untuk memosisikan Indonesia sebagai pusat mode halal global. Inisiatif ini mempromosikan tekstil halal bersertifikat serta memamerkan fesyen muslim dan kain tradisional seperti Batik, Ikat dan Songket karya desainer Indonesia di acara-acara internasional.

Grafik 4.41

Peringkat Indonesia dalam Global Islamic Economy Index (GIEI) Tahun 2019-2025



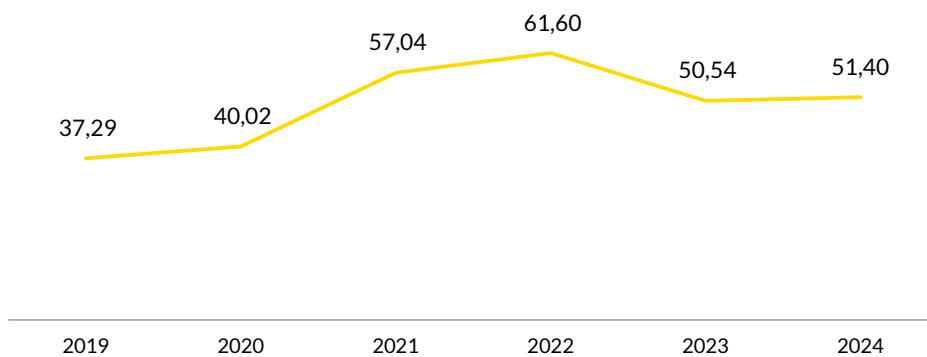
Sumber: State Global Islamic Economy Report (SGIER), 2024/2025

Dari sisi sektor riil domestik, perkembangan positif ekonomi syariah salah satunya tecermin dari tumbuhnya nilai ekspor produk halal Indonesia ke berbagai negara di dunia menjadi senilai US\$51,40 Miliar pada tahun 2024, tumbuh 1,70 persen (yoy). Capaian

ini didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem halal, termasuk penguatan industri halal dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) halal di berbagai wilayah di Indonesia.

Grafik 4.42

Nilai Expor Halal Indonesia (USD Miliar) Tahun 2019-2024



Sumber: Bank Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2024, diolah



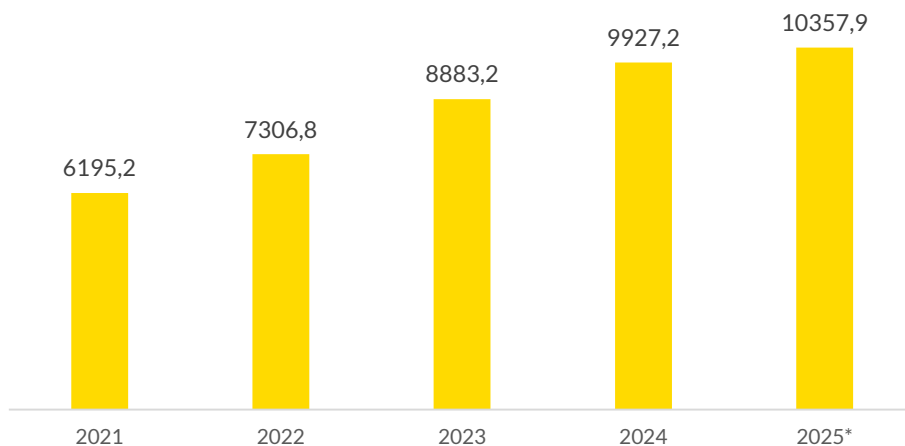
Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah berkolaborasi dengan berbagai *stakeholders* untuk melakukan upaya promosi produk halal baik untuk pasar domestik maupun global, misalnya dengan pelaksanaan Indonesia Halal Industry Award, Halal Indo yang diikuti 202 pelaku industri, serta berbagai kegiatan exhibition dan pameran dagang lainnya. Selain itu, penguatan ekosistem halal juga didukung oleh upaya percepatan penerbitan sertifikasi produk halal, melalui penyediaan kuota sertifikasi halal gratis oleh beberapa K/L dan pelaku pendukung ekosistem halal serta peningkatan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dengan berbagai lembaga halal luar negeri oleh BPJPH.

Secara akumulasi hingga pertengahan awal 2025, jumlah produk yang telah tersertifikasi halal di Indonesia telah mencapai kurang lebih 6,50 juta produk. Pada tahun ini pemerintah juga memfokuskan fasilitasi industri halal yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis melalui pelatihan Penyelia Halal kepada 245 pelaku industri. Produk halal yang tersertifikasi memberikan jaminan kepastian dan keamanan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, sehingga mendorong peningkatan konsumsi yang pada akhirnya berkontribusi bagi perekonomian.

Untuk mendorong terbentuknya Global Halal Hub, pemerintah juga terus mendorong pengembangan Kawasan Industri Halal (KIH). Pada tahun 2025, telah diinisiasi penyusunan kebijakan penyediaan layanan dasar halal di kawasan industri, yang mencakup fasilitasi sertifikasi halal, pasokan air halal, serta layanan lain sesuai standar halal. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing kawasan industri dan mendorong penciptaan rantai pasok halal yang lebih luas di dalam negeri.

Selanjutnya, dari sisi sektor keuangan syariah yang menjadi *enabler* pertumbuhan sektor rill, perkembangan positif tecermin dari peningkatan nilai keseluruhan aset keuangan syariah nasional yang berasal dari sektor perbankan syariah, pasar modal syariah (termasuk saham syariah), dan industri keuangan nonbank syariah, yang meningkat menjadi senilai Rp10.357,9 triliun pada Mei tahun 2025, tumbuh 8,90 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Capaian tersebut didukung oleh berbagai inovasi layanan dan peningkatan digitalisasi oleh berbagai lembaga jasa keuangan syariah.

Grafik 4.43
Perkembangan Aset Keuangan Syariah Nasional (Rp Triliun) Tahun 2021-2025

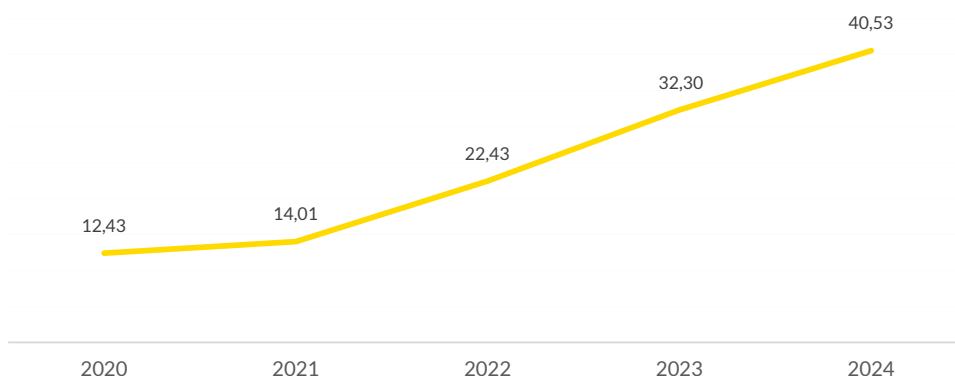


Sumber: OJK, IDX, BPKH dan Kementerian Keuangan, 2025, diolah
 Keterangan: *) Data per Mei 2025

Perkembangan positif ekonomi syariah juga terlihat dari tumbuh positifnya dana sosial syariah, utamanya ZIS-DSKL (Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya) yang pada akhir tahun 2024 mencapai nilai pengumpulan Rp40,53 triliun. Perkembangan

yang positif ini ditopang oleh penguatan tata kelola dan digitalisasi pengelolaan ZIS-DSKL nasional dan peningkatan kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan literasi terkait dana sosial syariah.

Grafik 4.44
Perkembangan Nilai ZIS-DSKL (Rp Triliun) Tahun 2020-2024



Sumber: Baznas, BWI, KNEKS, 2025, diolah
 Keterangan: Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) mencakup berbagai jenis dana sosial syariah selain zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), seperti harta nazar, harta amanah, kurban, fidyah, dan lain-lain



Selain ZIS-DSKL, penguatan dana sosial syariah juga dilakukan melalui pengembangan wakaf baik dengan penguatan tata kelola maupun dengan pengembangan bauran skema wakaf dan keuangan syariah komersil. Sejalan dengan Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029, berbagai inisiatif strategis telah dijalankan oleh pemerintah pusat untuk menjadikan wakaf sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi syariah, di antaranya: (1) inovasi produk *Cash Wakaf Linked Deposit* (CWLD); (2) Gerakan Wakaf Uang; (3) Kota Wakaf; (4) Inkubasi Wakaf Produktif; (5) *Waqf Core Principle*; dan (6) digitalisasi pengelolaan wakaf.

4.14.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan dalam pengembangan dan penguatan sektor ekonomi syariah antara lain (1) optimalisasi pemanfaatan potensi pasar ekonomi syariah global yang besar; (2) peningkatan nilai ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara anggota OKI; (3) akselerasi sertifikasi halal untuk UMKM dan pelaku industri; (4) penguatan kapasitas keuangan syariah dan optimalisasi integrasi pemanfaatan layanan keuangan syariah untuk industri dan UMKM halal; (5) peningkatan tingkat literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah nasional; dan (6) penguatan kelembagaan ekonomi syariah baik di tingkat nasional maupun daerah.

Adapun beberapa upaya ke depan yang dilakukan dalam rangka penguatan dan pengembangan sektor ekonomi syariah, di antaranya yaitu: (1) penguatan industri halal dan UMKM halal untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk halal serta pengembangan pariwisata; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional melalui penguatan kerja sama jaminan produk halal global serta kerja sama dengan berbagai *stakeholder* internasional termasuk dengan negara-negara anggota OKI; (3) penguatan ekosistem halal melalui akselerasi sertifikasi halal dan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pendukung ekosistem halal; (4) penguatan keuangan syariah baik perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah dan pasar modal syariah melalui pengembangan diversifikasi produk, peningkatan literasi dan penguatan digitalisasi layanan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf/ ZISWAF) melalui akselerasi bauran ZISWAF dan keuangan syariah, salah satunya dengan penyempurnaan bentuk kelembagaan dan skema bisnis bank wakaf serta penguatan tata kelola dan literasi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.



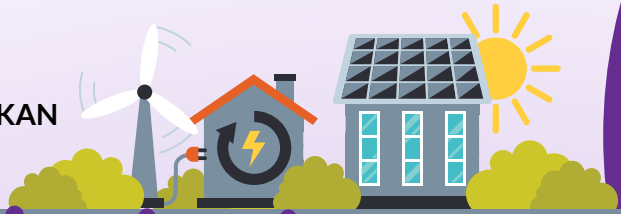
Pelabuhan Patimban
Sumber: Kementerian Perhubungan

BAB 5

ASTA CITA 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

CAPAIAN INDIKATOR SUBSEKTOR INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2022-2025

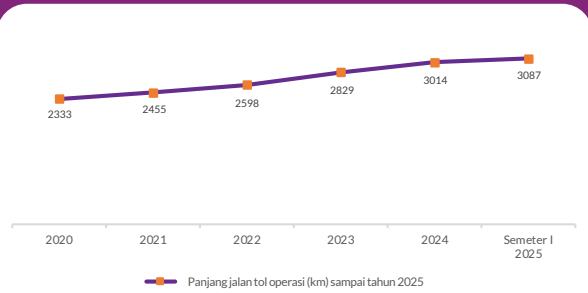


Uraian	Satuan	2022	2023	2024	Semester I	
					2024	2025 ^{a)}
Konsumsi Listrik per Kapita	kWh (kilo watt hour) per kapita	1.173	1.337	1.412	1.373	1.448
Rasio Elektrifikasi	%	99,63	99,79	99,83	99,81	99,83

Sumber: Kementerian ESDM, 2025
Keterangan: a) Outlook s.d. triwulan II 2025

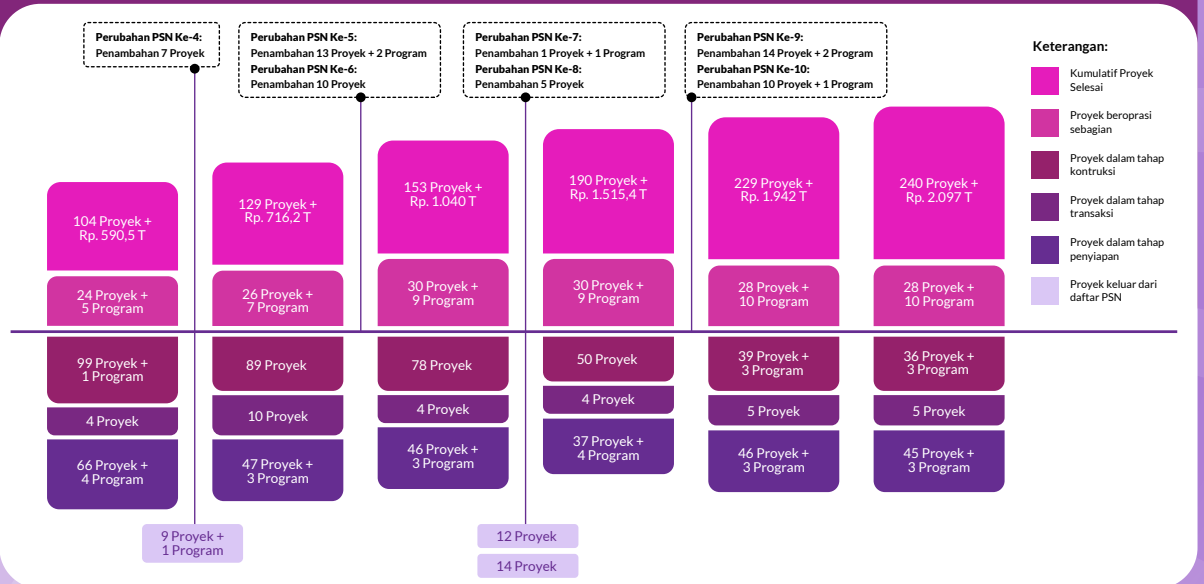


CAPAIAN JALAN TOL BEROPERASI SAMPAI TAHUN 2025



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2025

PERKEMBANGAN CAPAIAN PSN TAHUN 2020-2025



Keterangan:

- Kumulatif Proyek Selesai
- Proyek beroperasi sebagian
- Proyek dalam tahap konstruksi
- Proyek dalam tahap transaksi
- Proyek dalam tahap persiapan
- Proyek keluar dari daftar PSN

BAB 5

ASTA CITA 3

Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi



Pembangunan ekonomi produktif dan inovatif memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi Indonesia menuju negara maju yang berkelanjutan. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, energi dan ketenagalistrikan, serta perumahan dan kawasan permukiman semakin solid mendukung daya saing ekonomi nasional. Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta optimalisasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) mendorong ekosistem ekonomi yang semakin inklusif, berdaya saing global, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

5.1 Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

5.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diarahkan untuk memperkuat kedaulatan digital nasional dan mempercepat pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan peningkatan jangkauan jaringan 4G dan perluasan infrastruktur fiber optik hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan

terluar (3T), termasuk optimalisasi Palapa Ring dan pemanfaatan satelit SATRIA-1 yang mulai beroperasi pada tahun 2024. Selain itu, pemerintah mendorong investasi pengembangan jaringan 5G secara bertahap dan membangun Pusat Data Nasional (PDN) untuk memperkuat keamanan dan kemandirian data.

Tabel 5.1
Capaian Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2024–2025

Uraian	Satuan	2024	2025 ^{a)}
Jumlah Penyediaan BTS (Akumulatif)	desa	6.794	6.747
Cakupan <i>Backbone</i> Darat/Fiberisasi (Akumulatif)	% kecamatan yang terdapat <i>optical distribution point</i> (ODP)	68,48	72,12
Cakupan Palapa Ring	kabupaten/Kota	57	57
Kapasitas SATRIA-1	gbps	150	150
Cakupan Layanan 5G	%	3,50	3,50

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025.

Keterangan: a) capaian semester I 2025.

Pada tahun 2025, terdapat penyesuaian jumlah *Base Transceiver Station* (BTS) oleh pemerintah yang disebabkan terminasi layanan pada sejumlah wilayah yang telah mampu menyediakan jaringan 4G secara mandiri oleh operator seluler. Hal ini menandai kemajuan dalam kemandirian layanan jaringan di berbagai daerah. Secara akumulatif, terdapat 7.300 desa yang menjadi target pembangunan BTS 4G periode 2025–2029 berfokus pada *operational maintenance* infrastruktur yang sudah terbangun, seiring dengan pemerataan akses sinyal 4G di wilayah nonkomersial.

Jaringan fiber optik sepanjang 850.826 km sebagai infrastruktur *backbone* darat berfungsi untuk memperkuat integrasi konektivitas digital dan mempercepat digitalisasi sektor-sektor strategis nasional. Hingga tahun 2025, sebanyak 5.248 kecamatan (72,12 persen dari total 7.230 kecamatan) telah memiliki *Optical Distribution Point* (ODP) dan telah terlayani oleh jaringan fiber optik. Cakupan jaringan ini ditargetkan mencapai 78 persen pada akhir tahun 2025 dan 90 persen pada tahun 2029.

Seiring dengan perluasan infrastruktur tersebut, kualitas layanan telekomunikasi juga meningkat, seperti kecepatan unduh jaringan 4G yang telah mencapai rata-rata lebih dari

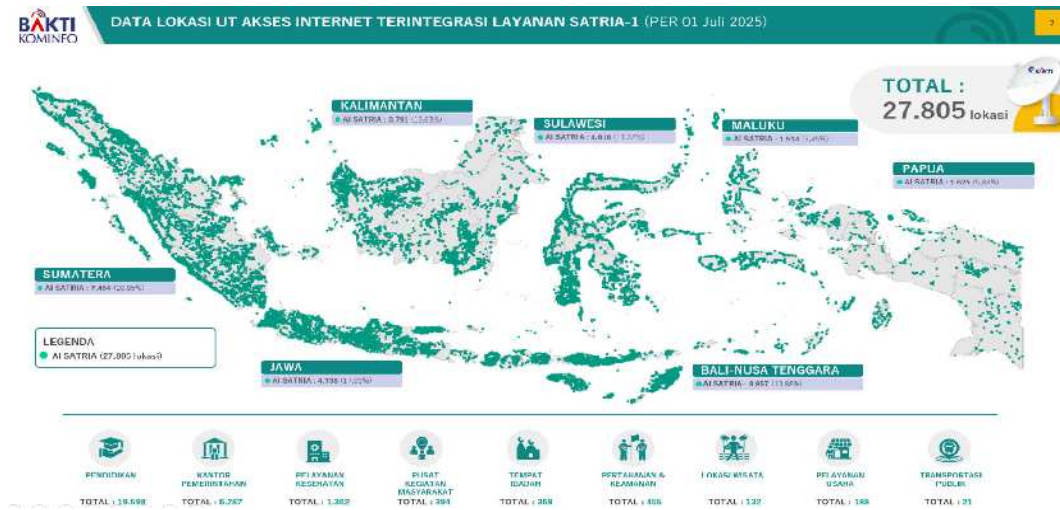
25,60 Mbps pada sejumlah lokasi dengan ketersediaan jaringan lebih dari 98 persen. Hal ini mencerminkan semakin andalnya sistem komunikasi nasional.

Pada tahun 2025, utilisasi mengalami penyesuaian menjadi 68,67 persen secara rata-rata dari Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur, dengan capaian *Service Level Agreement* (SLA) tetap terjaga pada tingkat konsistensi layanan 100 persen di 57 kabupaten/kota. Hal ini mencerminkan konsistensi kualitas layanan yang diberikan seiring dengan utilisasi yang semakin meningkat dan dapat mendorong peningkatan pemanfaatan jaringan, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum terlayani oleh jaringan terestrial, pemerintah telah mengoperasikan satelit SATRIA-1. Pada tahun 2024, satelit ini telah melayani 26.440 lokasi layanan publik, dengan kapasitas *IP Hub* sebesar 150 Gbps dan *IP Transit* sebesar 72 Gbps. Pada tahun 2025, cakupan layanan meningkat menjadi 27.805 lokasi. Hal ini memberikan kontribusi nyata terhadap pemerataan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan berbasis telekomunikasi di wilayah 3T.



Gambar 5.1
Sebaran Lokasi UT Akses Internet yang Terintegrasi Layanan SATRIA-1 per 1 Juli 2025



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025.

Dari sisi pemanfaatan teknologi, layanan 5G di Indonesia pada tahun 2025 mencakup 62 kabupaten/kota dengan luas wilayah permukiman sebesar 1.611,84 km² atau setara dengan 3,50 persen. Capaian ini menunjukkan potensi yang besar untuk ekspansi jaringan 5G di masa mendatang dengan target peningkatan cakupan menjadi 4,44 persen pada tahun 2025 dan 7,00 persen pada tahun 2029. Perluasan ini diarahkan untuk mendukung pengembangan industri 4.0, kota cerdas (*smart city*), serta penyelenggaraan layanan publik yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis teknologi digital.

Sejalan dengan pengembangan jaringan telekomunikasi pada tahun 2025, pembangunan infrastruktur PDN Cikarang telah mencapai progres 100 persen dan memasuki tahap persiapan operasionalisasi untuk memastikan kesiapan sistem sebelum beroperasi penuh. Hingga tahun 2029, pemerintah menargetkan penyelesaian tiga

lokasi PDN di Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai fondasi ekosistem pemerintahan digital terpadu, tata kelola berbasis data, keamanan dan kemandirian data nasional, serta percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

5.1.2 Tantangan dan Upaya

Dalam menghadapi lanskap digital global yang semakin kompetitif, sektor telekomunikasi nasional dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain (1) kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur dasar, dan keamanan, khususnya di wilayah timur Indonesia untuk penyediaan BTS 4G di wilayah 3T; (2) tingginya biaya investasi dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi jaringan *backbone* darat (fiberisasi); (3) kebutuhan regulasi yang mengatur pemanfaatan infrastruktur pasif secara bersama dan penyediaan jaringan serat optik dengan mekanisme sewa dalam mendukung percepatan pembangunan jaringan fiber optik nasional; (4) utilisasi

Bab 5.

kapasitas aktif jaringan Palapa Ring dan satelit SATRIA-1; (5) penataan ulang alokasi spektrum frekuensi jaringan 5G; dan (6) tingginya tarif listrik, ketergantungan pada impor peralatan, serta mahal biaya konektivitas di wilayah terpencil, dalam pembangunan PDN.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut adalah: (1) optimalisasi moda transportasi modular untuk menjangkau wilayah 3T; (2) penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penyusunan regulasi untuk mengatur pemanfaatan infrastruktur pasif bersama dan penyediaan jaringan serat optik dengan mekanisme sewa; (3) penyusunan skema penyewaan kapasitas layanan *dark fiber* dengan komitmen sewa jangka panjang; (4) pengembangan strategi utilisasi satelit SATRIA-1 serta merancang pengembangan satelit generasi berikutnya; (5) penyusunan kebijakan nasional penataan spektrum frekuensi jaringan guna mempercepat penggelaran jaringan 5G secara nasional; (6) penetapan klasifikasi industri agar memperoleh tarif listrik yang lebih kompetitif, mengusulkan pembentukan kawasan berikat guna menekan biaya impor, serta mengintegrasikan jaringan PDN dengan infrastruktur Palapa Ring dan satelit SATRIA-1 untuk memperluas jangkauan konektivitas di wilayah nonkomersial secara efisien.

5.2 Infrastruktur Transportasi

5.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah terus memperbaiki kinerja konektivitas dan kualitas layanan transportasi secara menyeluruh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, serta mewujudkan sistem transportasi yang lebih terintegrasi. Perbaikan kinerja konektivitas dan kualitas layanan transportasi tersebut, mampu mendorong kinerja keselamatan jalan tecermin dari penurunan rata-rata rasio fatalitas kecelakaan jalan sebesar 4,67 persen pada akhir tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi pelayanan publik, jumlah perjalanan kereta api meningkat dari 74.401 perjalanan/bulan pada Juni 2024 menjadi 83.315 perjalanan/bulan pada Juni 2025. Sementara itu, jumlah pengguna kereta api meningkat dari 41,93 juta penumpang menjadi sekitar 45,61 juta penumpang pada periode yang sama.

Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi juga mendukung pengembangan kawasan strategis industri, ekonomi khusus, dan sentra pangan, serta membuka akses ke wilayah 3T. Penguatan sistem transportasi massal perkotaan juga menjadi prioritas yang secara efektif mendorong mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan di pusat-pusat urban.



Kereta Api Makassar-Parepare
Sumber : Kementerian Perhubungan, 2025

Tabel 5.2
Capaian Infrastruktur Konektivitas dan Layanan Transportasi Periode
Tahun 2020 - 2025

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ^{a)}
Konektivitas Jalan ¹⁾							
Kondisi Mantap Jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	%	91/68/57	92/71/67	92/71/60	94/71/59	95/69/54	94/71/56/82 ^{d)}
Panjang Jalan Tol yang Beroperasi (sejak tahun 1978)	km	2.333	2.455	2.598	2.829	3.014	3.087
Konektivitas Berbasis Rel ²⁾							
Jumlah Perjalanan Kereta Api	ribu perjalanan	431	601	691	784	867	440
Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api	juta penumpang	199,25	162,57	307,19	429,12	506,61	262,21
Konektivitas Perkotaan ²⁾							
Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan ^{3) 4) c)}	juta penumpang	N/A	N/A	521,2	729,1	884,9	406,5
Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	juta penumpang/hari	2,49	2,69	2,69	2,99	3,00	2,85
Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan ^{c) 3) 4)}	juta penumpang/hari	N/A	N/A	1,63	1,86	2,03	1,99
Konektivitas Darat ²⁾							
Pelabuhan Penyeberangan yang Beroperasi	lokasi, kumulatif	208	212	215	220	224	231
Terminal Penumpang yang Beroperasi	lokasi, kumulatif	100	102	104	107	107	109
Volume Angkutan Penyeberangan	juta kendaraan	8,59	9,05	11,23	11,45	12,42	6,37
Konektivitas Laut ²⁾							
Jumlah Pelabuhan Laut Ditangani ³⁾	lokasi	5	9	18	22	18	29
Layanan Angkutan Tol Laut	layanan	26	32	33	40	37	37
Layanan Angkutan Perintis Laut	layanan	110	118	117	116	107	107
Muatan Angkutan Laut Nonkomersil	ton	81.492	118.349	173.643	201.950	206.551	104.966

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ^{a)}
Konektivitas Udara ²⁾							
Ketepatan waktu layanan (<i>on time performance/ OTP</i>) penerbangan	%	86,01	81,57	76,62	72,46	73,78	78,95
Jumlah Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang	layanan	192	214	228	226	250	266
Jumlah Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Kargo	layanan	27	38	41	40	44	47
Keselamatan Transportasi							
Persentase Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan (per 10.000 kendaraan) ^{2) 3)}	%	55,98	55,25	52,69	53,68	58,35	65 ^{b)}

Sumber: 1) Kementerian Pekerjaan Umum; 2) Kementerian Perhubungan; 3) Kementerian PPN/Bappenas (diolah); 4) Pemerintah Daerah (diolah).

Keterangan: a) capaian semester I 2025; b) target pemutakhiran RKP 2025; c) sepuluh wilayah metropolitan: Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Bandung, Semarang, Makassar, Manado; d) Variabel Indikator Kemantapan Jalan Kabupaten dan Kota dipisah pada tahun 2025.

Pemerintah telah mencatat kemajuan signifikan dalam peningkatan kinerja konektivitas dan layanan transportasi melalui pembangunan infrastruktur. Hingga pertengahan tahun 2025, kemantapan jalan nasional senantiasa terjaga di atas 90 persen dan panjang jalan tol yang beroperasi bertambah 73 km menjadi 3.087 km. Capaian ini mampu memperkuat kinerja transportasi dalam mendukung sistem logistik nasional melalui kelancaran mobilitas dan penurunan waktu tempuh perjalanan.

Kemantapan jalan nasional juga mendukung program keselamatan transportasi jalan yang menunjukkan peningkatan kinerja yang tecermin dari persentase penurunan rasio fatalitaskecelakaanlalulintas dari 53,68 persen (2023) menjadi 58,35 persen (2024). Upaya ini merupakan bagian dari komitmen mencapai target tingkat keselamatan jalan sebesar 65 persen pada tahun 2025. Di samping itu, sebanyak 315 titik rawan kecelakaan telah ditangani hingga pertengahan tahun 2025.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas dan kondisi kemantapan jalan daerah, pemerintah menerbitkan Inpres No. 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dan Inpres No. 11/2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Pengembangan transportasi massal perkotaan di sepuluh wilayah metropolitan menunjukkan progres yang signifikan. Hal ini tecermin dari capaian jumlah penumpang mencapai 884 juta orang sepanjang tahun 2024 dan 406 juta orang selama semester I 2025. Pencapaian ini merupakan hasil pengembangan MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KA Commuter Jabodetabek, pengembangan dan penyelenggaraan BRT di beberapa wilayah metropolitan dan kota sedang, serta penyediaan layanan *Public Service Obligation* (PSO) dan subsidi angkutan KA perkotaan. Besarnya jumlah pengguna

Bab 5.

angkutan umum ini berkontribusi pada pengurangan penggunaan subsidi BBM, penurunan kemacetan, serta emisi gas rumah kaca (GRK).

Pada sektor perkeretaapian, pemerintah telah memastikan ketersediaan dana *Infrastructure Maintenance and Operation* (IMO) perkeretaapian, layanan subsidi perintis dan penyediaan PSO kereta ekonomi jarak jauh. Hal tersebut telah berhasil menjaga kualitas jaringan KA (*track quality index*) tetap terjaga di atas 90 persen sehingga keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api tetap terjaga. Selain itu, langkah tersebut mampu menjaga kualitas dan kesinambungan 68 layanan kereta api, sehingga mendorong kenaikan jumlah pengguna kereta api selama tahun 2024 yang mencapai 506 juta penumpang, dan pada semester I 2025 telah mencapai 262 juta penumpang.

Sebagai negara kepulauan, transportasi laut, penyeberangan, dan transportasi udara memegang peran krusial dalam mendukung konektivitas antarwilayah di Indonesia. Selama pertengahan tahun 2025, dilakukan pengembangan kapasitas 29 pelabuhan dan 116 bandara, serta pengoperasian 231 pelabuhan penyeberangan. Pemerintah juga menyediakan layanan angkutan nonkomersil baik melalui skema PSO maupun layanan keperintisan penumpang dan barang, melalui subsidi perintis laut di 107 rute dan 39 rute tol laut, layanan perintis udara untuk 266 rute penumpang dan 47 rute kargo, serta subsidi penyeberangan di 68 rute. Langkah-langkah ini bertujuan memperkuat jaringan logistik dan mobilitas, serta memastikan akses transportasi yang memadai bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.

Hal ini mendorong peningkatan kinerja transportasi yang mencatat kenaikan volume barang angkutan laut sebesar 2 persen dan jumlah penumpang sebesar 11 persen, serta melayani penyeberangan 6,37 juta kendaraan.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur transportasi udara, salah satunya untuk mendukung layanan haji dan umrah. Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta dikembangkan sebagai terminal khusus haji dan umrah dengan kapasitas hingga 6,1 juta penumpang per tahun ini. Terminal dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti masjid seluas 3.136 m² lounge umrah seluas 3.000 m², serta parkir bus seluas 4.158 m² yang terhubung langsung dengan terminal kedatangan.

Selain capaian pada infrastruktur dan layanan, kualitas sumber daya manusia (SDM) transportasi semakin membaik, yang ditunjukkan oleh SDM memenuhi kualifikasi kompetensi sebesar 74 persen dan tingkat serapan lulus sebesar 88 persen. Di samping itu, kemampuan tim SAR juga terus ditingkatkan, dengan keberhasilan evakuasi korban mencapai 95 persen yang didukung lebih dari 22.000 personel terlatih.

5.2.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan infrastruktur transportasi masih menghadapi sejumlah tantangan, yaitu (1) disparitas tingkat kemantapan antara jalan nasional dan jalan daerah; (2) kelembagaan khusus pengelola transportasi perkotaan lintas wilayah dan lintas moda serta optimalisasi implementasi Rencana Mobilitas Perkotaan (RMP) Terpadu; (3) utilisasi sejumlah bandara pasca pandemi COVID-19, pengaturan rute penerbangan dan



slot time yang efektif, serta integrasi kawasan; (4) kepatuhan terhadap regulasi dan standar keselamatan sarana maupun prasarana serta penyelenggaraan layanan transportasi; dan (5) peremajaan armada pada layanan transportasi perintis.

Upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain: (1) intervensi program yang tepat sasaran, koordinasi efektif, dan skema pembiayaan yang sesuai; (2) pengembangan kelembagaan transportasi metropolitan untuk mengoordinasikan perencanaan, operasional, dan pembiayaan angkutan umum massal, melanjutkan pengembangan RMP, dan mengembangkan pendanaan kreatif; (3) kebijakan peningkatan utilisasi bandara melalui integrasi pengembangan kawasan, standardisasi kinerja bandara secara bertahap, penataan rute penerbangan yang lebih efisien, serta modernisasi fasilitas navigasi penerbangan; (4) penguatan regulasi, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta penguatan koordinasi lintas sektor yang efektif; dan (5) pengembangan kebijakan dan pemanfaatan skema pembiayaan alternatif guna mempercepat pengembangan layanan transportasi nonkomersil maupun perintis yang andal dan berkelanjutan.

5.3 Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan

5.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan diarahkan untuk mewujudkan ketahanan dan transisi energi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi gas bumi sangat penting untuk memperluas akses dan mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan *toll fee* yang lebih rendah, serta memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik, komersial, dan rumah tangga. Pemanfaatan program pengembangan jaringan gas kota untuk rumah tangga (Jargas) juga dapat mengurangi subsidi gas *Liquid Petroleum Gas* (LPG) 3 kg dan dapat menghemat devisa impor LPG.

Program Jargas merupakan inisiatif penting pemerintah untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan terjangkau bagi masyarakat. Capaian jaringan gas untuk rumah tangga (kumulatif) meningkat dari 922 ribu sambungan pada tahun 2023 menjadi 943 ribu sambungan pada tahun 2024.

Gambar 5.2
Peta Jaringan Transmisi Gas Bumi Nasional Tahun 2024



Sumber: Kementerian ESDM, 2025.

Bab 5.

Penyediaan layanan ketenagalistrikan sejalan dengan arah kebijakan peningkatan transisi energi listrik yang didukung melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berkualitas, andal, efisien, rendah karbon, dan berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan bertujuan untuk memperluas akses ketenagalistrikan dengan meningkatkan konsumsi listrik per kapita, meningkatkan rasio elektrifikasi, dan menjamin keberlanjutan layanan ketenagalistrikan.

Secara umum, rata-rata pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mengalami peningkatan. Total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional meningkat dari tahun 2022 sebesar 84 GW menjadi 105 GW pada semester I 2025, dengan dominasi pembangkit berbahan bakar fosil sebesar 89,81 GW dan sumber Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sebesar 15,20 GW untuk penyediaan listrik nasional. Infrastruktur jaringan transmisi pada semester I 2025 meningkat menjadi 73,42 ribu kms dari tahun 2022 sebesar 69,19 ribu kms.

Tabel 5.3
Capaian Indikator Subsektor Infrastruktur Ketenagalistrikan Tahun 2022–2025

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	Semester I	
					2024	2025
Konsumsi Listrik per Kapita	kWh (<i>kilo watt hour</i>) per kapita	1.173	1.337	1.412	1.373	1.448
Rasio Elektrifikasi	%	99,63	99,79	99,83	99,81	99,83 ^{a)}

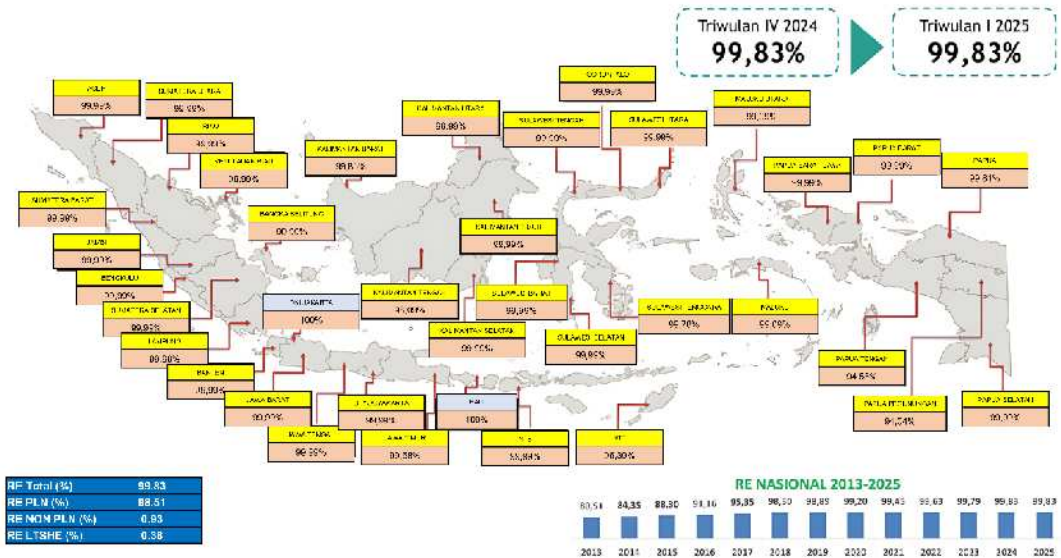
Sumber: Kementerian ESDM, 2025.

Keterangan: a) Outlook s.d. triwulan II 2025

Capaian konsumsi listrik per kapita pada tahun 2024 terealisasi sebesar 1.412 kWh. Kontribusi utama berasal dari industri sebesar 45–46 persen, diikuti oleh rumah tangga sebesar 33 persen, bisnis sebesar 16 persen, dan publik sebesar 5 persen. Mayoritas listrik disuplai oleh PLN dengan proporsi sekitar 80–81 persen, sementara non-PLN menyumbang sekitar 18–19 persen. Tren peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan konsumsi listrik

yang stabil di berbagai sektor, terutama industri yang menjadi pendorong utama. Elektrifikasi wilayah juga mengalami peningkatan, hal ini tergambar pada penyediaan listrik perdesaan (Lisdes) dan rasio elektrifikasi. Hingga triwulan I 2025, capaian listrik perdesaan mencapai 66 desa dan rasio elektrifikasi meningkat dari 99,63 persen (2022) menjadi 99,83 persen.

Gambar 5.3
Peta Sebaran Rasio Elektrifikasi (RE) Triwulan I 2025



Sumber: Kementerian ESDM, 2025.

5.3.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi pilar penting bagi ketahanan energi dan perekonomian nasional Indonesia. Tantangan dalam penyediaan dan layanan gas bumi saat ini antara lain (1) integrasi dan pemerataan infrastruktur gas bumi di berbagai wilayah; (2) potensi pengembangan infrastruktur di wilayah Indonesia bagian timur; (3) investasi pada sektor infrastruktur gas bumi; serta (4) keberlanjutan dan kelayakan ekonomi jargas.

Pembangunan infrastruktur transmisi gas bumi dilakukan dengan perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi melalui beberapa upaya, antara lain: (1) peningkatan integrasi dan pemerataan infrastruktur gas bumi antarwilayah; (2) fasilitasi jaringan gas rumah tangga non-APBN; (3) pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas CISEM Tahap 2; (4) pembangunan

Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai-Sei Mangkei (DUSEM); dan (5) fasilitasi pembangunan infrastruktur regasifikasi dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) Terminal.

Sejalan dengan pembangunan infrastruktur migas, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan juga menjadi prioritas strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemenuhan pelayanan dasar listrik. Tantangan yang dihadapi sektor ketenagalistrikan antara lain (1) pasokan listrik saat ini didominasi oleh bahan bakar fosil; (2) peningkatan sistem ketenagalistrikan, termasuk untuk mengadopsi pasokan listrik dari pembangkit listrik energi baru terbarukan; (3) konektivitas untuk mentransmisikan listrik dari lokasi sumber pasokan listrik terbarukan ke pusat beban permintaan listrik; dan (4) kondisi geografis, khususnya di wilayah yang menantang untuk dijangkau dalam penyediaan ketenagalistrikan.

Bab 5.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, upaya yang akan dilaksanakan yaitu (1) pembangunan pembangkit listrik beban dasar dan variabel serta sistem penyimpanan energi; (2) perubahan bahan bakar pembangkit listrik yang rendah karbon; (3) pembangunan jaringan transmisi dan interkoneksi dalam dan antarpulau (*Super grid*); (4) pembangunan jaringan distribusi dan terisolasi serta listrik pedesaan; (5) digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan; (6) pengembangan koneksi tenaga listrik; dan (7) pengembangan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

5.4 Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, komitmen pemerintah diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Melalui akses hunian yang layak dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Keterpaduan ini sangat penting di wilayah perkotaan mengingat tingginya laju urbanisasi sehingga menuntut respons kebijakan yang cepat dan terencana.

Intervensi yang dilakukan dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman mencakup (1) pembangunan baru dan

peningkatan kualitas hunian serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) bagi rumah umum; (2) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi dari hulu ke hilir; (3) penyediaan dan pengawasan infrastruktur sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis pendekatan *Citywide Inclusive Sanitation* (CWIS); serta (4) peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di Tempat Pemrosesan Akhir/Lahan Urug Residu (TPA/LUR).

Pada tahun 2024, capaian akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan mencapai 65,25 persen. Pemerintah menargetkan capaian ini akan terus meningkat menjadi 67 persen pada tahun 2025 melalui (1) fasilitasi penyediaan hunian baru yang mencakup pembangunan rumah khusus, rumah susun sederhana sewa, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan, serta Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); (2) fasilitasi peningkatan kualitas hunian melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); dan (3) penanganan permukiman kumuh, termasuk salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) yang pada tahun ini dilaksanakan di 32 kabupaten/kota.

Selain itu, beberapa inovasi yang dilakukan mulai tahun 2025, khususnya dalam mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, antara lain (1) pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, serta percepatan penerbitan PBG; (2) skema pembiayaan mikro; dan (3) Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang terkait dengan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM).

“

Penanganan permukiman kumuh kepada 119 Kepala Keluarga di Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah disokong melalui pendanaan DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu. Penanganan dilakukan dengan merelokasi penduduk yang berada di pesisir pantai dan menangani ketidaklayakan hunian di bidang perumahan, PSU, air minum dan air limbah yang selesai dilaksanakan pada Desember 2024 dan terus dimonitoring pemanfaatannya hingga saat ini. Penanganan permukiman kumuh terpadu merupakan salah satu intervensi yang mendukung Program Pembangunan 3 Juta Rumah.



Pelaksanaan DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu sebagai Bagian dari Program Tiga Juta Rumah
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Pemerintah Kab. Bangka Tengah

Bab 5.

Pada bidang air minum, pemerintah mengembangkan SPAM terintegrasi dari hulu ke hilir guna menjamin layanan air minum yang menyeluruh dan aman. Kebijakan ini mendukung peningkatan akses air minum di berbagai kabupaten/kota dengan akses air minum yang masih rendah, wilayah perkotaan, wilayah rawan air, perdesaan di kawasan 3T, dan wilayah utara Jawa. Kegiatan ini dilakukan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas operator, inovasi pembiayaan, pelibatan aktif masyarakat, serta pengimplementasian rencana pengamanan air minum (RPAM) yang saat ini mencapai 121 Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (BUMDAM) pada tahun 2024.

Pada bidang sanitasi, pemenuhan akses sanitasi dilakukan melalui penyediaan rantai layanan yang dikelola secara aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai dengan karakteristik wilayah. Untuk mencapai target sanitasi aman 30 persen dan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) terbuka 0 persen pada akhir tahun 2029, layanan sanitasi yang awalnya hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan isu kesehatan, saat ini dikembangkan melalui prinsip *Citywide Inclusive Sanitation* (CWIS) sehingga mencakup penyediaan layanan, isu lingkungan, pemilihan teknologi sesuai dengan karakteristik wilayah, serta pemanfaatan sumber daya kembali.

Prinsip ini didukung oleh (1) penguatan tata kelola melalui pemisahan operator dan regulator serta penyusunan regulasi terkait pengelolaan dan tarif air limbah domestik; (2) pendampingan daerah melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) kepada 43 kabupaten/kota di 15 provinsi (2025) dalam implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK); serta (3) pendekatan berbasis pasar untuk menciptakan *demand* masyarakat akan layanan sanitasi.

Pada sektor persampahan, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk (1) meningkatkan terolahnya sampah di fasilitas pengolahan sampah dan (2) meningkatkan akses rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah. Terobosan yang telah dilakukan untuk mendukung arah kebijakan sektor persampahan salah satunya melalui Program *Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities* (ISWMP) yang mencakup kegiatan pengembangan kapasitas pemerintah daerah, penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah, perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan penyediaan infrastruktur yaitu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), untuk membantu menangani Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sudah darurat/penuh dan timbulan sampah kabupaten/kota di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, termasuk di antaranya di Kota Bandung dan Kota Cimahi.



Tabel 5.4
Capaian Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	2025 ^{a)}
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan ¹⁾	%	60,66	63,15	65,25	67,00
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman ²⁾	%	11,80 (2020)	11,80 (2020)	20,49 (2023)	33,00
Akses Air Minum Jaringan Perpipaan ¹⁾	%	19,47	19,76	30,12 ^{b)}	31,00
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ²⁾	%	24,00 (2020)	24,00 (2020)	39,00 ^{c)}	39,00
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ¹⁾	%	10,16	10,21	10,25	12,50
Rumah Tangga yang Mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Tempat Terbuka ¹⁾	%	5,86	4,20	3,20	2,50
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah ³⁾	%	15,00 (13,00 terdaur ulang)	12,30 (10,90 terdaur ulang)	13,00 (12,00 terdaur ulang)	24,00 (16,00 terdaur ulang)

Sumber data: 1) Badan Pusat Statistik, 2024; 2) Kementerian Kesehatan, 2024; 3) Kementerian Lingkungan Hidup, 2024, capaian menurun dari *baseline* 2022 karena terdapat kecenderungan penurunan daerah yang melakukan penginputan data ke dalam SIPSN.

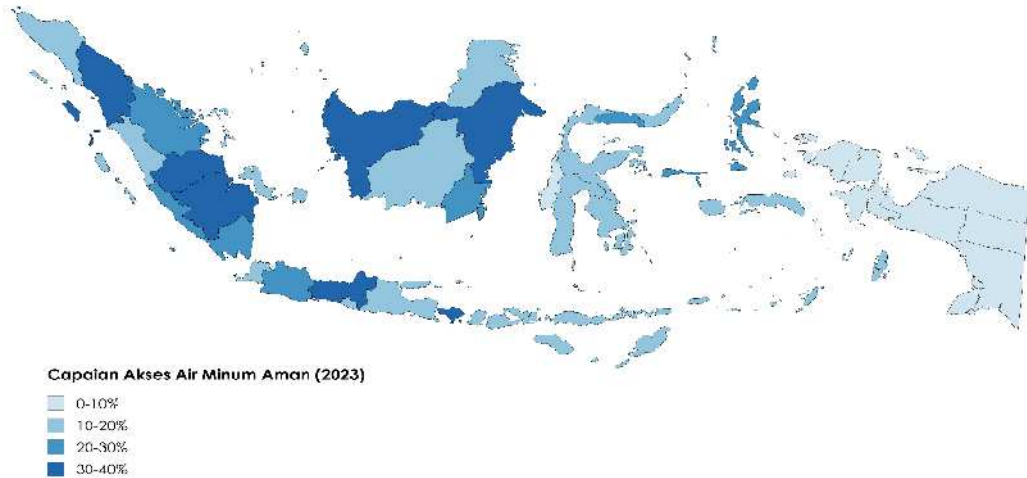
Keterangan: a) target pemutakhiran RKP 2025; b) Terdapat perubahan sumber perhitungan akses menjadi Kementerian PU; c) Merupakan indikator baru dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 sehingga capaian 2024 menggunakan target pada RKP 2025;

Gambar 5.4
Peta Sebaran Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Tahun 2024



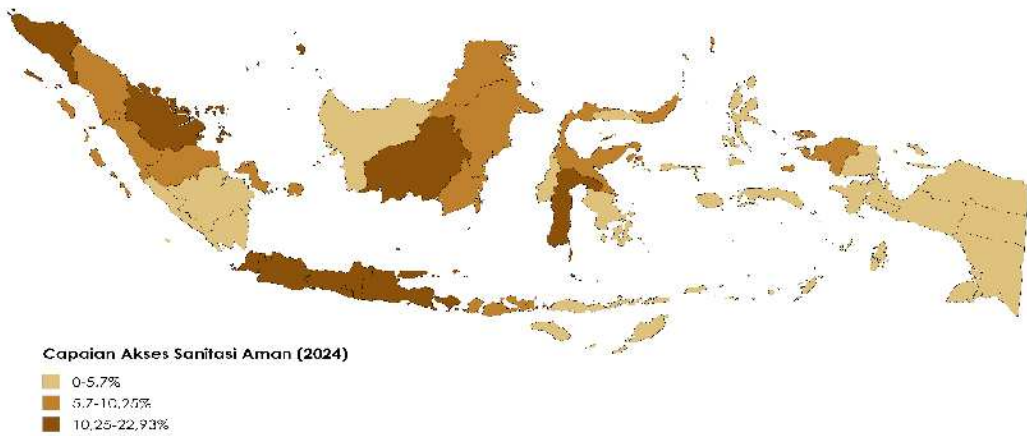
Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas KOR, 2024

Gambar 5.5
Peta Sebaran Akses Air Minum Aman Tahun 2023



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2023.

Gambar 5.6
Peta Sebaran Akses Sanitasi Aman Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR, 2024.



5.4.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman menghadapi sejumlah tantangan yang saling terkait, antara lain: (1) ekosistem pembiayaan inovatif dan inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat; (2) tata kelola lintas sektor untuk menyinergikan pengelolaan pembangunan secara efektif; (3) perubahan perilaku masyarakat; dan (4) peningkatan kapasitas pelaku pembangunan serta komitmen pemenuhan perencanaan dan penganggaran untuk efektivitas program.

Selain tantangan umum tersebut, terdapat pula tantangan teknis pada setiap sektor. Pada sektor perumahan, tantangan mencakup penyediaan hunian, khususnya bagi generasi milenial dan generasi Z, serta perluasan program pemerintah terutama untuk rumah tangga MBR dan pekerja informal. Pada sektor air minum, tantangan mencakup optimalisasi dan penuntasan SPAM terbangun menjadi sambungan rumah dan dampak perubahan iklim pada kualitas serta kuantitas sumber air. Pada sektor sanitasi, tantangan mencakup penyediaan infrastruktur hilir dan pemanfaatan infrastruktur terbangun. Pada sektor persampahan, tantangan berupa pemastian tata kelola dan pemberdayaan masyarakat sebelum pembangunan infrastruktur.

Merespons berbagai tantangan tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya, di antaranya (1) pengembangan ekosistem pembiayaan inklusif melalui skema mikro kredit, pembiayaan koperasi perumahan, dan KPBU; (2) pengembangan tata kelola terintegrasi dan responsif, seperti penguatan regulasi melalui perubahan UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, implementasi platform pengelolaan sampah terpadu, dan

pembentukan badan regulator air minum dan sanitasi; (3) transformasi perilaku melalui edukasi dan pemberdayaan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya hunian layak, air minum aman, sanitasi aman, penuntasan BABS terbuka, dan pemilahan dan pengurangan sampah di sumber; serta (4) penguatan kapasitas dan komitmen setiap level pemerintahan dalam sektor perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman, seperti melalui peningkatan pasokan hunian dengan pembangunan rumah baru dan rumah susun (vertikal); peningkatan kinerja penyelenggara air minum dan sanitasi dengan kegiatan pendampingan; bantuan keuangan, dan penyesuaian tarif; serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dengan implementasi platform pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan serta pembangunan TPST bagi kabupaten/kota yang telah memenuhi *readiness criteria* dan dengan kondisi TPA penuh/darurat.

5.5 Pengembangan Destinasi Pariwisata

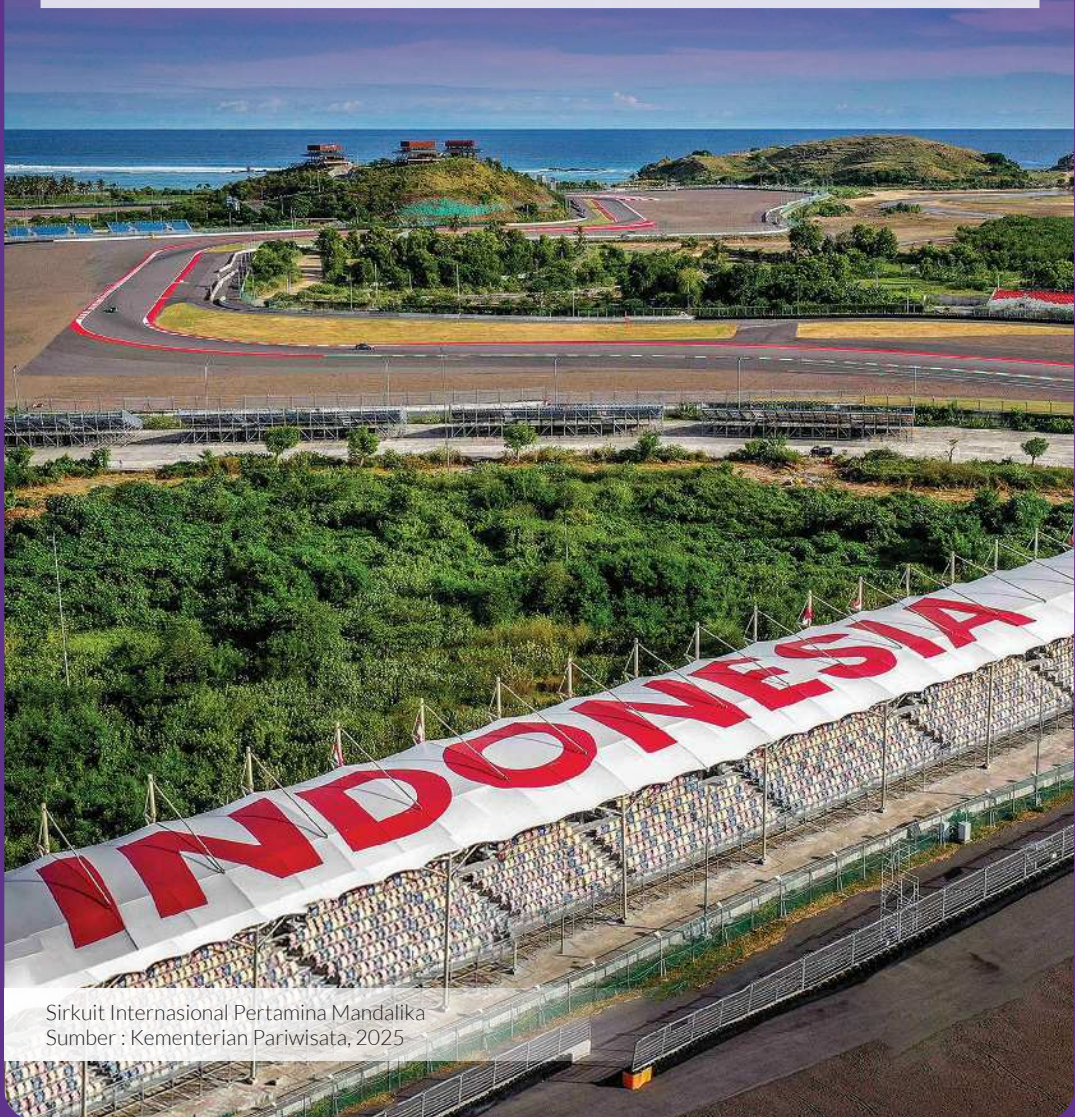
5.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan diharapkan mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen pada 2029. Selain sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), sektor ini juga memiliki *multiplier effect* yang luas terhadap sektor lainnya seperti transportasi, akomodasi, UMKM, ekonomi kreatif, dan jasa pendukung lainnya. Dalam konteks transformasi ekonomi, pariwisata juga diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

◀ Bab 5.

“

Kawasan Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian dari DPP Lombok-Gili Tramenra dikembangkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata petualangan, termasuk olahraga kelas dunia. Dukungan pengembangan sesuai amanat Peraturan Presiden No. 84/2021 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Lombok-Gili Tramenra 2020-2044. Pada tahun 2025, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan Mandalika, termasuk penyempurnaan Sirkuit Internasional Mandalika, peningkatan kapasitas akomodasi wisata, penataan kawasan wisata, serta penguatan konektivitas melalui Bandara Internasional Lombok dan pelabuhan penyeberangan. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui pelatihan wirausaha, promosi UMKM, dan pengembangan desa wisata. Dengan penyelenggaraan ajang balap motor internasional seperti MotoGP dan WorldSBK, Mandalika diharapkan menjadi ikon *sport tourism* Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif, serta mampu menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya.



Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika
Sumber : Kementerian Pariwisata, 2025



Pascapandemi COVID-19, sektor pariwisata nasional mengalami pemulihan yang cukup cepat. Tahun 2022 menjadi titik awal *rebound* pariwisata Indonesia, yang terus menunjukkan tren positif hingga tahun 2025.

Pemulihan ini tecermin dari berbagai indikator utama pariwisata, baik dari sisi kontribusi terhadap PDB, jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan devisa, hingga serapan tenaga kerja.

Tabel 5.5
Capaian Pembangunan Destinasi Pariwisata

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	2025 ^{b)}
Rasio PDB Pariwisata ¹⁾	%	3,72	4,67	4,04 ^{a)}	4,20-4,30
Devisa Pariwisata ²⁾	miliar US\$	6,78	14,00	16,70	17,10-18,30
Pengeluaran wisatawan mancanegara ^{1),2)}	US\$/kunjungan	1.481,59	1.198,85	1.201,23	1.200
Tenaga kerja pariwisata ^{1),3)}	juta orang	22,89	24,41	25,01 ^{a)}	25,75
Indeks Pembangunan Pariwisata (<i>Travel & Tourism Development Index</i>) ⁴⁾	peringkat TTDI	32 (2021)	N/A	22	20 (2026)
Kunjungan wisatawan mancanegara ¹⁾	juta kunjungan	5,89	11,60	13,89	14,00-15,00
Perjalanan wisatawan nusantara ¹⁾	juta perjalanan	734,86	839,67	1.021,13	1.084

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik, 2024; 2) Bank Indonesia, 2024; 3) Kementerian Pariwisata, 2023; 4) *World Economic Forum*, 2024

Keterangan: a) *exercise* Kementerian Pariwisata, b) target pemutakhiran RKP 2025

Peningkatan rasio PDB pariwisata dan devisa pariwisata dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sektor pariwisata semakin kuat sebagai penopang struktur ekonomi nasional. Hal ini didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan belanja wisata, serta penguatan infrastruktur, promosi, dan kebijakan pendukung sektor pariwisata. Dari sisi pengeluaran wisatawan mancanegara, terjadi peningkatan kualitas pengeluaran yang ditunjukkan dari rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara yang mencerminkan semakin berkualitaskannya wisatawan yang datang ke Indonesia, dengan lama tinggal dan aktivitas wisata yang semakin beragam.

Pemulihan pariwisata juga berkontribusi terhadap peningkatan tenaga kerja pariwisata yang menggambarkan bahwa sektor pariwisata menyumbang peluang kerja seluas-luasnya, terutama bagi masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata. Dari sisi daya saing, Indeks Pembangunan Pariwisata Indonesia (*Travel & Tourism Development Index*/TTDI) juga menunjukkan perbaikan. Indonesia menempati peringkat ke-22 pada tahun 2024 dan ditargetkan dapat berada di posisi 20 besar pada tahun 2026. Peningkatan peringkat ini merupakan hasil dari berbagai pembenahan, termasuk pada aspek aksesibilitas, infrastruktur, keberlanjutan lingkungan,

Bab 5.

serta kualitas SDM pariwisata. Capaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan nusantara juga menunjukkan pemulihan signifikan yang menandakan kebangkitan minat wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang sangat penting sebagai penyangga utama ekosistem pariwisata nasional.

Pengembangan destinasi pariwisata akan difokuskan pada 10 Destinasi Pariwisata Prioritas yang selanjutnya disebut DPP (Danau Toba, Lombok-Gili Tramen, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Bromo-Tengger-Semeru, Raja Ampat, Bangka Belitung, Wakatobi, dan Morotai) dan 3 Destinasi Pariwisata Regeneratif (Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau). Pada tahun 2025, pemerintah akan mendukung pengembangan destinasi pariwisata dengan fokus pada Danau Toba, Lombok-Gili Tramen, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, dan Labuan Bajo.

Selain itu, pemerintah juga mendukung pengembangan DPP melalui penerbitan enam Peraturan Presiden terkait Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN), yang mencakup Perpres No. 84/2021 tentang RIDPN Lombok-Gili Tramen Tahun 2021–2044; Perpres No. 16/2024 tentang RIDPN Manado–Likupang Tahun 2023–2044; Perpres No. 17/2024 tentang RIDPN Bangka Belitung Tahun 2023–2044; Perpres No. 87/2024 tentang RIDPN Raja Ampat Tahun 2024–2044; Perpres No. 88/2024 tentang RIDPN Borobudur–Yogyakarta–Prambanan Tahun 2024–2044; dan Perpres No. 89/2024 tentang RIDPN Danau Toba Tahun 2024–2044. Sementara itu, empat DPP lainnya, yaitu Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo–Tengger–Semeru, dan Morotai, tengah berada dalam proses finalisasi regulasi RIDPN.

5.5.2 Tantangan dan Upaya

Pengembangan destinasi pariwisata nasional menghadapi berbagai tantangan, yaitu (1) keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, terutama di wilayah terpencil serta daerah penyangga destinasi; (2) optimalisasi daya tarik wisata; (3) koordinasi antarpemangku kepentingan; (4) kualitas dan kompetensi SDM pariwisata; (5) terbatasnya ketersediaan produk wisata yang unik, berkualitas, dan berkelanjutan; (6) degradasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal akibat *overtourism* dan akulturasi yang tidak terkelola; (7) ketersediaan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas yang memenuhi prinsip pariwisata berkelanjutan; (8) layanan pariwisata yang berorientasi pada pengalaman wisatawan; (9) diversifikasi aktivitas pariwisata; serta (10) keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai pariwisata.

Adapun upaya yang akan terus dilakukan, antara lain: (1) penguatan industri dan rantai pasok inklusif melalui partisipasi aktif pelaku lokal dan pertumbuhan ekonomi yang merata dengan melibatkan UMKM serta komunitas masyarakat; (2) penerapan *Blue-Green-Circular Economy* (BGCE) melalui integrasi praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan industri pariwisata guna menjaga keberlanjutan sumber daya alam; (3) pembentukan *Indonesia Quality Tourism Fund* (IQTF) melalui penyediaan skema pendanaan inovatif yang mendukung pengembangan destinasi dan usaha pariwisata berkualitas; (4) peningkatan SDM pariwisata agar mampu memberikan layanan prima yang berstandar internasional;



(5) pembangunan destinasi prioritas melalui peningkatan kualitas destinasi unggulan dan pengembangan tematik pariwisata seperti desa wisata, *geopark*, pariwisata ramah muslim, pariwisata bahari, dan lainnya; serta (6) penguatan promosi pariwisata nasional guna meningkatkan visibilitas dan *positioning* Indonesia di pasar global.

5.6 Koperasi dan UMKM

5.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus diarahkan untuk mendorong transformasi usaha ke arah yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 5.6
Capaian Indikator Pembangunan Utama

No.	Nama Indikator	Satuan	2024	2025
1.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB ¹⁾	%	0,97	0,95 ^{a)}
2.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah ²⁾	%	3,06	3,10 ^{b)}
3.	Rasio Kewirausahaan ²⁾	%	3,08	3,10 ^{b)}

Sumber: 1) Kementerian Koperasi, 2025 (PDB ADHB 2024–2025); 2) Badan Pusat Statistik (Survei Angkatan Kerja Nasional/Sakernas Agustus 2024).

Keterangan: a) Realisasi Volume Usaha Koperasi berdasarkan data 31 Maret 2025, sedangkan data PDB ADHB berdasarkan data April 2024–Maret 2025; b) target pemutakhiran RKP 2025.

Pertumbuhan koperasi menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada Juli 2025, terdapat peningkatan jumlah koperasi aktif menjadi 211.372 koperasi dengan total koperasi yang menjalankan rapat anggota tahunan (RAT) sebanyak 44.631. Jumlah

anggota koperasi juga meningkat menjadi 29,98 juta. Pada aspek usaha, total volume usaha koperasi naik menjadi 235,41 triliun rupiah pada tahun 2025. Selain itu, total sisa hasil usaha (SHU) juga bertambah menjadi 8,35 triliun rupiah di periode yang sama.

Tabel 5.7
Koperasi Aktif berdasarkan Sektor Usaha 2025

Sektor Usaha	Volume Usaha (Rp triliun)	Proporsi Volume Usaha (%)	Koperasi Aktif (unit)
Perdagangan Besar dan Eceran	38,35	16,29	64.784
Jasa Keuangan dan Asuransi	138,79	58,96	51.135
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,22	6,04	39.183
Jasa Lainnya	15,14	6,43	33.556
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,22	0,94	8.393
Industri Pengolahan	3,71	1,58	5.599
Jasa Perusahaan	14,59	6,20	2.062
Sektor Usaha Lainnya	8,36	3,55	6.660
Total	235,41	100	211.372

Sumber: Kementerian Koperasi, 2025

◀ Bab 5.

“

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bentangan, yang berlokasi di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu *mock-up* Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025. *Mock-up* KDKMP bertujuan untuk mempercepat dan mengefektifkan pembentukan koperasi di tingkat desa/kelurahan secara akuntabel dan tepat sasaran sebagai model percontohan nasional.

Salah satu unit usaha yang dijalankan oleh KDMP Bentangan adalah gudang koperasi. Unit ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan pokok serta hasil produksi desa. Gudang koperasi mendukung stabilisasi harga, menjamin ketersediaan pasokan, dan berperan sebagai sarana logistik desa, termasuk dalam penyediaan sembako murah, alat pertanian dan penampungan hasil panen.



Gudang Koperasi Desa/Merah Putih (KDMP) Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Kementerian Koperasi, 2025



Capaian tersebut didukung melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, seperti pelatihan manajerial dan tata kelola koperasi serta penguatan kapasitas usaha. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) memfasilitasi pembiayaan kepada koperasi melalui penyaluran dana bergulir. Pada tahun 2024, realisasi penyaluran melebihi target yang telah ditetapkan, mencapai 1,90 triliun rupiah dari 1,85 triliun rupiah.

Secara khusus, penguatan peran koperasi juga dilakukan melalui Inpres No. 9/2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan kebijakan afirmatif yang mendorong pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai entitas ekonomi produktif berbasis komunitas. Pada 21 Juli 2025, telah terbentuk 80.081 KDKMP yang berbadan hukum.

Terkait UMKM dan kewirausahaan, pemerintah mendorong peningkatan daya saing yang mencakup kemudahan legalitas usaha, akses pembiayaan, akses perluasan pasar dan kemitraan strategis, serta penguatan ekosistem kewirausahaan. Pada aspek legalitas, formalisasi usaha didorong melalui penerbitan nomor induk berusaha (NIB). Hingga Juli 2025, jumlah pelaku UMKM yang telah memiliki NIB mencapai 12,27 juta atau 22,17 persen dari keseluruhan pelaku usaha, melampaui target 2025 sebesar 19,50 persen. Capaian ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam mendorong legalitas usaha mikro dan kecil (UMK).

Pada aspek pembiayaan, pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

untuk kebutuhan permodalan individu maupun kelompok usaha. Selama tahun 2025, penyaluran KUR hingga bulan Juli mencapai 113,4 triliun rupiah yang menjangkau hingga 2,29 juta debitur, atau setara 44,23 persen dari target 2025 sebesar 300 triliun rupiah. Di sisi lain, proporsi KUR untuk sektor produksi meningkat dari 57,80 persen (Juni 2024) menjadi 59,97 persen atau setara 79,62 triliun rupiah (Juli 2025). Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor-sektor produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

Pada aspek perluasan pasar dan kemitraan strategis, pemerintah melalui PP No. 7/2021 mengamanatkan pengalokasian 30 persen area infrastruktur publik untuk UMK, dengan realisasi hingga Juni 2025 telah mencapai 40,03 persen. Pemerintah juga mengamanatkan alokasi pengadaan barang dan jasa sebesar 40 persen untuk UMK, yang hingga Juni 2025 telah mencapai 69,40 triliun rupiah atau 35,59 persen dari target. Pemerintah juga mendorong keterlibatan UMKM dalam rantai pasok BUMN, dengan nilai transaksi kemitraan antara UMKM dan 13 BUMN pada periode April 2024 hingga April 2025 mencapai 72,89 triliun rupiah yang melibatkan 5.893 UMKM.

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam penguatan ekosistem kewirausahaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing UMKM. Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi berbagai layanan usaha, perkuatan program inkubasi, pelatihan, serta pendampingan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, upaya perkuatan juga dilakukan melalui percepatan pembangunan basis data tunggal (BDT) UMKM. Hingga

Bab 5.

kini, BDT UMKM telah berhasil menghimpun data sebanyak 30,18 juta unit UMKM secara *by name by address*. Fondasi BDT ini menjadi penting dalam perbaikan tata kelola pengembangan UMKM dan kewirausahaan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program dapat lebih efisien dan tepat sasaran.

5.6.2 Tantangan dan Upaya

Pengembangan koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan antara lain (1) partisipasi masyarakat dalam koperasi mengingat rasio jumlah anggota koperasi terhadap total penduduk pada tahun 2025 masih sebesar 10,54 persen; (2) partisipasi generasi muda dalam koperasi yang mendorong adopsi teknologi dan inovasi; (3) struktur skala usaha koperasi yang masih didominasi oleh koperasi berskala mikro (KUK-1); dan (4) akses pembiayaan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, yaitu (1) peningkatan literasi dan sosialisasi perkoperasian bagi masyarakat dan generasi muda; (2) pengembangan kapasitas SDM koperasi melalui pelatihan dan pemagangan; (3) perluasan akses pembiayaan; dan (4) optimalisasi dukungan kebijakan afirmatif pemerintah bagi koperasi.

Penguatan UMKM dan kewirausahaan juga masih menghadapi berbagai tantangan antara lain (1) legalitas UMKM; (2) akses pembiayaan dan permodalan bagi UMKM; (3) produktivitas UMKM yang terlihat dari omzet dan skala usaha; (4) keterbatasan wirausaha yang mempekerjakan tenaga kerja berbayar; serta (5) integrasi program penguatan UMKM dan kewirausahaan dalam kerangka pengembangan usaha naik kelas secara bertahap.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya melalui (1) fasilitasi, legalitas, pendampingan literasi keuangan, penguatan digitalisasi usaha, dan inkubasi usaha; (2) perluasan akses pembiayaan; (3) penguatan kemitraan strategis dan akses pasar; (4) integrasi dan konsolidasi berbagai program pemberdayaan melalui kerangka Program Kartu Usaha; serta (5) penyusunan regulasi tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang akan menjadi landasan koordinatif dan integratif antarpemangku kepentingan.

5.7 Ekonomi Kreatif

5.7.1 Capaian Utama Pembangunan

Sektor ekonomi kreatif, sebagai representasi dari ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas, telah menjadi kekuatan ekonomi Indonesia dan mendorong transformasi menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia (*economic powerhouse*). Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan produktivitas ekonomi kreatif. Keberhasilan capaian peningkatan produktivitas ekonomi kreatif tercermin melalui capaian PDB ekonomi kreatif sebesar 1.417,68 triliun rupiah pada tahun 2024 dan berkontribusi 6,92 persen terhadap perekonomian nasional.

Subsektor utama (kuliner, fesyen, dan kriya) menjadi penyumbang terbesar untuk PDB ekonomi kreatif dengan total kontribusi setiap tahun mencapai kisaran 75 persen. Adapun subsektor kuliner menyumbang 42 persen, fesyen 18 persen, dan kriya 15 persen. Proporsi PDB ekonomi kreatif ditargetkan meningkat menjadi 7,30–8,00 persen pada tahun 2025 dan mencapai angka 8,00–8,40

persen pada tahun 2029. Peningkatan ini tidak terlepas dari membaiknya konsumsi produk lokal buatan dalam negeri serta meningkatnya minat terhadap produk-produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Selain itu, peran subsektor strategis seperti aplikasi dan gim, kuliner, fesyen, serta film juga mendorong pertumbuhan nilai tambah sektor ini.

Tabel 5.8
Capaian Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Tahun 2024–2025

Indikator	Satuan	2024	2025 ^{a)}
Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	6,92 ¹⁾	7,30-7,90
Laju Pertumbuhan PDB Ekonomi Kreatif	%	5,30 ^{1),b)}	5,30-5,50
Pertumbuhan Ekspor Ekonomi Kreatif	%	4,76 ²⁾	4,90-5,20
Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	juta orang	26,47 ¹⁾	25,55
Pertumbuhan Investasi Ekonomi Kreatif	%	162,60 ^{1),c)}	5,30-7,30

Sumber: 1) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; 2) Kementerian Keuangan
Keterangan: a) target pemutakhiran RKP 2025; b) capaian tahun 2022; c) capaian indikator Nilai Investasi Ekonomi Kreatif dengan satuan triliun rupiah.

Pertumbuhan ekspor sektor ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan tren positif, dengan laju pertumbuhan sebesar 4,76 persen pada tahun 2024. Subsektor dengan kontribusi ekspor terbesar meliputi fesyen (54,96 persen), kriya (38,38 persen), dan kuliner (6,60 persen). Negara tujuan utama ekspor produk ekonomi kreatif Indonesia adalah Amerika Serikat, diikuti oleh Swiss dan Hongkong. Komposisi ini mencerminkan daya saing global produk kreatif Indonesia, sekaligus mempertegas peran sektor ini sebagai penggerak ekspor nasional yang tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika perdagangan internasional. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor produk ekonomi kreatif hingga 4,90–5,20 persen pada tahun 2025 dan meningkat hingga 6,00 persen pada tahun 2029 yang ditopang melalui program fasilitasi pelaku kreatif dalam pameran dan jaringan distribusi global.

Selain itu, sektor ekonomi kreatif menyerap tenaga kerja sebanyak 26,47 juta orang. Angka ini menunjukkan sektor ekonomi kreatif dapat menjadi kontributor dalam penyediaan lapangan kerja yang inklusif dan adaptif, sekaligus menjadi akselerator produktivitas nasional. Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja diproyeksikan mencapai 25,5 juta orang pada tahun 2025 dan terus meningkat hingga sebesar 27,66 juta orang pada tahun 2029.

Di sisi lain, investasi ekonomi kreatif berhasil mencatatkan nilai sebesar 162,60 triliun rupiah, yang bersumber dari investasi domestik dan asing serta difokuskan pada subsektor potensial seperti aplikasi dan gim, kuliner, fesyen dan film. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah menargetkan adanya pertumbuhan investasi secara agregat hingga 5,30–7,30 persen pada tahun 2025 dan terus meningkat hingga 7,00–8,00 persen pada tahun 2029, dengan strategi perluasan

Bab 5.

insentif investasi kreatif serta mendorong kolaborasi strategis antara sektor swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah. Pertumbuhan investasi tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya inovasi dan penggunaan teknologi yang meningkatkan produktivitas ekonomi kreatif.

Pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital dan konten juga tengah didorong oleh pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat antara lain penyusunan regulasi industri gim yang ditargetkan selesai tahun 2026 serta peningkatan literasi pelaku usaha perempuan melalui program "Emak-Emak Matic".

Lebih lanjut, ekonomi kreatif turut serta berkontribusi pada ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kontribusi pada ekonomi hijau terlihat melalui subsektor kriya dan fesyen yang mengedepankan keberlanjutan dan pelestarian budaya lokal. Sedangkan kontribusi pada ekonomi biru, tecerminkan dari penguatan subsektor kuliner dan kriya berbasis laut.

Program Akselerasi Keuangan Syariah Ekonomi Kreatif dan Pariwisata (AKSES) 2025 hadir untuk memperkuat pembiayaan syariah di sektor ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan. Program ini mensinergikan pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah dalam konteks penertiban efek syariah dan *crowd-investing* yang bertujuan dalam peningkatan keterampilan digital dan pemahaman terkait tren pasar halal global.

Indonesia terus memperkuat posisi ekonomi kreatif di tingkat global melalui kerja sama bilateral dan forum internasional. Salah satu

capaian strategis yang berhasil dijalin tahun 2025 adalah kerja sama dengan Prancis yang mencakup subsektor gim, film, desain, fesyen, dan kriya. Peta jalan kerja sama ini mulai diimplementasikan melalui program pengembangan talenta, kolaborasi multipihak, perluasan akses pasar, serta perlindungan dan komersialisasi Kekayaan Intelektual.

Hingga Juli 2025, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 sebagai dokumen arah kebijakan sektoral jangka panjang. Penyusunan ini menjadi langkah strategis dalam mengakselerasi pencapaian target indikator makro di sektor ekonomi kreatif.

Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif akan difokuskan pada pengembangan di 15 provinsi prioritas yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua.

5.7.2 Tantangan dan Upaya

Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain (1) fokus kekayaan intelektual untuk nilai tambah dan daya saing ekonomi kreatif; (2) kesadaran pelaku ekonomi kreatif terhadap potensi nilai ekonomi; (3) integrasi data ekonomi kreatif yang mempengaruhi penyusunan kebijakan dan intervensi program berbasis data; (4) pemerataan kelembagaan ekonomi kreatif untuk mendukung ekosistem kekayaan intelektual; (5) daya saing pelaku ekonomi kreatif yang dipengaruhi oleh akses



peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dan sinergitas antara dunia pendidikan dengan dunia industri; (5) sistem insentif yang mapan untuk mendukung pertumbuhan usaha, ekspansi, dan peningkatan daya saing subsektor ekonomi kreatif yang memiliki keterkaitan rantai pasok yang luas, seperti film, video, dan subsektor berbasis konten lainnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, upaya penguatan ekosistem ekonomi kreatif antara lain (1) penguatan ekosistem kekayaan intelektual melalui aktivasi pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi yang didukung dengan forum kolaboratif pemangku kepentingan ekonomi kreatif; (2) penguatan data ekonomi kreatif serta integrasinya; (3) penguatan regulasi, kebijakan, dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah; (4) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif melalui pelatihan, sertifikasi, inkubasi produk serta kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi; serta (5) perluasan akses pendanaan dan pembiayaan melalui penyediaan insentif fiskal dan pembiayaan inovatif.

5.8 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

5.8.1 Capaian Utama Pembangunan

Secara umum, perkembangan kebijakan KPBU di Indonesia mencerminkan arah yang progresif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan infrastruktur. Pendekatan sinergi pendanaan melalui KPBU menjadi salah satu instrumen strategis dalam

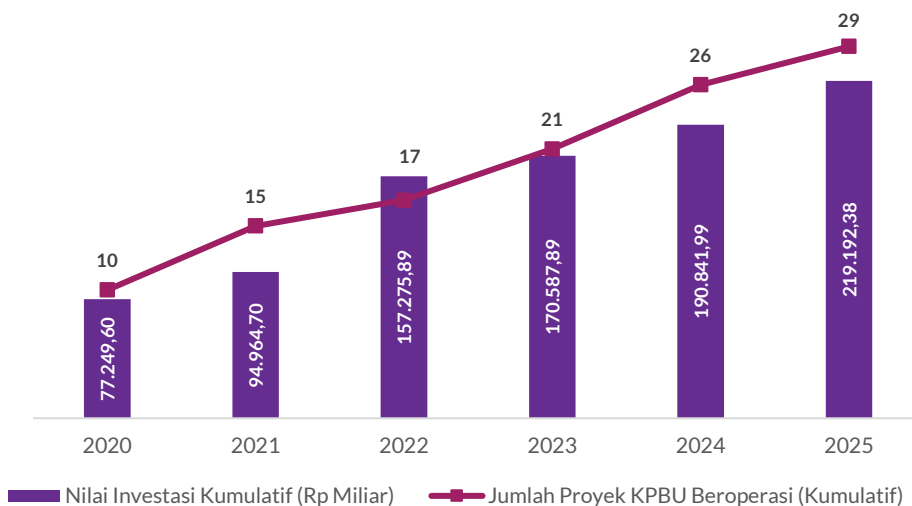
menjembatani pembiayaan pemerintah, sekaligus mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam pembangunan nasional.

UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan pentingnya sinergi pendanaan dalam rangka percepatan pembangunan. Sinergi Pendanaan tersebut meliputi sumber pendanaan pemerintah maupun nonpemerintah. Untuk meningkatkan peran badan usaha dalam mendukung penyediaan infrastruktur pusat dan daerah, Pemerintah secara aktif mendorong optimalisasi skema KPBU sebagai strategi utama untuk memobilisasi sumber pendanaan alternatif.

Kerangka hukum pelaksanaan KPBU diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Ketentuan teknis pelaksanaan KPBU diatur lebih lanjut melalui Permen PPN/Bappenas No. 4/2015, yang diubah menjadi Permen PPN/Bappenas No. 2/2020, dan terakhir disempurnakan melalui Permen PPN/Bappenas No.7/2023. Perubahan yang dilakukan berupa penyederhanaan tahap pelaksanaan studi proyek KPBU baik atas prakarsa pemerintah maupun prakarsa badan usaha, serta penyederhanaan organisasi KPBU untuk mempercepat proses birokrasi.

Regulasi ini merupakan upaya konkret untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mempercepat realisasi proyek, dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Grafik 5.1
Perkembangan Proyek KPBU yang Beroperasi pada Tahun 2020–2025



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025, diolah.

Dalam kurun waktu semester I 2024 hingga semester I 2025, pelaksanaan proyek KPBU menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Tercatat tiga proyek baru yang memasuki tahap operasi, yaitu Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I, Proyek Jalan Tol Solo–Yogyakarta–NYIA (Ruas Jalan Solo–Klaten), dan Penerangan Jalan Umum Dharmasraya. Ketiga proyek ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan inisiatif sektor swasta dalam mendukung penyediaan infrastruktur nasional.

Selain proyek-proyek yang telah beroperasi, capaian penting lainnya hingga saat ini adalah penandatanganan perjanjian KPBU untuk sejumlah proyek strategis, di antaranya Proyek Jalan Trans Papua Jayapura–Wamena (Segmen Mamberamo–Elelim), Proyek *Flyover* Sitinjau Lauik, dan Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka.

Minat KPBU di sektor sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan air minum masih

berkembang. Meskipun skema pendapatan di sektor ini berbeda dengan sektor komersial, peluang untuk menciptakan nilai sosial yang tinggi menjadikannya memiliki potensi besar. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menghadirkan inovasi pembiayaan, memberikan insentif, serta memperkuat regulasi, sehingga proyek-proyek di sektor sosial semakin menarik bagi investor sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, hingga akhir semester I 2025, sebanyak 36 proyek KPBU telah mencapai tahapan konstruksi dan operasi dan dikategorikan sebagai *success stories*, dengan nilai investasi mencapai 180,41 triliun rupiah untuk proyek skema *solicited* dan 109,72 triliun rupiah untuk proyek skema *unsolicited*. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur melalui kemitraan strategis dengan dunia usaha, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 5.9
Jumlah dan Nilai Proyek KPBU Tahun 2024 dan 2025

Proyek KPBU Semester I 2024		Tahapan Proyek	Proyek KPBU Semester I 2025	
Nilai Investasi (Rp triliun)	Jumlah Proyek (unit)		Jumlah Proyek (unit)	Nilai Investasi (Rp triliun)
522,51	89	Prakarsa Pemerintah	68	443,20
0,88	10	Perencanaan	3	0,23
219,28	46	Penyiapan	32	193,64
121,92	8	Transaksi	8	68,92
41,45	5	Konstruksi	5	41,45
138,96	20	Beroperasi	20	138,96
326,17	36	Prakarsa Badan Usaha	36	328,46
65,34	9	Penyiapan	8	64,62
63,23	6	<i>Approval Letter</i>	7	87,65
87,91	11	Transaksi	10	66,46
57,79	4	Konstruksi	2	29,49
51,87	6	Beroperasi	9	80,23

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025, diolah.

Skema KPBU hadir sebagai solusi inovatif dalam pembiayaan infrastruktur sekaligus membuka ruang kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat kelembagaan KPBU melalui pembaruan regulasi yang mendorong terciptanya proses yang lebih sederhana, efektif, dan efisien. Selain itu, sinergi antar pemangku kepentingan juga akan terus ditingkatkan melalui penyelarasan persepsi, tujuan, dan ekspektasi dalam penyelenggaraan KPBU. Hal ini penting agar strategi pelaksanaan KPBU dapat dirumuskan secara lebih komprehensif, berorientasi hasil, dan mampu menjaga daya saing serta daya tarik investasi di sektor infrastruktur.

5.8.2 Tantangan dan Upaya

Penguatan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (1) komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam perencanaan dan penyiapan proyek; (2) sinergi kualitas antarproyek dengan skema pendanaan; (3) sistem informasi yang terintegrasi untuk pemantauan proyek dengan fokus pada standardisasi data dan kemudahan pelacakan.

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: (1) penguatan keterlibatan calon lembaga pembiayaan sejak tahap penyiapan juga perlu diperkuat guna meningkatkan *bankability* proyek dan mempercepat tahap transaksi; (2) penyempurnaan referensi dan *template* dokumen khusus proyek KPBU skala kecil; dan (3) peningkatan relevansi proyek, pemetaan risiko yang menyeluruh, penyusunan *long list* proyek, serta pelibatan investor sejak awal.

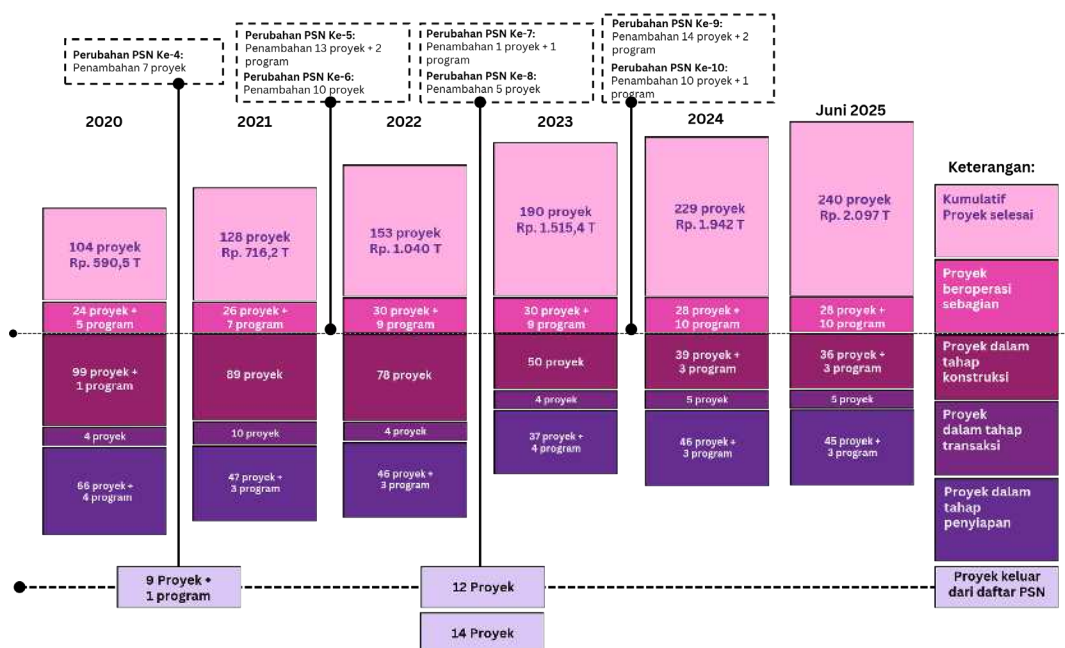
5.9 Proyek Strategis Nasional (PSN)

5.9.1 Capaian Utama Pembangunan

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan PSN. PSN merupakan proyek/

program yang memiliki nilai strategis dan memberikan dampak signifikan terhadap transformasi sosial-ekonomi, serta berperan dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional. PSN difasilitasi dengan berbagai kemudahan seperti percepatan proses perizinan, pembebasan lahan, dukungan pendanaan, kepastian hukum, dan koordinasi lintas instansi.

Gambar 5.7
Perkembangan Capaian PSN Tahun 2020–2025



Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2025.

Hingga Juni 2025, sebanyak 240 proyek PSN telah selesai dan beroperasi dengan nilai investasi 2.097 triliun rupiah. Terdapat 28 proyek dan 10 program yang beroperasi sebagian, 36 proyek dan 3 program dalam tahap konstruksi, serta 45 proyek dan 3 program dalam tahap penyiapan.

Dalam kerangka Asta Cita, telah ditetapkan tujuh program prioritas sebagai bagian dari PSN, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kartu Usaha Afirmatif, Sekolah Rakyat, Kartu Kesejahteraan Sosial, dan Pengelolaan Sampah Terpadu. Hal ini memperluas cakupan PSN, dari infrastruktur fisik menuju agenda transformasi sosial.



Salah satu program utama yang telah menunjukkan dampak nyata adalah Program MBG. Hingga 12 Agustus 2025, program ini telah menjangkau 10.083.647 penerima manfaat melalui 5.018 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh provinsi. Program ini bertujuan meningkatkan gizi peserta didik dan mendorong pengembangan ekosistem pangan lokal melalui skema logistik terdesentralisasi, pelibatan UMKM, dan penguatan rantai pasok.

Mendukung pencapaian kualitas sumber daya manusia di era digital, pemerintah juga mendorong akselerasi Program Digitalisasi Pendidikan. Program ini ditargetkan menjangkau 300.000 satuan pendidikan. Pada tanggal 2 Mei 2025, sebanyak 23 satuan pendidikan ditetapkan sebagai *pilot project*. Masing-masing satuan pendidikan akan menerima beberapa perangkat digital berisi konten pembelajaran. Bagi satuan pendidikan dengan akses internet dan listrik terbatas, terdapat dukungan tambahan berupa sambungan internet satelit dan panel surya untuk memastikan pemerataan akses teknologi pendidikan di seluruh wilayah.

Di bidang ekonomi masyarakat, Program KDKMP ditetapkan sebagai PSN sebagai upaya untuk mempercepat pemerataan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, memperkuat ekonomi rakyat, serta mendorong kemandirian masyarakat. Hingga 21 Juli 2025, telah terbentuk 80.081 KDKMP, melampaui target semula sebanyak 80.000 koperasi. Setelah tahap pembentukan, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas usaha masyarakat miskin dan rentan, pemerintah juga mengimplementasikan Kartu Usaha Afirmatif. Program ini mencakup 44 proyek pemberdayaan, dengan target 1 juta penerima pada 2025. Saat ini, pemerintah tengah menyusun tata kelola kelembagaan, standardisasi program, serta pedoman operasional mekanisme pendampingan usaha untuk memastikan pelaksanaan yang optimal. Langkah ini diperkuat dengan pengembangan mekanisme dan instrumen pendampingan usaha.

Pada saat yang sama, pemerintah terus memperluas akses terhadap pendidikan inklusif melalui PSN Sekolah Rakyat. Hingga pertengahan Juli 2025, sebanyak 63 Sekolah Rakyat tahap 1A telah beroperasi, diawali dengan pemeriksaan kesehatan dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Sementara itu, 37 sekolah tahap 1B telah menyelesaikan renovasi pada akhir Juli 2025, dan peserta didik telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Saat ini tengah dilakukan persiapan tahap 2 yang mencakup 100 Sekolah Rakyat tambahan dengan memanfaatkan fasilitas balai latihan kerja milik pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung percepatan implementasi.

Pada sisi kesejahteraan sosial, Kartu Kesejahteraan Sosial dirancang sebagai platform integratif untuk penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi yang bersifat adaptif dan berbasis data tunggal. Pengembangannya mencakup penyusunan konsep dasar kebijakan, kerangka regionalisasi bantuan sesuai tingkat biaya hidup, serta standardisasi kelembagaan. Pendekatan graduasi sosial dan pemanfaatan *Central Mapper* serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai instrumen perencanaan untuk memastikan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

Bab 5.

Pemerintah terus mendorong pengelolaan lingkungan melalui Pengelolaan Sampah Terpadu. Hingga tahun 2025, terdapat dua kota yang mengimplementasikan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan sesuai Perpres No. 35/2018, yaitu Kota Surabaya (1.000 ton/hari, 10 MW) dan Kota Surakarta (540 ton/hari, 5 MW). Sementara itu, sepuluh kota lainnya masih dalam tahap penyiapan dokumen teknis, lelang, dan konstruksi. Pemerintah saat ini melakukan optimalisasi koordinasi antar pemangku kepentingan, penguatan kapasitas pelaksana daerah, serta peningkatan dan sinkronisasi perencanaan, kelembagaan, dan pembiayaan guna mengakselerasi implementasi PSN. Selain itu, keterbukaan teknologi dan perluasan lokasi prioritas juga terus didorong melalui penyusunan payung kebijakan yang mendukung, integrasi program lintas sektor, penguatan *monitoring* dan evaluasi, serta pelibatan kemitraan sektor swasta. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat implementasi PSN pengelolaan sampah terpadu berkelanjutan dan berdampak signifikan terhadap peningkatan sampah terolah melalui fasilitas tepat guna dan terintegrasi.

5.9.2 Tantangan dan Upaya

Proyek Strategis Nasional dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pengendalian dan pascapelaksanaan.

Pada tahap perencanaan, tantangan meliputi (1) integrasi dan keterpaduan usulan PSN dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (2) partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses identifikasi dan perumusan proyek guna meningkatkan relevansi dan dukungan terhadap pelaksanaan; (3) kualitas penyiapan proyek dari sisi teknis, lingkungan, dan pembiayaan; serta (4) aksesibilitas terhadap alternatif pembiayaan inovatif seperti KPBU, investasi swasta, dan *blended finance*.

Pada tahap pelaksanaan, tantangan meliputi (1) proses perizinan; (2) pengadaan lahan dengan berbagai karakteristik sosial, hukum, dan budaya masyarakat, termasuk untuk lahan ulayat, tanah wakaf, dan aset publik; dan (3) kapasitas sumber daya manusia atau *stakeholder* pelaksana.

Pada tahap pengendalian dan pascapelaksanaan, tantangan meliputi (1) tata kelola PSN; serta (2) sistem evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terukur dan berbasis data guna menginformasikan efektivitas intervensi pembangunan.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut adalah melalui (1) penguatan regulasi dan kelembagaan; (2) penyempurnaan proses perencanaan; dan (3) penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan penguatan di seluruh tahapan siklus proyek dan semangat kolaboratif lintas sektor, pelaksanaan PSN ke depan diharapkan semakin efektif, berdampak luas, dan mendukung transformasi ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.



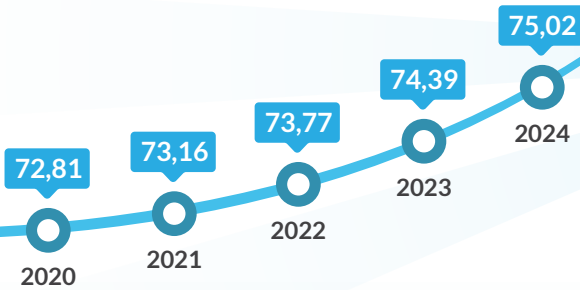
Kunjungan Kerja Presiden Prabowo Subianto
Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

BAB 6

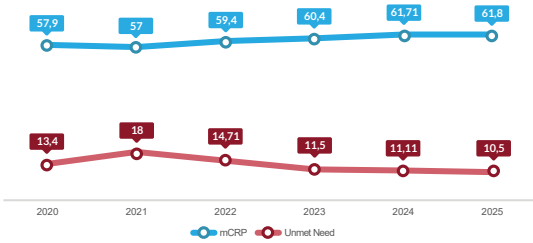
ASTA CITA 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

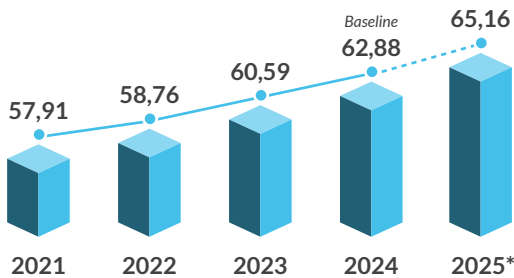
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2020-2024



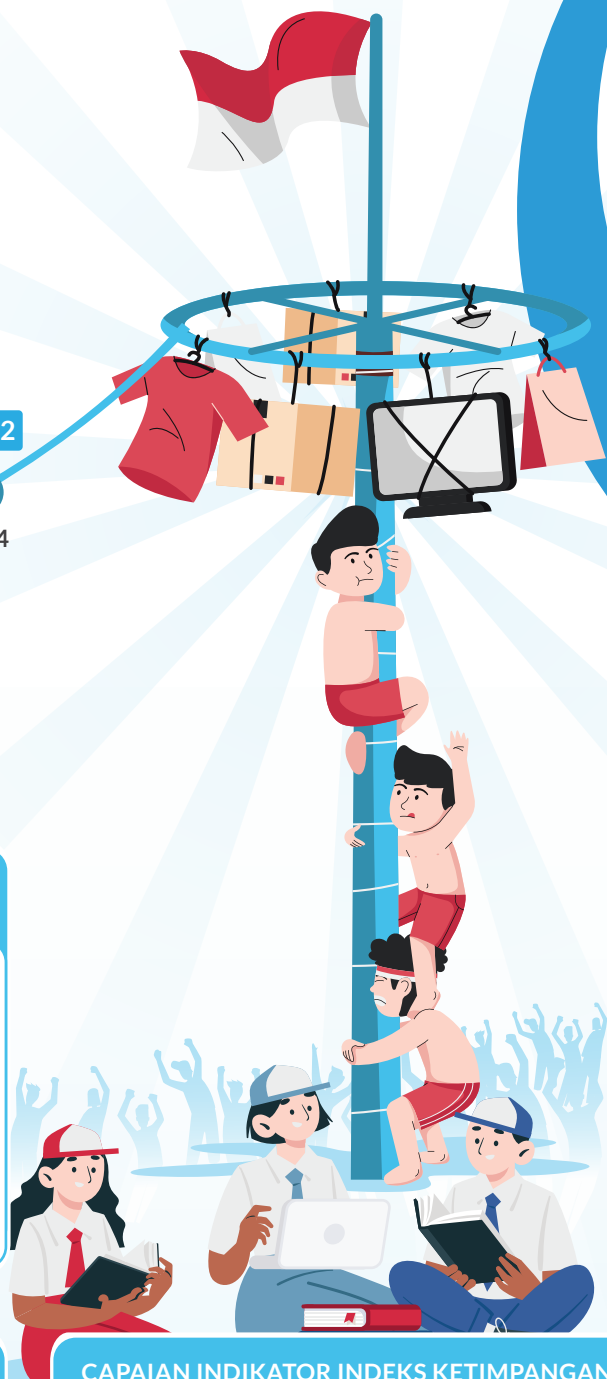
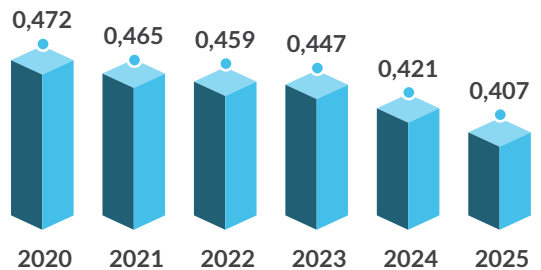
CAPAIAN INDIKATOR MCPR DAN UNMET NEED TAHUN 2020-2025



INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP) TAHUN 2021-2025



CAPAIAN INDIKATOR INDEKS KETIMPANGAN GENDER TAHUN 2020-2025





BAB 6

ASTA CITA 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan cara memampukan manusia, memenuhi pelayanan dasar, dan membentuk modal manusia. Kinerja pembangunan manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang capaiannya terus meningkat utamanya didorong oleh pengeluaran riil per kapita, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Sumber daya manusia laki-laki maupun perempuan yang sejahtera, produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, unggul, serta berdaya saing merupakan modal dasar pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

6.1. Indeks Pembangunan Manusia

6.1.1. Capaian Utama Pembangunan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia yang digambarkan dengan capaian dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Capaian IPM terus menunjukkan tren positif, tercermin dari nilai IPM tahun 2024 mencapai 75,02, meningkat sebesar 0,63 poin dari tahun sebelumnya. Pada dimensi kesehatan, capaian

Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2024 mencapai 74,15 tahun, meningkat sebesar 0,22 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada dimensi pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas mencapai 8,85 tahun, meningkat 0,08 tahun, sementara untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,21 tahun, meningkat 0,06 tahun. Pada dimensi standar hidup layak yang dicerminkan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan meningkat sebesar 3,71 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp12,3 juta per tahun.

Bab 6.

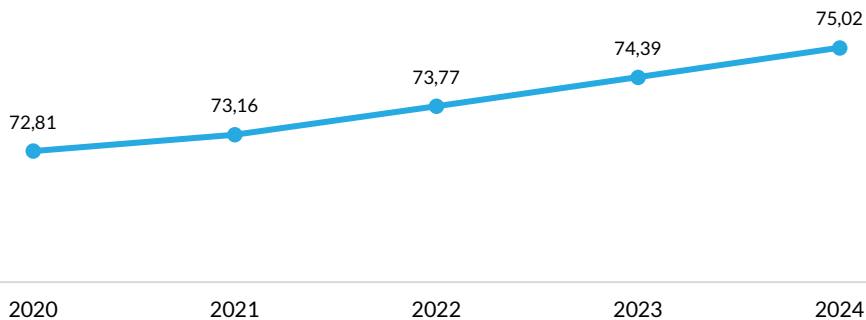
Peningkatan capaian IPM Indonesia didorong oleh peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan serta peningkatan daya beli masyarakat. Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari transformasi struktural mendukung peningkatan IPM melalui perbaikan gizi anak, peningkatan kehadiran peserta didik dalam proses pembelajaran, serta dampak ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM dan petani sekitar. Selain itu, komponen indeks dimensi kesehatan meningkat tidak lepas dari upaya pemerintah antara lain: (1) penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (hingga Maret 2025 telah mencakup 98,30 persen penduduk); (2) penguatan pelayanan kesehatan primer melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan alat (SPA) puskesmas dan puskesmas pembantu; (3) penguatan layanan kesehatan lanjutan melalui pemenuhan SPA RS pengampu layanan Kanker Jantung *Stroke* dan *Uronefro* (KJSU) serta Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); (4) pemenuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah melalui rekrutmen aparatur sipil negara (ASN); serta (5) intervensi promotif-preventif termasuk melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang hingga 16 Juli 2025 telah mencakup 13,1 juta jiwa.

Peningkatan capaian dimensi pendidikan merupakan hasil dari berbagai kebijakan strategis pemerintah yang secara konsisten mendorong pemerataan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas. Pada tahun 2025, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20.872.451 peserta

didik dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 1.172.349 mahasiswa. Pemerintah juga memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan, serta wilayah afirmasi lainnya, terutama bagi anak-anak di Pulau Papua melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Perluasan akses terhadap layanan pendidikan juga didukung oleh program revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah dengan berbasis prinsip ketuntasan, penyelenggaraan sekolah rakyat, serta penyediaan pendanaan operasional satuan pendidikan melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Sementara itu, peningkatan capaian dimensi standar hidup layak didorong oleh Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), operasi pasar Bulog untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), perpanjangan PPh Final UMKM 0,5 persen, diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan 450–2.200 VA (Januari-Februari 2025), serta Kartu Prakerja, yang bersama-sama memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Selama libur sekolah Juni–Juli 2025, pemerintah menyalurkan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dan tarif tol, perluasan bantuan sosial dan pangan, subsidi upah, serta potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK (Februari- Juli 2025) untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Grafik 6.1
Tren Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

Tabel 6.1
Capaian Komponen Indikator Penyusun Nilai Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	73,37	73,46	73,70	73,93	74,15
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas	tahun	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	juta rupiah/ orang/ tahun	11,01	11,16	11,48	11,90	12,34

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2024

6.1.2. Tantangan dan Upaya

Pembangunan manusia terus meningkat secara progresif. Seiring kemajuan tersebut, Indonesia menghadapi tantangan antara lain: (1) pergeseran struktur demografi yang meningkatkan komposisi usia produktif dan lanjut usia; (2) transisi epidemiologi yang mendorong pengembangan layanan kesehatan

komprehensif untuk penyakit menular dan tidak menular; (3) keragaman karakteristik sosiokultural masyarakat; (4) variasi akses dan layanan dasar di berbagai wilayah; (5) tingkat ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan manusia, serta; (6) beragamnya kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Bab 6.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan pembangunan manusia ke depan. Di bidang kesehatan diperlukan langkah strategis lintas sektor yaitu (1) penguatan intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK); (2) peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan jejaringnya; (3) penguatan upaya deteksi dini penyakit melalui pemeriksaan kesehatan gratis; dan (4) pemenuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan.

Di bidang pendidikan, upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui (1) perluasan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), revitalisasi sarana prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, penyelenggaraan sekolah rakyat, penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran, serta pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah dalam rangka mendukung kebijakan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (2) percepatan perluasan akses pendidikan tinggi berkualitas; dan (3) restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru.

Pada aspek kesejahteraan sosial, diperlukan (1) penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mendorong peningkatan kualitas dan akurasi data berbagai jenis bantuan sosial; (2) kontribusi PKH pada peningkatan kualitas SDM sejak dini dan mendukung pembangunan manusia yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan melalui kewajiban kehadiran anak di sekolah dan pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan anak; (3) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

(KDKMP) berpotensi menstimulasi daya beli masyarakat melalui kemudahan akses modal dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

6.2 Kesehatan

6.2.1. Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan kesehatan untuk semua. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 73,70 tahun pada 2022 menjadi 74,15 tahun di 2024, dan diproyeksikan mencapai 74,33 tahun pada 2025. Angka Kematian Ibu (AKI), yang tercatat sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup pada 2020 (hasil Sensus Penduduk), ditargetkan turun menjadi 122 pada 2025. Di sisi lain, prevalensi *stunting* pada balita menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 21,60 persen pada 2022 menjadi 19,80 persen di 2024, dan ditargetkan menjadi 18,80 persen pada 2025.

Penanggulangan penyakit menular tuberkulosis (TBC) juga menjadi perhatian serius pemerintah. Insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk tercatat sebesar 386 pada 2022 dan 387 pada 2023, dengan target penurunan menjadi 329 pada 2025.

Sementara itu, cakupan kepesertaan JKN meningkat dari 96 persen pada 2023 menjadi 98,42 persen di 2024, ditargetkan mencapai 98,60 persen pada akhir 2025. Cakupan universal ini berkontribusi dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan yang lebih merata dan proteksi finansial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 6.2
Capaian Pembangunan Bidang Kesehatan

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup	tahun	73,70	73,93	74,15	74,33 ^{b)}
Angka Kematian Ibu	per 100,000 kelahiran hidup	189 ^{a)}	189 ^{a)}	189 ^{a)}	122 ^{b)}
Prevalensi <i>stunting</i> pada balita	%	21,60	21,50	19,80	18,80 ^{b)}
Insidensi tuberkulosis	per 100,000 penduduk	386	387	N/A	329 ^{b)}
Cakupan kepesertaan JKN	%	90,45	96	98,42	98,30 ^{c)}

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022-2024

Keterangan: a) Hasil Sensus Penduduk LF tahun 2020; b) target tahun 2025; c) capaian triwulan I 2025

Hingga triwulan II 2025, pembangunan bidang kesehatan telah berjalan dan menunjukkan hasil awal yang positif. Hingga 12 Agustus 2025, Program MBG telah menjangkau 10.083.647 penerima dari target 82,9 juta penerima pada akhir 2025. Hingga 3 Agustus 2025, sebanyak 17.096.971 orang telah mendaftar CKG dan sebanyak 16.309.265 orang telah melakukan pemeriksaan. Berbagai hal telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti pelaksanaan CKG di sekolah dan peningkatan kemudahan dalam mengakses CKG.

Peningkatan kelas Rumah Sakit (RS) dari tipe D ke C difokuskan di wilayah yang hanya memiliki 1 RS tipe D, dengan target 66 RS hingga 2029. Untuk mencapai target tersebut hingga 11 Juli 2025, 19 RS sudah memasuki tahap konstruksi dan 3 RS menjalani persiapan teknis.

Penuntasan TBC hingga triwulan II 2025 menunjukkan cakupan keberhasilan pengobatan yang baik sebesar 88,20 persen. Percepatan dilakukan melalui perluasan penemuan kasus dan deteksi dini di tingkat

fasilitas pelayanan kesehatan (*fasyankes*) dan masyarakat, serta peningkatan komitmen pemerintah daerah.

Peningkatan kesehatan ibu dan anak dilakukan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, peningkatan puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan RS Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi, serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kematian ibu dan anak. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) terus diperkuat melalui peningkatan upaya promotif dan preventif, termasuk edukasi masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan mendorong peningkatan mutu melalui akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, pemenuhan SPA, dan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan melalui berbagai skema. Ketahanan kesehatan diperkuat melalui penguatan surveilans dan pengendalian kejadian luar biasa (KLB/wabah), pemenuhan logistik esensial kesehatan, serta pendekatan

Bab 6.

One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan dalam upaya deteksi dan respons terhadap ancaman kesehatan secara terpadu.

6.2.2. Tantangan dan Upaya

Indonesia telah mencatat kemajuan kesehatan yang signifikan, namun pembangunan kesehatan nasional masih menghadapi beberapa tantangan yaitu: (1) beban ganda penyakit muncul karena tren penyakit tidak menular terus meningkat, sementara penyakit menular tetap memerlukan penanganan serius; (2) *triple burden of malnutrition* yaitu *undernutrition*, defisiensi gizi mikro, dan obesitas masih terjadi; (3) pola hidup kurang sehat seperti merokok serta konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih menambah kompleksitas tantangan kesehatan; (4) bervariasinya sumber daya kesehatan, termasuk SDM dan SPA di fasyankes antar daerah; dan (5) dukungan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan masih perlu dioptimalkan guna memperkuat sinergi, efektivitas, dan keberlanjutan intervensi.

Untuk menjawab tantangan pembangunan kesehatan, dibutuhkan langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan di antaranya: (1) peningkatan investasi pada pelayanan kesehatan primer perlu didorong, termasuk perluasan upaya promotif dan preventif, serta penguatan intervensi berbasis kewilayahan; (2) sinkronisasi intervensi lintas sumber pembiayaan, disertai mobilisasi dana nonpublik menjadi kunci dalam memperluas jangkauan dan efektivitas layanan kesehatan; dan (3) penguatan skema JKN guna memastikan

perlindungan finansial menyeluruh bagi masyarakat, termasuk mendorong peran aktif asuransi swasta.

Sementara itu, guna memperkuat pembangunan kesehatan, optimalisasi PHTC difokuskan pada: (1) percepatan dan penguatan regulasi MBG; (2) perluasan cakupan dan kualitas CKG di puskesmas serta membangun kemitraan dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta; (3) percepatan penuntasan TBC melalui perluasan penemuan kasus, pemberdayaan Desa/Kelurahan Siaga TBC, integrasi TPT-investigasi kontak, dan kolaborasi pendampingan pasien putus berobat; dan (4) Memperkuat konektivitas antardaerah dan utilitas pendukung, melakukan mitigasi risiko bencana dan keamanan, serta memastikan ketersediaan SPA yang memadai dan SDM terlatih guna mendukung operasional RS Lengkap Berkualitas.

6.3 Pendidikan

6.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Akses pendidikan yang semakin membaik ditandai dengan meningkatnya capaian Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Hal ini didukung oleh beberapa program strategis yang dilakukan pada tahun 2025 antara lain: penyediaan BOSP, bantuan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui PIP, revitalisasi sarana dan prasarana madrasah, penanganan anak tidak sekolah salah satunya melalui pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, serta penyediaan makan bergizi gratis bagi peserta didik di satuan pendidikan.

Sementara itu, peningkatan kualitas pendidikan didorong melalui pemenuhan guru, percepatan sertifikasi profesi dan peningkatan kesejahteraan guru, penerapan kurikulum yang berfokus pada peserta didik, penerapan digitalisasi pembelajaran, serta pembangunan dan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda. Peningkatan relevansi pendidikan dengan dunia kerja dilakukan melalui penerapan kurikulum dan pembelajaran pada satuan pendidikan vokasi berbasis industri, peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik pada satuan pendidikan vokasi, serta sertifikasi kompetensi peserta didik pendidikan vokasi.

Pemerintah meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi melalui bantuan berkeadilan, seperti KIP Kuliah dan ADik, serta memberikan kesempatan beasiswa bagi peserta berprestasi, mahasiswa asrama, insan kebudayaan, pendidik, dan tenaga kependidikan. Program beasiswa tersebut mendukung pengembangan karier akademik dan nonakademik peserta dan lulusan berprestasi. Selain itu, pemerintah turut memperluas kapasitas dan memperkuat infrastruktur perguruan tinggi melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), mencakup perguruan tinggi negeri keagamaan Islam dan perguruan tinggi negeri.

Tabel 6.3
Capaian Indikator Pembangunan Bidang Pendidikan

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	2025 ^{a)}
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun ¹⁾	tahun	9,08	9,13	9,22	9,33
Harapan lama sekolah ¹⁾	tahun	13,10	13,15	13,21	13,32
Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional ²⁾	nilai	56,30	60,89	63,06	62,89
(a) Literasi Membaca		45,59	51,36	55,92	54,36
(b) Numerasi					
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi ³⁾	%	31,16	31,45	32,00	33,94
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi ³⁾	%	10,15	10,15	10,20	11,12
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi ⁴⁾	%	69,84	66,30	68,14	68,32

Sumber: 1) Susenas 2022-2024; 2) Kemendikdasmen, 2022-2024; 3) BPS 2022-2024; 4) Sakernas 2022-2024
Keterangan: a) Target akhir tahun

Bab 6.

Pada tahun 2025, pemerintah melanjutkan penyediaan BOSP bagi satuan pendidikan formal dan non-formal yang mencakup 61,9 juta peserta didik, serta menyalurkan bantuan pendidikan kepada 21,11 juta peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan rentan melalui PIP. Selain itu, pemerintah juga melakukan berbagai terobosan pembangunan pendidikan, antara lain pelaksanaan Sekolah Rakyat untuk membuka akses pendidikan bagi anak tidak sekolah dengan target sasaran 20.000 anak (2025), serta penyaluran bantuan subsidi upah bagi 565.000 pendidik honorer untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kinerja pendidik.

6.3.2. Tantangan dan Upaya

Pembangunan pendidikan masih memiliki tantangan ke depan, di antaranya: (1) akses pendidikan pada jenjang PAUD, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan capaian APK dan tingkat penyelesaian pendidikan; (2) perluasan infrastruktur dasar seperti listrik dan internet di sekolah perlu diperkuat guna mendukung implementasi pembelajaran digital secara merata; (3) penyediaan dan revitalisasi ruang kelas perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kenyamanan dan kapasitas pembelajaran peserta didik; (4) peningkatan kualitas pembelajaran perlu dipercepat guna mendorong capaian skor *Programme for International Student*

Assessment (PISA) Indonesia setara dengan negara-negara maju; (5) penambahan, peningkatan kompetensi serta distribusi guru yang merata perlu terus diperkuat; (6) penguatan pendidikan karakter, agama, dan kewarganegaraan perlu diintensifkan untuk meningkatkan *student well-being* melalui integrasi dalam kurikulum dan penguatan budaya sekolah; (7) pengembangan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi perlu didorong secara berkelanjutan untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat; dan (8) peningkatan keterampilan lulusan perguruan tinggi serta perluasan lapangan kerja perlu dilakukan agar tenaga kerja memiliki daya saing dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Beberapa upaya dalam mewujudkan pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut: (1) percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (2) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (3) pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; (4) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (5) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (6) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic* (STEAM); serta (7) penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi.



Sesuai Inpres No. 7/2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran, pemerintah di tahun 2025 melaksanakan revitalisasi sarana-prasarana di 13.807 sekolah dan 1.419 madrasah untuk menjamin ketersediaan sarana-prasarana berkualitas; pembangunan SMA Unggul Garuda (SUG) baru di 4 lokasi dan pembinaan SUG Transformasi di 12 SMA/MA untuk membina talenta unggul sains dan teknologi dari seluruh Indonesia untuk bersaing di tingkat global; serta penyediaan sarana digital di 300.000 satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui integrasi teknologi pendidikan



6.4 Iptek dan Inovasi

6.4.1. Capaian Utama Pembangunan

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) menjadi fondasi transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Pemerintah memperkuat ekosistem Iptekin melalui sinergi antara penghasil riset dan inovasi (perguruan tinggi dan lembaga penelitian),

lembaga intermediasi (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat/LPPM dan Science Techno Park), dan pihak pengguna (industri, masyarakat, dan instansi pemerintah). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan konektivitas antar pelaku inovasi, kapasitas SDM Iptek, serta pemanfaatan hasil riset dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Tabel 6.4
Capaian Indikator Pembangunan Bidang Iptek dan Inovasi

Uraian	Satuan	2022	2023	2024 ^{a)}	2025 ^{b)}
Peringkat Indeks Inovasi Global (GII)	peringkat	75	61	54	53
Jumlah SDM Iptek per juta penduduk	orang	1.184	1.218	1.242	1.267
Jumlah infrastruktur strategis yang dibangun	unit	6	8	8	1
Jumlah Science Techno Park yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	5	5	5	5
Jumlah BRIDA/Ekosistem Daerah yang beroperasi optimal ^{c)}	lembaga	N/A	N/A	N/A	2

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022-2025

Keterangan: a) capaian semester I; b) target akhir tahun; c) indikator baru

Peningkatan kapasitas Iptekin didukung oleh peningkatan kapasitas SDM serta pembangunan infrastruktur riset strategis menjadi pilar utama dalam mendorong efisiensi nasional dan pengembangan produk unggulan berbasis teknologi tinggi. Pada semester I 2024, jumlah SDM Iptek Indonesia telah mencapai 1.242 orang (per satu juta penduduk). Hal ini mencerminkan pertumbuhan signifikan dalam basis tenaga ahli nasional. Capaian ini turut mendorong kenaikan peringkat Indonesia dalam GII dari 61 (2023) menjadi 54 (semester I 2024). Dari sisi infrastruktur, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan fasilitas Akselerator Energi dan Elektronika Terpadu

(AEET) sebagai bagian dari penguatan infrastruktur riset nasional. Pemerintah juga terus berkomitmen memperkuat ekosistem inovasi yang mampu menjembatani hasil riset dengan kebutuhan pengguna.

Pengembangan Science Techno Park (STP) menjadi contoh nyata penerapan model *triple helix* yang efektif mendorong hilirisasi riset. Hingga saat ini, pemerintah telah berhasil mengembangkan STP berbasis perguruan tinggi di 5 (lima) Perguruan Tinggi Negeri diantaranya, Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi

Bab 6.

Sepuluh Nopember (ITS), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Inisiatif ini terus menunjukkan kemajuan terlihat dari kinerja STP yang berhasil memberikan pelatihan inkubasi bisnis kepada 3.000 mahasiswa dan 30 *startup* lokal serta menghasilkan total lebih dari 100 produk inovasi dan 120 paten. Salah satu produk inovasi STP yang telah berhasil dikembangkan yaitu vaksin matriks intranasal untuk pencegahan penyakit *avian influenza* pada unggas dengan tingkat kesiapan teknologi 8 dan telah berkolaborasi dengan mitra industri untuk memasuki tahap produksi.

Pendekatan ini kini diperluas ke tingkat daerah melalui penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA/ekosistem Iptekin daerah), yang mengembangkan ekosistem riset berbasis potensi lokal dengan mengadopsi standar kolaboratif sebagaimana diterapkan di STP. Saat ini, pengembangan ekosistem Iptekin daerah telah memasuki tahap pematangan konsep di daerah *pilot project*, yakni Provinsi Jakarta dan Kota Depok. Inisiatif ini bertujuan memperkuat kapasitas riset secara nasional hingga daerah serta mendorong inovasi di sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, transisi energi, dan kemandirian kesehatan. Beberapa inovasi yang telah dan sedang dikembangkan oleh pemerintah antara lain: (1) penguatan teknologi pasca panen dan masa simpan; (2) pengembangan bahan baku obat dari sumber daya alam lokal; (3) produksi obat dan vaksin penyakit endemik lokal (demam berdarah, TBC, dan beberapa jenis kanker); (4) kit deteksi dini berbagai penyakit endemik lokal; (5) *co-firing* biomassa di PLTU; (6) pengolahan sampah terpadu (*waste to energy*); (7) konversi Limbah Cair Kelapa Sawit (POME) menjadi energi terbarukan; serta (8) penguasaan teknologi reaktor nuklir generasi keempat untuk PLTN.

Penguatan ekosistem inovasi nasional juga mencakup aspek pengawasan ketenaganukliran. Beberapa kegiatan pengawasan ketenaganukliran diantaranya penyelenggaraan dan peningkatan kualitas perizinan dan inspeksi dalam keselamatan, keamanan, dan garda aman ketenaganukliran. Pada tahun 2025, pemerintah telah melakukan pengembangan aplikasi Bapeten *Licensing and Inspection System* (Balis) 2.5 yang telah berkontribusi besar dalam peningkatan efektivitas pelayanan perizinan yang berujung pada peningkatan kualitas perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) dan perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN) dengan capaian sampai dengan bulan Juni 2025 meliputi penerbitan 1.525 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bidang Kesehatan, 1.011 KTUN bidang Industri dan Penelitian, 826 KTUN Petugas Proteksi Radiasi Medis, dan 46 KTUN bidang Instalasi dan Bahan Nuklir. Inspeksi pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan untuk memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan dan penerapan standar keselamatan radiasi dan keamanan dengan capaian sampai dengan Juni 2025 yaitu 108 asesmen inspeksi bidang FRZR dan 25 asesmen inspeksi bidang IBN.

6.4.2. Tantangan dan Upaya

Pengembangan Iptekin menghadapi sejumlah tantangan, meliputi kebutuhan terhadap: (1) proses intermediasi yang menghubungkan hasil Iptekin dengan penerima manfaatnya; (2) efektivitas penganggaran riset yang sesuai dengan kebutuhan pemanfaat hasil Iptekin; (3) peningkatan infrastruktur riset untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang *techno-economy*; (4) peningkatan potensi



kerja sama riset dan pengembangan dengan aktor inovasi lain seperti lembaga pendanaan, industri strategis, dan pelaku usaha; dan (5) optimalisasi dukungan kebijakan dan regulasi sektoral guna mendukung aktivitas penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan hasil teknologi domestik.

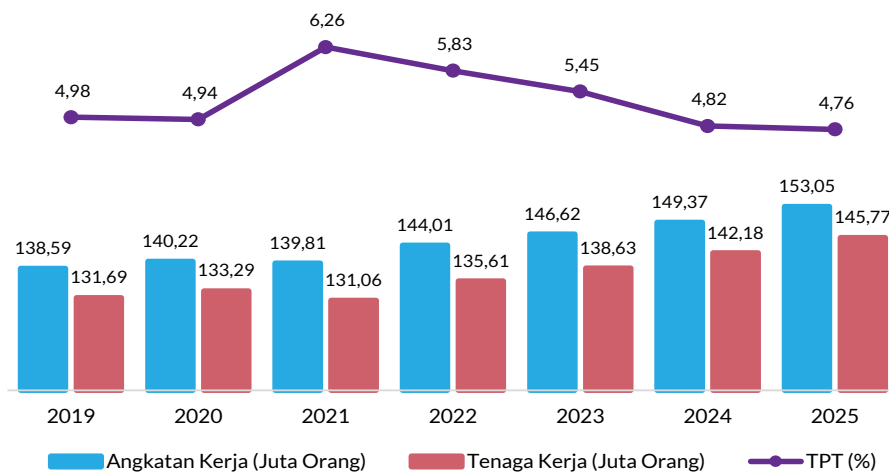
Upaya penguatan ekosistem Iptekin lebih terstruktur, sederhana, dan adaptif terhadap berbagai konteks implementasi akan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas SDM Iptekin, pengembangan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta penyempurnaan regulasi. Selain itu, pemanfaatan hasil riset oleh industri, masyarakat, dan pemerintah terus didorong, salah satunya dengan memperkuat peran lembaga intermediasi, pengembangan layanan BRIDA atau ekosistem daerah, dan pembentukan hub inovasi sektoral di kementerian/lembaga prioritas dan hub tematik di BRIN.

6.5. Ketenagakerjaan

6.5.1. Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penyiapan tenaga kerja produktif dan kompeten terus dilakukan untuk menangkap peluang di pasar kerja melalui peningkatan kualitas tenaga kerja. Penciptaan lapangan kerja juga didukung dengan pengembangan program bantuan modal kewirausahaan seperti program Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula, Bantuan TKM Kemiskinan Ekstrem, dan Bantuan TKM Lanjutan. Pengembangan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dipastikan agar bersifat inklusif dengan tetap memperhatikan kelompok rentan seperti tenaga kerja perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Grafik 6.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 - 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional Periode Februari 2019-2025, diolah.

Bab 6.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 mencatatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen, turun sebanyak 0,06 persen poin dari angka Februari 2024 sebesar 4,82 persen. Penurunan TPT menunjukkan bahwa dinamika pasar tenaga kerja masih cukup optimis di tengah ketidakstabilan global. Jumlah tenaga kerja pada Februari 2025 meningkat sebesar 3,59 juta orang menjadi 145,77 orang dari sebelumnya 142,18 juta orang pada Februari 2024. Peningkatan jumlah tenaga kerja juga disertai dengan peningkatan rata-rata upah pekerja/buruh sebesar 1,64 persen, dari tahun sebelumnya 3,04 juta per bulan menjadi 3,09 juta per bulan pada 2025. Hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menjaga ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif dan berdaya saing.

Di sisi lain, jumlah angkatan kerja meningkat 2,46 persen, dari 149,37 juta orang pada Februari 2024 menjadi 153,05 juta orang pada Februari 2025. Peningkatan ini didukung oleh semakin besarnya partisipasi perempuan dalam pasar kerja, yang kini mencapai 61,11 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 1,29 persen poin, dari 55,41 persen menjadi 56,70 persen dalam setahun terakhir. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan tersebut didukung oleh reformasi ketenagakerjaan melalui revitalisasi kebijakan vokasi, penyempurnaan regulasi, pembinaan hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, serta perlindungan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.

Perpres No. 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (RPVVPV) mendorong dan mengubah paradigma peningkatan kualitas tenaga kerja yang semula berbasis suplai menjadi mengacu pada kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja/industri (*demand driven*). Pada semester I 2025, tercatat bahwa jumlah lulusan pelatihan vokasi mencapai 13.561 orang. Sementara itu, jumlah orang yang telah mendapatkan sertifikasi kompetensi baik dari lulusan pelatihan maupun masyarakat umum sebesar 565.217 orang pada periode yang sama. Perbaikan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ini didukung oleh aksi konkrit Strategi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang memuat matriks rencana aksi multipihak, bahkan dilengkapi kelembagaan berupa Tim Koordinasi Vokasi di tingkat nasional sampai dengan regional (TKNV dan TKDV).

Sejalan dengan hal tersebut, hingga akhir 2024, pemerintah telah mendorong penciptaan kesempatan kerja melalui penyaluran bantuan modal kewirausahaan dalam bentuk bantuan TKM Pemula kepada 43.053 orang dan bantuan TKM Pemula Kemiskinan Ekstrem kepada 9.887 orang. Sementara itu, program Bantuan TKM Lanjutan mampu menciptakan lapangan kerja baru sebesar 3.034 orang.

Perlindungan tenaga kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker), khususnya program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, telah mencakup 28,99 persen pekerja hingga Mei 2025. Lebih rinci, cakupan kepesertaan peserta penerima upah (PPU) sebesar 54,61 persen dan peserta bukan penerima upah (PBPU) sebesar 10,58 persen berdasarkan semesta pekerja per segmen.



“

Dalam upaya mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif sesuai prioritas pembangunan RPJMN 2025-2029, pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) melalui platform SIAPkerja menjadi langkah strategis. SIAPkerja berhasil mengoptimalkan *link and match* antara pencari kerja dan pemberi kerja melalui interaksi dalam bentuk peningkatan keterampilan kerja, pencarian kerja, sertifikasi, data informasi kebutuhan pekerjaan dari industri, sampai dengan analisis dan intelijen pasar kerja secara komprehensif untuk meningkatkan keberkerjaan. SIAPkerja mendorong peningkatan keterampilan dan produktivitas pekerja, sehingga pasar kerja semakin berorientasi kepada kebutuhan yang relevan bagi industri. Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan telah dilibatkan dalam sinergi dan integrasi program pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, perlindungan jaminan sosial untuk membangun iklim ketenagakerjaan yang semakin komprehensif.



Kunjungan Kerja ke BPVP Sorong pada 24 Januari 2024
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas

Bab 6.

Pemerintah mendorong optimalisasi perlindungan terhadap pekerja melalui implementasi PP No. 7/2025 tentang Penyesuaian luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025. Kebijakan ini mengantisipasi ketidakmampuan perusahaan industri padat karya tertentu membayar iuran Jamsosnaker secara masif. Selain itu, sebagai respon terhadap tantangan perekonomian global, pemerintah mengoptimalkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja ter-PHK melalui penetapan PP No. 6/2025 tentang Perubahan atas PP No. 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Peningkatan persentase Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum juga membuktikan kinerja baik pemerintah dalam pelindungan PMI. Semakin terbukanya akses penempatan PMI di beberapa negara tujuan turut mendorong keberhasilan penempatan PMI pada triwulan II 2025 yang mencapai 143.949 orang. Pada periode yang sama, tercatat 65.612 orang atau 45,6 persen PMI telah bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.

6.5.2. Tantangan dan Upaya

Penguatan kondisi ketenagakerjaan secara makro di Indonesia menunjukkan komitmen dan upaya pemerintah dalam pembangunan ketenagakerjaan. Beberapa tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi antara lain: (1) produktivitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan; (2) peningkatan relevansi pendidikan vokasi dan keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri; (3) keterlibatan

dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan vokasi perlu dioptimalkan; (4) peningkatan proporsi pekerja dengan keahlian menengah tinggi yang bekerja pada kegiatan ekonomi formal; (5) perlunya mendorong kesempatan kerja yang merata di level regional serta pasar tenaga kerja yang inklusif termasuk partisipasi angkatan kerja perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia; (6) jumlah perselisihan hubungan industrial yang perlu ditekan disertai dengan penguatan sistem pengawasan terhadap norma ketenagakerjaan; (7) penyediaan sistem informasi pasar kerja yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir; (8) optimalisasi kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan tenaga kerja terampil, serta peningkatan kualitas layanan penempatan pekerja migran Indonesia; dan (9) peningkatan pemahaman calon peserta dan pengawasan serta evaluasi berkala cakupan Jamsosnaker bagi seluruh ekosistem ketenagakerjaan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain: (1) penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi berbasis produktivitas (*reskilling* dan *upskilling*) serta pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*) melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang memuat redesain kurikulum pelatihan dan penyesuaian kejuruan mengikuti kebutuhan dunia usaha, dunia pendidikan, dan dunia kerja (DUDIKA); (2) mendorong *link and match* sistem pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri melalui penguatan SiapKerja menuju SIPK berkelas dunia; (3) peningkatan peran aktif DUDIKA dalam revitalisasi vokasi; (4) peningkatan

keahlian pekerja ke keahlian menengah tinggi serta memperluas program bantuan kewirausahaan bagi UMKM untuk naik kelas ke sektor formal; (5) pengembangan kebijakan ketenagakerjaan inklusif bagi kelompok rentan dan berbasis potensi wilayah; (6) pemenuhan hak-hak pekerja dan dialog sosial serta penerapan norma ketenagakerjaan yang efektif dan efisien; (7) pembangunan dan pemutakhiran sistem informasi pasar kerja nasional yang terintegrasi; (8) penguatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan tenaga kerja terampil serta meningkatkan kualitas layanan penempatan PMI; dan (9) pengawasan dan evaluasi berkala cakupan Jamsosnaker bagi seluruh ekosistem ketenagakerjaan.

6.6. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

6.6.1. Capaian Utama Pembangunan

Keberhasilan kebijakan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) berkontribusi pada terwujudnya penduduk tumbuh seimbang yang menjadi salah satu landasan transformasi pembangunan. Dengan menyediakan akses serta layanan KB dan Kespro yang berkualitas, maka kehamilan yang tidak diinginkan dan kelahiran yang berisiko dapat dicegah. Hal ini mendukung pada upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan stunting yang berkontribusi pada peningkatan Indeks Modal Manusia pada dimensi kesehatan, khususnya mendukung kelangsungan hidup anak dan dewasa.

Tabel 6.5
Capaian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	2025 ^{a)}
Total Fertility Rate/TFR	rata-rata anak per wanita usia subur 15-49 tahun	2,14	2,14	2,11	2,11
Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (<i>Proportion of demand satisfied by modern methods</i>)	%	79,60	83,20	83,97	84,70
Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	%	59,40	60,40	61,71	61,80
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	14,71	11,50	11,11	10,50
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ <i>Age Specific Fertility Rate</i> (ASFR 15-19)	kelahiran hidup per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	22,80	19,70	18,00	18,00
Persentase peserta KB aktif metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,24	23,60	25,52	25,70

Sumber: BKKBN (Pemutakhiran Pendataan Keluarga), 2022–2024
Keterangan: a) Target akhir tahun 2025

Bab 6.

Program KB dan Kespro dilakukan untuk mendorong keinginan masyarakat menggunakan alat kontrasepsi dan merencanakan kehamilan melalui peningkatan pengetahuan, pendampingan, serta penyediaan layanan yang berkualitas. Pelaksanaan program KB dan Kespro telah menunjukkan berbagai kemajuan sampai pada triwulan II 2025.

Upaya peningkatan pemahaman Kespro dimulai dari usia remaja melalui terbentuknya 36.216 kelompok masyarakat Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Selain itu, penyebarluasan promosi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Kespro juga dilakukan melalui berbagai media yang sesuai dengan karakter generasi muda untuk mencegah terjadinya perilaku berisiko seperti kehamilan usia remaja dan perkawinan anak. Telah dilakukan kompetisi video kreatif yang diikuti oleh perwakilan generasi muda dari 34 provinsi sebagai salah satu upaya pelibatan aktif remaja.

Selanjutnya, advokasi dan edukasi kepada Pasangan Usia Subur (PUS) dilakukan oleh Petugas Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tersebar di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Saat ini terdapat sekitar 18.025 PKB dan PLKB yang terdiri dari 5.965 laki-laki dan 12.060 perempuan. Pelibatan PKB dan PLKB laki-laki dalam advokasi dan edukasi KB ini merupakan upaya untuk meningkatkan keikutsertaan laki-laki dalam menggunakan kontrasepsi *modern* jenis vasektomi/Metode Operasi Pria (MOP). Untuk menjamin akses masyarakat dalam mendapatkan layanan KB, pemerintah telah menyediakan 53.114 tempat pelayanan KB yang terdiri dari klinik, dokter, rumah sakit, dan bidan praktik mandiri.

Selain itu, upaya afirmasi telah dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan KB melalui layanan momentum secara serentak, seperti pada peringatan hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ke-74 pada Juni 2025 yang berhasil menjangkau sekitar 1.432.726 akseptor KB.

6.6.2. Tantangan dan Upaya

Upaya peningkatan akses dan layanan KB dan Kespro masih terdapat tantangan khususnya terkait dengan faktor geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program ini. Tantangan utama dalam pelaksanaan Kebijakan KB dan Kespro, di antaranya: (1) disparitas capaian TFR, ASFR, dan *unmet need* antarwilayah, sehingga membutuhkan intervensi spesifik berbasis wilayah; (2) konstruksi norma sosial budaya memengaruhi kepesertaan masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi; (3) gaya hidup dan perilaku berisiko remaja; dan (4) pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga kesehatan (dokter/bidan) yang terlatih dan memiliki sertifikat kompetensi dalam memberikan layanan KB, serta fasilitas layanan kesehatan/ bidan mandiri.

Adapun upaya ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan KB dan Kespro di antaranya: (1) penerapan program KB dan Kespro berbasis kewilayahan dengan memperhatikan disparitas capaian dan tingkat kelahiran di setiap wilayah; (2) penguatan advokasi dan edukasi terkait dengan Kespro yang komprehensif dan berbasis siklus hidup menyesuaikan dengan perbedaan karakteristik sasaran; (3) peningkatan promosi dan KIE tentang alat kontrasepsi dan perencanaan keluarga melalui berbagai media dari *above the line* (radio, televisi, media massa),



through the line (media sosial dan *event*), hingga *below the line* (komunikasi langsung) dengan memfokuskan pada isu terkait efek samping dan rumor dalam penggunaan kontrasepsi; (4) penguatan tata kelola dan koordinasi lintas sektor terkait KB dan Kespro, agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan; (5) penguatan peran tenaga penyuluh lapangan dalam melakukan pembinaan peserta KB guna menurunkan angka putus pakai kontrasepsi, memastikan pemenuhan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) bagi pasangan usia subur (PUS), memperkuat layanan KB pasca persalinan, serta mendorong partisipasi laki-laki sebagai akseptor KB; dan (6) optimalisasi penyelenggaraan promosi dan KIE terkait Program Bangga Kencana secara masif kepada masyarakat dengan

memperhatikan perbedaan karakteristik masyarakat, kelompok berisiko, dan kondisi wilayah yang memiliki kesulitan geografis.

6.7. Kualitas Keluarga

6.7.1. Capaian Utama Pembangunan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peranan penting dalam menciptakan generasi berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan melalui penanaman karakter, transfer nilai positif antar generasi, serta kontrol sosial bagi setiap anggotanya. Semakin berkualitas sebuah keluarga, maka semakin tinggi modal manusia yang terbentuk untuk mewujudkan generasi emas 2045 yang berkarakter dan berdaya saing.

Tabel 6.6
Capaian Indikator Pembangunan Keluarga

Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025 ^{b)}
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	-	64,16	69,51	71,62 ^{a)}	72,89
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	56,07	61,43	62,40	64,10
Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	21,00	22,30	22,32	22,40

Sumber: Pendataan Keluarga 2022-2024 Kemendukbangga/BKKBN, Perhitungan IPKK oleh Bappenas
Keterangan: a) Proyeksi capaian; b) Target akhir tahun 2025

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) merupakan salah satu indikator yang mengukur kualitas keluarga melalui tiga dimensi, yaitu: kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi keluarga. Capaian keluarga yang berkualitas dilakukan melalui berbagai upaya baik yang menasar langsung pada peningkatan kapasitas keluarga maupun

pembentukan lingkungan pendukung keluarga melalui berbagai penyediaan layanan dan pendampingan keluarga.

Dalam rangka mempersiapkan kehidupan berkeluarga, pemerintah telah menerbitkan nota kesepahaman lintas kementerian/lembaga (K/L) tentang pelaksanaan

Bab 6.

bimbingan perkawinan dan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin (Catin). Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Kemendukbangga per Juni 2025, sekitar 230.610 Catin telah mendapatkan pendampingan pra nikah melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Untuk memastikan keluarga dapat menjalankan fungsinya, telah dilakukan peningkatan kapasitas dan pembinaan pada 94.723 kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), 56.894 kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), dan 63.415 kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL).

Pengasuhan merupakan salah satu fungsi keluarga yang sangat krusial dalam pembentukan karakter anak. Pengasuhan yang berkualitas bagi anak perlu dilakukan oleh kedua orang tua secara setara. Dalam rangka penguatan peran laki-laki dalam pengasuhan, pemerintah mendorong Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang bertujuan untuk merespons fenomena *fatherless* atau kurangnya figur ayah dalam keluarga. Salah satu inisiasi kegiatannya adalah gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah sebagai momentum awal pelibatan ayah dalam pengasuhan. Selaras dengan tujuan pembangunan untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, kebijakan pengasuhan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pada tempat pengasuhan sementara melalui program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA). Secara khusus, telah disusun Surat Edaran Bersama No. 2/2025 tentang Pembentukan

dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak (TPA) di Lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), Swasta, dan Masyarakat dengan tujuan memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang layak.

Dalam upaya mencegah terjadinya konflik di dalam keluarga, telah dibentuk berbagai layanan konsultasi dan konseling keluarga. Saat ini tersedia 5.196 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS/Satyagatra) dan 303 Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di level provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Selanjutnya, upaya afirmasi ini turut didukung dari sisi peningkatan ekonomi keluarga melalui pendampingan dan pemberdayaan pada 41.177 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di tahun 2025.

6.7.2. Tantangan dan Upaya

Pembangunan keluarga dipengaruhi oleh berbagai dinamika seperti perubahan bentuk keluarga, peningkatan partisipasi perempuan yang bekerja, serta pola pikir dan gaya hidup generasi muda saat ini. Beberapa tantangan utama dalam meningkatkan kualitas keluarga kedepannya di antaranya: (1) risiko terjadinya perkawinan anak dan kehamilan pada usia remaja; (2) kekerasan dalam rumah tangga dan pola asuh yang tidak layak bagi anak; (3) beragamnya bentuk keluarga yang disebabkan oleh penundaan pernikahan, perceraian, dan mobilitas anggota keluarga; serta (4) memastikan keluarga mampu menjalankan fungsinya, termasuk keluarga yang berada pada kondisi rentan.



Untuk menjawab tantangan di atas, beberapa upaya penting yang perlu dilakukan, di antaranya: (1) peningkatan edukasi terkait dengan usia ideal perkawinan dan pencegahan perilaku berisiko yang berakibat pada perkawinan yang tidak direncanakan; (2) penyiapan kehidupan keluarga yang optimal melalui pendidikan dan pendampingan Catin tentang fungsi keluarga, relasi gender yang setara, serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; (3) penguatan pengasuhan pada anak yang sesuai dengan karakteristik generasi Z dan *Alpha*, termasuk upaya perlindungan dari dampak negatif akses digital seperti adiksi, pornografi, kekerasan pada anak berbasis *online*, dan perilaku berisiko lainnya; (4) peningkatan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam melakukan fungsi keluarga; (5) peningkatan akses dan kualitas layanan pendukung keluarga seperti penitipan anak untuk memastikan pengasuhan yang optimal pada saat kedua orang tua bekerja, serta layanan konsultasi keluarga sebagai media pembelajaran dan pencegahan terjadinya konflik dalam rumah tangga; serta (6) penguatan dukungan terhadap

kelompok rentan melalui program afirmasi untuk memastikan keluarga memiliki legalitas dokumen kependudukan, pemberdayaan keluarga, serta afirmasi bagi keluarga yang memiliki kebutuhan khusus seperti keluarga yang mengalami masalah sosial, perceraian, dan pekerja migran.

6.8 Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan

6.8.1 Capaian Utama Pembangunan

Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan. Capaian indikator pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan menunjukkan tren positif dan kemajuan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Tabel 6.7

Capaian Indikator Pembangunan Bidang Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan

No	Uraian	Satuan	2022	2023	2024	2025 ^{a)}
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	-	0,459 ¹⁾	0,477 ¹⁾	0,421 ¹⁾	0,407
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	91,63 ¹⁾	91,85 ¹⁾	91,85 ¹⁾	92,02-92,11
3.	Proporsi perempuan kawin/ pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	-	0,140 ¹⁾	0,126 ¹⁾	0,094 ¹⁾	0,082
4.	Proporsi Anggota Legislatif	%	Laki-Laki: 78,26; Perempuan: 21,74 ¹⁾	Laki-Laki: 77,86; Perempuan: 22,14 ¹⁾	Laki-Laki: 77,54; Perempuan: 22,46 ¹⁾	Laki-Laki: 77,40 Perempuan: 22,60
5.	Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA	%	Laki-Laki: 42,06; Perempuan: 36,95 ¹⁾	Laki-Laki: 42,62; Perempuan: 37,60 ¹⁾	Laki-Laki: 43,78; Perempuan: 37,64 ¹⁾	Laki-Laki: 44,20 Perempuan: 38,14
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	53,41 ³⁾	54,52 ³⁾	56,42 ³⁾	56,30 - 58,80
7.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	8,70 ²⁾	8,70 ²⁾	6,60 ²⁾	6,30
8.	Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan	ribu rupiah	Laki-Laki: 16.215; Perempuan: 9.281 ¹⁾	Laki-Laki: 16.736; Perempuan: 9.579 ¹⁾	Laki-Laki: 17.346; Perempuan: 9.922 ¹⁾	Laki-Laki: 17.569 Perempuan: 10.035
9.	Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE	lembaga	KL: 7; Provinsi: 4; Kab/Kota: 4 ⁴⁾	KL: 7; Provinsi: 4; Kab/Kota: 4 ⁴⁾	KL: 3; Provinsi: 2; Kab/Kota: 3 ⁴⁾	KL: 4; Provinsi: 3; Kab/Kota: 5

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik, 2022-2024; 2) Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Kementerian PPPA, 2021 dan 2024 (survei tiga-lima tahunan sehingga data 2022 dan 2023 tidak tersedia); 3) Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional Edisi Agustus, 2020-2024; 4) Penganugerahan Parahita Ekapraya Kementerian PPPA, 2022 dan 2024 (survei dua tahunan, sehingga data 2021 dan 2023 tidak tersedia)
Keterangan: a) target tahun 2025



Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 0,459 pada tahun 2022 menjadi 0,421 pada tahun 2024. Keberhasilan pemerintah menurunkan IKG didorong oleh perbaikan secara utuh dan terpadu, khususnya pada peningkatan akses dan kualitas kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan dan politik, serta peningkatan partisipasi ekonomi perempuan. Indikator lainnya terkait dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga turut menggambarkan pencapaian positif. Meskipun terdapat kenaikan yang positif pada capaian laki-laki dan perempuan, pemerintah berkomitmen untuk terus mempersempit kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sehingga seluruh individu dapat merasakan manfaat yang setara dari pembangunan.

Untuk mendukung pembangunan individu yang berkualitas, perlindungan dari segala bentuk kekerasan turut menjadi hal yang krusial. Pada tahun 2021, prevalensi kekerasan tercatat sebesar 8,70 persen, dan menurun menjadi 6,60 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan dan program yang telah diimplementasikan dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan. Meskipun prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir mengalami penurunan, jumlah perempuan di Indonesia yang pernah mengalami kekerasan masih perlu menjadi perhatian. Dengan demikian, penguatan komitmen, evaluasi efektivitas program, serta optimalisasi kebijakan yang responsif gender harus dilakukan guna memastikan setiap perempuan dapat bebas dari kekerasan.

Tata kelola penyelenggaraan pengarusutamaan gender di tingkat pusat dan daerah juga menunjukkan peningkatan, yang terlihat dari semakin banyaknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menerima Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE). Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan dalam pembangunan kesetaraan gender di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, PPE menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan yang responsif gender.

Beberapa capaian positif pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dari kekerasan antara lain: (1) pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di 34 provinsi dan 355 kabupaten/kota; (2) penguatan Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) sebagai aplikasi pencatatan dan pelaporan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) berbasis manajemen kasus; (3) penguatan *call center* Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 sebagai pintu masuk pelaporan atau pengaduan kasus kekerasan; (4) penerbitan peraturan pelaksana dari UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yaitu PP No. 30/2025 tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS; dan (5) penyelenggaraan proses sinkronisasi dan integrasi perspektif gender dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bab 6.

6.8.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan masih mengalami berbagai tantangan antara lain: (1) penyusunan kebijakan/pedoman operasional penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG); (2) penguatan mekanisme koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (3) adanya norma sosial budaya yang memerlukan transformasi positif; (4) afirmasi untuk mendorong TPAK perempuan; (5) penguatan tata kelola pelaksanaan penanganan atau respons terhadap perempuan korban kekerasan; dan (6) penguatan kapasitas SDM lembaga layanan dan aparat penegak hukum.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi tantangan yang ada, antara lain: (1) penyelesaian Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan PUG sebagai acuan pemerintah pusat dalam melakukan koordinasi serta memperjelas peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PUG; (2) penyusunan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Kesetaraan Gender sebagai pedoman pemerintah dalam mengintegrasikan gender di masing-masing sektor; (3) penyusunan strategi komunikasi terkait pembangunan kesetaraan gender yang kontekstual dan

responsif terhadap dinamika sosial budaya; (4) penguatan ekosistem kerja yang inklusif dengan memastikan penerapan kebijakan upah yang adil, mendorong perusahaan menyediakan fasilitas ramah keluarga, serta implementasi jam kerja yang fleksibel; (5) pengembangan bahan ajar dan kurikulum standar serta peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum terkait kesetaraan gender; (6) penguatan peran pembinaan dan pengawasan (Binwas) teknis dalam penyelenggaraan PUG; (7) penguatan data administrasi kasus kekerasan berbasis manajemen kasus yang harus mencakup seluruh proses penanganan, dari pelaporan hingga terminasi kasus; dan (8) penguatan koordinasi dan sinergi layanan dengan mengembangkan standarisasi layanan dan SOP teknis dalam memberikan layanan bagi korban secara komprehensif.

6.9 Perlindungan Anak

6.9.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan bidang perlindungan anak terus menunjukkan kemajuan. Hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia diantaranya melalui peningkatan kualitas pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak dan perlakuan salah lainnya.



Tabel 6.8
Capaian Pembangunan Bidang Perlindungan Anak

No.	Uraian	Satuan	2022	2023	2024	2025 ^{g)}
1.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		63,30 ^{a)}	63,83 ^{a)}	N/A	70,19 ^{b)}
2.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		64,91 ^{c)}	65,58 ^{c)}	N/A	67,57 ^{d)}
3.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		78,57 ^{e)}	79,91 ^{e)}	N/A	81,44 ^{f)}
4.	Prevalensi anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir	%	Laki-laki: 20,51 Perempuan: 26,58 (2021)	N/A	Laki-laki: 31,11 Perempuan: 36,31	Laki-laki: 25,37 Perempuan: 31,60
5.	Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan	%	1,40 (2021)	N/A	2,37	2,41
6.	Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	kabupaten/kota	Utama: 8; Nindya: 66; Madya: 117; Pratama: 121	Utama: 19; Nindya: 76; Madya: 130; Pratama: 135;	Utama: 22; Nindya: 69; Madya: 125; Pratama: 139	Utama: 20; Nindya: 77; Madya: 132; Pratama: 140
7.	Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga	%	77,48 (2021)	N/A	77,89	78,03
8.	Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir	%	7,95 (2021)	N/A	7,28	7,06
9.	Jumlah kabupaten/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan	kabupaten/kota	222	280	N/A	325
10.	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang berstatus menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun	%	8,06	6,92	5,90	5,61
11.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	52,87	56,64	46,81	85

Sumber: Kementerian PPPA, 2022-2024

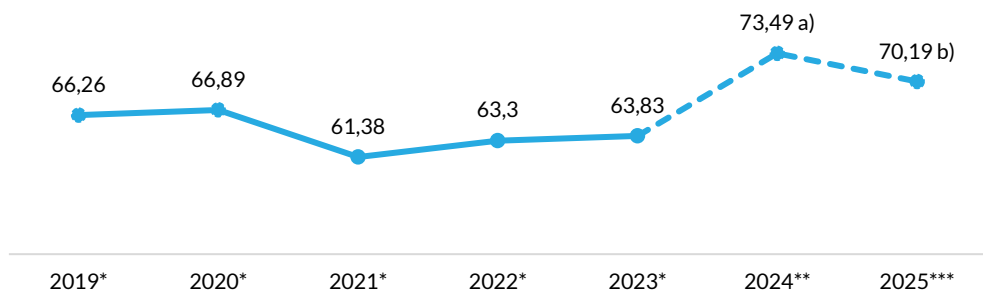
Keterangan: a) indeks dengan 27 indikator penyusun dan merupakan indikator Program Prioritas pada RPJMN 2020–2024; b) indeks dengan 19 indikator penyusun dan merupakan indikator Prioritas Nasional 4 pada RPJMN 2025–2029; c) indeks dengan 24 indikator penyusun dan merupakan indikator Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas 5 di Prioritas Nasional 3 dalam RPJMN 2020–2024; d) indeks dengan 15 indikator penyusun dan merupakan indikator Program Prioritas 17 pada Prioritas Nasional 4 dalam RPJMN 2025–2029; e) indeks dengan 5 indikator penyusun dan merupakan indikator Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas 5 di Prioritas Nasional 3 dalam RPJMN 2020–2024; f) indeks dengan 4 indikator penyusun dan merupakan indikator Program Prioritas 17 pada Prioritas Nasional 4 dalam RPJMN 2025–2029; g) target tahun 2025.

Bab 6.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) menunjukkan peningkatan pasca pandemi COVID-19, IPA meningkat dari 61,38 (2021) menjadi 63,30 (2022) dan 63,83 (2023). Peningkatan capaian IPA didorong oleh berbagai kemajuan lintas sektor, di antaranya melalui pengembangan lingkungan ramah anak. Hal ini ditunjukkan dengan: (1) telah tersedia 90.333 Sekolah Ramah Anak dan 4.109 Puskesmas Ramah Anak; (2) peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran; (3) penguatan pengasuhan

positif berbasis hak anak melalui Sekolah Orang Tua Hebat, program Bina Keluarga Balita (BKB), dan standarisasi Taman Asuh Ceria Ramah Anak (TARA) dimana saat ini telah ada 53 TARA di pusat dan daerah; (4) penguatan implementasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; (5) percepatan penurunan *stunting*; serta (6) penguatan pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.

Grafik 6.3
Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA)



Sumber: *) Kementerian PPPA 2019-2023; **) Target sesuai RPJMN 2020-2024; ***) Target sesuai RPJMN 2025-2029
Keterangan: a) indeks dengan 27 indikator penyusun dan merupakan indikator Prioritas Nasional 3 pada RPJMN 2020-2024; b) indeks dengan 19 indikator penyusun dan indikator Prioritas Nasional 4 pada RPJMN 2025-2029.

Selain itu, turut dilakukan peningkatan perlindungan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk pencegahan dan penghapusan pekerja anak, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam proses peradilan pidana anak, peningkatan perlindungan anak di ranah daring, serta penguatan dan pengembangan UPTD PPA sebagai lembaga layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Angka perkawinan anak yang digambarkan melalui indikator proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus menikah atau hidup

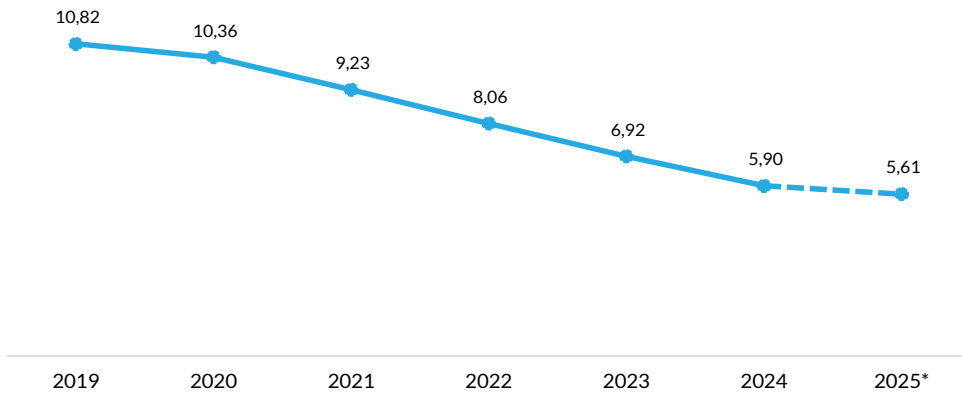
bersama sebelum usia 18 tahun di Indonesia juga menunjukkan penurunan signifikan. Angka perkawinan anak terus menurun dari 10,36 persen (2020) menjadi 6,92 persen (2023) dan 5,90 persen (2024). Kemajuan ini merupakan hasil sinergi upaya di tingkat pusat dan daerah melalui implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) meliputi: (1) penguatan kapasitas anak, melalui peningkatan dan penguatan forum anak serta peran aktif konselor sebaya; (2) penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan



perkawinan anak, melalui penguatan KIE hak kesehatan seksual dan reproduksi di sekolah serta penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai lembaga konsultasi untuk meningkatkan kualitas pengasuhan; (3) peningkatan aksesibilitas perluasan layanan, baik sebelum maupun sesudah terjadinya perkawinan anak, melalui pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah dan pendampingan bagi anak penyintas perkawinan anak; (4) penguatan regulasi dan

kelembagaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui penguatan implementasi panduan praktis pelaksanaan strategi nasional pencegahan perkawinan anak, penyusunan strategi daerah hingga peraturan desa terkait pencegahan perkawinan anak; serta (5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi.

Grafik 6.4
Proporsi Perempuan Umur 20-24 tahun yang Berstatus Menikah atau Hidup Bersama Sebelum Usia 18 Tahun



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (KOR), Badan Pusat Statistik, 2019-2024

Keterangan: *) angka target sesuai Perpres No. 79/2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025

Upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap anak juga terus menjadi prioritas. Penguatan langkah-langkah preventif dan responsif untuk menangani anak korban kekerasan saat ini terus didorong melalui implementasi Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA). Pendekatan ini dilakukan secara kolaboratif dan lintas sektor guna memastikan tersedianya lingkungan yang aman dan ramah anak, serta ketersediaan dan kemudahan akses layanan terintegrasi bagi anak korban kekerasan.

Peningkatan penanganan terhadap anak korban kekerasan saat ini lebih cepat dan komprehensif ditunjukkan melalui: (1) penguatan pelaporan kasus kekerasan melalui layanan pengaduan SAPA 129; (2) penguatan tata kelola penanganan kasus kekerasan melalui penguatan kelembagaan UPTD PPA di provinsi dan kabupaten/kota beserta penguatan kapasitas tenaga layanannya; serta (3) pengembangan SIMFONI PPA berbasis manajemen kasus yang terintegrasi antarlembaga layanan di pusat dan daerah.

Bab 6.

Kemajuan juga tercermin dari meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Sebanyak 22 kabupaten/kota meraih predikat utama, 69 kabupaten/kota meraih predikat nindya, 125 kabupaten/kota meraih predikat madya, dan 139 kabupaten/kota meraih predikat pratama pada tahun 2024. Partisipasi anak juga semakin kuat melalui forum anak di pusat dan daerah yang secara aktif terlibat dalam proses penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan. Pemerintah terus berupaya melibatkan dan memperkuat partisipasi bermakna anak dalam proses pembangunan di berbagai tingkatan.

6.9.2 Tantangan dan Upaya

Perlindungan anak menunjukkan tren positif dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi yaitu: (1) penurunan angka perkawinan anak di beberapa provinsi, pencegahan perkawinan siri pada anak, serta peningkatan akses dan kualitas layanan sebelum terjadi perkawinan untuk anak rentan dan setelah terjadi perkawinan untuk anak korban perkawinan anak; (2) penguatan pengendalian kekerasan terhadap anak di ranah daring yang berkembang dalam berbagai bentuk baru seperti eksploitasi seksual daring, perundungan digital, dan penyebaran konten pornografi; (3) peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas kelembagaan UPTD PPA di daerah; (4) pencegahan kekerasan terhadap anak secara masif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk edukasi publik; (5) peningkatan akses dan kualitas

layanan untuk anak korban kekerasan secara terintegrasi dan komprehensif; (6) optimalisasi integrasi sistem data kekerasan terhadap anak, antarlembaga layanan untuk mendukung penanganan yang efektif, pemantauan terpadu, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti; serta (7) kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola, koordinasi, dan komitmen antarpemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam menjawab tantangan ini, berbagai upaya terus dilakukan meliputi: (1) penguatan pencegahan dan penanganan anak korban perkawinan anak secara komprehensif dan terintegrasi, termasuk penguatan pendataan dan pengembangan kebijakan untuk mencegah dan menangani anak korban perkawinan anak secara siri; (2) peningkatan literasi digital dan penguatan perlindungan anak di ranah daring melalui penyusunan Rancangan Perpres Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring; (3) penyusunan Rancangan Inpres Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (GN-AKTPA) serta pembaruan Stranas PKTA; (4) Peningkatan kapasitas UPTD PPA, melalui penguatan standar layanan, peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi layanan; (5) penguatan, pemantauan, pencegahan, dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terhadap anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyangkut anak serta pekerja anak; serta (6) pengembangan sistem pelaporan dan pencatatan penanganan kekerasan berbasis manajemen kasus melalui portal SIMFONI PPA untuk memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

6.10 Manajemen Talenta Nasional

6.10.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah berkomitmen mencetak talenta Indonesia yang berdayasaing dan diakui secara

global melalui pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang merupakan strategi nasional untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memaksimalkan potensi talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, serta olahraga.

Tabel 6.9
Capaian Utama MTN Bidang Riset dan Inovasi

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	2025
Rasio SDM Iptek per satu juta penduduk	-	1.242,10	1.595,83	1.574	1.700 ^{a)}
SDM Iptek berkualifikasi S3	%	20,71	20,80	25,40	36,23 ^{b)}
Jumlah publikasi internasional yang disitasi	publikasi	45.451 (Kumulatif)	59.443 (Kumulatif)	62.345 (Kumulatif)	72.640 ^{a)} (Kumulatif)
Jumlah paten yang dilisensikan	paten	67 (Kumulatif)	96 (Kumulatif)	116 (Kumulatif)	126 ^{b)} (Kumulatif)
Raihan Olimpiade sains dan teknologi dunia tingkat pelajar dan mahasiswa	orang	1.014 (Kumulatif)	3.849 (Kumulatif)	7.673 (Kumulatif)	8.339 ^{d)} (Kumulatif)
Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan <i>World's Top 2% Scientists</i>	orang	95 ^{c)}	95	150	160 ^{b)}

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, Puspresnas, scimagojr.com 2025

Keterangan: a) target akhir tahun; b) capaian semester I; c) capaian 2021; d) data sementara

Pemerintah terus berkomitmen memperkuat pembinaan talenta riset dan inovasi melalui kebijakan strategis dan apresiasi di tingkat nasional maupun internasional. Komitmen ini tecermin dari meningkatnya prestasi internasional, jumlah publikasi bereputasi, pertumbuhan peneliti bergelar doktor, serta penghargaan bergengsi seperti Habibie Prize, Sarwono Award, Nurtanio Award, Indonesia Innovator Lecture, dan Siwabessy Award. Di sisi lain, pembinaan talenta muda juga

menunjukkan hasil membanggakan, ditandai dengan raihan empat medali internasional oleh pelajar SMA Indonesia dalam ajang International Chemistry Olympiad (ICHO) tahun 2025. Sinergi pemerintah dan perguruan tinggi memastikan generasi muda Indonesia dapat mencapai jenjang tertinggi S3 sebelum usia 29 tahun, dan memilih karier di berbagai bidang sesuai kepakaran dan minatnya.

Bab 6.

Di lain sisi, dukungan pengelolaan dana abadi riset secara terbuka dan kompetitif memastikan sistem merit yang kondusif untuk memotivasi produktivitas komunitas periset nasional. Pencapaian ini mencerminkan ekosistem riset yang semakin kondusif dalam

mendorong inovasi, penciptaan kekayaan intelektual, dan pengakuan global. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi penggerak utama dalam mencetak talenta riset dan inovasi menuju Indonesia Emas 2045.

Tabel 6.10
Capaian Utama MTN bidang Seni Budaya

Uraian	Satuan	2022	2023	2024 ^{a)}	2025 ^{a)}
Persentase lulusan SMK/MAK dan Perguruan Tinggi (PT) bidang studi seni budaya yang bekerja di bidang seni budaya	%	3,28	3,57	3,109	3,33
Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	%	28	26,79	31,50	32,76
Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di tingkat internasional	karya	12	22	126	195
Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional	orang	244	660	572	736
Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional	kegiatan	30	38	108	145

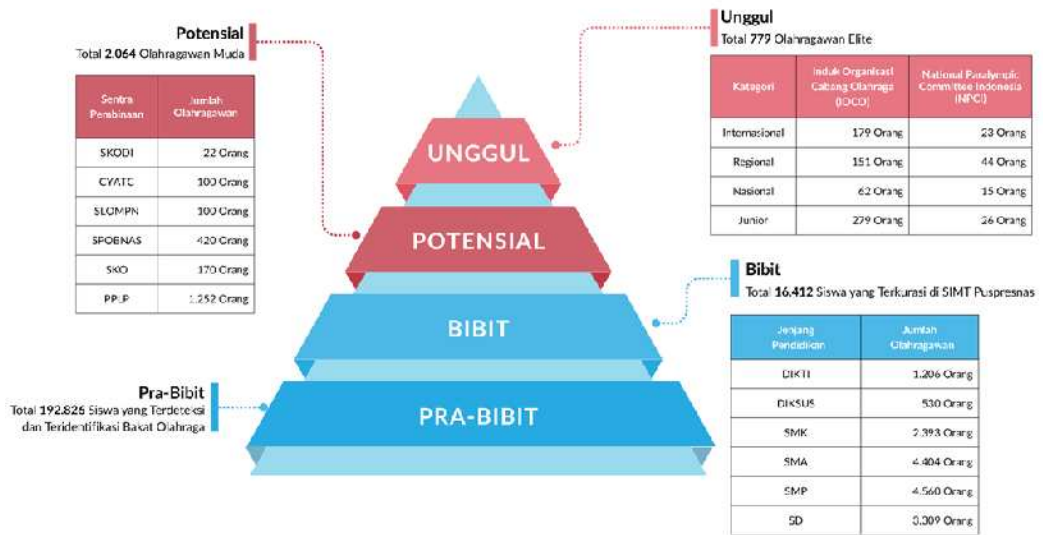
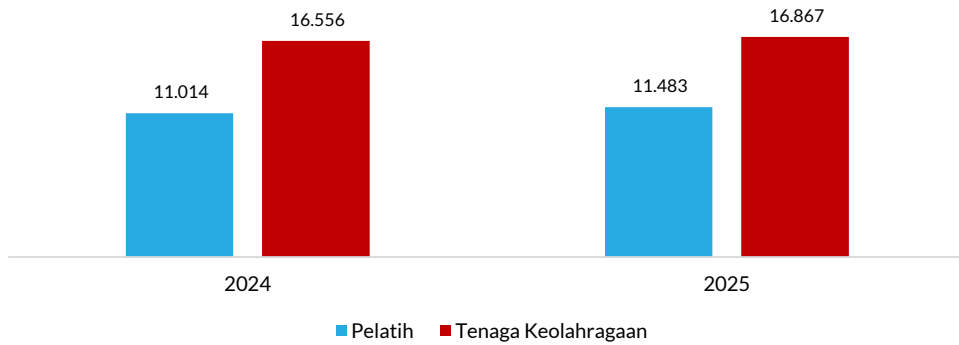
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kebudayaan, 2025
Keterangan: a) target semester I.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui kerja sama dengan lembaga seni, komunitas budaya, dan institusi pendidikan seni antara lain: (1) pelaksanaan laboratorium seni budaya (MTN Lab) di berbagai daerah sebagai wahana pembinaan kreatif dan regenerasi talenta; (2) fasilitasi pembinaan terhadap 1.000 lebih

talenta seni budaya dari tingkat prabibit hingga unggul melalui dukungan pusat dan daerah; serta (3) pelaksanaan kurasi talenta seni budaya di satuan pendidikan melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) untuk memetakan potensi dan merancang intervensi pembinaan secara berkelanjutan.



Grafik 6.5
Grafik Capaian Utama MTN Bidang Olahraga Tahun 2024-2025



Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pusat Prestasi Nasional, 2024-2025

Kebijakan terobosan MTN bidang olahraga telah menunjukkan hasil pembinaan terhadap talenta unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui kerja sama pemerintah dengan lembaga dan organisasi keolahragaan di antaranya: (1) pendampingan terhadap 3 Sekolah Khusus Olahraga (SKO) dan 10 Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) di daerah; (2) fasilitasi pembinaan

terhadap 995 olahragawan di 34 provinsi melalui dana dekonsentrasi; serta (3) pelaksanaan kurasi terhadap talenta di satuan pendidikan melalui SIMT.

6.10.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan yang dihadapi dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang bertalenta, unggul, dan rekognisi secara global, meliputi:

Bab 6.

(1) pemutakhiran basis data talenta nasional, termasuk integrasi data antar lembaga; (2) kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pemanfaatan data talenta secara berkelanjutan; (3) sistem identifikasi, kurasi, dan akuisisi talenta dari tahap dini hingga unggul secara terstruktur dan berkelanjutan; dan (4) pertumbuhan pusat-pusat pembinaan talenta.

Berbagai upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang bertalenta, unggul, dan diakui secara global, antara lain: (1) pengembangan sistem yang terintegrasi antar lembaga, guna menghasilkan data yang akurat, terkini, dan dapat dimanfaatkan secara luas dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan; (2) sosialisasi, penguatan koordinasi, serta pelibatan aktif sektor publik dan swasta dalam pemanfaatan data talenta secara berkelanjutan; dan (3) pengembangan mekanisme seleksi berbasis prestasi dan potensi, serta dukungan pembinaan yang konsisten dan terarah; serta (4) perluasan akses, kapasitas kelembagaan, dan membangun ekosistem pembinaan yang inklusif dan berkelanjutan.



Pada 2024–2025, tercapai prestasi global di tiga bidang: (1) riset dan inovasi melalui penyelenggaraan program *Visiting Researcher* dan *Post-Doctoral* yang terbuka bagi WNI dan WNA, Bantuan Riset Talenta Riset dan Inovasi (BARISTA), pendampingan ide bisnis berbasis teknologi melalui *Technopreneur Assistant*; (2) olahraga melalui penyelenggaraan sentra pembinaan olahraga prestasi di pusat dan daerah, beasiswa keolahragaan LPDP, dan peningkatan jumlah pelatih dan tenaga keolahragaan bersertifikat internasional; serta (3) seni budaya melalui penyelenggaraan MTN Lab, pemanfaatan Dana Indonesiana bagi pengembangan talenta dan penguatan rekognisi global. Salah satunya talenta animasi melalui film *Jumbo* yang telah memperoleh pengakuan sebagai karya yang dilindungi kekayaan intelektual dan dipromosikan di tingkat internasional.

6.11 Pemuda dan Olahraga

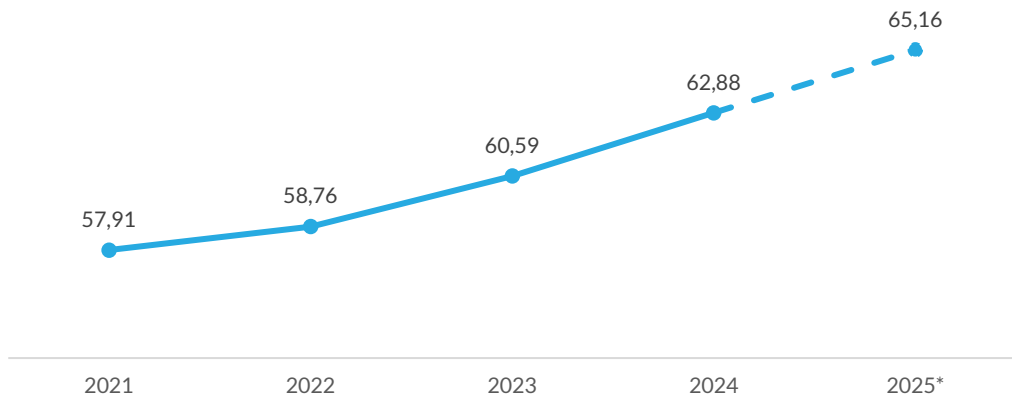
6.11.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan pemuda terus diperkuat sebagai investasi strategis untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Salah satu indikator utamanya, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), meningkat dari 60,59 (2023) menjadi 62,88 (2024). Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kualitas pemuda pada berbagai dimensi kehidupan mencakup pendidikan dan pelatihan, kesehatan, ketenagakerjaan layak, partisipasi dan kepemimpinan, serta inklusivitas dan kesetaraan gender. Capaian ini didukung dengan berbagai intervensi pemerintah hingga akhir 2024, meliputi: (1) penguatan kapasitas 49.022 pemuda melalui program kemandirian, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan, dan pencegahan perilaku berisiko; (2) fasilitasi terhadap 105 lembaga/komunitas pemuda dalam kepemimpinan dan kepeloporan; serta (3) pembinaan dan pengembangan terhadap 20 organisasi kepramukaan (Kwartir Nasional/Satuan Karya/Satuan Komunitas).

Saat ini telah terbentuk 38 Kwartir Daerah di tingkat provinsi dan sedikitnya 400 Kwartir Cabang di tingkat kabupaten/kota yang menjadi struktur pendukung utama penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Indonesia. Pendidikan Kepramukaan sebagai bagian integral dari penguatan pendidikan karakter pemuda diperkuat dengan terbitnya Permen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 13/2025 yang menetapkan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.



Grafik 6.6
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2021-2025

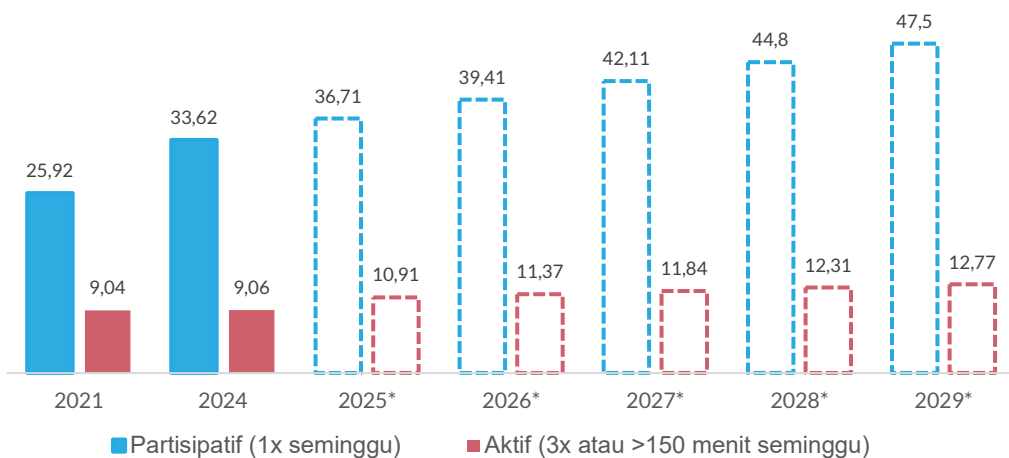


Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Pusat Statistik, 2025
Keterangan : *) Angka target RKP 2025 (IPP telah ditinjau ulang dan dimutakhirkan struktur, definisi operasional, ruang lingkup, indikator penyusun, metodologi penghitungan hingga disagregasi datanya).

Pemerintah telah melakukan berbagai intervensi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga hingga akhir 2024 di antaranya melalui program kampanye dan festival olahraga pada lingkup olahraga masyarakat, layanan khusus, dan di satuan pendidikan dengan

jumlah peserta mencapai 195.429 orang dalam serangkaian event Liga Antarkampung (Tarkam), Piala Presiden, Festival Olahraga Pendidikan (FOP), dan Pekan Paralimpiade Pelajar Nasional (Peparpenas); serta fasilitasi peralatan, sarana, dan prasarana olahraga melalui 402 lembaga.

Grafik 6.7
Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik, 2024
Keterangan: *) angka proyeksi

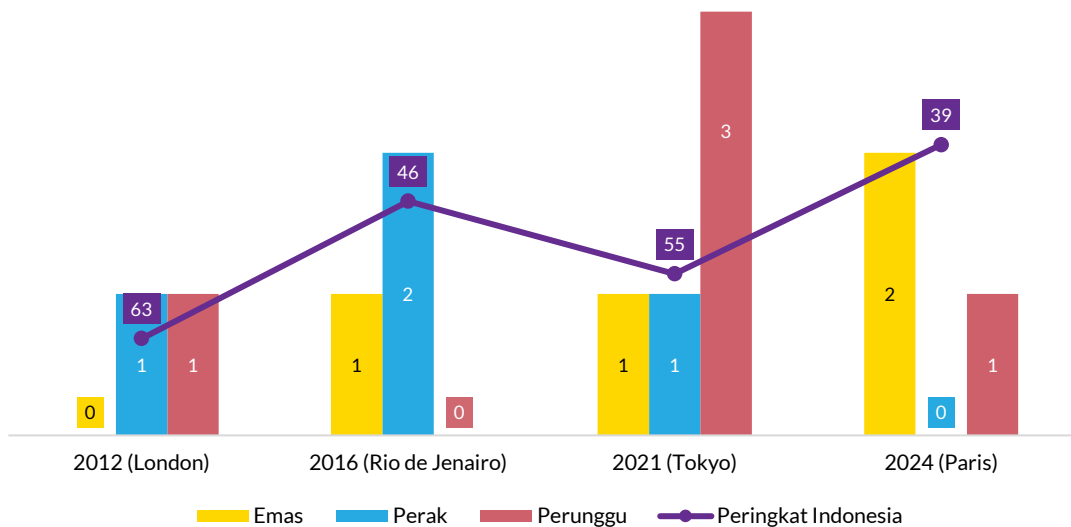
Bab 6.

Peningkatan prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional tecermin dari capaian prestasi di sejumlah ajang seperti Olimpiade, Paralimpiade, dan kualifikasi Piala Dunia Sepak Bola. Sampai dengan akhir tahun 2024, Pemerintah telah melakukan berbagai intervensi di antaranya: fasilitasi penyelenggaraan Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) terhadap 1.615 olahragawan (elite junior dan senior), peningkatan kapasitas melalui penyelenggaraan/keikutsertaan pelatihan bagi 604 pelatih dan tenaga keolahragaan bersertifikasi nasional dan internasional, keikutsertaan/penyelenggaraan

single-event dan *multi-event* internasional, penyediaan peralatan, sarana dan prasarana olahraga melalui 235 lembaga.

Olimpiade dan Paralimpiade 2024 di Paris menjadi pembuktian upaya peningkatan prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia. Pertama kalinya Indonesia meraih dua emas dari dua cabang olahraga berbeda di olimpiade, mengakhiri penantian 32 tahun raihan satu emas dalam setiap edisi Olimpiade. Sementara itu, capaian medali yang diraih Indonesia pada Paralimpiade merupakan jumlah medali terbanyak sepanjang sejarah keikutsertaan dengan total raihan 14 medali.

Grafik 6.8
Prestasi Olahraga Indonesia pada Olympic Games Tahun 2012-2024

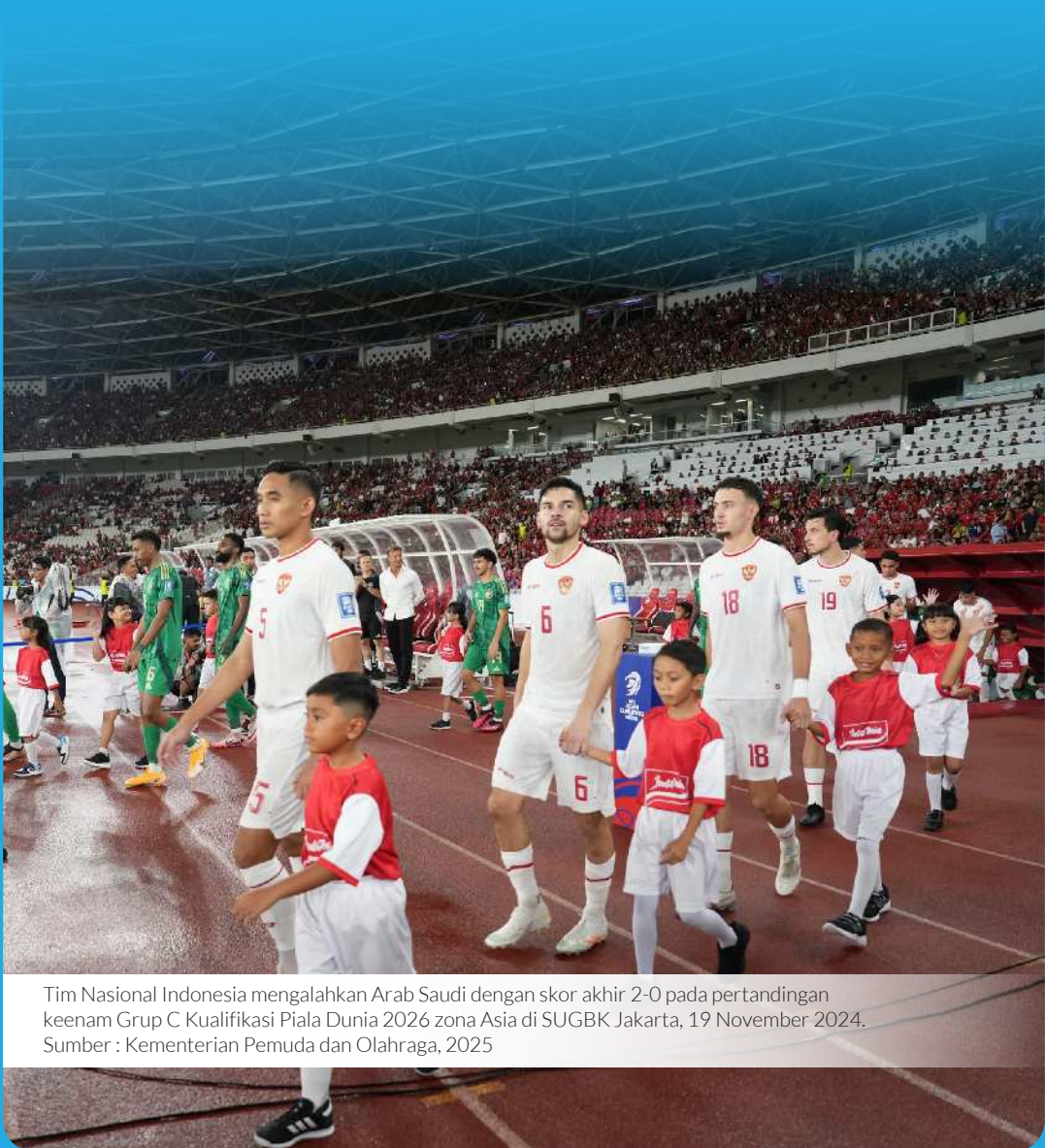


Sumber: International Olympic Committee, 2012-2024



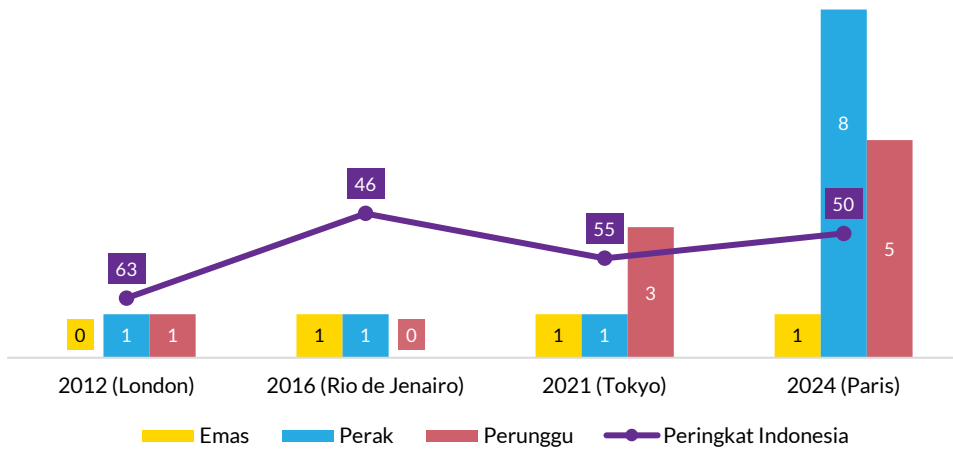
“

Prestasi olahraga yang membanggakan di tingkat dunia tidak dapat tercapai tanpa proses pembinaan yang berkualitas, berjenjang, dan berkelanjutan. Dalam rangka memastikan kualitas pembinaan dan meningkatkan daya saing olahragawan tersebut, pemerintah dalam kurun 2024-2025 telah menunjukkan keseriusan dengan membangun sejumlah pusat pembinaan olahraga prestasi, di antaranya Cibubur Youth Elite Training Center sebagai pusat pembinaan olahragawan usia muda nasional, Paralympic Training Center di Karanganyar sebagai pusat pembinaan olahragawan disabilitas nasional, Indonesia Athletic Training Center di Pangalengan sebagai pusat pelatihan nasional untuk atletik, training center PSSI di IKN sebagai pusat pelatihan nasional untuk sepak bola, dan renovasi 17 stadion sesuai dengan standar internasional.



Tim Nasional Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor akhir 2-0 pada pertandingan keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK Jakarta, 19 November 2024.
Sumber : Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2025

Grafik 6.9
Prestasi Olahraga Indonesia pada Paralympic Games Tahun 2012-2024

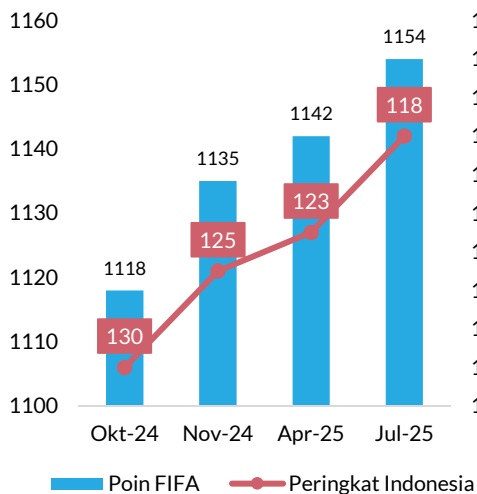


Sumber: International Paralympic Committee, 2012-2024

Upaya percepatan pembangunan persepakbolaan nasional sebagai olahraga paling digemari oleh masyarakat Indonesia terus didorong untuk meraih prestasi yang membanggakan di tingkat dunia. Timnas Sepak Bola Putra Indonesia berhasil lolos ke putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, serta otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Selain

itu, peningkatan kompetensi dan partisipasi dalam kualifikasi Piala Asia dan turnamen regional terus didorong untuk memperkuat pembinaan Timnas Sepak Bola Putri, sehingga Timnas Sepak Bola Putri Indonesia mampu memperoleh juara Piala ASEAN Football Federation Women's Championship 2024, mengalahkan Thailand di pertandingan final.

Peringkat dan Poin FIFA Tim Sepak Bola Putra Indonesia 2024–2025



Grafik 6.10

Peringkat dan Poin FIFA Tim Sepak Bola Putri Indonesia 2024–2025



Sumber: Federation Internationale de Football Association (FIFA), 2025



Pada beberapa *single-event* internasional, olahragawan Indonesia juga menunjukkan prestasi yang membanggakan. Rahmat Erwin Abdullah meraih tiga medali emas dan memecahkan rekor dunia di Kejuaraan Angkat Besi Asia 2025 di Jiangshan, Tiongkok. Luluk Diana Tri Wijayana meraih medali emas di International Weightlifting Federation World Championship 2025 di Lima, Peru. Raharjati Nursamsa dan Desak Made Rita menyumbangkan dua medali emas dari kategori *speed* putra dan putri pada International Federation of Sport Climbing World Cup Krakow 2025.

Selain berpartisipasi dan mendapatkan berbagai prestasi pada *event* olahraga internasional, pemerintah juga telah menunjukkan kesuksesan selaku tuan rumah dalam menyelenggarakan berbagai *event* bergengsi. Beberapa di antaranya: (1) Mandalika Racing Series dan Mandalika Festival of Speed 2025 memberikan dampak positif terhadap pariwisata dan perekonomian lokal; dan (2) Formula E 2025 di Jakarta yang memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap teknologi ramah lingkungan dan masa depan mobilitas berkelanjutan.

6.11.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan pemuda menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (1) pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan, program, dan intervensi pembangunan pemuda yang lebih tepat sasaran dan berdampak; (2) tata kelola layanan kepemudaan yang terpadu lintas sektor dan lintas level pemerintahan; (3) peningkatan kualitas dan daya saing pemuda untuk memanfaatkan momentum bonus demografi; (4) optimalisasi pencegahan perilaku berisiko dan kerentanan ekonomi

pemuda, melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan; serta (5) membangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang responsif dan inklusif, di tingkat pusat dan daerah, guna mendorong partisipasi aktif serta kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain: (1) meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam pemanfaatan IPP untuk perencanaan dan penganggaran; (2) memperkuat regulasi terkait koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; serta (3) menyusun Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan sebagai kerangka implementasi yang terarah dan berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang olahraga, antara lain: (1) budaya olahraga dalam masyarakat yang mengalami perubahan gaya hidup kurang gerak (*sedentary lifestyle*); (2) ketersediaan sarana dan prasarana olahraga terstandar dan ramah disabilitas; (3) implementasi *sport science* dan teknologi dalam peningkatan prestasi olahraga untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat; (4) ekosistem birokrasi yang kolaboratif dalam pengembangan olahraga; (5) kesejahteraan olahragawan dan pelatih purna prestasi; serta (6) skema pembiayaan inovatif di luar APBN/D.

Upaya yang dilakukan antara lain: (1) peningkatan kampanye pada lingkup olahraga masyarakat, pendidikan, dan layanan khusus; (2) peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional yang ramah disabilitas; (3) pengembangan sistem pembinaan olahragawan talenta unggul; (4) pengembangan tenaga dan organisasi

Bab 6.

olahraga berstandar internasional; (5) peningkatan koordinasi lintas sektor melalui peta jalan Desain Besar Olahraga Nasional dan Rencana Aksi Desain Besar Manajemen Talenta Nasional; (6) pengembangan skema penghargaan dan jaminan kesejahteraan yang berkelanjutan serta membentuk dana perwalian olahraga.

6.12 Perpustakaan

6.12.1 Capaian Utama Pembangunan

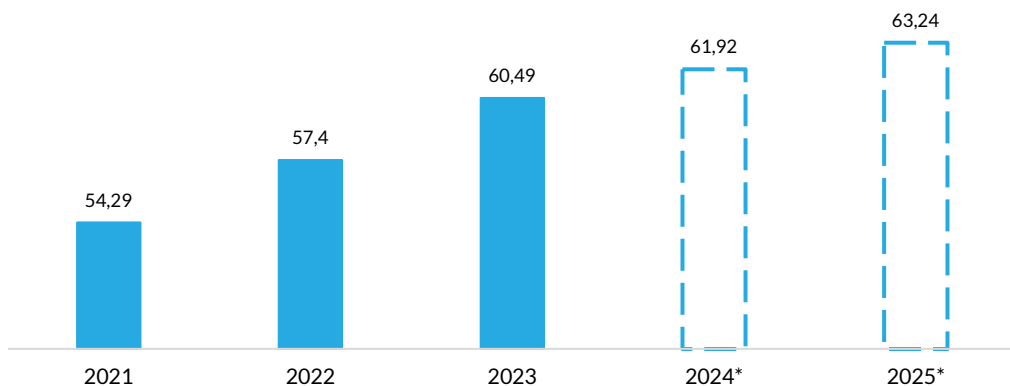
Pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat ekosistem literasi dan pengetahuan bangsa sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, salah satunya melalui optimalisasi peran perpustakaan. Sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan berperan tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menciptakan masyarakat yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Penguatan ekosistem literasi diukur antara lain melalui indikator nilai budaya literasi.

Indikator ini menggambarkan tingkat literasi penduduk, yang dilihat dari kebiasaan membaca, mengakses informasi melalui internet, serta mengunjungi perpustakaan ataupun memanfaatkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Pada tahun 2023 nilai budaya literasi Indonesia sebesar 60,49 meningkat dari tahun 2022 sebesar 57,40. Nilai budaya literasi diproyeksikan mengalami kenaikan menjadi 63,24 pada 2025. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan.

Peningkatan nilai budaya literasi juga menunjukkan adanya perluasan makna literasi di masyarakat. Literasi tidak lagi dipahami sekadar membaca, menulis, dan menghitung, tapi juga mengakses informasi untuk mengatasi berbagai persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Capaian nilai budaya literasi juga turut mengukuhkan peran perpustakaan dalam pembangunan sebagai lembaga yang berperan aktif mewujudkan masyarakat berpengetahuan melalui suatu gerakan literasi yang bersifat kolektif.

Grafik 6.11
Capaian Nilai Budaya Literasi



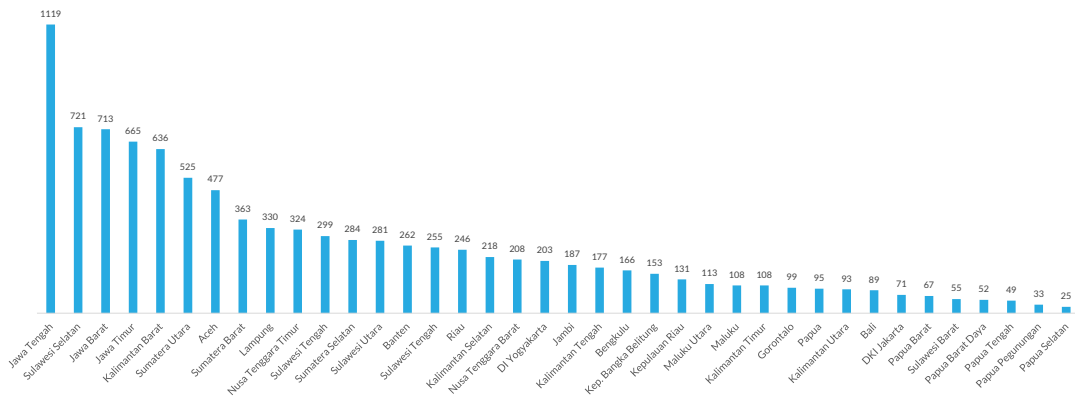
Sumber: Kementerian Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Bappenas (2025), diolah
Keterangan: *) angka proyeksi



Dalam upaya pengembangan budaya baca dan kecakapan literasi, pemerintah melakukan beberapa intervensi kebijakan. Salah satunya program Bantuan Bahan Bacaan Bermutu kepada 10.000 penerima, terdiri dari 6.916 perpustakaan desa/kelurahan dan 3.084 taman bacaan masyarakat. Sejak tahun 2024 hingga bulan Juli 2025 program ini telah dilaksanakan di 37 provinsi, 451 kabupaten/kota dengan 10.000 penerima mencakup 7.968 perpustakaan umum dan 2.102 perpustakaan rumah ibadah. Adapun

bentuk program berupa pemberian 1.000 judul buku bermutu dan bimbingan teknis kepada pengelola perpustakaan/TBM. Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang telah dimulai sejak tahun 2018. Hingga bulan Juli 2025, tercatat telah ada 2.726 perpustakaan yang mendapat intervensi TPBIS dengan sebaran di 34 provinsi, 296 kabupaten/kota, dan 2.396 perpustakaan desa/kelurahan.

Grafik 6.12
Sebaran Penerima Bantuan Perpustakaan Desa/Kelurahan Tahun 2024



Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2025, diolah

Perkembangan ekosistem literasi nasional juga tercermin dari tingginya partisipasi masyarakat. Pada 2024, tercatat 2,98 juta kunjungan masyarakat ke berbagai jenis perpustakaan, baik secara luring maupun daring. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi seperti diskusi, lokakarya, pameran tercatat mencapai 32,5 juta orang, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 22 juta orang.

Selain itu, dilakukan pengadaan koleksi buku, langganan jurnal elektronik, dan

pengembangan aplikasi perpustakaan digital yang terintegrasi dalam jaringan nasional Indonesia *OneSearch* (IOS) yang melibatkan 781 lembaga. Program lain adalah pembangunan Pojok Baca Digital (POCADI) yang menyediakan akses ke sumber informasi fisik maupun digital di ruang-ruang publik strategis. Upaya ini diperkuat dengan penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan perpustakaan daerah yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Bab 6.

Dalam rangka menjaga memori kolektif bangsa serta memperkuat literasi berbasis kearifan lokal, pemerintah telah melaksanakan program Pemajuan Naskah Nusantara. Hingga Juli 2025, dilakukan program pelestarian fisik dan isi naskah melalui percepatan digitalisasi naskah. Dari 13.318 naskah, sebanyak 7.987 naskah telah dialihmediakan dan dapat diakses melalui Khasanah Pustaka Nusantara (Khastara). Selain itu, diterbitkan 910 judul buku berbasis naskah, baik alih aksara, alih bahasa, saduran, maupun kajian, serta 100 hasil alih wahana dalam bentuk komik. Tujuh naskah kuno juga telah diidentifikasi dan dikelola sebagai bagian dari program Ingatan Kolektif Nasional (IKON). Selain itu, telah terdaftar 14 naskah sebagai IKON, dan delapan naskah sebagai *Memory of the World (MoW)*, baik internasional maupun regional. Sebagai bagian dari penguatan literasi kebangsaan, dilaksanakan juga program promosi warisan dokumenter, seperti *Babad Diponegoro* dan *Peristiwa 200 Tahun Perang Jawa*.

Seiring dengan berbagai inovasi dan intervensi kebijakan, termasuk pemberdayaan TBM, POCADI, dan implementasi layanan inklusi sosial, terjadi peningkatan signifikan pada tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia dari awalnya sebesar 66,77 pada tahun 2023 menjadi 72,44 pada tahun 2024. Pemerintah juga menggagas kolaborasi lintas sektor melalui sosialisasi budaya baca, promosi literasi digital di berbagai platform, pemberdayaan duta baca di daerah, serta penyelenggaraan kegiatan literasi berbasis partisipatif seperti festival dan kompetisi.

Pemerintah juga terus melancarkan berbagai aktivitas literasi seperti Gerakan Indonesia Membaca yang mencakup kegiatan membaca nyaring, menulis esai dan resensi, diskusi

bersama penulis, lomba mendongeng dengan partisipasi masyarakat luas, serta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Literasi yang bekerja sama dengan 22 perguruan tinggi di 1.000 desa pada tahun 2025. Pelatihan teknis juga diberikan kepada pengelola perpustakaan desa, TBM, dan perpustakaan sekolah, disertai dengan pelaksanaan akreditasi institusi perpustakaan serta sertifikasi dan uji kompetensi bagi pustakawan.

6.12.2 Tantangan dan Upaya

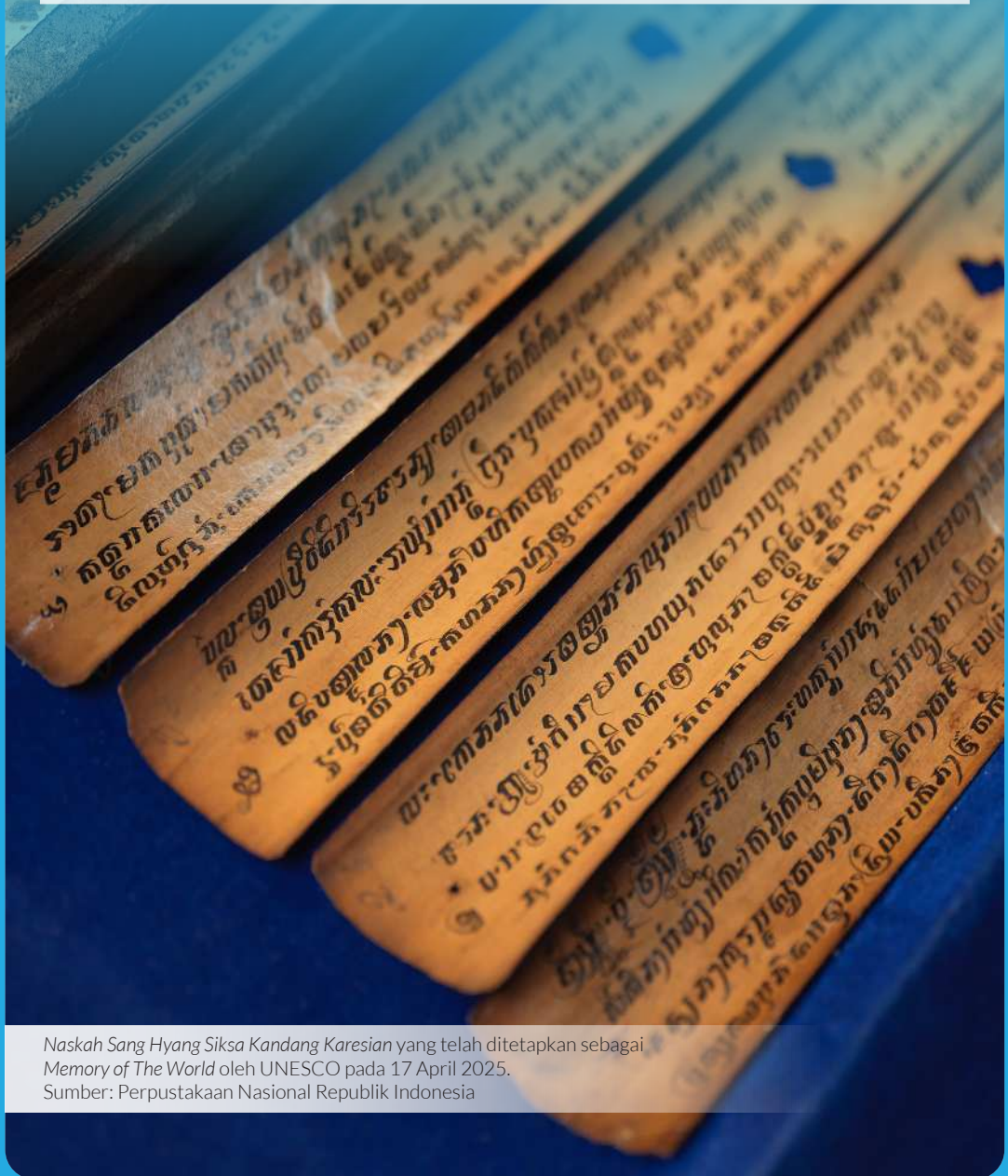
Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang perpustakaan, antara lain: (1) ketersediaan jumlah perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP), baik dari sisi kelembagaan, koleksi, layanan, maupun sumber daya manusia; (2) ketersediaan akses yang merata terhadap bahan bacaan berkualitas dan pengembangan ekosistem digital nasional untuk mendukung transformasi perpustakaan; (3) kompetensi pengelola perpustakaan dan pelestari naskah kuno; dan (4) penguatan kolaborasi dan sinergi gerakan literasi antar lembaga.

Merespons tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, antara lain: (1) penyusunan regulasi dan fasilitasi teknis untuk mendorong setiap perpustakaan memenuhi SNP; (2) peningkatan akses atas bahan bacaan bermutu melalui digitalisasi dan mobilisasi layanan perpustakaan keliling, terutama di wilayah 3T; (3) penguatan kapasitas dan kompetensi pelestari bahan dan naskah kuno; (4) pengoptimalan kolaborasi dan sinergi gerakan literasi antar lembaga, baik dalam pelaksanaan program, kegiatan, maupun pendanaan filantropi untuk peningkatan budaya baca.



Pemajuan Naskah Kuno Nusantara sebagai *Memory of the World*

Pemerintah terus berkomitmen melestarikan khazanah warisan dokumenter yang memiliki nilai penting bagi kemanusiaan. Upaya ini telah mendapatkan rekognisi internasional, salah satunya melalui Naskah *Sanghyang Siksa Kandang Karesian* dan Karya-Karya Hamzah Fansuri yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Ingatan Kolektif Dunia (*Memory of the World/MoW*) pada 17 April 2025. Dua dokumen ini menambah daftar naskah kuno dari Indonesia yang telah diakui sebagai MoW, selain *La Galigo* (2011), *Babad Diponegoro* (2013), *Nagarakretagama* (2013), *Cerita Panji* (2017), dan *Hikayat Aceh* (2023). Selain itu, ada juga naskah *Tambo Tuanku Imam Bonjol* (2024) yang diakui sebagai MoW Asia Pasifik.



Naskah *Sang Hyang Siksa Kandang Karesian* yang telah ditetapkan sebagai *Memory of The World* oleh UNESCO pada 17 April 2025.
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia



Kilang Minyak Blok Cepu
Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Presiden

BAB 7

ASTA CITA 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN LINGKUP INDUSTRI DAN HILIRISASI TAHUN 2024 – SEMESTER I 2025

Rasio PDB Industri Pengolahan¹⁾

%	2024	Triwulan II	
		2024	2025
	18,98	18,52	18,67
%	2024	Triwulan II	
		2024	2025
	4,43	3,95	5,68

Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan¹⁾

Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel²⁾

Juta ton/tahun	
2024	
33,68	
Semester I	
2024	2025
31,31	36,96

Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga²⁾

Ribu ton/tahun	
2024	
735	
Semester I	
2024	2025
685	1.195

Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah²⁾

Ribu ton/tahun	
2024	
130,83	
Semester I	
2024	2025
130,83	130,83



Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut²⁾

%	
2024	
49,51	
Semester I	
2024	2025
49	55

Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa²⁾

%	
2024	
40	
Semester I	
2024	2025
45	40

Ragam Produk Hilir Sawit²⁾

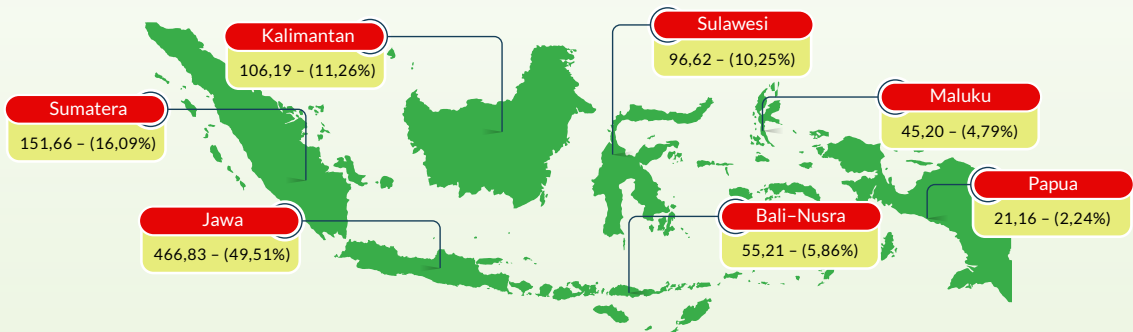
Produk	
2024	
193	
Semester I	
2024	2025
193	195

Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit²⁾

Juta ton/tahun	
2024	
5	
Semester I	
2024	2025
5	16

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik; 2) Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM, 2025

REALISASI INVESTASI BERDASARKAN PULAU (RP TRILIUN) SEMESTER I 2025



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2025



BAB 7

ASTA CITA 5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam bertujuan membangun fondasi industri bernilai tambah tinggi, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global. Fokus pada tahun 2025 mencakup hilirisasi komoditas mineral, perkebunan, maritim, serta pengembangan industri padat karya dan industri berbasis teknologi menengah-tinggi. Optimalisasi hilirisasi membutuhkan dukungan infrastruktur dan ekosistem yang memadai, termasuk pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK) untuk menarik investasi. Dengan fasilitas dan insentif yang memadai, investasi dapat meningkat dan mempercepat proses industrialisasi. Sinergi antara hilirisasi, KI/KEK, dan investasi akan memperkuat perdagangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

7.1 Hilirisasi Industri

7.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor utama PDB berdasarkan lapangan usaha. Di tengah kondisi ketidakpastian global, sektor industri pengolahan pada triwulan II 2025 masih mencatat pertumbuhan sebesar 5,68 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh keberlanjutan proyek hilirisasi, terutama hilirisasi mineral yang berkembang menjadi produk bernilai tambah tinggi. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan subsektor Industri Logam Dasar mencapai *double digit* pada triwulan II 2025 masih mencatat pertumbuhan sebesar 14,91 persen (yoy).

Faktor pendorong kinerja hilirisasi mineral pada tahun ini antara lain (1) percepatan realisasi proyek hilirisasi nikel menjadi baterai di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah; (2) operasionalisasi smelter tembaga dan industri *copper foil* di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat; serta (3) proyek hilirisasi bauksit ke alumina dan aluminium di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Selain itu, sebanyak tujuh smelter dari 16 smelter prioritas telah mencapai kemajuan konstruksi lebih dari 90 persen dan diharapkan dapat beroperasi pada akhir tahun 2025.

Tabel 7.1
Capaian Indikator Pembangunan Lingkup Industri dan Hilirisasi
Tahun 2024 - 2025

Indikator	Satuan	2024	Semester 1	
			2024	2025
Rasio PDB Industri Pengolahan ¹⁾	%	18,98	18,52 ^{a)}	18,67 ^{a)}
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan ¹⁾	%	4,43	3,95 ^{a)}	5,68 ^{a)}
Kapasitas Produksi Industri Olahan Nikel ²⁾	juta ton/tahun	33,68	31,31	36,96
Kapasitas Produksi Industri Olahan Tembaga ²⁾	ribu ton/tahun	735	685	1.195
Kapasitas Produksi Industri Olahan Timah ²⁾	ribu ton/tahun	130,83	130,83	130,83
Kapasitas Produksi Industri Olahan Bauksit ²⁾	juta ton/tahun	5	5	16
Ragam Produk Hilir Sawit ²⁾	produk	193	193	195
Utilisasi Industri Pengolahan Kelapa ²⁾	%	40	45	40
Utilisasi Industri Pengolahan Rumput Laut ²⁾	%	49,51	49	55

Sumber: 1) Badan Pusat Statistik; 2) Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM, 2025

Keterangan: a) Triwulan II

Nikel merupakan salah satu komoditas utama hilirisasi yang mendukung peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Kapasitas produksi industri olahan nikel meningkat dari 30,57 juta ton/tahun pada 2023 menjadi 36,96 juta ton/tahun pada semester I 2025. Selain itu, sebanyak 55 industri pirometalurgi telah beroperasi dan menghasilkan Nikel Kelas 2 (NPI, FENI, dan *Nickel Mate*), dimana enam diantaranya telah memproduksi *stainless steel slab/coil*. Lebih strategis lagi, sebanyak tujuh industri hidrometalurgi telah mampu menghasilkan *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP) dari bijih nikel kadar rendah. Puncak keberhasilan hilirisasi nikel yakni menciptakan *nickel sulphate* sebagai bahan baku pembentuk ekosistem kendaraan listrik nasional. Hilirisasi nikel diharapkan masih akan terus berkembang. Pemerintah terus mendorong ketersediaan bahan baku dan rantai pasok

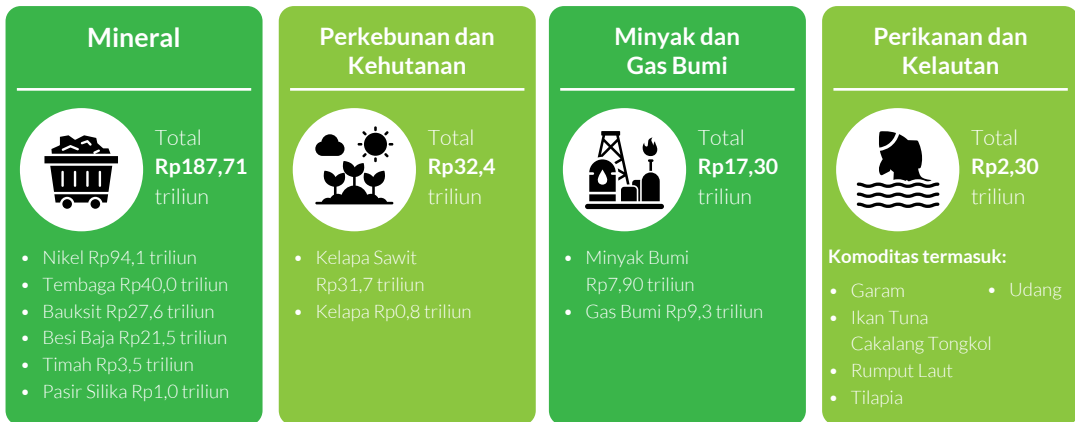
di dalam negeri. Salah satunya melalui implementasi penerapan tarif royalti progresif yang mendukung hilirisasi, sebagaimana diatur melalui PP No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hilirisasi komoditas sumber daya hayati juga menunjukkan kemajuan yang berarti. Salah satunya adalah hilirisasi kelapa sawit, dengan dihasilkannya 195 ragam produk hilir sawit di dalam negeri. Upaya peningkatan nilai tambah juga terlihat dari rasio ekspor produk hilir kelapa sawit terhadap bahan baku yang mencapai 92 persen pada tahun 2024. Dampak positif dari industri sawit tecermin dari penyerapan tenaga kerja langsung yang mencapai 4,2 juta orang dan diperkirakan menghidupi sekitar 17 juta jiwa.

Lebih lanjut, nilai realisasi investasi 15 komoditas prioritas hilirisasi pada semester I 2025 mencapai Rp239,7 triliun, atau setara dengan 25,4 persen dari total realisasi investasi

yang masuk ke Indonesia. Realisasi investasi terbesar masih dipegang oleh industri nikel, yakni Rp94,1 triliun, disusul dengan tembaga, kelapa sawit, bauksit dan besi-baja.

Gambar 7.1
Nilai Realisasi Investasi 15 Komoditas Prioritas Hilirisasi Semester I 2025 (Rp. Triliun)



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2025

Selain agenda hilirisasi, beberapa subsektor industri pengolahan lainnya juga menunjukkan kinerja positif. Salah satunya industri makanan dan minuman yang tumbuh 6,09 persen (yoy) pada semester I 2025, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (5,70 persen, yoy). Selain efek peningkatan permintaan (*demand pull*) pada saat Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, perbaikan kinerja ini juga didukung oleh penerapan *smart manufacturing* di beberapa perusahaan besar. Penerapan tersebut menjadikan subsektor industri makanan dan minuman sebagai subsektor dengan jumlah perusahaan yang memiliki nilai *Indonesia Industry 4.0 Readiness Index*¹ (INDI 4.0) di atas 3,00 terbesar dibandingkan subsektor industri pengolahan lainnya.

Agar produk industri pengolahan dapat diterima di pasar global, diperlukan penyesuaian aspek keberlanjutan bagi hilirisasi dan industrialisasi melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi proses produksi, dan penerapan prinsip ekonomi sirkular. Pemerintah terus mendorong peningkatan jumlah perusahaan industri yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH), rasio penggunaan material sirkular, dan penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi.

Selain penguatan industri pengolahan, pemerintah juga melakukan pemberdayaan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui

¹ INDI 4.0 merupakan indikator penilaian tingkat kesiapan industri untuk menerapkan teknologi 4.0

Bab 7.

peningkatan produktivitas, inovasi produk, dan akses pasar yang lebih luas. Pada tahun 2024, pengembangan IKM dilaksanakan melalui restrukturisasi mesin dan peralatan produksi, penumbuhan wirausaha industri, serta pendampingan penerapan industri 4.0. Selain itu, IKM juga didorong untuk bergabung dalam program *e-Smart* IKM sebagai upaya strategis dalam meningkatkan akses pasar secara digital, memperluas jangkauan konsumen, serta mendorong transformasi digital. Pemerintah terus berupaya memfasilitasi IKM untuk melakukan *onboarding* ke *marketplace digital* guna meningkatkan visibilitas produk.

Sementara itu, dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, berbagai intervensi yang dilaksanakan yaitu: (1) penyelenggaraan pendidikan vokasi industri seperti politeknik, sekolah menengah kejuruan (SMK), dan akademi komunitas; (2) fasilitasi pendampingan SMK *link and match* dengan industri; (3) pelatihan vokasi industri *upskilling dan reskilling*; (4) pelatihan diklat *3 in 1* (mencakup pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja); dan (5) sertifikasi tenaga kerja industri kompeten.

7.1.2 Tantangan dan Upaya

Industri pengolahan masih menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai target lebih tinggi dari pertumbuhan PDB nasional, antara lain: (1) volatilitas harga komoditas di tingkat global yang membuka peluang akselerasi diversifikasi produk hilir seperti produk *medium-high technology*; (2) pelambatan ekonomi global akibat kondisi geopolitik menuntut industri dalam negeri untuk terus meningkatkan produktivitas dan daya saingnya; (3) ketersediaan bahan baku berkualitas terus dikembangkan untuk menjamin keandalan rantai pasok hilirisasi dalam negeri; (4) pemanfaatan riset untuk inovasi produk dan adopsi teknologi; (5) tuntutan mitra dagang akan aspek berkelanjutan menjadi peluang penggunaan energi bersih dan terbarukan; serta (6) optimalisasi insentif untuk menarik investasi.

Upaya yang dilakukan untuk mendorong akselerasi hilirisasi mineral antara lain: (1) pengembangan hilirisasi nikel ke arah industri *stainless steel slab/coil* dan industri baterai kendaraan listrik (termasuk prekursor dan katoda) di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan



Jawa Timur; (2) pembangunan industri daur ulang baterai kendaraan listrik dan industri alat berat di Maluku Utara; (3) optimalisasi kapasitas produksi industri olahan tembaga di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah; (4) operasionalisasi industri alumina dan aluminium di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau; (5) penguatan penerapan smelter berkelanjutan; dan (6) penyiapan SDM terampil di sekitar kawasan industri melalui sekolah vokasi dan balai diklat.

Selanjutnya, upaya untuk mendorong hilirisasi hayati yaitu (1) pengembangan suplemen kapsul vitamin A dan vitamin E berbasis kelapa sawit untuk pendamping Program MBG; (2) pembangunan industri *oleofood*, bahan baku biodiesel dan *biodegradable lubricants* di KEK Sei Mangkei; (3) peningkatan target mandatori biodiesel dari B35 ke B40 dan B50 secara bertahap; (4) penyiapan infrastruktur sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) hilir untuk mendukung implementasi Perpres No. 16/2025 tentang

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; (5) peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa; serta (6) hilirisasi rumput laut ke arah industri karagenan, biofertilizer, dan biostimulan. Berbagai agenda hilirisasi tersebut perlu didukung dengan perbaikan produktivitas di sisi hulu, guna menjamin ketersediaan bahan baku kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut.

Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan untuk perbaikan produktivitas dan daya saing industri pengolahan secara keseluruhan meliputi (1) penguatan rantai pasok industri; (2) penerapan ekonomi sirkular dan dekarbonisasi; (3) penyiapan SDM industri terampil dan produktif melalui sekolah vokasi, diklat 3 in 1 dan sertifikasi kompetensi; (4) fasilitasi dan pendampingan Industri 4.0; (5) pengembangan skema insentif yang bersaing; (6) fasilitasi akses pasar dalam dan luar negeri untuk peningkatan skala ekonomi; (7) penerapan standardisasi dan peningkatan adopsi teknologi; dan (8) peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi industri.

“

Seiring dengan kesiapan bahan baku baterai, industri otomotif nasional juga menunjukkan geliat positif dalam transisi energi. Persentase produksi kendaraan listrik roda empat terhadap total produksi kendaraan roda empat terus meningkat, dari 1,1 persen pada 2023 menjadi 1,86 persen pada semester I 2025. Penjualan kendaraan bermotor listrik hingga bulan Juli 2025 mampu mencapai 53.650 unit kendaraan, atau naik hampir 52 persen dari total penjualan tahun sebelumnya.



Meresmikan *groundbreaking* ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Artha Industrial Hills, Kabupaten Karawang.
Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi, Sekretariat Presiden



7.2 Perikanan

7.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Dalam upaya meningkatkan peran sektor perikanan bagi perekonomian nasional, perlu diperkuat sektor hulu untuk mendukung program pengolahan perikanan yang menciptakan nilai tambah hilirisasi. Berdasarkan data produksi hasil perikanan pada triwulan II 2025, total produksi perikanan

mencapai 6,22 juta ton, atau setara dengan pertumbuhan 2,30 persen dibandingkan dengan periode triwulan II 2024. Total produksi ini terdiri atas produksi perikanan tangkap sebesar 1,70 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 4,52 juta ton. Besarnya capaian produksi ini menjadi landasan dalam penyediaan bahan baku untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sektor perikanan.

Tabel 7.2
Produksi Hasil Perikanan
Tahun 2024 - Triwulan II 2025 (Juta Ton)

Komoditas	2024					2025	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	TW I	TW II
Total Produksi Perikanan	5,74	6,08	6,44	6,31	24,57	5,87	6,22
Perikanan Tangkap	1,68	1,67	2,02	2,03	7,39	1,67	1,70
Perikanan Budidaya	4,06	4,42	4,42	4,28	17,18	4,17	4,52

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025

Pemerintah sedang mengimplementasikan beberapa program hilirisasi, antara lain hilirisasi ikan tilapia dan hilirisasi tuna. Untuk hilirisasi tilapia, saat ini dilakukan penyiapan revitalisasi program 20.000 ha tambak *idle* di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Program ini diproyeksikan mampu menghasilkan 1,18 juta ton ikan per tahun dengan menyerap 168.000 tenaga kerja, dan menjadi pemasok bahan baku utama bagi industri pengolahan. Produk turunan yang dapat dihasilkan antara lain: *frozen fillet* untuk pasar ekspor, abon dan bakso ikan untuk pasar domestik, serta produk yang lebih bernilai tinggi seperti kolagen dan gelatin untuk industri farmasi dan kosmetik. Pada tahun 2025, pemerintah tengah menyelesaikan modeling budi daya ikan nila salin di tambak eks Tambak Inti Rakyat (TIR) Karawang seluas 443,92 ha.

Sementara itu, untuk mendukung hilirisasi ikan tuna, pemerintah menyiapkan proyek

percontohan budidaya tuna modern di Biak (Papua) bersama investor dari Turkiye, untuk menjamin pasokan bahan baku berkualitas bagi industri olahan tuna. Langkah ini akan memastikan kontinuitas bahan baku untuk industri tuna kalengan, *loin* beku, dan produk olahan lainnya yang menjadi primadona di pasar ekspor.

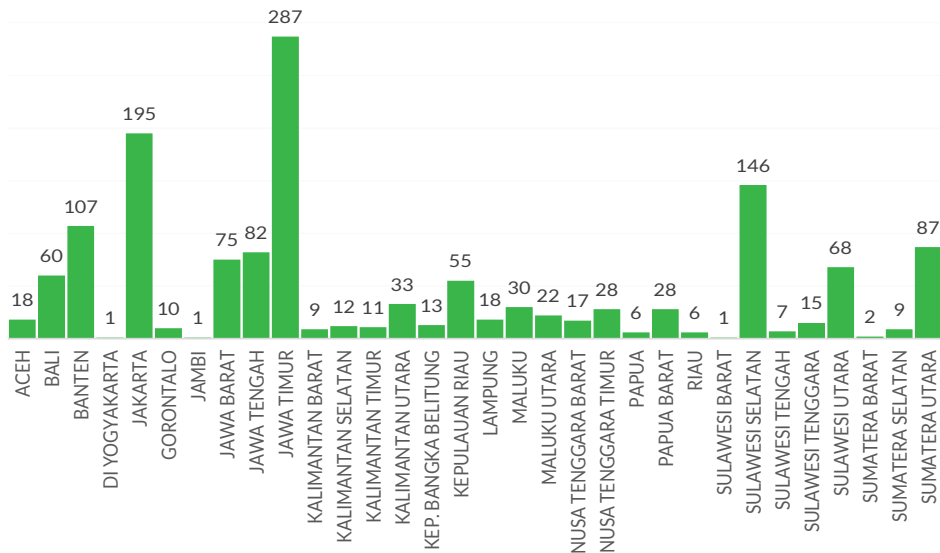
Guna memastikan hilirisasi berjalan efektif, kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) menjadi krusial. Terdapat 1.459 UPI skala menengah-besar di Indonesia yang sebagian besar digunakan untuk beberapa jenis kegiatan olahan utama, diantaranya: (1) pembekuan ikan; (2) penanganan ikan; (3) pengolahan rumput laut; (4) peragian/fermentasi ikan; (5) pendinginan dan pengesan ikan; (6) pengasapan dan pemanggangan ikan; (7) penggaraman/pengeringan ikan; (8) pengalengan; (9) pengolahan kerupuk ikan; (10) pembuatan minyak ikan; dan (11)

Bab 7.

pengolahan berbasis lumatan daging/*jelly* ikan atau surimi. Pembekuan ikan menjadi pilihan utama industri pengolahan skala menengah-besar yaitu sebanyak 922 unit. Hal ini karena

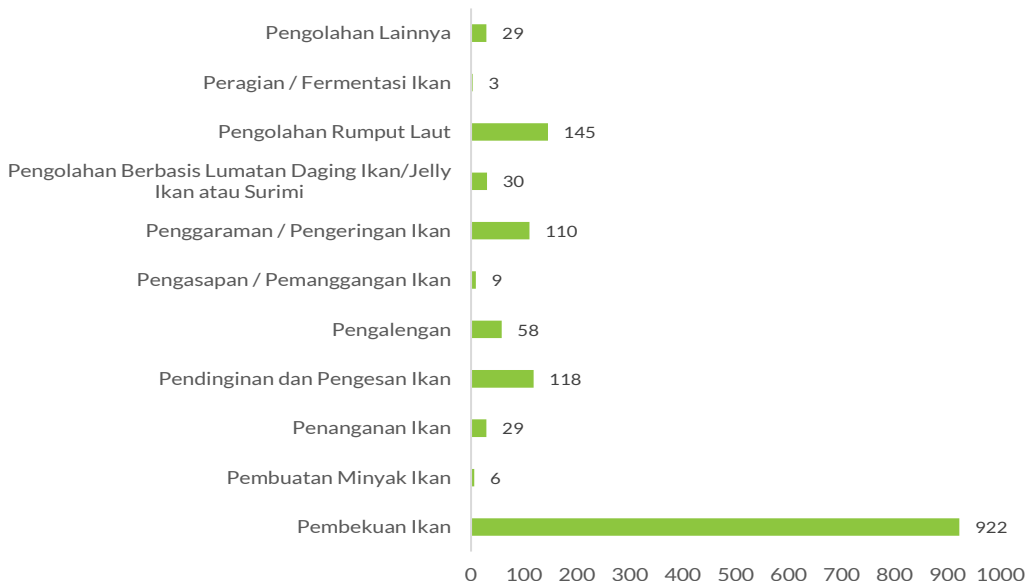
permintaan ekspor yang tinggi, efisiensi distribusi, dan nilai jual produk yang stabil. Sementara jenis olahan bernilai tambah lainnya masih perlu didorong dan dikembangkan.

Grafik 7.1
Unit Pengolahan Ikan Menengah Besar berdasarkan Provinsi Semester I 2025



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025

Grafik 7.2
Unit Pengolahan Ikan Menengah Besar berdasarkan Jenis Olahan Utama Semester I 2025



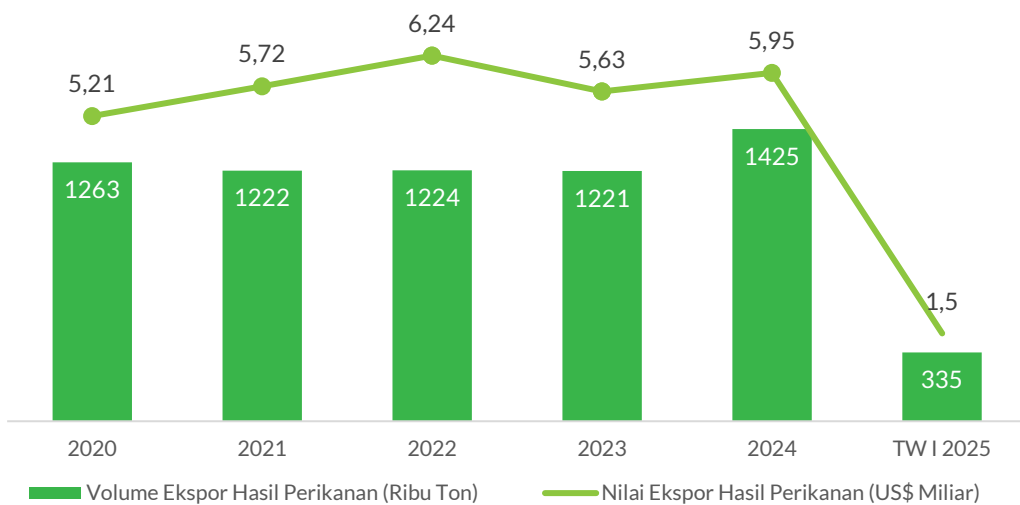
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025



Dengan dukungan UPI yang tersebar dan beragam jenis olahan, sektor perikanan mampu menjaga daya saing ekspor dan secara konsisten mencatat surplus neraca perdagangan yang signifikan sebagai salah satu penyumbang devisa negara. Pada tahun 2024, nilai ekspor mencapai US\$5,95 miliar, jauh melampaui nilai impor yang hanya US\$0,52

miliar. Kinerja gemilang ini terus berlanjut pada triwulan I 2025, di mana nilai ekspor mencapai US\$1,5 miliar. Amerika Serikat masih menjadi negara utama tujuan ekspor produk perikanan Indonesia dengan nilai ekspor US\$499,29 juta, selanjutnya diikuti China US\$258,09 juta, Jepang US\$149,57 juta, Vietnam US\$108,46 juta, dan Thailand US\$57,83 juta.

Grafik 7.3
Capaian Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2020 – Triwulan I 2025

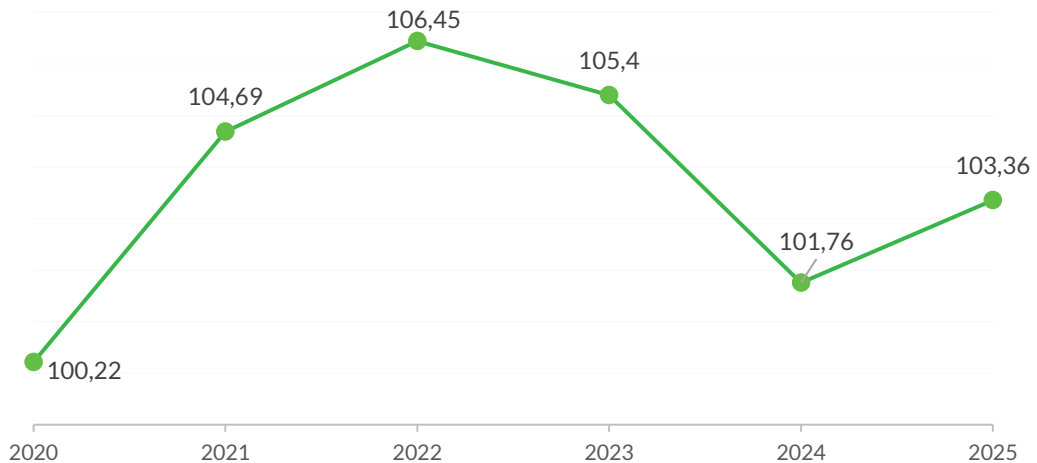


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Selain berkontribusi terhadap PDB nasional, sektor perikanan juga berdampak positif pada kesejahteraan nelayan yang tercermin dari Nilai Tukar Nelayan (NTN). Perkembangan capaian NTN dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Dari akhir 2024 hingga Mei 2025, NTN mengalami peningkatan sebesar 1,57 persen, dari 101,76 menjadi 103,36. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan nelayan dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang mendorong

peningkatan NTN antara lain (1) membaiknya harga hasil tangkapan ikan di tingkat nelayan; (2) stabilisasi biaya produksi melalui subsidi atau efisiensi penggunaan sarana produksi; serta (3) dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk bantuan alat tangkap atau BBM bersubsidi. Selain itu, membaiknya kondisi cuaca dan kondisi musim penangkapan dibandingkan tahun sebelumnya juga dapat menjadi faktor pendukung peningkatan daya beli nelayan.

Grafik 7.4
Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2020–2025



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025

7.2.2 Tantangan dan Upaya

Pengembangan hilirisasi perikanan nasional saat ini dihadapkan pada tiga tantangan utama, yaitu: (1) biaya logistik yang tinggi akibat kesenjangan geografis, di mana sebagian besar sentra produksi ikan berada di wilayah timur Indonesia sementara mayoritas industri pengolahan masih terpusat di Pulau Jawa; (2) ketersediaan infrastruktur rantai dingin/*cold chain* khususnya di pelabuhan-pelabuhan perikanan kecil masih harus dioptimalkan; serta (3) kontinuitas dan standar pasokan bahan baku, serta keterbatasan dalam adopsi teknologi pengolahan dan pengemasan modern.

Menjawab berbagai tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain: (1) peningkatan fasilitas investasi industri pengolahan ikan di luar Pulau Jawa, terutama di wilayah-wilayah yang menjadi sentra produksi, sehingga biaya logistik dapat ditekan, efisiensi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi daerah akan

terakselerasi; (2) pembangunan infrastruktur rantai dingin dan logistik melalui Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Salah satunya adalah instalasi *mobile cold storage* di berbagai lokasi pendaratan ikan yang akan dikelola oleh koperasi nelayan. Langkah ini bertujuan untuk mendekatkan fasilitas pendingin ke nelayan, sehingga kualitas ikan dapat terjaga sejak awal; (3) implementasi sistem ketertelusuran produk perikanan (STELINA) untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan pasar; serta (4) pembangunan fasilitas *cold storage modern* berstandar ekspor untuk memperkuat rantai pasok ke pasar global oleh sektor swasta.

Selanjutnya, untuk menjamin stabilitas dan kontinuitas pasokan bahan baku perikanan tangkap yang berkelanjutan dan perikanan budidaya yang produktif, dibutuhkan: (1) modernisasi kapal ikan; (2) pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan yang modern dan ramah lingkungan; serta (3) modeling budi daya perikanan.



7.3 Kelautan

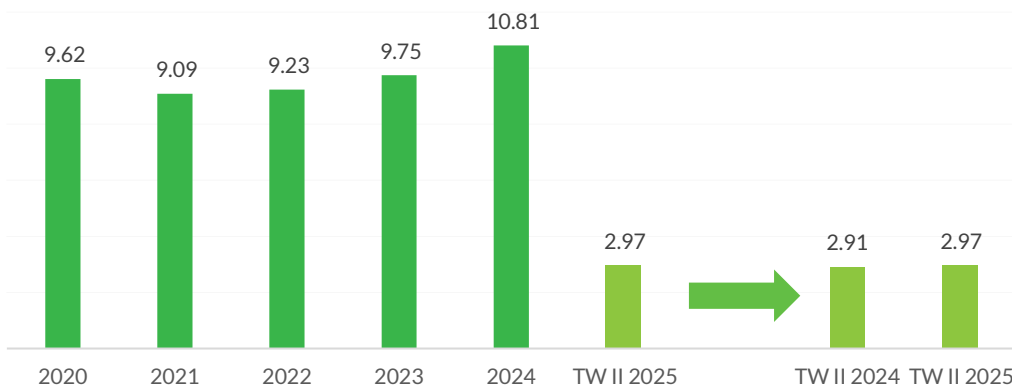
7.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Sektor kelautan menjadi salah satu penggerak nilai tambah dan industrialisasi yang difokuskan untuk menjaga modal alam, meningkatkan kepastian usaha, dan menghasilkan nilai tambah yang mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar dan beragam, salah satunya adalah potensi rumput laut yang melimpah. Indonesia merupakan produsen dan eksportir rumput laut mentah terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, terutama untuk industri makanan.

Melihat potensi yang ada, rumput laut menjadi salah satu komoditas unggulan hilirisasi

bersama komoditas lainnya. Pemerintah terus membenahi dan memperkuat sektor hulu melalui peningkatan produksi rumput laut. Pada tahun 2024, produksi rumput laut sebesar 10,81 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 10,87 persen dari tahun 2023 sebesar 9,75 juta ton (yoy). Dari gambar terlihat bahwa kinerja awal tahun ini kembali memberi sinyal positif dimana produksi triwulan II 2025 mencapai 2,97 juta ton, meningkat sekitar 2,06 persen dibanding triwulan II 2024. Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa akselerasi produksi rumput laut tidak hanya bertahan, tetapi juga memperkuat optimisme dan memperlebar peluang penguatan rantai pasok serta ekspor produk rumput laut Indonesia.

Grafik 7.5
Produksi Rumput Laut Tahun 2020 - Triwulan II 2025 (Juta Ton)

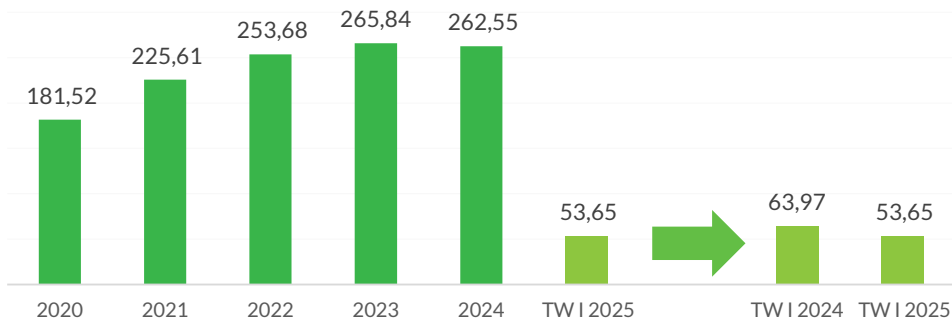


Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025

Di sisi lain, volume ekspor rumput laut Indonesia menunjukkan tren yang konsisten meningkat sepanjang periode 2020–2024. Hal ini mencerminkan kinerja sektor kelautan yang kian menggairahkan, meskipun terjadi koreksi menjadi 262,55 ribu ton pada tahun 2024. Volume ekspor rumput laut pada tahun 2024 tetap lebih baik dibandingkan capaian pada

prapandemi dan menegaskan ketangguhan rantai pasok serta daya saing produk rumput laut Indonesia di pasar global. Pada triwulan I 2024 dan triwulan I 2025 menunjukkan adanya koreksi volume ekspor sebesar 16,13 persen. Hal ini menjadi pemicu bagi Indonesia untuk terus berinovasi agar memperbaiki kualitas produknya.

Grafik 7.6
Volume Ekspor Rumput Laut Tahun 2020 - Triwulan I 2025 (Ribu Ton)

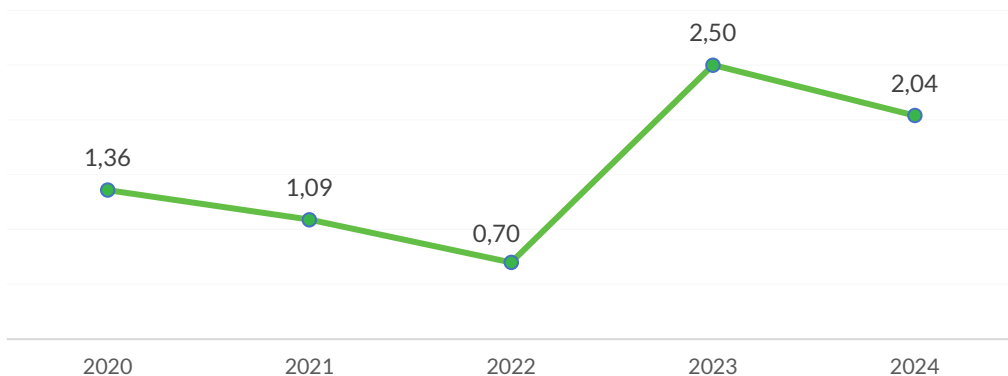


Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025

Peluang untuk mengakselerasi produksi dan hilirisasi garam terbuka lebar. Garam dipandang sebagai sumber nilai tambah yang dapat berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan target swasembada garam pada tahun 2027, sehingga pemerintah mendorong percepatan industrialisasi pergaraman nasional melalui Perpres No. 17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Peraturan Presiden ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi garam dalam negeri secara terpadu dan berkelanjutan.

Produksi garam nasional tahun 2024 bertahan di kisaran 2,04 juta ton. Adanya fluktuasi produksi garam sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan perubahan iklim global. Kenaikan produksi pascapandemi menandakan keberhasilan berbagai intervensi seperti perbaikan infrastruktur tambak, peningkatan kualitas teknologi kristalisasi, dan penataan tata niaga yang mampu memulihkan sekaligus mengangkat daya saing sektor garam. Hal ini menunjukkan optimisme bahwa industri garam domestik kian resilien serta siap memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun peluang ekspor.

Grafik 7.7
Produksi Garam Tahun 2020 - 2024 (Juta Ton)



Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2025



7.3.2 Tantangan dan Upaya

Pengembangan sektor kelautan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (1) dampak perubahan iklim dapat mengganggu siklus panen garam dan menekan produktivitas pesisir; (2) harmonisasi rencana ruang darat dan laut; (3) kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban kesesuaian kegiatan di ruang laut; (4) pemanfaatan teknologi pengawasan guna meningkatkan efektivitas patroli penerapan praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* yang selaras dengan luasnya wilayah perairan dan kondisi geografis yang beragam; (5) pemerataan produktivitas rumput laut yang bervariasi antar-sentra; (6) serangan hama penyakit laut yang dipicu naiknya suhu permukaan air; (7) standardisasi pascapanen; (8) ketersediaan fasilitas *cold-storage*; (9) pemutusan rantai pasok antara petani dengan tengkulak guna meningkatkan margin di hulu dan insentif adopsi teknologi; (10) volatilitas cuaca ekstrem bagi komoditas garam menyebabkan fluktuasi rendemen; (11) perluasan investasi infrastruktur *tunnel house* dan geomembran; dan (12) pemenuhan persyaratan kualitas industri dimana diharapkan kemurnian NaCl lebih dari 97 persen untuk menurunkan ketergantungan impor garam industri dan ketidakpastian harga garam rakyat.

Menjawab tantangan tersebut, kebijakan 2025 difokuskan pada (1) adopsi teknologi adaptif serta sarana usaha garam untuk menstabilkan produksi garam di tengah anomali iklim; (2) percepatan integrasi Rencana Tata Ruang

Wilayah-Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RTRW-RZWP3K) melalui koordinasi lintas kementerian untuk memberi kepastian investasi; (3) peningkatan sarana prasarana niaga garam untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam; (4) peningkatan nilai tambah hilirisasi rumput laut diupayakan melalui dukungan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengembangan Rumput Laut Terintegrasi; (5) peningkatan praktik budidaya, kualitas bibit, penanganan pascapanen yang lebih baik, serta investasi dalam teknologi pengolahan yang mutakhir; dan (6) perluasan dan fasilitasi investasi industri pengolahan terutama di wilayah-wilayah yang menjadi sentra produksi.

7.4 Perdagangan

7.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Perkembangan kinerja perdagangan Indonesia menunjukkan tren positif dan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB terus mengalami peningkatan, dari 21,75 persen (2023) menjadi 22,29 persen (Semester I 2025). Sejalan dengan itu, kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor dunia menunjukkan tren meningkat, dari 1,10 persen (2023) menjadi 1,28 persen (triwulan I 2025). Hal ini mencerminkan bahwa produk ekspor Indonesia semakin mampu bersaing dalam rantai pasok global, serta memperoleh posisi yang lebih strategis dalam struktur perdagangan internasional.

Tabel 7.3
Capaian Indikator Pembangunan Lingkup Perdagangan Tahun 2023 - Triwulan I 2025

Uraian	Satuan	2023	2024	2025 ^{a)}
Ekspor Barang dan Jasa ¹⁾	%PDB	21,75	22,18	22,29 ^{a)}
Kontribusi Ekspor Barang Indonesia terhadap Total Ekspor Barang Dunia ²⁾	%	1,10	1,11	1,28 ^{b)}
Nilai Ekspor Jasa Indonesia ³⁾	US\$ miliar	33,61	39,03	9,04 ^{b)}

Sumber: (1) Badan Pusat Statistik; (2) *Trademap* diolah Kementerian PPN/Bappenas; (3) Bank Indonesia
Keterangan: a) Capaian semester I 2025; b) Capaian triwulan I 2025

Capaian ini memperlihatkan efektivitas kebijakan dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan kualitas produk ekspor nasional. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya sembilan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2025 terkait deregulasi kebijakan impor (Permendag No. 16 hingga 24 Tahun 2025) sebagai bagian dari langkah strategis deregulasi dan reformasi kebijakan perdagangan nasional guna menciptakan iklim usaha yang lebih efisien, pro-bisnis, dan kompetitif. Regulasi ini mempermudah akses bahan baku bagi industri dalam negeri guna mendukung proses hilirisasi dan peningkatan ekspor.

Peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa (% PDB) tidak terlepas dari capaian positif di berbagai sektor strategis. Secara sektoral, pertumbuhan ekspor menunjukkan arah transformasi ekonomi nasional yang semakin mengarah pada diversifikasi, keberlanjutan, dan peningkatan nilai tambah. Ekspor barang-barang berkategori hijau (*environmental goods*) meningkat dari US\$7,25 miliar (2023) menjadi US\$8,13 miliar (2024), dan telah mencapai US\$2,21 miliar (triwulan I 2025). Peningkatan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perdagangan berkelanjutan serta memperkuat posisi sebagai pelaku aktif

dalam ekonomi hijau global. Sementara itu, ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi juga mencatat pertumbuhan, ditunjukkan oleh peningkatan pangsa pasar Indonesia dari 1,26 persen (2023) menjadi 1,33 persen (2024). Hal ini menunjukkan peran ekspor sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan penggerak pertumbuhan inklusif.

Kinerja ekspor sektor perikanan terus menunjukkan peningkatan dengan nilai ekspor yang naik dari US\$5,67 miliar (2023) menjadi US\$6,07 miliar (2024), dan mencapai US\$1,55 miliar (triwulan I 2025). Peningkatan juga terlihat pada ekspor produk industri berbasis sumber daya alam (SDA), di mana kontribusi Indonesia terhadap pangsa pasar dunia melonjak dari 2,27 persen menjadi 4,00 persen dalam periode yang sama. Di sektor jasa, total ekspor mencapai US\$9,04 miliar pada triwulan I 2025, menegaskan semakin strategisnya peran jasa sebagai sumber devisa dan penopang ketahanan ekonomi. Ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi meningkat dari US\$2,77 miliar (2023) menjadi US\$3,76 miliar (2024), dan mencapai US\$0,81 miliar (triwulan I 2025). Jasa bisnis lainnya juga mencatat pertumbuhan dari US\$7,86 miliar menjadi US\$8,76 miliar. Sementara ekspor ekonomi kreatif menunjukkan peningkatan



dari US\$23,96 miliar (2023) menjadi US\$25,1 miliar (2024), menandakan besarnya potensi sektor kreatif dalam ekonomi digital dan berbasis inovasi.

Dari sisi kewilayahan, penguatan kinerja ekspor juga tecermin dari peningkatan nilai ekspor barang per pulau dan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB provinsi per pulau yang semakin merata di berbagai wilayah. Pulau Jawa mencatat peningkatan terbesar dari Rp1.432,87 triliun (2023) menjadi Rp1.615,69 triliun (2024), dan mencapai Rp882,45 juta (semester I 2025). Diikuti Pulau Sumatera yang naik dari Rp1.017,54 triliun (2023) menjadi Rp1.073,40 triliun (2024), dan mencapai Rp632,23 juta (semester I 2025). Peningkatan juga terjadi di Sulawesi, Bali-Nusra, dan Papua-Maluku. Hal ini mengindikasikan semakin kuatnya integrasi kawasan luar Jawa dalam sistem perdagangan secara nasional dan global serta menunjukkan perbaikan struktur ekonomi nasional yang lebih inklusif.

Lebih lanjut, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB provinsi juga menunjukkan peningkatan. Pulau Kalimantan mencatat peningkatan tertinggi kontribusi dari 9,28 persen (2023) menjadi 9,78 persen (2024) dan 10,20 persen (semester I 2025). Peningkatan serupa juga terjadi di Sumatera, yang naik dari 14,10 persen (2023) menjadi 14,27 persen (semester I 2025) dalam periode yang sama. Pulau Jawa dan Sulawesi juga menunjukkan tren serupa, meskipun Bali-Nusra mengalami sedikit penurunan. Hal ini menegaskan bahwa aktivitas perdagangan ritel dan grosir menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah serta memperlihatkan semakin meratanya distribusi manfaat ekonomi dari aktivitas

perdagangan. Penguatan peran perdagangan daerah dalam PDRB juga menjadi indikasi bahwa pertumbuhan tidak hanya terpusat di Jawa, melainkan didukung oleh kontribusi kawasan lain. Kombinasi ini memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

7.4.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan sektor perdagangan menghadapi beberapa tantangan internal yaitu (1) optimalisasi nilai tambah produk ekspor melalui ekspor komoditas berkompleksitas tinggi; (2) penyederhanaan hambatan non-tarif (*Non-Tariff Measures*) di dalam negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor; (3) isu struktural dan regulasi di sektor jasa; (4) peningkatan efisiensi logistik ekspor yang tecermin dalam skor *Logistic Performance Index* (LPI) Indonesia; dan (5) aktivitas perdagangan di luar pulau Jawa.

Dalam menjawab tantangan internal, dilakukan upaya melalui arah kebijakan perdagangan, antara lain: (1) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan dengan global; (2) peningkatan ekspor produk industri berteknologi menengah tinggi; (3) peningkatan ekspor produk industri penyerap tenaga kerja tinggi; (4) peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA; (5) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (6) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle*; (7) peningkatan utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; dan (8) peningkatan kualitas produk, persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Bab 7.

Selain itu, beberapa tantangan global yang dihadapi, antara lain: (1) perlambatan ekonomi global berdampak pada permintaan dan volume perdagangan dunia; (2) pergeseran geopolitik, seperti penurunan dominasi G7 (Kelompok Tujuh); (3) kebangkitan Tiongkok; (4) rivalitas AS-Tiongkok; (5) pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat; (6) perubahan iklim, seiring dengan meningkatnya permintaan produk berstandar hijau dan berkelanjutan; dan (7) konflik di berbagai wilayah dunia.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, upaya pembangunan bidang perdagangan diarahkan pada (1) peningkatan daya saing untuk memperkuat partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global; (2) penguatan diplomasi ekonomi dan promosi ekspor untuk meningkatkan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global; (3) peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan; (4) ekspansi pasar ekspor serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global; dan (5) peningkatan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global.

7.5 Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

7.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda industrialisasi dan hilirisasi. Saat ini, sebanyak 24 KI/KEK telah ditetapkan sebagai prioritas yang akan didorong menjadi pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi baru, 13 KI telah beroperasi, satu KI dalam tahap persiapan, dan dua KI dalam tahap konstruksi yang diharapkan dapat beroperasi pada akhir 2025.

Perkembangan KI/KEK berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi. Pada triwulan I 2025, beberapa KI/KEK mencatatkan nilai realisasi investasi yang cukup tinggi. Realisasi investasi di KEK Gresik tercatat mencapai Rp3,89 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.104 orang. Pada KI Weda Bay terdapat beberapa *tenant* yang saat ini sedang dalam tahap konstruksi dan direncanakan mulai beroperasi pada akhir tahun 2025, dengan perkiraan nilai investasi mencapai US\$8 miliar. Hingga akhir tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang terserap di KI Weda Bay mencapai 81.124 tenaga kerja, dimana 90 persennya berasal dari masyarakat lokal. Peningkatan nilai investasi tersebut mencerminkan tingginya minat investasi swasta, baik PMA maupun PMDN, di sektor industri pengolahan dalam negeri.

Dampak pembangunan KI/KEK memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional yang tercermin dari peningkatan PDB sektor industri pengolahan di berbagai wilayah. Rasio PDB industri pengolahan di provinsi KI/KEK prioritas terhadap PDB industri pengolahan nasional mengalami peningkatan dari 50,98 persen (2024, yoy) menjadi sebesar 51,36 persen (semester I 2025, yoy). Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa pengembangan KI/KEK tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional secara menyeluruh.



Tabel 7.4
Capaian Indikator Pembangunan terkait KI/KEK Prioritas

Indikator	Satuan	2024	Semester 1	
			2024	2025
Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan	%	50,98	50,99	51,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

7.5.2 Tantangan dan Upaya

Pengembangan KI/KEK menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (1) ketersediaan dan kecukupan infrastruktur konektivitas di luar kawasan seperti jalan akses masuk kawasan dan/atau menuju lokasi bahan baku dan bahan penolong; (2) ketersediaan dan kecukupan jaringan listrik, gas, sanitasi, dan persampahan pendukung KI/KEK dan wilayah sekitar kawasan; (3) perubahan perencanaan KI termasuk tata ruang dan perizinan; (4) percepatan proses perizinan dan koordinasi antarinstansi untuk memberikan kepastian iklim investasi dan mengurangi *sunk cost*; (5) pengelola kawasan memiliki kapasitas yang berbeda dalam menarik investasi kunci (*anchor tenant*); (6) optimalisasi integrasi rantai pasok lokal, terutama dengan industri kecil dan menengah (IKM); (7) penyiapan SDM sekitar kawasan sesuai dengan kebutuhan tenant/calon *tenant* di KI/KEK, dari sisi jumlah dan keterampilan; dan (8) moratorium pembangunan sekolah tinggi vokasi di dalam dan/atau sekitar kawasan KI/KEK prioritas.

Upaya menghadapi berbagai tantangan tersebut antara lain (1) penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan dalam pengembangan KI/KEK; (2) percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama konektivitas jalan, pelabuhan,

serta penyediaan energi dan air baku yang dapat dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan alternatif; (3) pengintegrasian kebutuhan jalan akses masuk KI/KEK sesuai Inpres No. 11/2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi; (4) penyesuaian tata ruang dan percepatan perizinan kawasan melalui integrasi sistem perencanaan nasional dan reformasi kebijakan investasi; (5) peningkatan kapasitas pengelola kawasan agar mampu menarik *anchor tenant* dan menciptakan ekosistem industri yang berdaya saing; (6) perluasan kemitraan antara industri besar dengan IKM (termasuk peluang melalui skema DAK); (7) peningkatan kapasitas SDM melalui penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan di sekitar kawasan serta pengembangan vokasi berbasis kebutuhan industri; dan (8) pemanfaatan teknologi digital dengan fokus pada pengembangan *dashboard* kawasan serta sistem informasi perizinan satu pintu.

7.6 Investasi

7.6.1 Capaian Utama Pembangunan

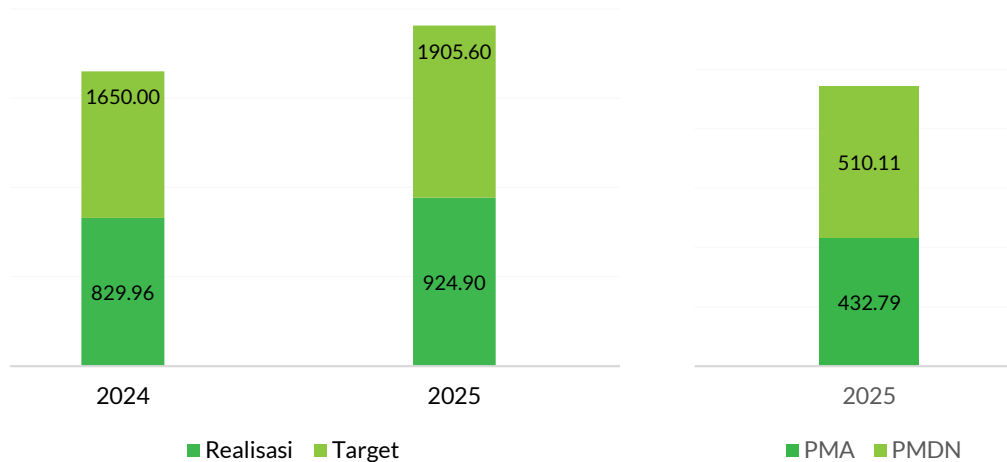
Investasi merupakan salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 8 persen pada tahun 2029. Dalam mencapai target tersebut,

Bab 7.

dibutuhkan total investasi PMDN dan PMA sebesar Rp13.032,8 triliun selama 2025-2029, meningkat 31,47 persen dari capaian 10 tahun terakhir (2014-2024) senilai Rp9.912,7 triliun. Pada tahun 2025, pemerintah

menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.905,60 triliun dengan capaian sementara pada semester I 2025 sebesar Rp942,87 triliun atau naik 13,60 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Grafik 7.8
Perkembangan Realisasi Investasi
Semester I 2025 (Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Juli, 2025) diolah

Kinerja positif dari peningkatan realisasi investasi didukung oleh: (1) komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong realisasi PMA dan PMDN; (2) percepatan investasi hilirisasi khususnya di luar Pulau Jawa; (3) optimalisasi fungsi satuan tugas (satgas) percepatan investasi dalam penyelesaian hambatan investasi pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta (4) peningkatan kemitraan usaha nasional untuk melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM.

Kinerja positif ini diperkuat dengan telah ditetapkan PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko. Deregulasi ini memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan, serta memastikan penyesuaian regulasi investasi yang lebih adaptif, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, melalui reformasi kebijakan meliputi penerapan waktu layanan/ *service level agreement* (SLA) pada seluruh tahapan perizinan, dan penerapan mekanisme fiktif-positif. Selain itu, penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko juga telah meningkatkan transparansi, serta memudahkan pelaku usaha dalam memulai usaha dan merealisasikan investasinya di Indonesia.



Tabel 7.5
Capaian Indikator Pembangunan Lingkup Investasi
Tahun 2024 - Semester I 2025

Indikator	Satuan	2024	Semester I	
			2024	2025
Nilai PMA/PMDN Sektor Sekunder	Rp triliun	721,30	337,00	369,30
Persentase Realisasi PMDN Termasuk UMKM	% total nilai PMA/PMDN	47,50	49,20	54,10
Nilai PMA/PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan	Rp triliun	378,20	181,10	213,00
Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi	Rp triliun	407,80	181,40	280,80
Nilai PMA berorientasi ekspor	Rp triliun	164,60	N/A ^{a)}	N/A ^{a)}
Nilai PMDN berorientasi ekspor	Rp triliun	56,20	N/A ^{a)}	N/A ^{a)}
Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa	%	52,20	50,20	50,50

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Juli, 2025)

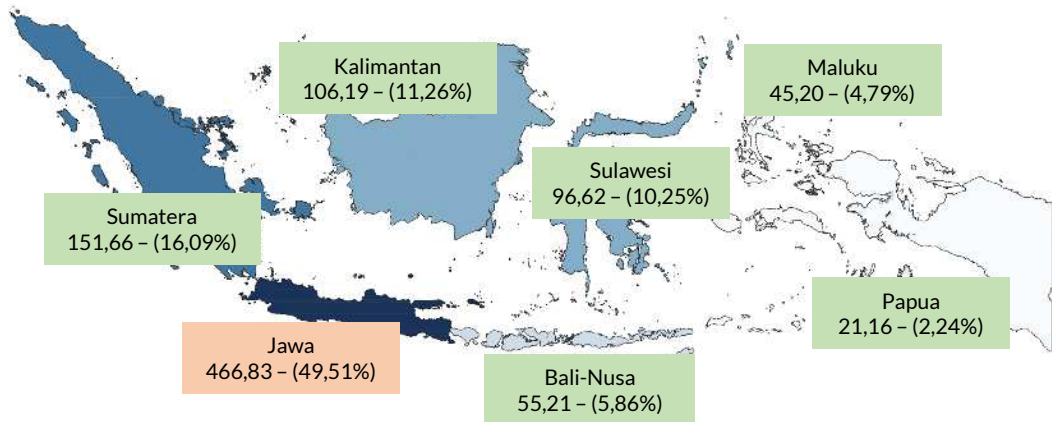
Keterangan: a) Indikator Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor hanya dilaporkan pada triwulan IV setiap tahun (capaian data tahunan)

Capaian indikator pembangunan lingkup investasi hingga semester I 2025 menunjukkan kinerja yang progresif. Capaian investasi tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.259.868 orang atau meningkat 2,84 persen (yoy). Pada periode yang sama, PMDN berkontribusi 54,12 persen terhadap total realisasi dan naik 25,02 persen (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan kontribusi PMA sebesar 45,88 persen dengan kenaikan 2,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa

pelaku usaha dalam negeri turut berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan investasi nasional.

Sementara itu, distribusi investasi antara Pulau Jawa dan luar Jawa cukup seimbang. Realisasi investasi pada semester I 2025, pulau Jawa berkontribusi 49,51 persen dari total nasional. Pertumbuhan investasi yang positif terlihat di kedua wilayah, yakni meningkat 14,34 persen di Pulau Jawa dan 17,38 persen di luar Jawa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Gambar 7.2
Realisasi Investasi Berdasarkan Pulau
Semester I 2025 (Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2025

Sebagai salah satu penggerak utama perekonomian, BUMN memegang peran penting dalam investasi yang mendukung prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2025, terdapat sembilan rencana investasi BUMN yang mendukung program hilirisasi dan industri dengan total investasi mencapai Rp22,02 triliun. Investasi tersebut difokuskan pada hilirisasi mineral, industri manufaktur dan transportasi, industri baterai dan kendaraan listrik, serta industri pupuk.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan investasi, diperlukan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPI Danantara selaku badan yang bertugas melakukan pengelolaan BUMN. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BPI Danantara dalam mendukung hilirisasi dan industri antara lain: (1) Nota Kesepahaman terkait hilirisasi *EV battery* dan hilirisasi mineral strategis; (2) Nota Kesepahaman dengan China Investment Corporation (CIC) terkait hilirisasi industri hijau dan manufaktur berat; (3) Nota Kesepahaman dengan ACWA Power

terkait energi terbarukan dan industrialisasi hijau; dan (4) Nota Kesepahaman dengan *Japan Bank for International Cooperation* terkait *green energy* dan efisiensi rantai pasok energi. Investasi BUMN diharapkan terus meningkat melalui optimalisasi aset BUMN yang dilaksanakan oleh BPI Danantara, sehingga dapat menjadi katalisator dalam pencapaian target pembangunan nasional khususnya dalam mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi yang berkelanjutan.

Capaian-capaian tersebut menunjukkan upaya peningkatan iklim investasi yang kondusif. Indonesia dipandang positif oleh investor global. Hal ini sejalan dengan data *United Nations Trade and Development* (UNCTAD) tahun 2024 yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke-14 tujuan investasi global dan urutan kedua di ASEAN setelah Singapura. Selanjutnya pemerintah akan terus menjaga iklim investasi untuk menjamin tren positif pertumbuhan investasi.



7.6.2 Tantangan dan Upaya

Peningkatan investasi dihadapkan pada sejumlah tantangan antara lain: (1) pemanfaatan peluang investasi di tengah dinamika ekonomi global; (2) kompetisi global dalam mengamankan rantai pasok, menarik investasi asing langsung (FDI), dan volatilitas harga komoditas; (3) perbaikan iklim investasi di tingkat pusat dan daerah untuk meningkatkan daya saing global, sebagaimana tecermin dari indikator *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) dan *Business Ready*; (4) penguatan sistem keamanan dan ketertiban untuk menjaga kepercayaan dan minat investor; (5) pemanfaatan aset untuk mendukung ekspansi investasi BUMN ; (6) pengambilan keputusan investasi BUMN cenderung konservatif; (7) integrasi perizinan dan koordinasi antar-stakeholder; serta (8) dukungan pembiayaan dan/atau kebijakan pembiayaan pemerintah yang selaras dengan upaya peningkatan investasi.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, pemerintah berupaya (1) peningkatan target investasi melalui optimalisasi kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi

daerah dan keunggulan komparatif, serta memperkuat hilirisasi sebagai tulang punggung industrialisasi; (2) penyempurnaan sistem perizinan berusaha melalui OSS yang efisien, terintegrasi, dan ramah investor; (3) penguatan koordinasi lintas K/L, pemerintah daerah, aparat penegak hukum melalui regulasi daerah yang menjamin keamanan investasi serta optimalisasi kerja satgas percepatan investasi di daerah; (4) optimalisasi pengelolaan aset BUMN oleh BPI Danantara untuk mendorong peningkatan kinerja keuangan BUMN dan kapasitas investasi; (5) penerapan *Business Judgement Rule* untuk memberikan perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan bisnis BUMN; (6) penguatan tata kelola investasi melalui penyederhanaan perizinan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan koordinasi antar *stakeholder*; serta (7) memberikan dukungan pembiayaan dan/atau kebijakan pembiayaan pemerintah melalui bauran pendanaan (*blended finance*), skema *spending to invest*, KPBU, dan bentuk kerja sama investasi internasional lainnya. Dalam prosesnya, APBN diorientasikan tidak hanya sebagai belanja rutin, tetapi sebagai instrumen strategis untuk akselerasi investasi.

80



Seorang bapak mengayuh sepeda dengan penuh semangat
Sumber: Kementerian Sekretariat Negara

BAB 8

ASTA CITA 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

PEMBANGUNAN PEDESAAN, DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN TRANSMIGRASI



22,85%

Desa Mandiri

52,88%

Desa Maju

Pada 45 Kawasan
Transmigrasi

26 dari 25

Kabupaten

Pengentasan daerah
tertinggal

22 Pusat
Pertumbuhan

Kawasan Perbatasan

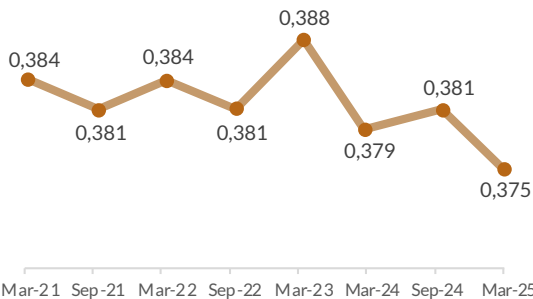


**Kemandirian
Masyarakat**

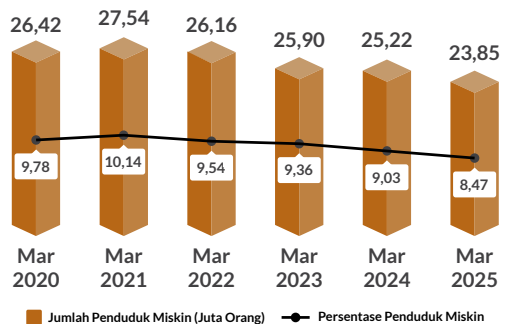
467
Ribu Orang

diberdayakan
secara ekonomi

CAPAIAN RASIO GINI 2022-2025



KONDISI KEMISKINAN INDONESIA





BAB 8

ASTA CITA 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Pembangunan dari desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan dan perekonomian, senantiasa diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat lokal dengan tetap mengutamakan pemenuhan hak dasar setiap warga. Pendekatan ini membantu menurunkan kemiskinan, mengurangi disparitas ekonomi, dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui kebijakan kewilayahan afirmatif. Beberapa indikator menunjukkan perkembangan positif, antara lain penurunan jumlah penduduk miskin dan rasio gini, serta peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia.

8.1 Kependudukan

8.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Penguatan administrasi kependudukan (Adminduk) selaras dengan prioritas pembangunan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya *Civil Registration and Vital Statistics (CRVS)*. Pemerintah terus mendorong

perbaikan tata kelola kependudukan, termasuk pemutakhiran dan integrasi data kependudukan. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama akta kelahiran dan identitas kependudukan digital (IKD), yang menjadi dasar dalam pelayanan publik dan perlindungan hak sipil.

Tabel 8.1
Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Tahun 2020-2025

Sasaran/ Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Semester I	
							2024	2025
Kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0–4 tahun	%	91,45	91,71	94,53	95,29	94,52	94,03	94,89
Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	-	-	0,26	3,41	6,53	4,88	7,39

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Capaian kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-4 tahun dan cakupan kepemilikan IKD terus ditingkatkan untuk menjamin hak identitas hukum anak sejak dini. Pencapaian tersebut dapat diraih berdasarkan upaya dan inovasi yang telah dilakukan dalam pelayanan dokumen kependudukan, antara lain: (1) penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpusat; (2) pelayanan administrasi kependudukan secara daring; (3) penerapan tanda tangan elektronik untuk legalisasi dokumen kependudukan; (4) pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri oleh masyarakat; (5) pelayanan jemput bola kepada masyarakat desa, daerah 3T, penyandang disabilitas, lansia dan penduduk dengan penyakit permanen/*bedridden*; (6) integrasi layanan pencatatan kelahiran dengan fasilitas kesehatan; dan (7) peluncuran aplikasi IKD.

Peluncuran aplikasi IKD dilakukan sejak tahun 2022 dan secara resmi diterapkan tahun 2024 dengan cakupan penggunaannya sebesar 6,53 persen. Adapun target cakupan penggunaan aplikasi IKD bagi penduduk wajib

KTP yaitu 10 persen (2025) dan 50 persen (2029). Aplikasi IKD merupakan representasi digital dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Ke depannya, IKD dapat menjadi pilar utama integrasi layanan publik berbasis data dan identitas tunggal, sekaligus mendukung efisiensi, transparansi, dan inklusivitas pelayanan.

Pemerintah Indonesia menempatkan prinsip inklusivitas dalam pembangunan nasional, dimana semua penduduk tanpa terkecuali memiliki hak yang setara untuk mengakses layanan pencatatan sipil. Kolaborasi lintas sektor juga telah diperkuat, termasuk dengan sektor perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan untuk memperluas jangkauan layanan. Upaya ini telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah maupun swasta dalam mendukung pelayanan yang berbasis data kependudukan. Hingga April 2025 tercatat sebanyak 7.010 lembaga telah melakukan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan, yang sebagian besar berasal dari pihak pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga pendidikan.



8.1.2 Tantangan dan Upaya

Kepemilikan dokumen kependudukan meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Beberapa tantangan dalam layanan administrasi kependudukan antara lain: (1) disparitas pencatatan data yang baik dan akurat antar provinsi; (2) keragaman kondisi geografis; (3) tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pengurusan dan manfaat dokumen kependudukan; serta (4) optimalisasi penerapan prosedur dan standar praktik pelayanan pencatatan sipil di berbagai daerah.

Penerapan IKD juga menghadapi berbagai tantangan yakni (1) optimalisasi infrastruktur teknologi untuk mendukung IKD terutama di daerah terpencil dan 3T; (2) tingkat kompetensi SDM; dan (3) optimalisasi pemanfaatan IKD oleh masyarakat sejalan dengan penguatan terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi.

Mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah berupaya untuk: (1) pelaksanaan transisi dokumen kependudukan yang semula berbentuk fisik menjadi digital; (2) penerapan IKD berbasis NIK; (3) pengintegrasian berbagai layanan publik; (4) penguatan kolaborasi dan kerja sama lintas kementerian/

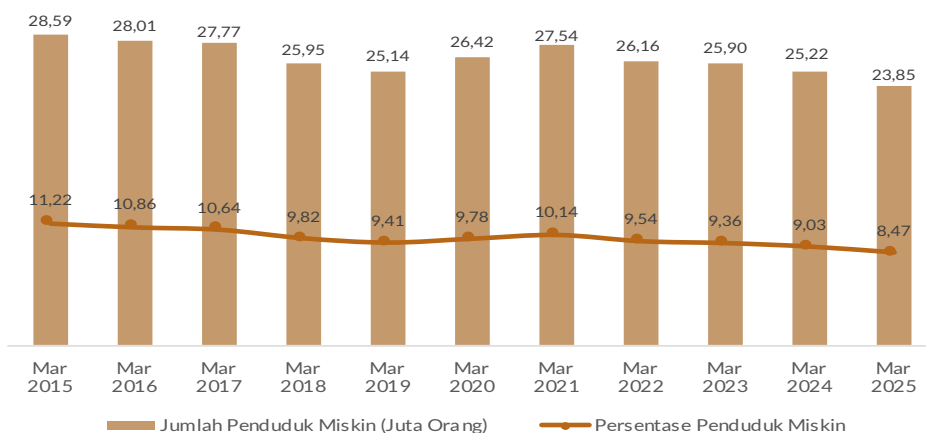
lembaga pemberi layanan publik untuk mengintegrasikan layanan berbasis NIK ke dalam IKD; serta (5) peningkatan kesadaran masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi dalam meningkatkan capaian kepemilikan dokumen kependudukan dan aktivasi IKD.

8.2 Kesejahteraan Sosial dan Penurunan Kemiskinan

8.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Capaian penanggulangan kemiskinan menunjukkan kemajuan signifikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan rakyat. Tingkat kemiskinan nasional berhasil diturunkan dari 9,03 persen (Maret 2024) menjadi 8,47 persen (Maret 2025) dengan jumlah penduduk miskin berkurang dari 25,22 juta jiwa menjadi 23,85 juta jiwa. Pada periode September 2024–Maret 2025, intervensi pemerintah yang semakin tepat sasaran, adaptif, dan terintegrasi berhasil mendorong sekitar 200.000 penduduk keluar dari garis kemiskinan. Hal ini mencerminkan hasil kerja sama seluruh elemen bangsa dalam memperkuat kedaulatan rakyat dalam membangun Indonesia yang bersatu, sejahtera, dan maju.

Grafik 8.1
Kondisi Kemiskinan Indonesia Tahun 2015-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Bab 8.

Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan tingkat kemiskinan tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah. Inpres No. 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional telah mendorong tersedianya data yang lebih akurat, mutakhir, dan terintegrasi sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Selaras dengan itu, Inpres No. 8/2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem turut memperkuat sinergi dan keterpaduan antarprogram serta kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Keberadaan kedua Inpres ini telah mendorong perbaikan tata kelola program pemerintah dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

Sepanjang semester I 2025, pemerintah telah memberikan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH tidak hanya memberikan transfer tunai, tetapi juga mendorong perubahan perilaku melalui pendampingan intensif dan berkelanjutan. Program ini memastikan anak-anak dari KPM tetap mengakses layanan pendidikan, ibu hamil dan balita memperoleh layanan kesehatan yang layak, serta penyandang disabilitas dan lansia menerima perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, pemerintah telah memberikan Program Sembako kepada 18,27 juta keluarga. Keberadaan Program Sembako memungkinkan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah terus melakukan penguatan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi). Program ini mencakup pendampingan sosial, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan fasilitasi akses layanan bagi anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, korban HIV, dan Napza, serta kelompok rentan lainnya. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada pemulihan keberfungsian sosial dan reintegrasi sosial. Sebagai bagian dari penguatan layanan dasar yang inklusif, pemerintah juga telah melaksanakan bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, serta bantuan kepada anak yatim, piatu, dan yatim piatu (YAPI) yang berada dalam keluarga miskin.

Kesejahteraan masyarakat Indonesia juga didukung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah melindungi 98,30 persen penduduk hingga Maret 2025, dengan 41 persen peserta di antaranya terdaftar melalui skema bantuan iuran atau PBI JKN. Pemutakhiran data PBI JKN telah dilakukan berdasarkan data sosial dan ekonomi untuk memastikan ketepatan sasaran penerima. Bagi peserta yang terdampak pemutakhiran, disediakan mekanisme reaktivasi melalui verifikasi langsung untuk memastikan kelayakan menerima bantuan, antara lain berdasarkan kondisi ketidakmampuan ekonomi atau riwayat penyakit kronis yang mengancam keselamatan jiwa.

Pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker), seluruh provinsi telah menginisiasi perlindungan bagi pekerja rentan,



yaitu mereka yang bekerja dengan upah atau penghasilan di bawah standar, memiliki kondisi kerja tidak stabil, serta tingkat kesejahteraan rendah atau termasuk kategori miskin maupun miskin ekstrem. Pada tahun 2024, sebanyak 246 ribu pekerja di 502 kabupaten/kota

telah terlindungi melalui skema Jamsosnaker dengan iuran yang didanai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Selain itu, dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan perlindungan pekerja rentan.

Tabel 8.2
Realisasi Bantuan Sosial dalam Program Penurunan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2022 - 2025

Uraian	Satuan	2022	2023	2024	Semester 1	
					2024	2025
Program Keluarga Harapan	KPM (juta)	9,84	9,87	10,00	9,99	10,00
Program Sembako/BPNT	KPM (juta)	18,79	18,72	18,73	18,00	18,27
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial (PBI JK)	jiwa (juta)	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80
Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak	jiwa (ribu)	50,65	45,37	55,03	29,82	37,05
Atensi YAPI	jiwa (ribu)	378,75	332,64	274,05	205,69	270,00
Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Program Permakanan	jiwa (ribu)	33,93	48,79	33,77	33,77	36,00
Lanjut Usia yang Mendapatkan Bantuan Permakanan	jiwa (ribu)	247,14	209,99	100,00	100,00	101,00
Korban Penyalahgunaan Napza dan Orang dengan HIV yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	jiwa (ribu)	24,41	13,34	18,17	4,25	6,50
Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Logistik Tanggap Darurat	paket (ribu)	776,25	254,20	541,44	177,78	277,14

Sumber: Kementerian Sosial, 2025

Bab 8.

8.2.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan yaitu: (1) tingkat akurasi DTSEN dalam mengidentifikasi penduduk miskin dan rentan secara tepat; (2) konvergensi program perlindungan sosial dengan akses layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi perlu ditingkatkan; (3) desain program untuk inklusivitas afirmasi kebijakan terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan kepala keluarga, dan anak-anak; dan (4) kolaborasi multipihak dan skema pembiayaan inovatif.

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan yaitu: (1) pelaksanaan strategi perlindungan sosial adaptif melalui integrasi Program Kartu Kesejahteraan dan digitalisasi bantuan sosial untuk mendorong inklusi keuangan penduduk miskin dan rentan; (2) penyempurnaan metodologi penghitungan kemiskinan, seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat yang terus berkembang; (3) pemutakhiran data PBI JKN berbasis data sosial dan ekonomi didukung sosialisasi yang tepat sasaran terhadap peserta aktif dan nonaktif; (4) perluasan perlindungan pekerja

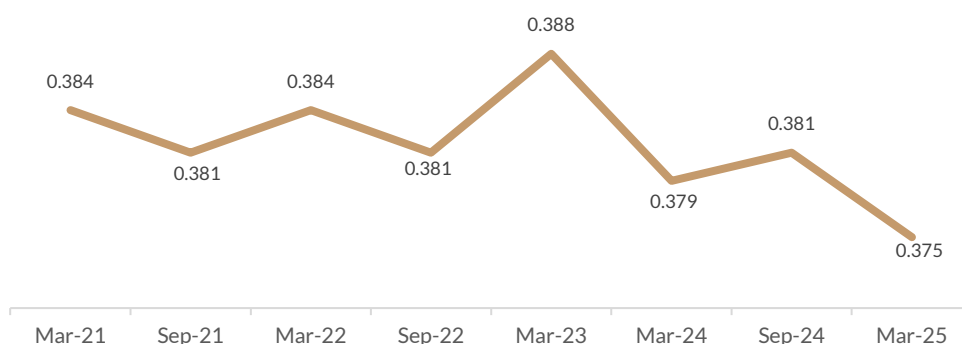
melalui pembentukan payung hukum terkait pemberian bantuan iuran bagi pekerja miskin dan tidak mampu termasuk teknis dan basis data; dan (5) penguatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan strategi nonkonvensional penanggulangan kemiskinan, melalui dukungan pendampingan intensif, pemanfaatan data berbasis desa/kelurahan, serta penguatan kelembagaan lokal.

8.3 Penurunan Ketimpangan Antar kelompok Masyarakat

8.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam menurunkan ketimpangan ekonomi antarkelompok masyarakat adalah rasio gini. Dalam dua tahun terakhir capaian rasio gini menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2025, capaian rasio gini sebesar 0,375. Capaian tersebut menurun apabila dibandingkan dengan rasio gini pada tahun 2024 sebesar 0,379. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan pelayanan dasar yang lebih merata, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Grafik 8.2
Capaian Rasio Gini Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Keberhasilan penurunan ketimpangan secara nasional tidak terlepas dari penurunan rasio gini di daerah. Beberapa daerah berhasil melakukan penurunan rasio gini secara signifikan sehingga berpengaruh terhadap

penurunan ketimpangan secara nasional. Penurunan rasio gini tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah, Sulawesi Barat, dan Banten dengan penurunan ketimpangan 0,023 hingga 0,048 poin.

Tabel 8.3
Capaian Penurunan Tertinggi Rasio Gini Provinsi
Tahun 2024-2025

No	Provinsi	Capaian		Selisih
		2024	2025	
1	Papua Tengah	0,381	0,333	-0,048
2	Banten	0,353	0,330	-0,023
3	Sulawesi Barat	0,354	0,316	-0,038
4	Sumatera Selatan	0,333	0,311	-0,022
5	Kep. Bangka Belitung	0,244	0,222	-0,022
6	Sulawesi Tengah	0,301	0,279	-0,022
7	Gorontalo	0,414	0,392	-0,022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Capaian tersebut tidak lepas dari pelaksanaan berbagai kebijakan strategis yang berpihak pada kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Program perlindungan sosial seperti bantuan sembako langsung dan jaminan kesehatan nasional, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang menysasar daerah tertinggal, serta pemberdayaan UMKM telah berkontribusi signifikan dalam mempersempit ketimpangan antarkelompok masyarakat. Penyaluran bantuan sosial yang menggunakan DTSEN menjadi lebih tepat sasaran dan berperan dalam menurunkan ketimpangan.

8.3.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan menurunkan ketimpangan antarkelompok masyarakat antara lain: (1) pemenuhan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan teknologi bagi masyarakat berpenghasilan rendah; (2) transformasi digital yang cepat berpotensi memperlebar kesenjangan, karena tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan dan sumber daya untuk beradaptasi; (3) ketimpangan dalam kepemilikan aset; (4) terbatasnya mobilitas sosial; serta (5) konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu.

Bab 8.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan yaitu: (1) penguatan perlindungan sosial; (2) pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan program pembiayaan inklusif; (3) pembangunan infrastruktur dasar dan digital di wilayah tertinggal; serta (4) perluasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat.

8.4 Kemandirian Masyarakat

8.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Kemandirian masyarakat merupakan kondisi individu atau kelompok mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial secara mandiri, tanpa bergantung pada pihak lain, kecuali dalam bentuk hubungan transaksional. Kemandirian masyarakat diwujudkan melalui proses graduasi masyarakat miskin menuju sejahtera. Pemerintah melaksanakan berbagai pemberdayaan ekonomi yang bersifat meningkatkan kapasitas keterampilan di bidang kewirausahaan. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk kemandirian masyarakat secara ekonomi tersebut meliputi seperti Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Program Pemberdayaan Sosial

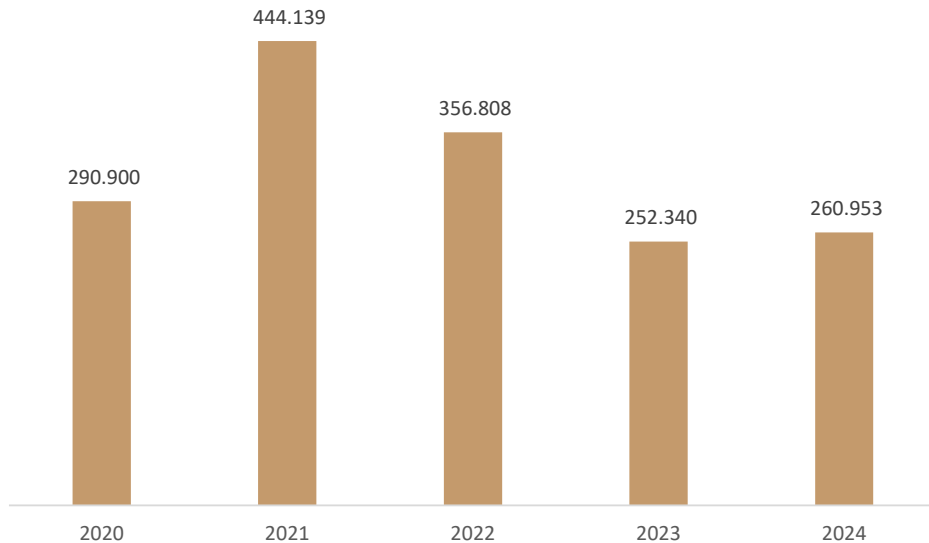
dan Ekonomi (PPSE), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), serta berbagai program pemberdayaan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sejak semester II 2024 hingga semester I 2025, jumlah masyarakat yang diberdayakan secara ekonomi mencapai 467 ribu orang.

Selama pelaksanaan program, pendampingan kepada penerima manfaat diberikan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, serta keberlanjutan intervensi. Selain itu, pemerintah mengimplementasikan program lain yang mendorong kemandirian secara sosial seperti pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas), pemberdayaan karang taruna, perhutanan sosial, serta reforma agraria.

Pelaksanaan reforma agraria berperan dalam mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan meningkatkan kemandirian masyarakat penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Pada semester I 2025, telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 12.531 bidang, sehingga secara total pemerintah telah meredistribusikan tanah sebanyak 6.150.589 bidang (4.391.969 ha) kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah, yang akan dilanjutkan dengan fasilitasi pendampingan usaha. Dengan demikian, penerima TORA diharapkan dapat mengelola tanah yang diberikan secara produktif sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.



Grafik 8.3
Capaian Kegiatan Redistribusi Tanah (Bidang Tanah)
Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2025

Keberhasilan program kemandirian masyarakat bergantung pada keberadaan tenaga pendamping pembangunan. Tenaga pendamping adalah ujung tombak dalam memberikan dukungan terhadap penerima program pemberdayaan masyarakat hingga dapat tergraduasi dari kemiskinan. Tenaga pendamping pembangunan hingga per 2024 berjumlah 197.809 orang. Jumlah tenaga pendamping tersebut masih perlu ditingkatkan untuk meringankan beban kerja dan memperkecil rasio jumlah penerima manfaat yang perlu didampingi dengan jumlah pendamping.

8.4.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat antara lain: (1) penyediaan standar universal sebagai acuan untuk mengukur tingkat kemandirian masyarakat secara objektif; (2) disparitas akses

layanan dasar, infrastruktur, dan ekonomi; (3) pemerataan sarana prasarana transformasi digital dan percepatan teknologi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat; (4) transformasi pola pikir dan resiliensi sosial mendorong kemandirian masyarakat keluar dari kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem; (5) pengintegrasian program pemberdayaan masyarakat dengan sumber pendanaannya; serta (6) sinkronisasi program pemberdayaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk mengadvokasi kemandirian masyarakat yang berkelanjutan, pemerintah terus mendorong berbagai upaya antara lain: (1) pengembangan Kartu Usaha Afirmatif (KUA) untuk mengintegrasikan, menstandarisasi, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi lintas lembaga secara berkualitas; (2) peningkatkan kualitas dan tata kelola pendampingan

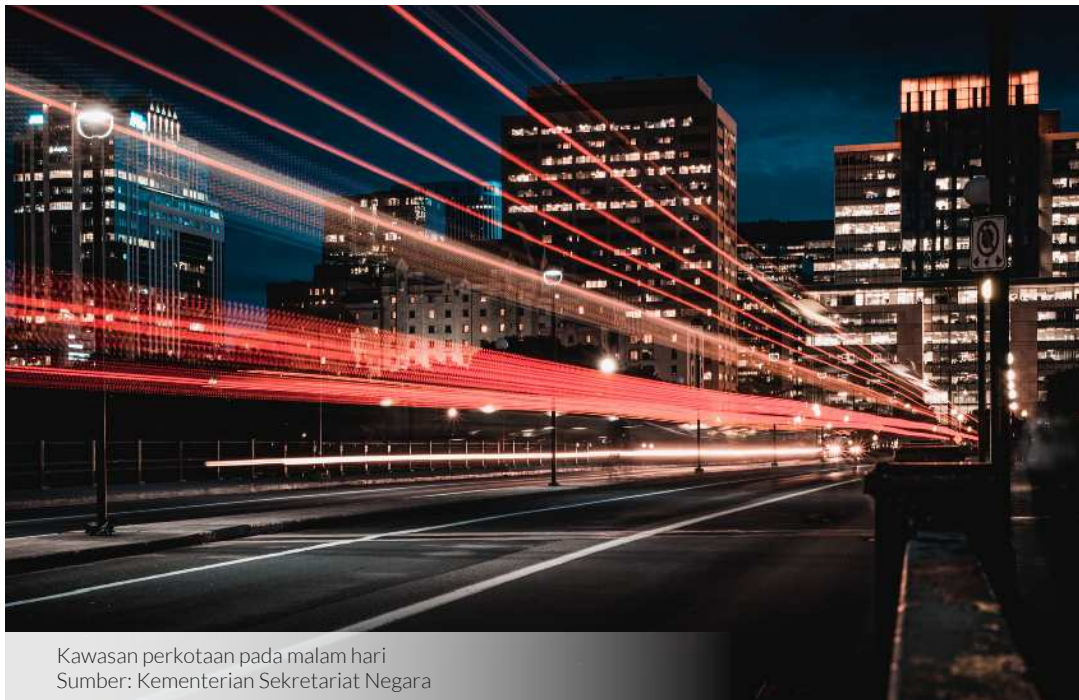
Bab 8.

pembangunan, khususnya untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, serta keberlanjutan pemberdayaan; (3) pendampingan terencana dengan tenaga terstandar untuk mempercepat kemandirian dan graduasi dari kemiskinan ekstrem; (4) pendampingan lintas sektor melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menyelaraskan program pemberdayaan pusat dan daerah bagi penerima TORA; (5) penguatan kesinambungan pendanaan dan alokasi sumber daya; serta (6) penguatan kerja sama multipihak terkait KUA dalam rangka sinkronisasi program pemberdayaan pemerintah dan nonpemerintah.

8.5 Kawasan Perkotaan

8.5.1 Capaian Utama Pembangunan

Pemerintah meningkatkan kontribusi PDRB dan skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) kawasan perkotaan prioritas yang mencakup wilayah metropolitan, wilayah non-metropolitan, dan Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berbudaya, hijau, maju, dan berkelanjutan melalui pembangunan perkotaan yang layak huni serta ketahanan sosial-ekologis.



Kawasan perkotaan pada malam hari
Sumber: Kementerian Sekretariat Negara



Tabel 8.4
Capaian Indikator Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
Tahun 2023-2025

Indikator	Satuan	Capaian		Target
		2023	2024	2025
Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	%	56,79	56,92	57,29
Wilayah Metropolitan				
Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional	%	44,20	44,26	44,35
Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	%	40,80	40,85	40,93
Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	%	3,40	3,41	3,42
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI	skor	45,86	N/A*	46,16
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI	skor	42,74	N/A*	43,04
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	skor	48,36	N/A*	48,66
Non-Wilayah Metropolitan				
Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional	%	7,15	7,26	7,47
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan	skor	44,61	N/A*	44,81
Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB Nasional	%	3,86	3,87	3,89
Proporsi Kontribusi PDRB Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB Nasional	%	3,29	3,39	3,57
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI	skor	49,81	N/A*	50,11
Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI	skor	47,20	N/A*	47,20

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Keterangan: *) Data capaian tahun 2024 masih dalam penghitungan

Selain capaian indikator di atas, beberapa capaian utama pembangunan perkotaan berkelanjutan dan pembangunan IKN pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

Wilayah Metropolitan - Dari sisi perencanaan, sebanyak 9 dari 10 Peraturan Presiden tentang RTR KSN Perkotaan yang menjadi dasar rencana tata ruang wilayah metropolitan telah disusun. Rancangan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) Bimindo

Wilayah Metropolitan (WM) Manado tengah difinalisasi. Adapun untuk mempermudah perizinan (kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang) pada tingkat kota, telah diselesaikan perda/perkada RDTR untuk 82 kawasan metropolitan.

Dalam hal pembangunan, beberapa *highlight* kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain (1) peningkatan konektivitas wilayah melalui layanan KA Perintis

Bab 8.

Makassar–Parepare; (2) peningkatan layanan dasar perkotaan melalui pembangunan Irigasi Komerling Tahap 3, pengembangan SPAM Regional Mamminasata, serta pengembangan Bendungan Cibeet dan Cijurey; (3) penguatan ketahanan melalui program pengendalian banjir *National Urban Flood Resilience Project* (NUFReP) di Kota Semarang dan Kota Banjarmasin serta penyusunan Peta Kerentanan Skala Nasional; serta (4) pengembangan perekonomian wilayah melalui program pelatihan vokasi di WM Semarang, Denpasar, dan Makassar.

Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan - Dari sisi perencanaan, telah tersusun dokumen *masterplan* pengembangan dan penataan untuk 9 kota/kabupaten prioritas (Kota Samarinda, Kota Manado, Kab. Morowali, Kab. Konawe, Kab. Halmahera Tengah, Kab. Maluku Tengah, Kab. Luwu Timur, Kab. Pegunungan Arfak, dan Kota Bandar Lampung) serta tengah disusunnya dokumen *Integrated City Planning* (ICP) di 10 kota/kabupaten (Kab. Mempawah, Kota Bitung, Kota Bukittinggi, Kab. Belitung, Kota Gorontalo, Kota Ambon, Kota Bengkulu, Kota Surakarta, Kota Jayapura, dan Kab. Banyumas).

Dalam hal pembangunan, beberapa *highlight* kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain (1) revitalisasi dan pembangunan rumah susun untuk ASN di Kota Ambon dan Kota Jayapura; serta (2) preservasi jalan strategis menuju Pelabuhan Samarinda, Kawasan Industri IMIP Morowali, Kawasan Industri IWIP Teluk Weda, dan simpul transportasi utama *hinterland* di Sulawesi Utara. Intervensi tersebut selaras dengan fokus pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak, mendukung agenda hilirisasi industri, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian indikator pembangunan kawasan perkotaan.

Ibu Kota Nusantara - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan pesat dengan selesainya infrastruktur strategis dan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak tahun 2024. Aparatur Sipil Negara Otorita sepenuhnya berkantor dan tinggal di IKN. Investasi swasta mencapai Rp65,7 triliun, melebihi target 2025 sebesar Rp60 triliun.



Tabel 8.5
Capaian pembangunan IKN Triwulan II
Tahun 2025

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target*	Realisasi
Terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan Sekitarnya			
Luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun	ha	800-850	777,09
Terselenggaranya Pemandahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara			
Jumlah Pemandahan dan/atau Penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	orang	1.700-4.100	913
Terwujudnya pengembangan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar			
Realisasi Nilai Investasi Sektor Swasta di Ibu Kota Nusantara	Rp triliun	60	65,7

Sumber: OIKN, Juni 2025

Keterangan: *) target tahun 2025 mengacu pada RKP Tahun 2025 dan RPJMN 2025-2029

Capaian pembangunan ini semakin terasa dengan selesainya pembangunan fasilitas pendukung seperti air bersih, listrik, serta kawasan perkotaan yang memperkuat ekosistem perkotaan untuk mendukung kehidupan masyarakat di IKN. Fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan ruang terbuka hijau juga terus dikembangkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat dan memastikan IKN menjadi kota yang layak huni dan ramah lingkungan. Pada tahun 2025 hingga 2028, selain melanjutkan pembangunan yang telah dimulai, pembangunan IKN difokuskan untuk mempersiapkan ekosistem legislatif dan yudikatif untuk mendukung sistem pemerintahan yang terpadu.

8.5.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan pembangunan perkotaan perlu diantisipasi secara terpadu yang meliputi (1) tata kelola batas administratif antarwilayah perkotaan; (2) optimalisasi kontribusi

PDRB perkotaan terhadap PDB nasional; (3) disparitas intra dan antarkota; (4) pengentasan kemiskinan dan informalitas; (5) peningkatan daya saing kota; (6) pengendalian tekanan terhadap kualitas lingkungan; (7) pemenuhan prinsip inklusivitas dan kota layak huni; (8) peningkatan infrastruktur dasar dan penguatan konektivitas antarwilayah di wilayah non-metropolitan; dan (9) percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar di IKN.

Menjawab tantangan tersebut, beberapa upaya yang dilakukan antara lain: (1) penguatan koordinasi lintas daerah; (2) perencanaan perkotaan terpadu; (3) percepatan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dan inklusif; dan (4) optimalisasi skema pendanaan non-APBN untuk mendorong transformasi tata kelola perkotaan di IKN.

Bab 8.

8.6 Perdesaan, Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Transmigrasi

8.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, perbatasan, dan transmigrasi menunjukkan kemajuan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan

kesejahteraan. Pendekatan pembangunan dari desa, termasuk di daerah tertinggal, telah mendorong perluasan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi yang lebih merata. Kawasan perbatasan dan transmigrasi juga mulai berkembang sebagai simpul-simpul baru pertumbuhan wilayah yang terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Tabel 8.6
Capaian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Transmigrasi Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Capaian 2024
Pembangunan Desa			
1	Persentase desa mandiri	%	22,85 ¹⁾⁵⁾
2	Persentase desa mandiri KTI dan KBI	%	KTI: 7,42 ¹⁾⁵⁾ KBI: 15,42 ¹⁾⁵⁾
3	Persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan	%	25,99 ¹⁾⁵⁾
4	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	24,62 ¹⁾⁵⁾
5	Persentase bagi hasil BUM Desa terhadap PADes	%	3,97 ¹⁾⁵⁾
6	Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status Berdaya Saing	kawasan	3 ¹⁾⁵⁾
7	Persentase Desa Berketahanan Iklim	%	33,73 ¹⁾⁵⁾
Pembangunan Daerah Tertinggal			
1	Jumlah Daerah Tertinggal	kabupaten	26 ²⁾
2	Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal	%	23,77 ³⁾
3	Rata-Rata IPM di Daerah Tertinggal	indeks	63,39 ³⁾
Kawasan Perbatasan			
1	Persentase desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas	%	21,46 ¹⁾⁷⁾
2	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan	%	44,38 ¹⁾⁷⁾
3	Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas	indeks	0,64 ¹⁾⁷⁾
4	Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP)	indeks	0,52 ¹⁾⁸⁾



No	Uraian	Satuan	Capaian 2024
Kawasan Transmigrasi			
1	Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi	indeks	58,63 ⁴⁾
2	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi	%	52,88 ¹⁾⁶⁾
3	Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi	indeks	0,425 ¹⁾⁶⁾
4	Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	%	0,90 ¹⁾⁶⁾
5	Persentase dukungan kegiatan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Masyarakat/Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	%	37,5 ¹⁾⁶⁾

Sumber: 1) Kementerian PPN/Bappenas, 2025; 2) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 490/2024 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2020-2024; 3) BPS, 2024, diolah; 4) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2024; 5) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 2025; 6) Kementerian Transmigrasi, 2025; 7) BNPP, 2024, diolah; dan 8) Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan No.35.04-657/2024 tentang Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan pada Pusat Kegiatan Startegis Nasional Tahun 2024, diolah

Capaian utama pembangunan desa diukur melalui persentase desa mandiri dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 22,85 persen dan ditargetkan menjadi 23,29 persen pada tahun 2025. Beberapa intervensi yang dilaksanakan pada semester I 2025 antara lain: (1) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar, seperti pembangunan jalan di kawasan perdesaan dan pembangunan sarana air bersih di desa; (2) pengembangan ekonomi lokal skala desa, seperti pengembangan desa wisata, pasar desa, fasilitasi desa ekspor, serta bantuan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa); (3) peningkatan kualitas dan kapasitas SDM seperti pencegahan *stunting* di desa, pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) dalam pembelajaran digital, dan peningkatan kapasitas lembaga posyandu dalam implementasi enam Standar Pelayanan Minimum (SPM); serta (4) penguatan tata kelola desa seperti pengendalian pemanfaatan dana desa, pendampingan desa, fasilitasi

inisiasi kerja sama desa, pengelolaan aset desa, penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital, dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital.

Pembangunan daerah tertinggal hingga tahun 2024 menunjukkan 26 kabupaten telah dinyatakan entas dari target 25 kabupaten. Pada periode tahun 2025-2029, upaya pembangunan daerah tertinggal berfokus pada 30 kabupaten daerah tertinggal dan sangat tertinggal untuk menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri.

Pada tahun 2025, terdapat metode dan indikator baru dalam penentuan intervensi, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin (PPM), dan Indeks Desa. Pada semester I 2025, telah dilakukan berbagai upaya, antara lain (1) peningkatan kapasitas tenaga kerja dan masyarakat bidang ekonomi dan lingkungan di daerah tertinggal; serta

Bab 8.

(2) penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan dasar dan ekonomi.

Arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan memiliki sasaran utama, yaitu pengembangan 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan, serta pemenuhan layanan dasar dan peningkatan tata kelola di 204 Kecamatan Perbatasan Prioritas. Kegiatan pembangunan kawasan perbatasan yang dilakukan hingga semester I 2025 antara lain: (1) koordinasi pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan 3 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang belum terbangun mengacu pada amanat Inpres No. 1/2019; (2) koordinasi intensif pemerintah pusat dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) 2025-2029; (3) pemberdayaan masyarakat desa terdepan kawasan perbatasan dalam menjaga dan memelihara tanda batas negara di Kab. Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; dan (4) pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut di Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan lokal. Capaian pembangunan transmigrasi pada tahun 2024 terlihat dari peningkatan rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi menjadi sebesar 58,63. Selain itu, pada tahun 2024 terdapat 52,88 persen desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi dan nilai rata-rata indeks transformasi 45 kawasan transmigrasi sebesar 0,425.

Untuk mencapai target pembangunan transmigrasi tahun 2025, telah dilakukan beberapa upaya pada semester I 2025 antara lain: (1) penyusunan regulasi tentang transformasi transmigrasi; (2) penajaman metode pengukuran indikator pembangunan transmigrasi tahun 2025-2029; serta (3) penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas *stakeholders*.

8.6.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan yang dihadapi pada pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, perbatasan, dan transmigrasi antara lain: (1) hilirisasi industri berbasis produk unggulan lokal; (2) kompetensi sumber daya manusia untuk peningkatan daya saing wilayah; (3) ketersediaan layanan dasar, seperti akses dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta air bersih dan sanitasi; (4) konektivitas intra dan antarwilayah; (5) perubahan iklim dan bencana; (6) kondisi keamanan dan ketertiban sebagian wilayah; serta (7) koordinasi lintas sektor dan lintas pelaku dalam pelaksanaan pembangunan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, perbatasan, dan transmigrasi melalui: (1) pengembangan ekosistem hilirisasi industri berbasis produk unggulan yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dan informasi; (2) peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan, dan pendampingan masyarakat; (3) pemenuhan akses dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta air bersih dan sanitasi; (4) peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan pengembangan sistem logistik



yang efisien; (5) penguatan sistem mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana; (6) peningkatan peran masyarakat dan kapasitas aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial; serta (7) penguatan koordinasi multisektor melalui integrasi perencanaan dan penganggaran, serta sinkronisasi program dan kegiatan.

8.7 Pengembangan Wilayah

8.7.1. Capaian Utama Pembangunan

Pengembangan wilayah dapat diukur melalui realisasi laju pertumbuhan PDRB wilayah

serta kontribusi perekonomian di tujuh wilayah Indonesia. Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh Wilayah Sulawesi dan Maluku melalui ekspansi industri pengolahan berbasis nikel dan logam dasar, serta Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga. Melalui upaya pemerataan ekonomi oleh pemerintah, mulai terlihat hasil nyata meningkatnya peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) dalam distribusi kontribusi terhadap PDB nasional.

Tabel 8.7
Realisasi Pertumbuhan PDRB Wilayah KBI dan KTI (persen, yoy)
Tahun 2020–2025

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
KBI	-2,30	3,53	5,14	4,90	4,80	5,17
Sumatera	-1,20	3,18	4,69	4,69	4,45	4,96
Jawa-Bali	-2,69	3,52	5,30	4,98	4,93	5,25
KTI	-0,82	3,81	6,21	5,78	5,97	4,86
Nusa Tenggara	-0,71	2,39	5,30	2,51	4,64	1,77
Kalimantan	-2,30	3,24	4,94	5,43	5,52	4,95
Sulawesi	0,23	5,67	7,07	6,37	6,18	5,83
Maluku	2,00	9,90	14,24	13,54	10,19	20,40
Papua	1,40 ^{a)}	10,32 ^{a)}	7,03 ^{a)}	4,87 ^{b)}	7,00 ^{b)}	-2,46 ^{b)}

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah

Keterangan: ^{a)} Realisasi pertumbuhan PDRB di Papua Tahun 2020-2022 menggunakan data pertumbuhan ekonomi sebelum adanya pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat; ^{b)} Realisasi pertumbuhan PDRB di Papua 2023-2025 menggunakan data pertumbuhan ekonomi setelah adanya pemekaran DOB meliputi Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Pertumbuhan ekonomi KTI pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 4,86 persen (yoy), menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor dan penguatan ekonomi di sejumlah wilayah. Wilayah Maluku mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 20,40 persen, diikuti Sulawesi 5,83 persen, Kalimantan 4,95 persen, dan Nusa Tenggara 1,77 persen.

Kinerja pertumbuhan ekonomi ini didorong terutama oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan seiring semakin masifnya hilirisasi komoditas unggulan, khususnya di Wilayah Sulawesi dan Maluku. Perkembangan Kawasan Industri (KI) seperti KI Konawe dan KI Morowali di Wilayah Sulawesi, serta KI Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli di Wilayah

Bab 8.

Maluku, berperan besar dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan menarik investasi terutama pada sektor pertambangan.

Di sisi lain, pemanfaatan sektor perikanan juga turut mendorong pertumbuhan wilayah seiring dengan tingginya potensi ekonomi biru di KTI. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kawasan industri dan pemanfaatan sektor perikanan berpotensi untuk dapat mendukung ketahanan ekonomi lokal, namun perlu dioptimalkan dengan menciptakan nilai tambah sesuai dengan keunggulan wilayah serta pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kedepan, arah pembangunan ekonomi KTI juga difokuskan pada penguatan sektor unggulan lainnya seperti pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), antara lain DPP Labuan Bajo, DPP Lombok-Gili Tramenra, DPP Morotai, DPP Manado-Likupang, dan DPP Wakatobi.

Selain itu, Wilayah Kalimantan juga mengalami tren peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan adanya pelaksanaan pembangunan IKN yang didorong utamanya oleh pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi pembangunan dan sekitarnya. Pertumbuhan ekonomi di Wilayah Kalimantan juga didorong oleh mulainya beberapa aktivitas pembangunan di kawasan perindustrian hijau Tanah Kuning di Kalimantan Utara dan KI Ketapang di Kalimantan Barat.

Sementara untuk capaian pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua pada triwulan II 2025 menunjukkan kontraksi yang disebabkan oleh adanya kendala pada aktivitas pertambangan

yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah. Namun demikian, Wilayah Papua masih memiliki banyak potensi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan, antara lain melalui pengembangan KI Fakfak, Kawasan Pertambangan dan Pengolahan Migas Teluk Bintuni, DPP Raja Ampat, Kawasan Pariwisata Biak-Teluk Cenderawasih dan potensi unggulan lainnya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera dan Jawa-Bali tetap terjaga. Wilayah Sumatera didorong oleh pertumbuhan sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, dan konstruksi. Pertumbuhan wilayah ini tetap kuat seiring keberlanjutan pengembangan KI dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta integrasi pelabuhan-logistik. Peresmian Tol Bayung Lencir-Tempino (Seksi 3), Proses Konstruksi Ruas Tol Palembang-Betung, Pengembangan KI Sei Mangkei, Kuala Tanjung serta pengembangan KPBPB Batam dan Bintan merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan di Wilayah Sumatera.

Sementara itu, Wilayah Jawa-Bali memiliki keunggulan pada sektor jasa, pariwisata, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan teknologi. Keunggulan ini semakin diperkuat dengan pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang yang menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mendukung ekspansi dan diversifikasi industri pengolahan pada Pulau Jawa.

Struktur ekonomi nasional, khususnya pada triwulan II 2025, masih didominasi oleh wilayah KBI sebesar 79,10 persen. Kontribusi Wilayah



Jawa dan Bali terhadap perekonomian nasional terus dijaga keseimbangannya di angka 58,30 persen. Angka ini menegaskan bahwa kawasan ini masih menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional. Sementara Wilayah Sumatera terus mencatat kontribusi yang relatif stabil sebesar 22,20 persen. Hal ini mengindikasikan penguatan struktur ekonomi di Sumatera didorong oleh pengembangan KI, perkebunan, dan energi.

Di sisi lain, wilayah KTI juga menunjukkan perkembangan positif. Kontribusi KTI meningkat dari 18,46 persen pada tahun 2020 menjadi 20,90 persen di triwulan II 2025. Peningkatan ini utamanya dikontribusikan oleh Wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Wilayah Kalimantan yang menjadi pusat

pengembangan ibu kota negara baru, menunjukkan peran yang cukup signifikan dengan kontribusi sebesar 8,10 persen. Wilayah Sulawesi, dengan pertumbuhan industri nikel dan hilirisasi tambang, mencatat kontribusi stabil, berada di kisaran 7,03 hingga 7,20 persen. Tidak kalah penting, kontribusi Wilayah Maluku naik dari 0,57 persen pada tahun 2020 menjadi 0,80 persen pada triwulan II 2025 dan Wilayah Papua tetap stabil di kisaran 1,8–1,9 persen. Data ini menjadi bukti bahwa agenda pemerataan pembangunan nasional melalui pengembangan wilayah, konektivitas antarwilayah, dan penguatan sektor-sektor unggulan mulai menunjukkan hasil yang positif tecermin pada kontribusi PDRB.

Tabel 8.8
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Wilayah (persen, yoy)
Tahun 2020–2025

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
KBI	81,54	81,07	78,52	79,06	79,14	79,10
Sumatera	21,72	22,10	22,03	22,01	22,12	22,20
Jawa-Bali	60,26	60,30	57,77	58,38	58,4	58,30
KTI	18,46	18,93	21,48	20,94	20,86	20,90
Nusa Tenggara	1,55	1,51	1,44	1,44	1,45	1,40
Kalimantan	8,10	8,46	9,23	8,49	8,24	8,10
Sulawesi	6,80	7,03	7,03	7,10	7,12	7,20
Maluku	0,57	0,61	0,65	0,70	0,72	0,80
Papua	1,79 ^{a)}	1,89 ^{a)}	1,85 ^{b)}	1,88 ^{b)}	1,97 ^{b)}	1,90 ^{b)}

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah

Keterangan: ^{a)} Distribusi PDRB di Papua Tahun 2020-2022 menggunakan data pertumbuhan ekonomi sebelum adanya pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat, ^{b)} Distribusi PDRB di Papua 2023-2025 menggunakan data pertumbuhan ekonomi setelah adanya pemekaran DOB meliputi Provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

Bab 8.

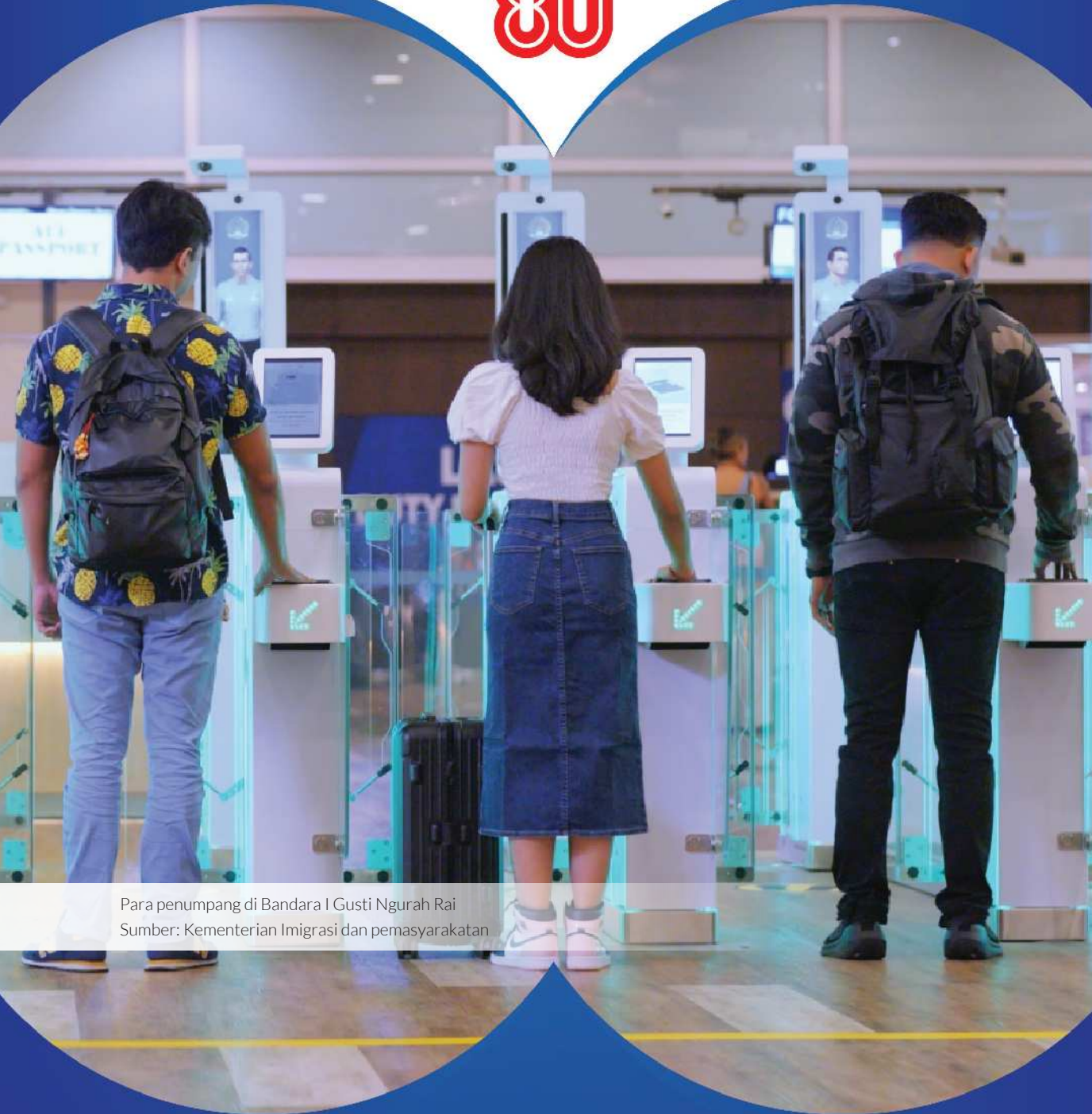
8.7.2. Tantangan dan Upaya

Pengembangan wilayah KBI masih menghadapi berbagai tantangan antara lain: (1) pengendalian terhadap laju urbanisasi yang cukup tinggi di kawasan perkotaan; (2) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (3) pengelolaan risiko bencana dengan lebih efektif; (4) akselerasi pertumbuhan ekonomi pada beberapa provinsi untuk menurunkan ketimpangan antarwilayah dan intrawilayah; (5) peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah; dan (6) peningkatan infrastruktur logistik agar lebih terintegrasi. Sementara itu, pengembangan wilayah KTI menghadapi tantangan utama, antara lain pemerataan akses infrastruktur dasar, aksesibilitas, dan konektivitas antarwilayah.

Upaya pengembangan wilayah KBI difokuskan pada pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan melalui hilirisasi komoditas unggulan yang didorong dengan penyiapan dan pengembangan sentra industri/produksi, pengelolaan kawasan konservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang difokuskan pada

penguatan destinasi regeneratif, serta percepatan pembangunan infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas yang lebih efisien dan adaptif. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah serta pelibatan masyarakat lokal secara aktif juga menjadi pendekatan kunci dalam menjamin keberlanjutan dan inklusivitas pembangunan wilayah KBI.

Sementara itu, pengembangan wilayah KTI difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan kawasan strategis eksisting, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Pemerintah turut mengakselerasi hilirisasi sumber daya alam secara berkelanjutan melalui pengembangan KI yang didukung dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Seluruh upaya ini ditujukan untuk memperkuat peran strategis KTI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata, inklusif, serta berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan pangan, air, dan energi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan sinergi antarwilayah dan pemanfaatan potensi unggulan masing-masing pulau, Indonesia diarahkan menuju pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Para penumpang di Bandara I Gusti Ngurah Rai
Sumber: Kementerian Imigrasi dan pemyarakatan

BAB 9

ASTA CITA 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

INDEKS INTEGRITAS PARTAI POLITIK TAHUN 2024

Kategori:
"Berintegritas Sedang"

62,83

IIPP 2024

Kategori (skor):

Berintegritas Rendah = 20.00-35.99
 Kurang Berintegritas = 36.00-51.99
 Berintegritas Sedang = 52.00-67.99
 Berintegritas = 68.00-83.99
 Berintegritas Tinggi = 84.00-100

61,85

Kode Etik

61,11

Demokrasi
Internal

64,98

Kaderisasi

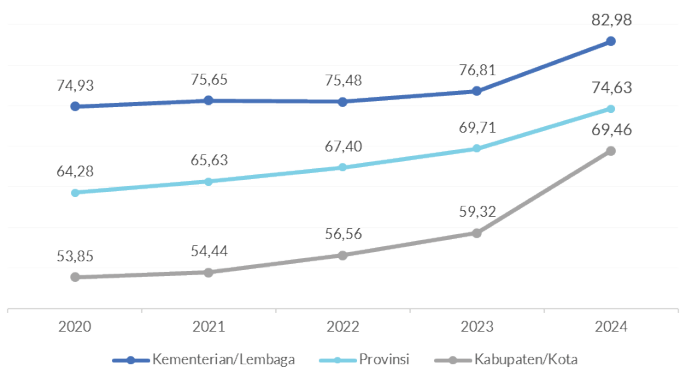
67,47

Rekrutmen

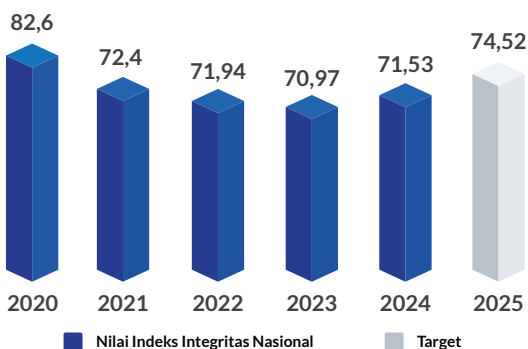
61,42

Keuangan Partai
yang Transparan
dan Akuntabel

Indeks Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024



Capaian Indeks Integritas Nasional



Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional Tahun 2020-2024



BAB 9

ASTA CITA 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan



Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkeadilan merupakan landasan strategis untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Upaya ini mencakup reformasi politik yang inklusif, birokrasi yang adaptif, sistem hukum yang adil, transformasi digital pemerintahan yang responsif, serta penyelenggaraan diplomasi yang tangguh. Selain itu, penataan desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif berperan penting dalam menjaga keseimbangan pusat-daerah. Seluruh aspek ini saling menopang untuk menciptakan tata kelola negara yang demokratis, profesional, dan mampu menjawab tantangan nasional maupun global secara berkelanjutan.

9.1 Reformasi Politik

9.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan politik di Indonesia menunjukkan komitmen besar pada demokrasi yang berkepastian hukum dengan ditandai oleh perbaikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berbeda dengan Pilkada Serentak 2020 yang hanya dilaksanakan di 9 provinsi dan 261 kabupaten/kota, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 merupakan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pertama yang dilaksanakan di

seluruh daerah Indonesia meliputi 37 provinsi dan 415 kabupaten dan 93 kota, kecuali Provinsi DIY serta 5 kota dan 1 kabupaten di wilayah administratif Jakarta. Pilkada Serentak 2024 menjadi tonggak penting dalam memperkuat konsolidasi demokrasi elektoral dan memastikan proses pemilihan kepala daerah berjalan secara efektif dan efisien. Pilkada serentak juga dilaksanakan dengan aman, damai, dan relatif bebas dari gangguan besar.

Bab 9.

Pilkada Serentak 2024 merupakan hajatan elektoral daerah terbesar yang pernah dilaksanakan di Indonesia, diikuti oleh 203.657.354 pemilih di 435.296 titik tempat pemungutan suara dalam satu hari. Penyelenggaraan pilkada juga konsisten mempertahankan inklusivitas bagi pemilih berkebutuhan khusus. Pemenuhan hak konstitusional warga negara penyandang disabilitas dilakukan melalui fasilitasi pendataan pemilih, penerapan standardisasi tempat pemungutan suara, bilik suara, dan alat bantu yang ramah disabilitas.

Pada sisi kepesertaan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 menjadi kompetisi elektoral yang lebih representatif, inklusif, terbuka, dan mendorong penguatan kualitas demokrasi dengan disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 60/PUU-XXII/2024 yang telah merekonstruksi ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan tersebut membuka peluang lebih besar bagi pasangan calon di daerah, sehingga dapat meminimalisir potensi pilkada dengan pasangan calon tunggal.

Tabel 9.1
Perbandingan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Sebelum dan Pasca
Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024

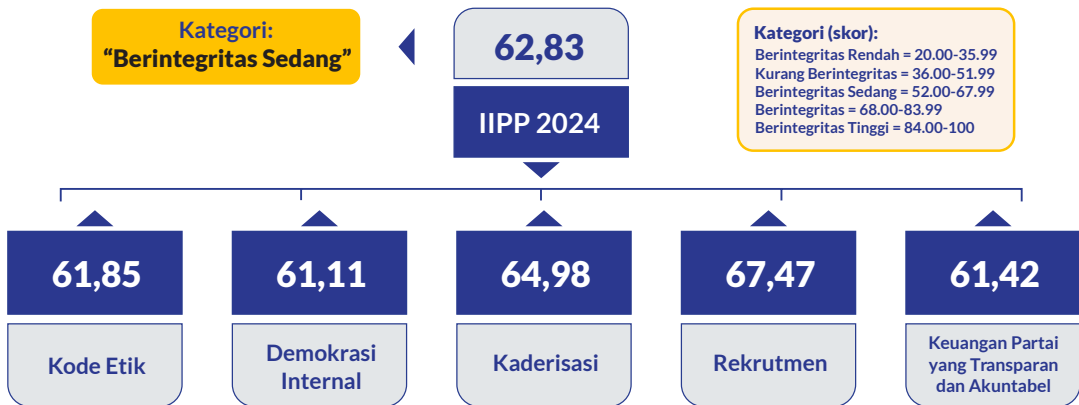
Semula	Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon harus memperoleh akumulasi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau memperoleh akumulasi paling sedikit 25% perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD. Ketentuan akumulasi suara sah tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.																				
Menjadi	<p>Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>Pemilihan gubernur dan wakil gubernur</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #1a3d54; color: white;"> <th style="text-align: center;">Jumlah Penduduk dalam DPT</th> <th style="text-align: center;">Suara sah parpol/gabungan parpol (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><2 juta</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">>2 juta - 6 juta</td> <td style="text-align: center;">8,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">>6 juta - 12 juta</td> <td style="text-align: center;">7,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">>12 juta</td> <td style="text-align: center;">6,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #1a3d54; color: white;"> <th style="text-align: center;">Jumlah Penduduk dalam DPT</th> <th style="text-align: center;">Suara sah parpol/gabungan parpol (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><250.000</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">>250.000 - 500.000</td> <td style="text-align: center;">8,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">>500.000 - 1 juta</td> <td style="text-align: center;">7,5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">>1 juta</td> <td style="text-align: center;">6,5</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Penduduk dalam DPT	Suara sah parpol/gabungan parpol (%)	<2 juta	10	>2 juta - 6 juta	8,5	>6 juta - 12 juta	7,5	>12 juta	6,5	Jumlah Penduduk dalam DPT	Suara sah parpol/gabungan parpol (%)	<250.000	10	>250.000 - 500.000	8,5	>500.000 - 1 juta	7,5	>1 juta	6,5
Jumlah Penduduk dalam DPT	Suara sah parpol/gabungan parpol (%)																				
<2 juta	10																				
>2 juta - 6 juta	8,5																				
>6 juta - 12 juta	7,5																				
>12 juta	6,5																				
Jumlah Penduduk dalam DPT	Suara sah parpol/gabungan parpol (%)																				
<250.000	10																				
>250.000 - 500.000	8,5																				
>500.000 - 1 juta	7,5																				
>1 juta	6,5																				

Sumber: Mahkamah Konstitusi, 2024

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dan Pelantikan Serentak Kepala Daerah Terpilih pada Februari 2025, diharapkan mampu menyeragamkan masa jabatan kepala daerah. Hal ini, dapat menjadi sumbu penghubung bagi suksesi kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah dalam mendesain pembangunan yang terkoneksi dan mencerminkan kerja sama pusat-daerah. Upaya ini dapat menekan risiko *missmatching* antara kebijakan pusat dan daerah. Hal tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, tepat implementasi, dan tepat guna melalui sinkronisasi periodisasi serta substansi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan daerah.

Selain Pilkada Serentak 2024 yang dimaknai sebagai medium sirkulasi kekuasaan, partai politik juga menjadi penggerak utama demokrasi dengan menyediakan kader-kader potensial sebagai calon pejabat publik. Penguatan tata kelola Parpol menjadi salah satu upaya transformatif super prioritas untuk mewujudkan Indonesia Emas. Pelembagaan demokrasi elektoral menunjukkan kemajuan, tercermin dari keikutsertaan 18 Parpol nasional dan 6 partai lokal Aceh yang terverifikasi sebagai peserta Pemilu 2024, meningkat dari 14 Parpol nasional dan 2 Parpol lokal pada Pemilu 2019.

Gambar 9.1.
Indeks Integritas Partai Politik tahun 2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Pada tahun 2024, pemerintah telah mengembangkan Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) sebagai instrumen pengukuran penguatan tata kelola Parpol. Berdasarkan penghitungan tahun 2024 tersebut, IIPP memiliki skor nasional sebesar 62,83 dari skala 0–100. Skor tersebut menunjukkan bahwa secara umum integritas Parpol berada pada kategori berintegritas sedang dengan

capaian tertinggi pada dimensi rekrutmen dan kaderisasi. Pencapaian tersebut mencerminkan optimalisasi sistem, regulasi, serta implementasi rekrutmen dan kaderisasi Parpol dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada 2024. Capaian ini menjadi modal awal untuk mendorong reformasi internal Parpol yang lebih terukur dan berbasis bukti.

Bab 9.

9.1.2 Tantangan dan Upaya

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang berhimpitan dengan tahapan Pemilu 2024 menghadapi tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (1) kapasitas penyelenggara Pemilu; (2) teknologi informasi dalam rekapitulasi suara; (3) profesionalitas dan pelembagaan kode etik penyelenggara Pemilu; serta (4) partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024.

Kualitas tata kelola Parpol menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (1) pengambilan keputusan secara terbuka dan partisipatif; (2) pengaturan konflik kepentingan dan sistem pengaduan; serta (3) transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik.

Upaya reformasi politik ke depan perlu diarahkan pada (1) perbaikan regulasi pemilu dengan berpedoman pada desain pemilu yang adaptif, tertata, terstruktur, terukur, dan berkeadilan; (2) penguatan kelembagaan

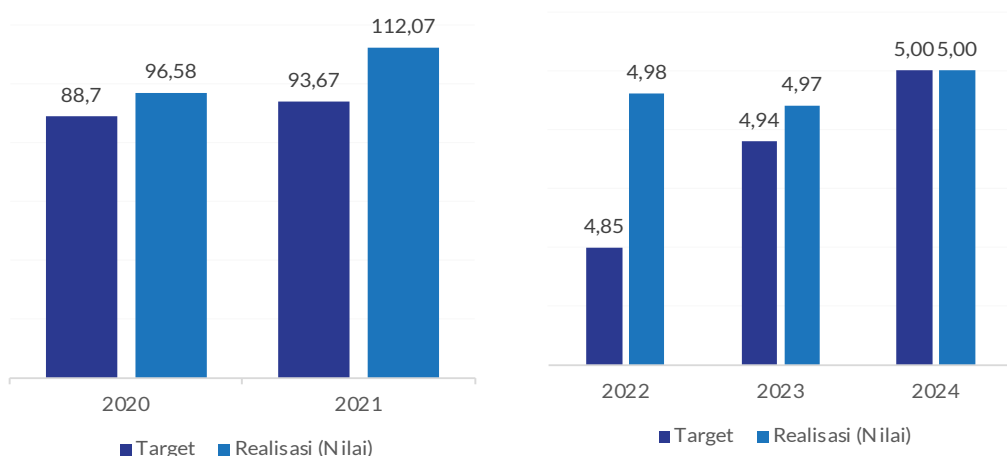
penyelenggara pemilu yang lebih profesional dan independen; (3) pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih secara berkelanjutan; (4) penguatan tata kelola Parpol melalui pendekatan yang lebih kolaboratif, pemberian insentif berbasis kinerja, dan pengawasan oleh publik yang lebih kuat; serta (5) perbaikan regulasi tata kelola Parpol yang meliputi kode etik, demokrasi internal, rekrutmen, kaderisasi, dan keuangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan reformasi politik Indonesia dapat berjalan secara lebih substansial, berkelanjutan, dan sejalan dengan cita-cita demokrasi konstitusional.

9.2 Politik Luar Negeri

9.2.1 Capaian Utama Pembangunan

Kepemimpinan Indonesia di dunia internasional secara umum mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh capaian Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional.

Grafik 9.1
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional



Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2024

Keterangan: Tahun 2022, Indeks mengalami reformulasi guna menggambarkan kinerja diplomasi yang lebih riil dengan rentang 1-5 (skor 5 menunjukkan pengaruh dan peran yang tinggi)



Kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di forum global tecermin dari kehadiran Presiden di forum-forum internasional strategis di antaranya KTT Ke-17 BRICS, KTT Ke-19 G20, KTT Ke-11 D-8, dan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2024-2026.

Selain itu, Indonesia juga terpilih sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) 2018-2025, anggota IAEA Board of Governors 2023-2025, anggota Dewan Pengarah Open Government Partnership (OGP) 2023-2025, dan anggota Dewan Direksi The South Center. Indonesia menjadi anggota BRICS dan telah menyerahkan Peta Jalan Akses kepada Dewan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta Initial Memorandum kepada Sekretaris Jenderal OECD dalam rangka proses akses.

Indonesia menyelenggarakan forum tingkat dunia di antaranya melalui: (1) High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) yang dihadiri oleh 1.502 partisipan dari 55 negara; (2) Indonesia-Africa Forum yang menghasilkan penandatanganan 32 kesepakatan dengan negara-negara Afrika senilai US\$3,5 miliar; (3) Indonesia-South Central Asia (INASCA) Business Forum yang menghasilkan total transaksi senilai US\$8,33 miliar; serta (4) Indonesia-Europe Business Forum (IEBF) yang menghasilkan total transaksi senilai US\$11 miliar. Pertemuan bilateral dengan berbagai negara sahabat juga menghasilkan penandatanganan kesepakatan kerja sama dan komitmen investasi. Pada tahun 2025, telah dirampungkan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang menyepakati pengurangan hambatan perdagangan, dimana 80 persen produk ekspor unggulan Indonesia ke Uni Eropa akan dikenakan tarif bea masuk sebesar 0 persen.

Tabel 9.2
Pertemuan Bilateral Presiden RI
dan Highlight Capaian Kesepakatan Kerja Sama Tahun 2024-2025

No	Pertemuan Bilateral Presiden	Nilai Kesepakatan	Bidang Kerja Sama
1	Republik Indonesia - Republik Rakyat Tiongkok	US\$10,07 miliar	Fitosanitari, perikanan, ekonomi biru, sumber daya mineral, mineral hijau, dan sumber daya air
2	Republik Indonesia - Brazil	US\$2,65 miliar	Energi terbarukan, agrikultur berkelanjutan, dan pengurangan emisi karbon
3	Republik Indonesia - Inggris	US\$8,50 miliar	Investasi, transisi energi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan
4	Republik Indonesia - Qatar	US\$4,00 miliar	Kolaborasi drone, keamanan siber, rudal, dan pelatihan militer bersama
5	Republik Indonesia - Arab Saudi	US\$27,00 miliar	Energi bersih, industri petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan.

Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2025

Bab 9.

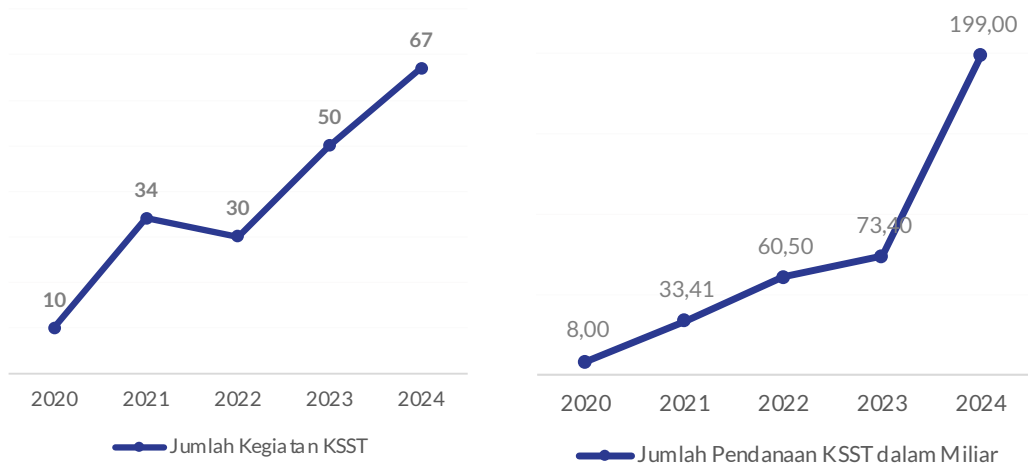
Pada tahun 2025, Indonesia berkomitmen kuat dalam mendukung kemerdekaan Palestina di forum PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai bagian dari solidaritas global. Dukungan juga ditunjukkan melalui pemberian bantuan kepada Warga Palestina berupa hibah logistik sebanyak 350 ton dan hibah melalui International Labour Organization (ILO) dan United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) sebesar US\$2,5 juta dan hibah bantuan medis darurat sebesar US\$3 juta melalui International Committee of the Red Cross (ICRC), pemberian beasiswa dan *capacity building* kepada 22 mahasiswa Palestina dan 6 dokter bedah plastik asal Gaza. Indonesia juga berkomitmen tinggi dalam diplomasi kesehatan dengan menjadi anggota aktif World Health Organization (WHO) dan GAVI Vaccine Alliance. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif membentuk arsitektur kesehatan global melalui komitmen pendanaan kepada Global Fund sebesar US\$2 juta.

Komitmen dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia diwujudkan melalui pengiriman 2.768 personel ke 8 misi PBB

di kawasan konflik dan potensi konflik pada Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara pengirim personel terbesar kelima dunia. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen terhadap pelucutan senjata pemusnah massal melalui ratifikasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/TPNW) yang berlaku pada 23 Desember 2024.

Indonesia sebagai negara yang aktif dalam kepemimpinan Selatan-Selatan secara konsisten melaksanakan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Pada tahun 2024, Indonesia telah melaksanakan 67 kegiatan pelatihan yang diikuti lebih dari 800 peserta dari Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Pasifik. Selain itu, hibah luar negeri telah diberikan, baik dalam bentuk uang tunai, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas maupun bantuan kemanusiaan senilai Rp403 miliar melalui 33 kegiatan yang menjangkau 92 negara penerima, dengan kawasan Asia dan Afrika sebagai penerima terbesar.

Grafik 9.2
Jumlah Kegiatan dan Pendanaan KSST (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025



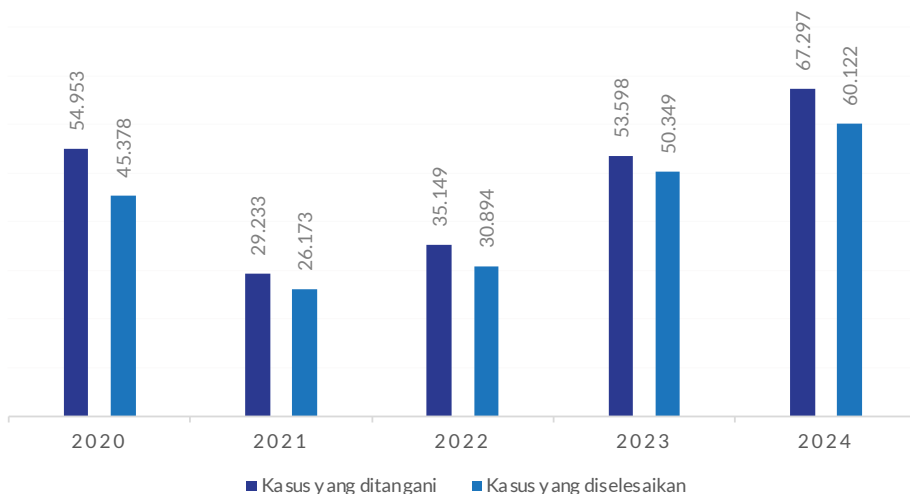
Dalam rangka diplomasi sosial dan budaya, Indonesia menambah tiga inskripsi Warisan Budaya Tak Benda, yaitu Reog Ponorogo, Kolintang, dan Kebaya. Selanjutnya, pada Sidang ke-221 Executive Board United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada April 2025, Indonesia berhasil melakukan penambahan lima arsip dokumenter ke dalam UNESCO Memory of the World Programme, a.l. Arsip Tarian Jawa: Tarian Khas Mangkunegaran periode 1861–1944, Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesia, Karya-karya Hamzah Fansuri, surat-surat dan arsip R.A. Kartini, serta Arsip Pembentukan ASEAN. Pada sidang yang sama, dua geopark Indonesia juga resmi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark, yaitu Geopark Kebumen dan Geopark Meratus.

Pada tahun 2024 sejumlah pencapaian berhasil diraih pada bidang perundingan penegasan batas darat dan maritim. Capaian perundingan batas darat, di antaranya: (1) Joint Report Co-Project Director (CPD) dan

penandatanganan *Field Plan Outstanding Boundary Problems* (OBP) Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad/Sesai dengan Malaysia; (2) Joint Documentation of Historical Records, pedoman pelestarian tanda batas, dan panduan pembangunan unilateral di dekat batas internasional dengan Malaysia; (3) kesepakatan penyelesaian tiga segmen batas darat (OBP Pulau Sebatik, OBP Sungai Sinapad-Sesai, dan West Pillar-AA2); serta (4) pembahasan penyelesaian segmen batas Noel Besi/Citrana dan Bijael Sunan/Oben dengan Timor Leste.

Pada perundingan batas maritim, capaian Indonesia antara lain: (1) Special Technical Meeting (STM) ke-3 pembahasan area intertidal dan *gap* di Laut Sulawesi dengan Malaysia; (2) pertemuan teknis pembahasan Implementing Arrangement (IA) area tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen dengan Vietnam; serta (3) *join development* Indonesia-Malaysia untuk bersama-sama membangun Kawasan Ambalat.

Grafik 9.3
Perbandingan Kasus Pelindungan WNI yang Ditangani dan Diselesaikan Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Luar Negeri, 2024

Bab 9.

Selanjutnya, selama tahun 2024, Indonesia telah menangani 67.279 kasus perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Sebanyak 60.122 kasus (89,34%) telah diselesaikan, yang terdiri dari 32.177 kasus penyalahgunaan visa, izin tinggal dan dokumen lainnya, 12.999 kasus ketenagakerjaan, 4.166 kasus meninggal dunia, 3.735 kasus pidana dan perdata, 3.281 kasus kedaruratan di Suriah, Lebanon, dan negara berkonflik lainnya, 642 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), 105 kasus WNI terancam hukuman mati, serta 3.018 kasus lainnya.

9.2.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan bidang politik luar negeri menghadapi beberapa tantangan antara lain: (1) ketegangan dan konflik sebagai dampak dinamika geopolitik; (2) perang tarif dagang sebagai instrumen rivalitas geoekonomi; (3) efektivitas mekanisme multilateral; (4) faktor eksternal penyelesaian perundingan batas negara; (5) tren migrasi nonprosedural dan modus kejahatan yang memengaruhi upaya perlindungan WNI termasuk PMI di luar negeri; serta (6) kasus *online scam* dan dampak eskalasi konflik di berbagai negara bagi upaya perlindungan WNI.

Dalam merespons tantangan tersebut, upaya politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk: (1) peningkatan intensitas hubungan baik dalam memitigasi munculnya konflik, serta upaya aktif dalam penyelesaian konflik; (2) peningkatan keikutsertaan pada berbagai forum dan negosiasi *result-oriented* sebagai bentuk diplomasi ekonomi yang efektif; (3) pembentukan mekanisme multilateral yang lebih baik berbasis partisipasi dan kontribusi aktif; (4) penguatan diplomasi perbatasan dan

penyelesaian perjanjian batas negara; serta (5) penguatan perlindungan dan pelayanan WNI termasuk PMI melalui transformasi tata kelola dan proses bisnis, interoperabilitas data, dan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan *safe migration*.

9.3 Reformasi Birokrasi

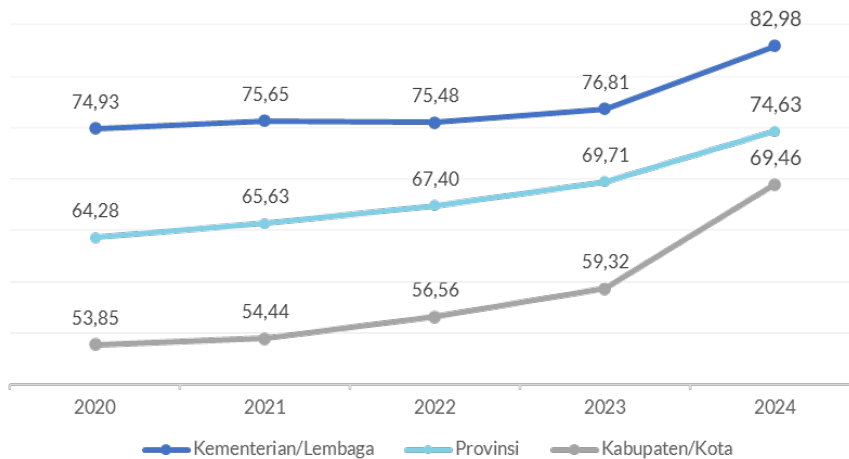
9.3.1 Capaian Utama Pembangunan

Reformasi Birokrasi (RB) ditujukan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani. Upaya pencapaian tujuan tersebut diantaranya dilakukan melalui penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah digital, transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, serta penataan desentralisasi dan otonomi daerah.

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Nasional mengalami kenaikan dalam periode tahun 2020-2024. Peningkatan ini ditandai dengan terjaganya capaian Indeks Reformasi Birokrasi Nasional yaitu 75,69 di tahun 2024. Kenaikan yang paling signifikan diperoleh pada tingkat kabupaten/kota yang semula 59,32 (2023) menjadi 69,46 (2024). Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah mendorong implementasi RB tematik yang mencakup empat fokus utama yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Pada tahun 2025, pemerintah melanjutkan upaya peningkatan kualitas birokrasi melalui perumusan kebijakan *Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN)* tahun 2025-2045 dan *Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN)* tahun 2025-2029.



Grafik 9.4
Indeks Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024



Sumber: Kementerian PANRB, 2025

Sementara itu, untuk menjamin kualitas aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik, pemerintah telah melaksanakan penilaian penerapan sistem merit. Hasil penilaian sistem merit menunjukkan capaian indeks sistem merit di tahun 2024 sebesar 0,54, dimana terdapat sebanyak 619 instansi pemerintah yang telah dinilai pelaksanaan sistem meritnya hingga tahun 2024. Langkah optimalisasi penerapan prinsip meritokrasi antara lain: (1) penyelesaian pengaduan atas dugaan pelanggaran sistem merit, terutama saat penyelenggaraan pilkada serentak; (2) pelaksanaan *quality assurance* melalui *monitoring* dan evaluasi penerapan sistem merit; (3) pelaksanaan manajemen talenta instansional; (4) perluasan akses pembelajaran bagi ASN melalui *platform* digital; dan (5) implementasi *Human Capital Development Plan* (HCDP) instansi pemerintah yang sejalan dengan *Individual Development Plan* (IDP) pegawai.

Di sisi lain, pemerintah melaksanakan penataan tenaga non-ASN sebagaimana mandat UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pada periode 2024-2025, telah dilaksanakan penataan tenaga non-ASN melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jumlah formasi yang terpenuhi melalui seleksi tahap I dan tahap II masing-masing sebanyak 676.438 dan 185.970 orang. Pemerintah juga mengumumkan kenaikan gaji guru (ASN dan non-ASN) sebesar Rp16,7 triliun di tahun 2025. Kenaikan gaji guru mencakup satu kali gaji pokok untuk guru ASN, dan penambahan gaji Rp2.000.000 untuk guru non-ASN dengan syarat sudah tersertifikasi profesi guru. Pada tahun 2025, sebanyak 1.932.666 guru telah bersertifikat pendidik, yang mencakup 64,4% dari total guru seluruh Indonesia.

Indeks Pelayanan Publik Nasional mengalami peningkatan dari 3,78 (2023) menjadi 4,02 (2024). Jika dilihat pada masing-masing aspek penilaian, aspek kebijakan pelayanan publik mendapatkan nilai 3,66, aspek profesionalisme

Bab 9.

Sumber Daya Manusia (SDM) 3,58, aspek sarana prasarana 4,01, aspek sistem informasi pelayanan publik 3,70, aspek konsultasi dan pengaduan 3,79, serta aspek inovasi 3,35. Hal ini menegaskan bahwa penguatan sarana dan prasarana menjadi prioritas dalam pelayanan publik, bersamaan dengan pemingkatan inovasi agar dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Pemerintah juga terus berkomitmen untuk memperluas dan mempermudah akses layanan publik terpadu berbasis digital, salah satunya dengan membentuk Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD). Hingga Juni 2024, telah dibangun 199 MPPD dengan rincian Sumatera 56 MPPD, Jawa-Bali-Nusra 80 MPPD, Kalimantan 26 MPPD, Sulawesi 32 MPPD, dan Maluku-Papua 5 MPPD.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik juga semakin membaik setiap tahun. Hal ini ditandai dengan peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional atas penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 3,54 pada tahun 2025.

Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan SP4N LAPOR! sebagai bentuk komitmen untuk mengakomodasi seluruh laporan/aduan masyarakat. Capaian penyelesaian laporan/aduan masyarakat yang ditindaklanjuti telah mencapai 70%. Substansi laporan/aduan yang paling banyak ditangani antara lain: (1) jalan berlubang; (2) kepegawaian; (3) konten penipuan; serta (4) ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Nasional sebesar 65,55 pada tahun 2024. Capaian tersebut mencerminkan prinsip *money follow program* dan *program follow result* telah menjadi komitmen bersama seluruh pimpinan instansi pemerintah. Peningkatan akuntabilitas kinerja juga tidak terlepas dari upaya pengendalian internal dan pengawasan pembangunan yang telah dilakukan.

Penerapan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdefenisi Level 3 menunjukkan tren positif di semua tingkatan, baik pada kementerian/lembaga (96,34%), pemerintah provinsi (82,35%), maupun pemerintah kabupaten/kota (70,08%). Sementara itu, pengawasan pembangunan telah dilakukan pada 8 sektor, 13 tema, dan 40 topik pengawasan yang terkait agenda prioritas pembangunan nasional seperti: (1) program Makan Bergizi Gratis (MBG); (2) pengentasan kemiskinan; (3) pembangunan rumah sakit berkualitas dan cek kesehatan gratis; (4) pembangunan Sekolah Rakyat; dan (5) perbaikan tata kelola industri sawit.

9.3.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan bidang reformasi birokrasi dan tata kelola menghadapi beberapa tantangan. Tantangan ini meliputi: (1) akses terhadap *platform* tunggal manajemen ASN; (2) penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang telah masuk dalam database BKN; (3) akses pelayanan publik yang inklusif; (4) optimalisasi pengawasan pelayanan publik sektor strategis; dan (5) sinergitas kinerja bersama (*shared outcome*) antar instansi pemerintah.



Upaya yang akan dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut antara lain: (1) percepatan perumusan dan pengesahan regulasi tentang Manajemen ASN serta Penghargaan dan Pengakuan; (2) percepatan pengembangan *platform* tunggal manajemen ASN; (3) percepatan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK paruh waktu dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran masing-masing instansi pemerintah; (4) pemantauan dan penguatan pelayanan publik ramah kelompok rentan; (5) peningkatan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terhadap maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik pada sektor strategis; (6) penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian pelaksanaan, dan pelaporan akuntabilitas kinerja pembangunan nasional; serta (7) penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) lintas sektor.

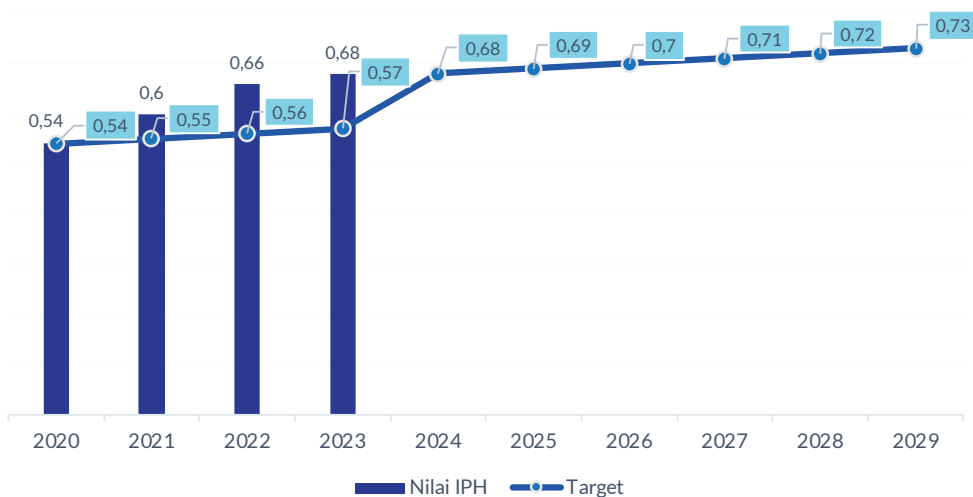
9.4 Penegakan Hukum

9.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan hukum bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak. Tujuan ini dicapai melalui penyusunan fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi. Hal ini dilaksanakan melalui arah kebijakan reformasi hukum, penguatan kelembagaan pelayanan dan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta TPPU, serta transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general*.

Capaian kinerja pembangunan bidang hukum dapat dilihat melalui nilai Indeks Pembangunan Hukum (IPH) tahun 2023 yang terus mengalami peningkatan dan berada pada angka 0,68 dalam kategori baik. Nilai IPH terdiri dari lima pilar, yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum.

Grafik 9.5
Capaian Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2020-2029



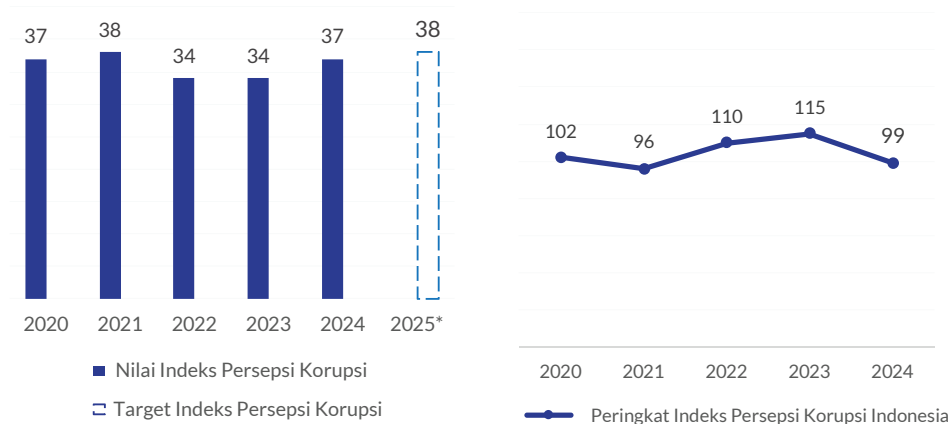
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Bab 9.

Di sisi lain, Indeks Persepsi Korupsi (IPK)/ Corruption Perception Index (CPI) Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2024 sehingga mengangkat peringkat Indonesia dari posisi 115 menjadi 99 dari 180 negara yang disurvei. Skor IPK Indonesia tahun 2024 terdiri atas sembilan indeks komposit yaitu *World Economic Forum Executive Opinion*

Survey, *IMD World Competitiveness Yearbook*, *Bertelsmann Foundation Transform Index*, *Political and Economic Risk Consultancy Asia Risk Guide*, *Economist Intelligence Unit Country Ratings*, *Political Risk Service International Country Risk Guide*, *Global Insight Country Risk Ratings*, *World Justice Project - Rule of Law Index*, dan *Varieties of Democracy Project*.

Grafik 9.6
Capaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2020-2025



Sumber: *Transparency International Indonesia*, 2025

Reformasi hukum menunjukkan capaian penting, termasuk pengesahan UU strategis dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah (Prolegnas JM) 2025-2029, seperti UU No. 1/2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah juga meningkatkan akses keadilan melalui bantuan hukum litigasi bagi 2.045 orang (Januari-Juni 2025) dan layanan bantuan hukum nonlitigasi sebanyak 542 kegiatan (2024-2025). Lebih dari 10.000 perkara (Januari-Juni 2025) dibebaskan dari biaya dan lebih dari 23.000 perkara (Januari-Juni 2025) diselesaikan diluar gedung pengadilan. Pos

bantuan hukum melayani lebih dari 160.000 pencari keadilan (Januari-Juni 2025). Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melayani 10.217 permohonan sepanjang 2024. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta TPPU ditunjukkan oleh nilai Indeks Integritas Nasional (IIN), dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Nilai IIN 2024 secara nasional memperoleh skor 71,53 (skala 0-100) mengalami kenaikan dibanding hasil IIN tahun 2023 dengan skor 70,97. Hal tersebut tecermin dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

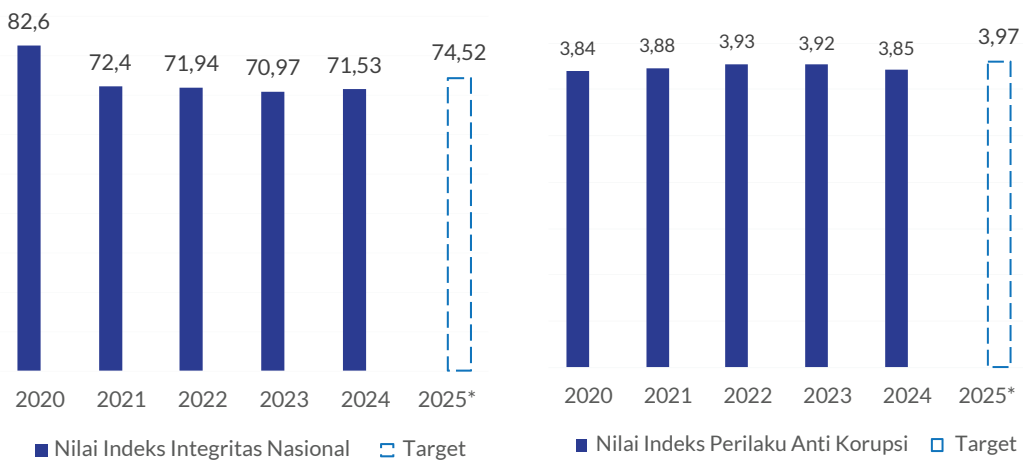


yang dilakukan melalui perbaikan sistem administrasi negara, transparansi harta dan kekayaan penyelenggara negara, pembangunan budaya anti gratifikasi, anti korupsi pada badan usaha, *Monitoring Center for Prevention* (MCP), serta pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi.

Sejak tahun 2014 hingga Juni 2025, KPK telah melakukan pemulihan aset dengan nilai

total sejumlah Rp5.045.837.869.283 melalui penanganan 1.173 perkara. Pencegahan dan pemberantasan TPPU dilakukan melalui pengembangan *machine learning* untuk intelijen keuangan, peningkatan kepatuhan pelaporan, pengungkapan perkara-perkara TPPU dan kejahatan/pidana asalnya. Hal ini termasuk partisipasi aktif dalam organisasi internasional, serta penguatan sinergi nasional melalui Komite TPPU.

Grafik 9.7
Capaian Indeks Integritas Nasional dan Indeks Perilaku Anti Korupsi Tahun 2020-2025



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (Indeks Integritas Nasional, 2025); Badan Pusat Statistik (Indeks Persepsi Anti Korupsi, 2025)



Upaya penguatan kelembagaan pelayanan dan penegakan hukum khususnya dalam lingkup peradilan dilakukan melalui kenaikan gaji bagi para hakim, dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280 persen.

Peningkatan layanan hukum dilakukan melalui digitalisasi keimigrasian dengan penerapan

paspor elektronik dan sistem e-visa. Hingga semester I 2025, telah diterbitkan sejumlah 1.954.138 paspor, 4.876.802 izin tinggal serta 4.088.103 visa. Di sisi lain, layanan Kekayaan Intelektual (KI) juga terus diperkuat. Sejak awal tahun hingga semester I 2025, pengajuan permohonan layanan KI mencapai 187.865 permohonan. Hal ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran dan permintaan masyarakat terhadap perlindungan KI.

Tabel 9.3
Perbandingan Capaian Penyelesaian Permohonan KI
Tahun 2024 dan Semester I 2025

No.	Layanan	2024	Semester I 2025
1	Hak Cipta	177.890	78.207
2	Desain Industri	5.766	4.531
3	Merek	131.668	139.808
4	Paten	12.614	10.772
5	Indikasi Geografi	53	15
6	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	9	9
7	Rahasia Dagang	40	40
8	Kekayaan Intelektual Komunal	589	110

Sumber: Kementerian Hukum, 2025

Keterangan: Capaian semester 1 2025 memperhitungkan permohonan yang belum selesai di tahun 2024

Beberapa capaian dalam mendukung pelaksanaan Transformasi sistem penuntutan dan *Advocaat Generaal* yang telah dilaksanakan di antaranya: (1) pemberantasan korupsi dan pencucian uang pada beberapa perkara mega besar seperti: i) tindak Pidana Korupsi Penerbitan Izin Usaha Tambang (IUP) di PT Timah Tbk sebesar Rp300 triliun, ii) tindak Pidana Korupsi Pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) sebesar Rp18 triliun, iii) Kasus Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang pada PT Pertamina (Persero) Tahun 2018-2023 sebesar Rp285 triliun, dan beberapa kasus besar lainnya; (2) penyelamatan Keuangan Negara melalui bidang tindak pidana khusus dalam periode 18 Agustus 2024 hingga 11 Juli 2025 sebesar Rp23 triliun. Penyelamatan ini tidak hanya dalam rupiah, namun juga dalam berbagai mata uang asing seperti Dolar Amerika (USD3,36 miliar), Dolar Singapura (SGD3,44 miliar), Euro (EUR356 juta), Poundsterling (GBP2,91 miliar), Ringgit Malaysia (RM3,58 miliar), Won Korea (KRW4,33 triliun), Peso Filipina (PESO3,39 miliar), dan mata uang

lainnya termasuk dolar Australia, dolar Brunei, dolar Hongkong, yuan, yen, rial, dong, bath, dan dirham; (3) Penyelesaian aset barang rampasan dan barang sitaan oleh Badan Pemulihan Aset sebesar Rp940 Miliar; (4) Penanganan perkara judi online yang menjadi salah satu fokus Presiden Prabowo sebanyak 1.351 perkara; (5) Penyelamatan keuangan negara melalui jalur perdata sebesar Rp6 triliun dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata sebesar Rp7 triliun; dan (6) Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana sebanyak 1.826 perkara.

9.4.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan dalam mendorong reformasi hukum adalah terjadinya disharmoni dan hiperregulasi. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan ini antara lain: (1) penguatan aspek pembentukan dan kualitas regulasi; (2) pembenahan terhadap kebijakan pemberian bantuan hukum sehingga jangkauan dan kualitas bantuan



hukum semakin meluas dan merata; serta (3) integrasi berbagai layanan akses terhadap keadilan yang disediakan pemerintah ke dalam sistem terpadu sehingga dapat mendukung penerapan peradilan pidana yang optimal.

Tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta TPPU, yaitu (1) belum dibahasnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal; (2) perlunya optimalisasi pelaksanaan rekomendasi UNCAC dalam UU Tindak Pidana Korupsi; (3) perlunya penguatan independensi lembaga anti korupsi melalui regulasi; (4) tingginya toleransi terhadap korupsi; dan (5) tindak lanjut atas rekomendasi hasil IIN di tingkat pusat dan daerah perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya seperti (1) percepatan adaptasi terhadap perubahan KUHP baru pada delik korupsi; (2) percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal; (3) penguatan regulasi untuk independensi lembaga anti korupsi; (4) peningkatan edukasi publik tentang antikorupsi; dan (5) penguatan tindak lanjut atas hasil rekomendasi IIN.

Beberapa tantangan dalam penguatan kelembagaan pelayanan dan penegakan hukum di Indonesia antara lain: (1) reformasi kelembagaan hukum; (2) pembenahan regulasi kelembagaan; dan (3) penguatan sarana dan prasarana serta penerapan teknologi informasi. Ketiga hal tersebut menjadi landasan upaya pemerintah sebagai berikut: (1) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam kerangka reformasi kelembagaan hukum; dan (2) penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap hukum.

Dalam mewujudkan transformasi sistem penuntutan beberapa tantangan yang dihadapi di antaranya: (1) dinamika koordinasi antara penyidik dan penuntut umum; (2) kebutuhan pemerataan sarana, prasarana dan peralatan penegakan hukum di seluruh satuan kerja; dan (3) infrastruktur teknologi serta interoperabilitas sistem antar lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan di antaranya: (1) penguatan fungsi penuntut umum serta peran jaksa sebagai *Advocaat Generaal*; (2) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam penanganan perkara berbasis teknologi seperti *digital forensics*, kejahatan digital, serta isu-isu hukum kontemporer lainnya; (3) pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan guna mendukung efektivitas proses penegakan hukum; dan (4) pembangunan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi serta interoperabilitas sistem antar lembaga penegak hukum.

9.5 Pemerintah Digital

9.5.1 Capaian Utama Pembangunan

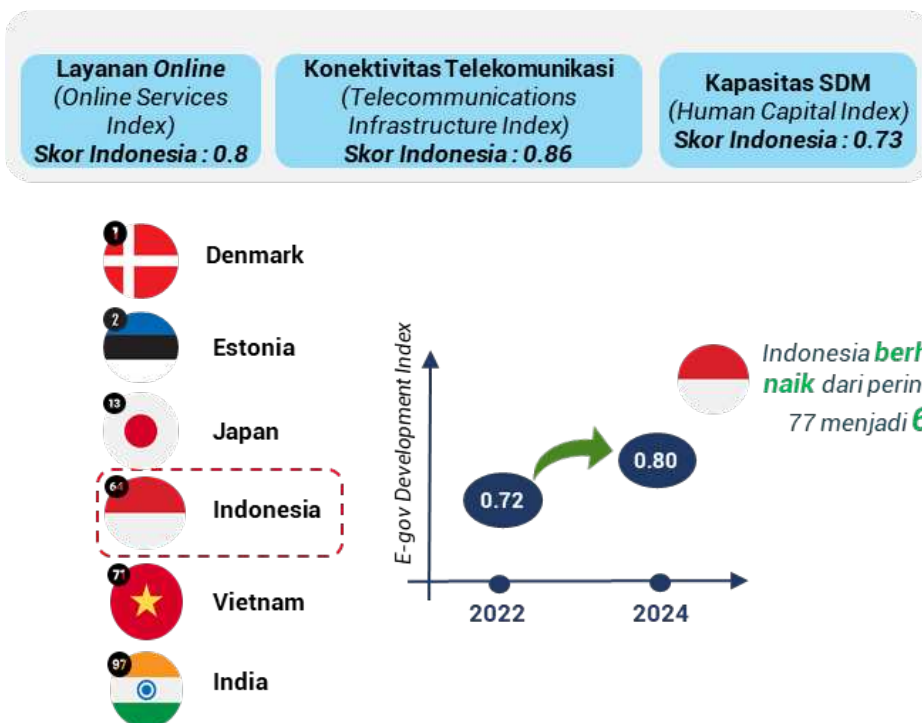
Pemerintah digital diarahkan untuk mempercepat transformasi kelembagaan, proses bisnis, dan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Tujuan utamanya adalah membangun birokrasi yang adaptif, responsif, dan berbasis kinerja, sekaligus mendorong efektivitas pelayanan publik yang lebih terbuka dan efisien. Fokus kebijakan mencakup penguatan Satu Data Indonesia (SDI), penyediaan satu layanan terpadu, serta integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh. Selain itu, juga dilakukan pembangunan dan pengoperasian Pusat Data Nasional (PDN), serta pengelolaan Sistem

Bab 9.

Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Pemerintah juga aktif menanggulangi konten negatif di internet melalui sistem analisis cerdas dan pemblokiran otomatis. Selain itu, UU No. 27/2022 Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi langkah penting dalam melindungi data warga negara.

Transformasi digital ini mendukung dalam peningkatan skor E-Government Development Index (EGDI) yang mengukur keberhasilan negara dalam mengimplementasikan layanan publik daring, infrastruktur TIK, dan kapasitas SDM. Peningkatan EGDI menandakan bahwa Indonesia semakin mampu menghadirkan layanan publik yang inklusif, efisien, dan responsif.

Gambar 9.2
Tiga Komponen Penilaian EGDI



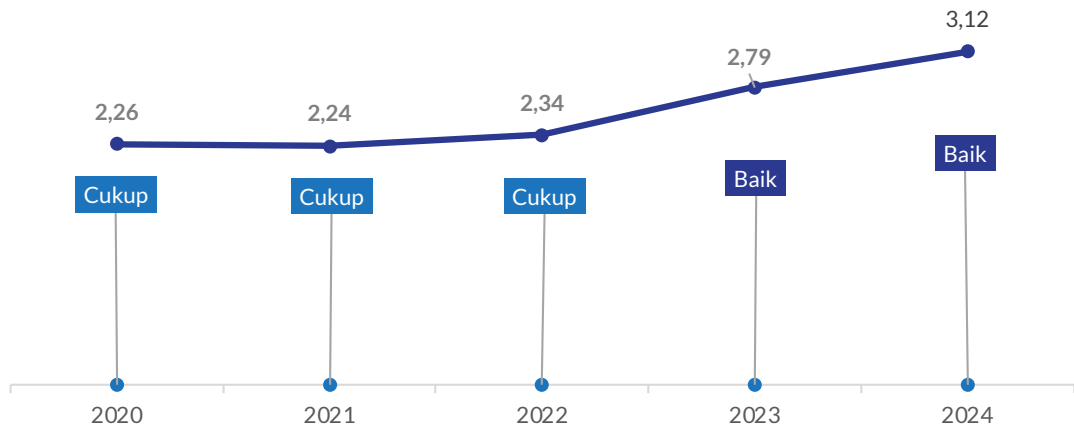
Sumber: United Nations, 2024

Salah satu pilar utama dalam pemerintahan digital adalah SPBE, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 95/2018. Sistem SPBE mendorong digitalisasi layanan pemerintahan secara menyeluruh, memanfaatkan TIK untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Sistem SPBE juga

terintegrasi dengan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai basis pengambilan keputusan yang akuntabel dan berbasis data. Indeks SPBE digunakan sebagai alat ukur kemajuan digitalisasi birokrasi, yang hingga 2024 terus meningkat dan berada pada kategori "Baik".



Grafik 9.8
Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Kementerian PANRB, 2024

Langkah strategis pemerintah juga mencakup penyusunan kebijakan baru seperti Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintahan Digital (RPerpres Pemdig) serta Rencana Induk 2025-2045 (Renduk) Pemerintahan Digital Nasional, sebagai kerangka arah pengembangan ekosistem digital pemerintah. Penyusunan Renduk Data Pembangunan 2025-2045 juga menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan berbasis data yang andal.

Sejalan dengan agenda transformasi ini, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah digitalisasi program perlindungan sosial (Perlinsos), termasuk integrasi data Regsosek, DTKS, dan P3KE untuk mendorong ketepatan sasaran bantuan, dengan dukungan interoperabilitas sistem layanan pemerintah dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan.

Transformasi digital juga menyentuh sektor layanan strategis, seperti pertanahan. Dalam rangka memotong rantai birokrasi dan mempercepat pelayanan, pemerintah melaksanakan digitalisasi Sertipikasi Hak Atas Tanah (SHAT). Pada Semester I 2025, sebanyak 579.831 bidang tanah telah disertipikasi secara digital. Penerbitan sertipikat dengan georeferensi akurat menjamin transparansi, memperkuat kepastian hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor.

Dalam bidang informasi geospasial, percepatan penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 terus dilakukan. Hingga kini, Peta Rupabumi Skala 1:5.000 telah tersedia secara penuh di seluruh Pulau Sulawesi untuk mendukung kebijakan perencanaan kewilayahan serta layanan pemerintahan berbasis lokasi dan ruang.



9.5.2 Tantangan dan Upaya

Transformasi pemerintahan digital menghadapi sejumlah tantangan, antara lain: (1) optimalisasi pada tata kelola pertukaran data antar instansi; (2) integrasi dalam pemanfaatan data induk pemerintah selain DTSEN, seperti Dapodik, serta data non-pemerintah sebagai basis penentuan sasaran program perlindungan sosial; (3) infrastruktur SPLP dan ekosistem PDN masih dalam proses penguatan untuk mendukung pertukaran data yang aman, efisien dan dapat melindungi privasi subjek data; serta (4) pemutakhiran DTSEN belum optimal akibat perbedaan struktur dan waktu pembaruan (*timestamp*) dari tiga basis data awal Regsosek, P3KE, dan DTKS.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, pemerintah melakukan transformasi digital melalui upaya: (1) pembangunan infrastruktur digital yang merata hingga ke wilayah 3T; (2) penguatan tata kelola data untuk menjamin integrasi dan interoperabilitas lintas instansi serta mendorong kebijakan yang berbasis bukti; (3) penguatan perlindungan data pribadi dan keamanan siber melalui penerapan regulasi dan pengawasan adaptif; (4) pengembangan sistem harmonisasi data yang menyelaraskan struktur dan frekuensi pembaruan dari berbagai sumber; (5) pembangunan platform pertukaran data nasional berbasis metadata dan *timestamp* standar; (6) penguatan peran Wali Data dan koordinasi lintas kementerian/daerah; serta (7) penguatan perlindungan data pribadi dan keamanan siber melalui implementasi regulasi dan sistem pengawasan adaptif.

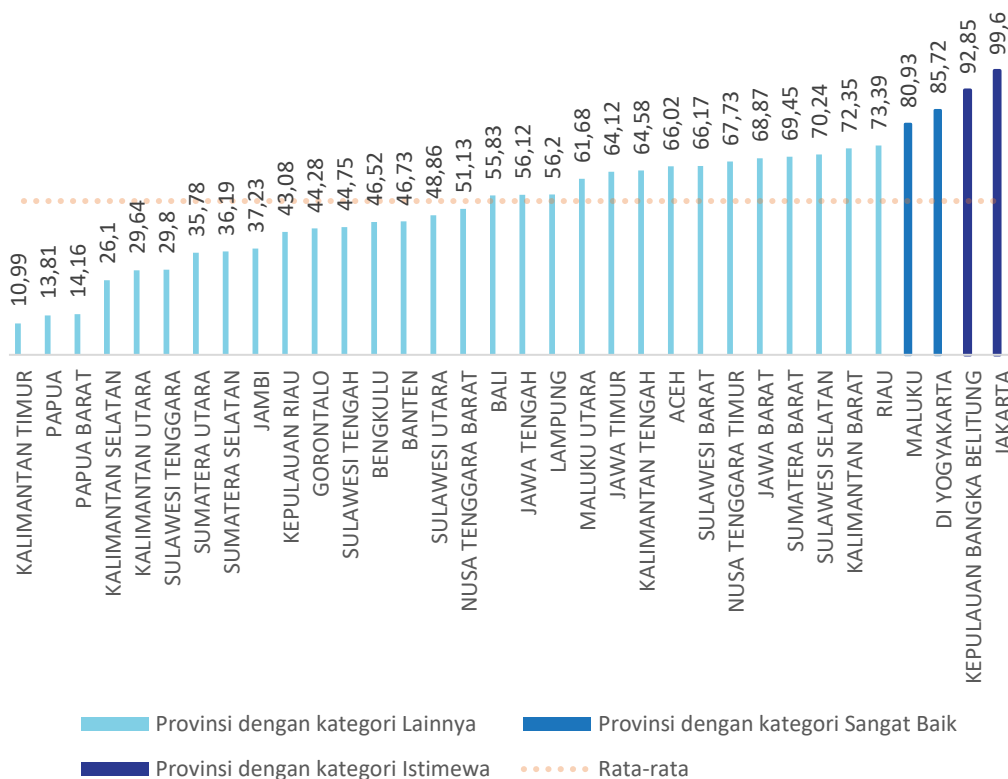
9.6 Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

9.6.1 Capaian Utama Pembangunan

Penataan desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan untuk harmonisasi kewenangan antartingkat pemerintahan dengan memperhatikan tipologi kewilayahan serta penguatan fondasi keuangan daerah. Penataan ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut, dilakukan kebijakan strategis melalui (1) optimalisasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP); (2) penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah; serta (3) optimalisasi kontribusi penerimaan pajak.

Optimalisasi peran GWPP merupakan amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 33/2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Peran GWPP dalam membantu Presiden adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, kinerja GWPP diukur dengan indeks GWPP yang dipublikasikan setiap tahun.

Grafik 9.9
Capaian Indeks GWPP tahun 2024



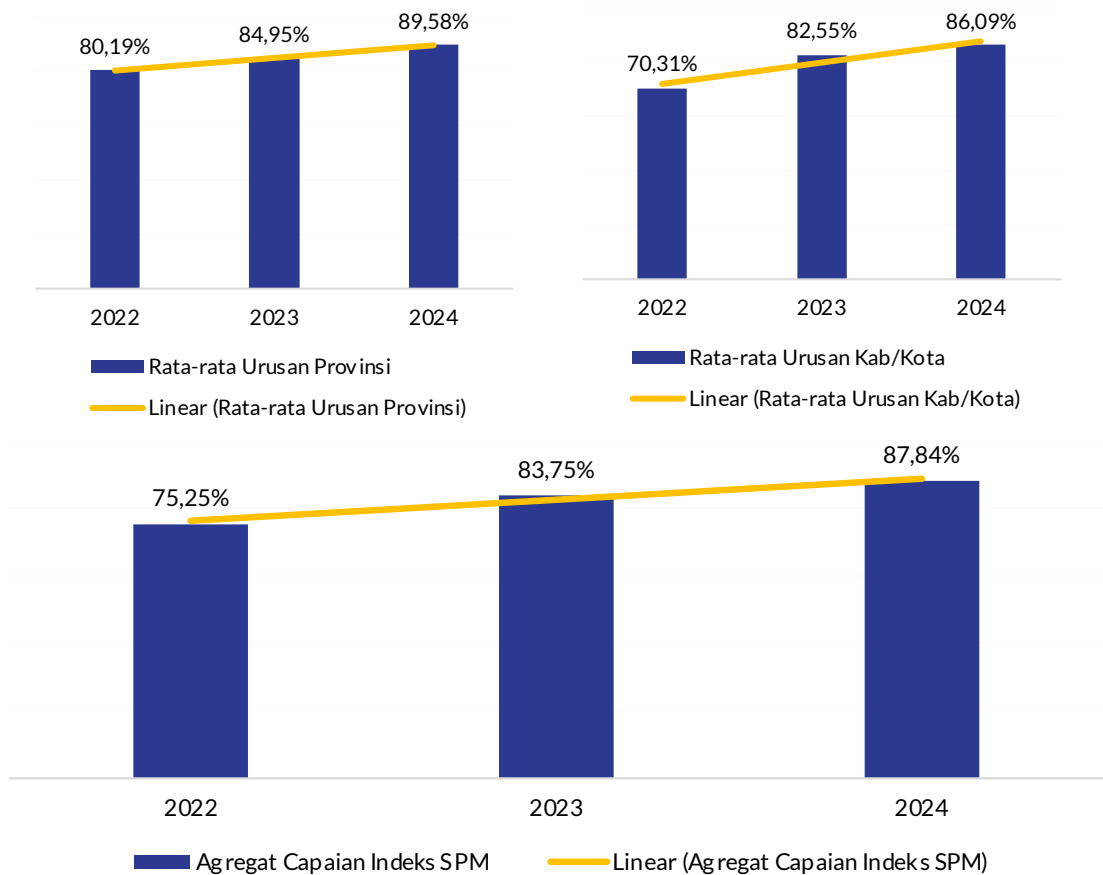
Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Capaian Indeks GWPP tahun 2024 adalah 53,95, dan ditargetkan menjadi 73 (2025) dan 85 (2029). Menurut kategorinya, terdapat dua provinsi yang berkategori “Istimewa” dengan capaian Indeks GWPP lebih besar dari 90 yaitu Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, dua provinsi berkategori “Sangat Baik” dengan capaian antara 80 sampai dengan 90 yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Maluku. Pada tahun 2025, ditargetkan 17 provinsi dengan kategori “Sangat Baik”.

Selanjutnya, penerapan SPM sebagai urusan wajib bagi pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang merata bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penerapan SPM merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerapan SPM diukur dengan Indeks SPM yang memuat pengelolaan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.



Grafik 9.10
Capaian Indeks SPM tahun 2022-2024

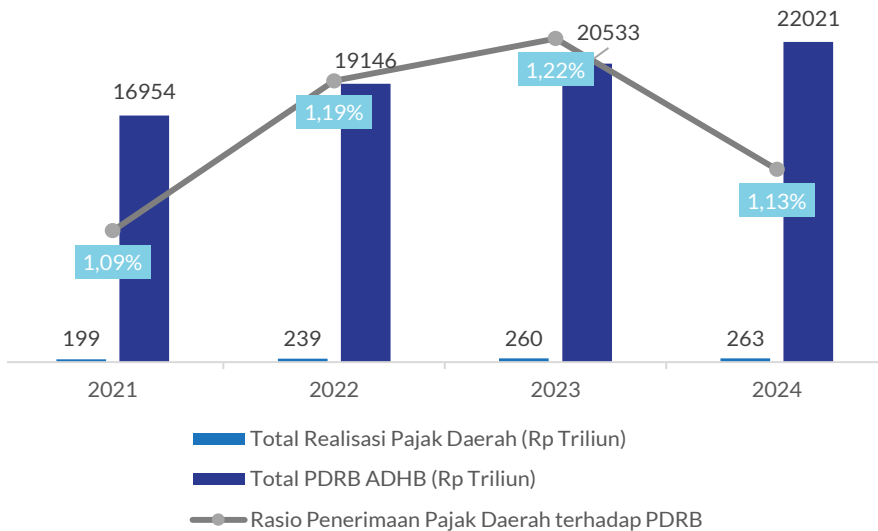


Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

Capaian Indeks SPM terus meningkat baik pada provinsi maupun kabupaten/kota. Peningkatan ini didorong oleh (1) penyelesaian penyusunan Rencana Aksi penerapan SPM di daerah; (2) penguatan pemantauan, pengawasan, dan sistem penghargaan SPM (*SPM Award*); (3) pencapaian komitmen dan peningkatan kualitas pelaporan dari pemerintah daerah; serta (4) peningkatan kapasitas pelaksana di daerah melalui pelatihan teknis termasuk dalam rangka pemanfaatan data sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan. Kombinasi kebijakan nasional dan upaya daerah yang adaptif mendorong percepatan pemenuhan pelayanan dasar.

Dalam rangka penguatan fondasi keuangan daerah, optimalisasi potensi pajak daerah menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB (*local tax ratio*) digunakan sebagai alat ukur yang mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memungut pajak daerah dari aktivitas/kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut.

Grafik 9.11
Capaian Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan, 2025, diolah

9.6.2 Tantangan dan Upaya

Dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah tantangan terkait aspek kelembagaan, yaitu: (1) kapasitas sumber daya; dan (2) koordinasi lintas sektor dan level pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan, seperti: (1) penguatan peran GWPP; (2) percepatan penerapan SPM; dan (3) penguatan fondasi keuangan daerah.

Sejumlah tantangan dalam optimalisasi peran strategis GWPP dalam menyinergikan kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota, antara lain: (1) kelembagaan dan penataan kewenangan; serta (2) sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan, seperti: (1) penguatan perangkat dan Sekretariat GWPP sesuai amanat PP No. 33/2018; (2) penataan kewenangan untuk mencegah tumpang tindih dalam pembinaan dan pengawasan; dan (3) penguatan sistem pelaporan berbasis digital dan indikator kinerja terukur.

Hal yang serupa juga dialami dalam penerapan SPM di daerah. Beberapa tantangan antara lain: (1) pendanaan alternatif; (2) jumlah sarana prasarana yang memenuhi standar; dan (3) koordinasi OPD dalam menangani urusan SPM secara terfokus. Dalam merespons tantangan tersebut, upaya yang dilakukan di antaranya: (1) peningkatan kapasitas daerah dalam skema pendanaan alternatif; (2) pengintegrasian kebutuhan sarana dan prasarana ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan (3) penyusunan regulasi dan kelembagaan yang terintegrasi.

Berkaitan dengan penguatan fondasi keuangan daerah, terdapat sejumlah tantangan, antara lain: (1) dukungan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah; dan (2) dukungan basis data pajak daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: (1) percepatan revisi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; serta (2) pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menyusun basis data pajak daerah.



Pesta Kesenian Bali 2025
Sumber: Kementerian Pariwisata

BAB 10

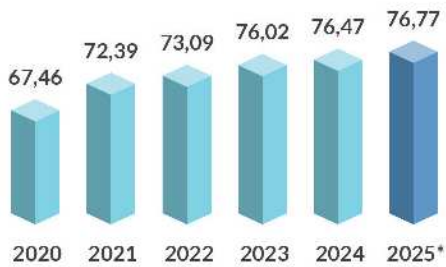
ASTA CITA 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

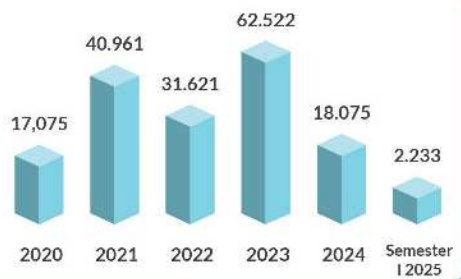
INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 2018-2025



INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (IKUB) 2020-2025



PERKEMBANGAN JUMLAH ARSIP YANG DISELAMATKAN 2020-2024



INDEKS RISIKO BENCANA TAHUN 2019 - 2024





BAB 10

ASTA CITA 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Menguatnya jati diri bangsa dan meningkatnya kerukunan umat beragama diharapkan menjadi landasan pembangunan untuk kehidupan berkelanjutan dan toleransi menuju Indonesia Maju. Kehidupan sosial yang rukun serta masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan menjadi fondasi untuk mewujudkan harmoni antara manusia, alam, dan lingkungan. Capaian pembangunannya tecermin dari peningkatan sejumlah indikator, seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), serta diakuinya khazanah arsip sebagai *Memory of the World* dari Indonesia. Di sisi lain, penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) menjadi keberhasilan tersendiri dalam menjamin fondasi dan keberlanjutan pembangunan.

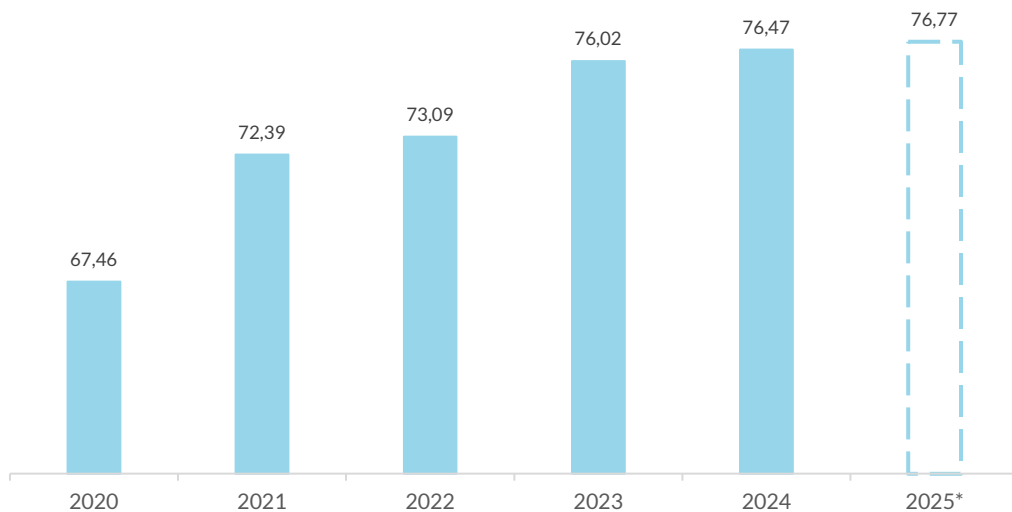
10.1 Agama

10.1.1 Capaian Utama Pembangunan

Pembangunan agama berperan penting dalam memperkokoh kohesi sosial dan harmoni masyarakat. Hal ini tecermin dari peningkatan IKUB secara signifikan sebesar 0,45 poin, dari 76,02 (2023) menjadi 76,47 (2024) dan

berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target tahun 2025 sebesar 76,77. Tren positif ini menunjukkan keberhasilan kolektif umat dalam membangun toleransi di tengah keberagaman masyarakat.

Grafik 10.1
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Tahun 2020-2025



Sumber: Kementerian Agama, 2025, diolah
Keterangan: *) angka target

Capaian IKUB tersebut didorong oleh berbagai kebijakan strategis, yakni penguatan dialog kerukunan, penyuluhan agama, serta peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dialog kerukunan, baik intra maupun antarumat beragama, serta antara tokoh agama dan budaya, berperan penting dalam mempererat kerukunan sekaligus mencegah potensi konflik. Peran aktif 37.916 penyuluh agama dalam melakukan bimbingan secara masif, inovatif, dan kontekstual turut menciptakan literasi keagamaan masyarakat yang semakin inklusif dan komprehensif. Selain itu, penancangan sejumlah Desa Kerukunan turut memperkuat peran strategis FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial.

Peningkatan kualitas layanan kehidupan beragama juga tercermin dalam capaian Indeks Layanan Keagamaan (ILK) sebesar 86,51

(kategori baik) pada tahun 2024. Pemerintah berkomitmen terhadap pemenuhan sarpras peribadatan melalui pendistribusian 221.181 eksemplar kitab suci kepada masyarakat, lembaga pendidikan, dan rumah ibadah, serta memberikan dukungan revitalisasi terhadap 5.706 rumah ibadah sepanjang tahun 2024-2025.

Peningkatan infrastruktur dan pelayanan agama juga direalisasikan melalui revitalisasi 1.758 Kantor Urusan Agama (KUA). Revitalisasi ini memperkuat perluasan fungsi KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang holistik, diantaranya mencakup layanan pencatatan pernikahan, kemasjidan, Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), manasik haji, pemberdayaan ekonomi umat, *basecamp* penyuluhan agama, dan layanan *early warning system* (EWS) konflik sosial keagamaan. Transformasi layanan keagamaan ini berkontribusi signifikan pada capaian Indeks



Kepuasan Layanan KUA, yang meningkat menjadi 85,53 (2024) dari 83,23 (2023).

Dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga, pemerintah melakukan program bimbingan perkawinan sebagai bagian dari layanan keagamaan. Program ini dilaksanakan secara luas oleh penghulu, penyuluh agama, serta tokoh agama. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan layanan bimbingan keluarga berbasis agama, seperti bimbingan keluarga sakinah (Islam), keluarga kristiani (Kristen), keluarga bahagia (Katolik), keluarga sukinah (Hindu), dan bimbingan keluarga hita sukhaya (Buddha).

Optimalisasi pengelolaan Dana Sosial Keagamaan (DSK) juga menjadi fokus strategis pemerintah melalui kontribusi berbagai lembaga filantropi keagamaan, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Lembaga Nadzir Wakaf, Lembaga Bantuan Kemanusiaan dan Kasih/BAKKAT (Katolik), lembaga-lembaga Gereja pengelola Dana Kasih (Kristen), lembaga-lembaga pengelola Dana Punia (Hindu), serta lembaga-lembaga pengelola Dana Paramitha (Buddha). Dana sosial keagamaan digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah juga terus mengalami peningkatan. Revitalisasi 32 asrama haji dan 207 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) berkontribusi signifikan bagi kelancaran keberangkatan dan kepulangan jemaah. Pada tahun 2025, sebanyak 221 ribu jemaah haji

berhasil diberangkatkan. Pada aspek yang lain, penetrasi produk Indonesia di pasar haji meningkat signifikan, khususnya untuk pasta bumbu yang digunakan di seluruh dapur katering yang melayani jemaah Indonesia, meningkat dari 76 ton (2024) menjadi 475 ton (2025). Hal ini semakin menumbuhkan optimisme terhadap potensi ekonomi dalam ekosistem haji dan umrah, yang diprediksi meningkat dari Rp65 triliun (2023) menjadi Rp194 triliun (2030).

Transformasi dan digitalisasi layanan juga diterapkan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Salah satunya tecermin dari penerbitan sertifikat halal sebanyak 3.097.611 produk sepanjang 2024-2025, yang mana capaian sertifikasi tanpa biaya untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mencapai 1.970.363 produk. Hal ini, menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam mendukung pelaku UMK. Peningkatan kualitas ekosistem halal juga didukung oleh sertifikasi 8.612 penyelia halal hingga akhir tahun 2024. Kemitraan berskala nasional dan internasional digiatkan pula demi mendukung perluasan dan percepatan penyelenggaraan JPH. Secara nasional, terdapat 68 kerja sama yang melibatkan kementerian/lembaga, BUMN, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta. Di kancah internasional, *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) telah dilakukan dengan 23 lembaga halal dari berbagai negara untuk memfasilitasi perdagangan produk halal dan memastikan keseragaman standar kualitas.

Bab 10.

10.1.2 Tantangan dan Upaya

Berbagai tantangan masih menjadi isu dalam pembangunan agama, antara lain: (1) perwujudan nilai agama menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kemaslahatan; (2) peniadaan sikap intoleransi pada sebagian kelompok masyarakat; (3) kebebasan beragama disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan; (4) pengelolaan dana sosial berbasis filantropi keagamaan agar selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan umat maupun pembangunan sosial ekonomi secara nasional; serta (5) penyediaan layanan keagamaan yang berkualitas secara merata.

Berbagai upaya diperlukan untuk memastikan terwujudnya kehidupan beragama yang rukun dan membawa kemaslahatan bagi umat, antara lain (1) penguatan praktik beragama maslahat dan pengamalan nilai-nilai agama yang toleran dan saling menghargai; (2) peningkatan literasi keagamaan yang kontekstual dan inklusif; (3) perluasan ruang dialog lintas agama yang lebih asertif di tingkat akar rumput; (4) penguatan kolaborasi program DSK untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat; serta (5) pemerataan layanan keagamaan yang berkualitas dan adaptif.

10.2 Kebudayaan

10.2.1 Capaian Utama Pembangunan

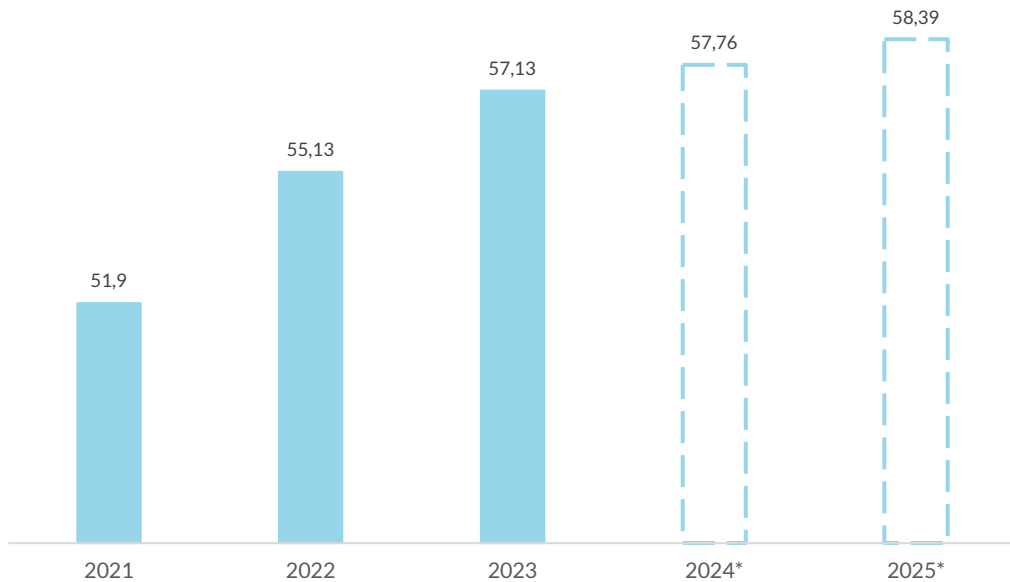
Pembangunan kebudayaan dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami perkembangan signifikan yang membawa harapan besar bagi masa depan. Sebagai upaya

dalam mendukung pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa, pemerintah melakukan serangkaian intervensi yang meliputi (1) penguatan karakter dan jati diri bangsa; (2) perlindungan dan pelestarian warisan budaya; (3) pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan; (4) penjaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (5) pengembangan bahasa dan sastra Indonesia; (6) transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan; serta (7) pengembangan diplomasi kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat merefleksikan pembangunan kebudayaan Indonesia secara lebih holistik dan bermakna dengan memuat tujuh dimensi, yakni ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan kesetaraan gender. Capaian IPK menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir, serta diproyeksikan mengalami kenaikan 2,26 poin pada tahun 2025. Dimensi ketahanan sosial budaya dengan capaian yang sudah relatif baik menunjukkan kemampuan kebudayaan untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik yang relevan, dengan dukungan kondisi sosial masyarakat. Sementara itu, dimensi ekonomi budaya dan ekspresi budaya perlu dioptimalkan, salah satunya melalui pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang berpotensi besar untuk memperkuat aktivitas ekonomi.



Grafik 10.2
Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2021-2025



Sumber: Kementerian Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, Kementerian PPN/Bappenas, 2025, diolah
Keterangan: *angka target

Berbagai upaya pelestarian warisan budaya telah memberikan dampak positif yang signifikan. Secara kumulatif sampai 2025, sebanyak 228 cagar budaya peringkat nasional telah ditetapkan, dengan enam diantaranya telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia (*World Cultural Heritage*). Enam warisan budaya ini meliputi Kawasan Candi Borobudur, Kawasan Candi Prambanan, Situs Manusia Purba Sangiran, Lanskap Budaya Provinsi Bali (Sistem Subak Sebagai Manifestasi Filosofi Tri Hita Karana), Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto, dan Sumbu Kosmologis Yogyakarta serta Penanda Bersejarahnya. Sementara itu, 2.213 unsur Warisan Budaya Takbenda (WBTb) juga telah ditetapkan secara nasional, dengan 13 diantaranya telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia (*World Intangible Cultural Heritage*). Sebagai upaya mendukung pemajuan kebudayaan, dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kebudayaan untuk mendukung operasional penyelenggaraan 115

museum dan 29 taman budaya di daerah guna menunjang kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pemerintah mendorong pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan sebagai langkah terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kebudayaan. Pada tahun 2025 dilakukan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan pada Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi. Pengembangan KCBN Muaro Jambi pada tahun 2025 meliputi pemugaran Candi Alun-Alun KCBN Muaro Jambi, pembuatan interior tahap I, serta penguatan ekosistem dan nilai budaya melalui pelatihan gastronomi kuliner tradisional, pelatihan *destination management living* museum KCBN Muaro Jambi, serta fasilitasi event budaya.

Pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk pemberdayaan masyarakat adat, salah satunya pengembangan wilayah adat sebagai

Bab 10.

ruang interaksi pemajuan kebudayaan. Pada tahun 2024, 39 wilayah adat dikembangkan dengan komponen yang meliputi (1) pemanfaatan ruang kultural; (2) perluasan partisipasi pendidikan berbasis kearifan lokal melalui Sekolah Lapang Kearifan Lokal; dan (3) pemberdayaan masyarakat adat berbasis kearifan lokal. Partisipasi berbagai pihak sangat penting untuk menjaga keberlanjutan inisiasi yang telah dilakukan.

Perkembangan pembangunan kebudayaan juga tidak lepas dari pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang terus meningkat, ditandai dengan kenaikan capaian Indeks Pembangunan Kebahasaan (IPBas) dari 48,35 (2023) menjadi 49,72 (2024). Peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) telah mencapai 101.330 peserta pada semester I 2025. Di samping itu, sinergi yang baik dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal telah berhasil merevitalisasi 114 bahasa daerah tahun 2025 melalui Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN). Eksistensi Bahasa Indonesia terus diperkuat pasca pengakuan sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO melalui serangkaian upaya, seperti dukungan 62 lembaga internasional yang memanfaatkan program diplomasi kebahasaan dan kesastraan di 32 negara, serta fasilitasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) oleh 387 lembaga pada tahun 2025.

Sejalan dengan penguatan di tingkat nasional, upaya pengembangan kebudayaan juga perlu dilakukan melalui diplomasi budaya di kancah global. Diplomasi kebudayaan dilakukan dengan memperkenalkan budaya Indonesia melalui musik, film, media digital, promosi seni, kuliner, sastra, dan festival. Fasilitasi kebudayaan dan 110 Kharisma Event Nusantara 2025 yang melibatkan lebih dari 500 komunitas budaya menunjukkan pentingnya kolaborasi multipihak dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kebudayaan.

10.2.2 Tantangan dan Upaya

Tantangan dalam menghadapi pelestarian budaya, antara lain: (1) pemerataan akses dan infrastruktur untuk mendukung perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan secara optimal; (2) pengelolaan cagar budaya yang telah ditetapkan; (3) pelestarian kearifan lokal sebagai fondasi dalam peneguhan karakter dan jati diri bangsa; (4) pemanfaatan warisan budaya sebagai modal dasar pembangunan dan akselerator transformasi ekonomi; (5) penguatan ekosistem seni budaya melalui pembinaan pelaku seni budaya untuk mendukung kreativitas dan daya cipta; (6) pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan; (7) pemanfaatan media digital untuk promosi kebudayaan guna membuka peluang baru dalam kerja sama dan diplomasi kebudayaan; (8) integrasi nilai-nilai budaya lokal sebagai alternatif pendekatan dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; (9) efektivitas pengawasan dan pemanfaatan Bahasa Indonesia di ruang publik; serta (10) perlindungan bahasa daerah dan internasionalisasi Bahasa Indonesia.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, upaya yang dilakukan, antara lain: (1) pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan untuk penguatan ekosistem kebudayaan; (2) perlindungan dan pelestarian cagar budaya secara partisipatif; (3) optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan OPK; (4) pengembangan ekosistem budaya melalui pembinaan talenta seni budaya; (5) perluasan kerja sama, promosi, dan diplomasi budaya; (6) pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (7) optimalisasi tata kelola kebudayaan melalui sinergi antarpemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah; serta (8) penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia.



Pemerintah terus berupaya mendorong terciptanya ekosistem pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan melalui Program Dana Indonesiana, yakni hibah dengan memanfaatkan Dana Abadi Kebudayaan. Berdasarkan Laporan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP (April 2025), melalui Dana Indonesiana, pemerintah telah memfasilitasi lebih dari 25.800 pelaku budaya, 10.346 komunitas, dan menghasilkan 384 karya budaya melalui 757 program publik serta lebih dari 6.800 peserta pelatihan. Pada 2025, alokasi anggaran untuk Dana Indonesiana sebesar Rp 465 miliar, mencakup dukungan untuk fasilitasi bidang kebudayaan bagi komunitas dan pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, produksi media, dan program layanan lainnya.



Pertunjukan Tedak "Puan dan Tato" Karya Siti Dexara Hachika dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024 di Taman Budaya Yogyakarta
Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024

10.3 Kearsipan

10.3.1 Capaian Utama Pembangunan

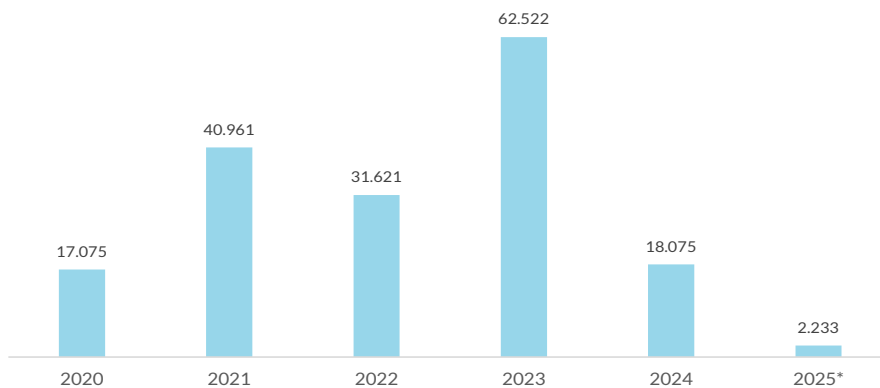
Kearsipan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tidak hanya merekam sejarah bangsa, arsip juga menjadi landasan dalam perumusan kebijakan, mendukung pemajuan kebudayaan, menjaga khazanah budaya dan memori kolektif bangsa, serta memperkuat jati diri dan identitas nasional. Arsip merupakan sarana penting untuk memahami sejarah dan peradaban, sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi basis evaluasi kebijakan pembangunan.

Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan. Arsip sebagai

Memori Kolektif Bangsa (MKB) dijaga dan dilestarikan melalui empat cara, yaitu akuisisi/penarikan, sejarah lisan, repatriasi dan registrasi MKB. Akuisisi dan wawancara sejarah lisan dilakukan oleh semua lembaga kearsipan sesuai jenjang kewenangannya. Adapun repatriasi dilakukan oleh pemerintah untuk menarik arsip dari beberapa negara seperti Belanda, Inggris, dan Jepang.

Komitmen pemerintah terlihat dari penyelamatan arsip sebagai MKB yang mencapai 172.487 arsip sejak tahun 2020 hingga bulan Juli 2025. Pada semester I 2025 penyelamatan dan pelestarian arsip nasional sebagai MKB mencapai 2.233 arsip. Penyelamatan dan pelestarian arsip bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dalam bentuk layanan digital.

Grafik 10.3
Perkembangan Jumlah Arsip yang Diselamatkan Tahun 2020–2025



Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia, 2025
Keterangan: *) Capaian semester I

Pemerintah secara konsisten melakukan identifikasi, kurasi, dan registrasi khazanah arsip ke dalam program MKB dan *Memory of the World* (MoW) untuk memastikan bahwa arsip-arsip penting yang merefleksikan perjalanan sejarah dan jati diri bangsa tetap terlindungi,

diakui, dan dapat diakses oleh generasi kini maupun mendatang. Konsistensi tersebut terlihat dari rekognisi dan kepercayaan penuh dari *stakeholder* dalam dan luar negeri terhadap pemerintah yang berhasil melakukan registrasi MKB dan MoW. Hingga bulan Juli



Arsip memiliki peran penting dalam memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Khazanah arsip tentang ketahanan pangan, penanganan stunting, dan gizi pelajar telah ada sejak masa Hindia Belanda hingga Republik. Arsip sejarah yang berkaitan dengan program MBG dapat menjadi pembelajaran, referensi, dan rujukan bagi penyusunan kebijakan nasional dan daerah, terutama di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Program MBG memiliki sejarah panjang yang dapat dirujuk melalui arsip-arsip sejarah yang tersimpan di lembaga kearsipan pemerintah pusat.



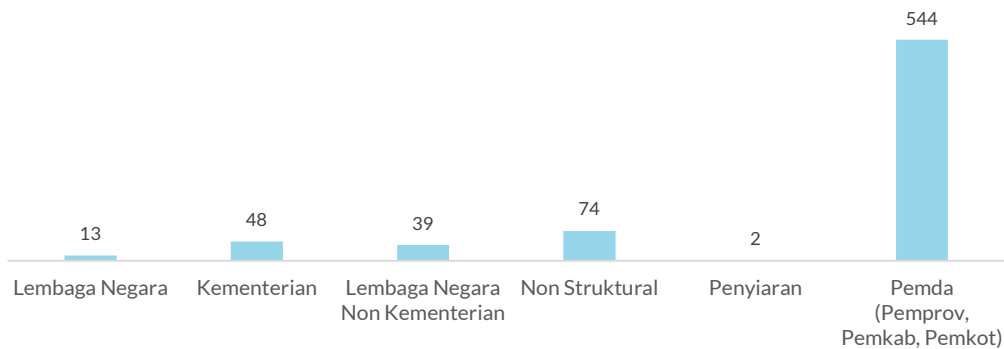
Pembagian Makanan di Sekolah Rakyat di Kotapraja Djakarta Raya, Pedjagalan
Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia, Kementerian Penerangan RI, 1954

Bab 10.

2025, terdapat sebelas arsip yang sudah teregistrasi sebagai MKB, serta tiga khazanah arsip Indonesia yang telah ditetapkan sebagai MoW. Capaian ini terwujud berkat kuatnya

kolaborasi antara berbagai pihak, baik Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas kearsipan, maupun perpustakaan.

Grafik 10.4
Kinerja Penerapan SRIKANDI Tahun 2025



Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia, 2025

Sebagai upaya transformasi dan digitalisasi arsip, pemerintah telah membangun dan mengembangkan sistem kearsipan berbasis *web based*. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sudah ditetapkan sejak Oktober 2020 dan sudah digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I). Implementasi SRIKANDI mengalami peningkatan dari 712 K/L/D/I pada tahun 2024 menjadi 720 K/L/D/I pada semester I 2025. Jumlah pengguna aplikasi SRIKANDI hingga bulan Juli 2025 mencapai 3,90 juta orang, dengan jumlah arsip sebanyak 121,62 juta arsip tersimpan di Pusat Data Nasional (PDN).

Penerapan SRIKANDI merupakan wujud nyata transformasi digital kearsipan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan efisien. Implementasi SRIKANDI telah memberikan dampak nilai ekonomi dalam mendukung efisiensi biaya dalam proses

penciptaan, penggunaan kertas dan tinta, pengiriman, penyimpanan, pencarian, hingga layanan arsip secara digital. Selain dampak ekonomi, implementasi SRIKANDI juga memperkuat akuntabilitas dan layanan publik serta berkontribusi besar terhadap pelestarian lingkungan.

Pemerintah juga terus mengembangkan JIKN yang memiliki peran penting sebagai instrumen penyatuan riwayat dokumenter yang terpisah-pisah (*fragmented documentary history*) di antara para penyelenggara kearsipan di seluruh Indonesia. Informasi arsip yang tersedia di JIKN ditargetkan sebanyak 65.000 arsip pada tahun 2025 dan terealisasi sebanyak 98.365 arsip. JIKN sebagai basis data kearsipan nasional memiliki peran penting sebagai sarana pelestarian warisan memori kolektif bangsa, pengintegrasian pengelolaan arsip, penyediaan sumber data untuk pendidikan, penelitian, dan inovasi, serta mempercepat transformasi digital kearsipan.



10.3.2 Tantangan dan Upaya

Pembangunan bidang kearsipan masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain: (1) kesadaran dan komitmen masyarakat terhadap pentingnya arsip; (2) digitalisasi arsip untuk mendorong optimalisasi fungsi arsip sebagai sumber informasi dan instrumen akuntabilitas; (3) optimalisasi kapasitas lembaga kearsipan dan SDM kearsipan; (4) partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan kearsipan; (5) pengembangan khazanah arsip nasional; dan (6) penguatan sistem manajemen kearsipan yang mendukung transformasi tata kelola pemerintahan.

Untuk menjawab tantangan dan melanjutkan tren positif dalam pembangunan kearsipan nasional, diperlukan serangkaian upaya sebagai berikut (1) pembudayaan literasi dan sadar arsip melalui komunitas dan kemitraan strategis; (2) pengembangan platform digital dan optimalisasi pengelolaan metadata kearsipan; (3) peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM kearsipan yang berkualitas secara merata; (4) pengembangan inovasi layanan kearsipan untuk masyarakat; (5) pengembangan pusat-pusat khazanah arsip nusantara; serta (6) penyelenggaraan pengawasan kearsipan nasional di tingkat pusat dan daerah secara rutin.

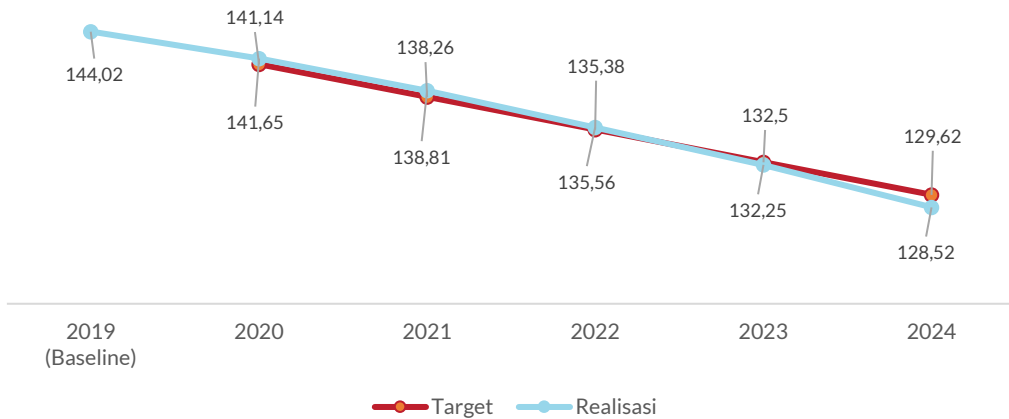
10.4 Mitigasi Bencana

10.4.1 Capaian Utama Pembangunan

Dalam upaya memperkuat ketahanan nasional, pemerintah terus mendorong pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap risiko bencana serta dampak perubahan iklim. Agenda pengelolaan risiko bencana difokuskan pada (1) penguatan kerangka regulasi; (2) penguatan kelembagaan dan pendanaan; (3) peningkatan kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana; serta (4) penguatan investasi pengelolaan risiko bencana untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif.

Untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pengurangan risiko bencana, digunakan penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), dimana semakin rendah nilai IRBI suatu wilayah, semakin kecil kemungkinan wilayah tersebut mengalami dampak signifikan akibat bencana. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya pengurangan risiko bencana, baik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan infrastruktur, pengurangan kerentanan sosial, maupun mitigasi bahaya yang efektif. Oleh karena itu, nilai IRBI yang rendah menjadi indikator penting dalam menilai ketangguhan suatu wilayah terhadap bencana. Pada tahun 2024, terjadi penurunan nilai IRBI sebesar 15,5 poin atau 10,76 persen dari tahun 2019 (*baseline*).

Grafik 10.5
Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2020 - 2024

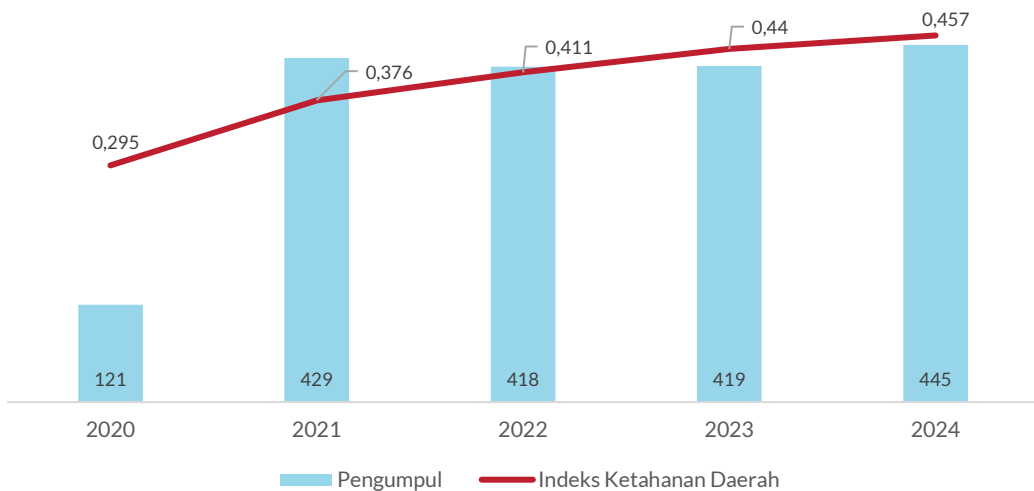


Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024, difokuskan pada tujuh prioritas utama, mulai dari penguatan kebijakan hingga pengembangan sistem pemulihan. Target tahun 2024 adalah peningkatan IKD sebesar 7

persen atau mencapai nilai 0,457. Hingga tahun 2024, sebanyak 445 dari 514 kabupaten/kota telah berpartisipasi dalam penghitungan IKD, meningkat signifikan dibandingkan empat tahun sebelumnya.

Grafik 10.6
Grafik Perkembangan IKD Tahun 2020 - 2024



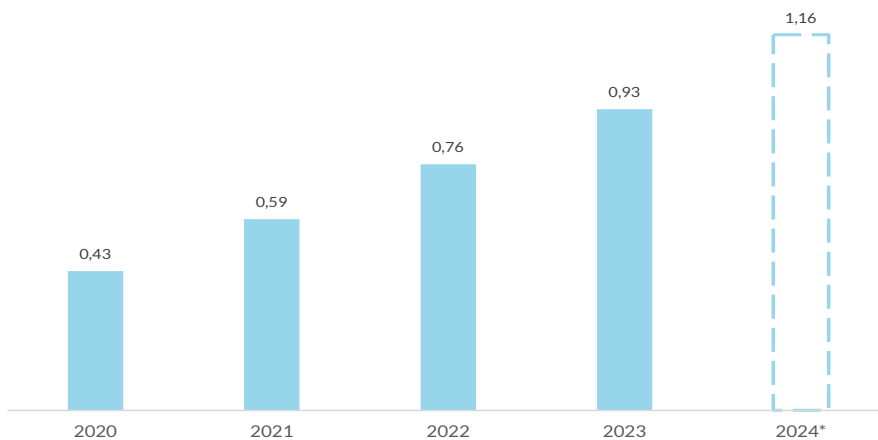
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025



Pencapaian lain pada penanggulangan bencana adalah peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, dimana pada tahun 2025 dilakukan (1) bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan korban dan pengungsi di Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Balikpapan; (2) pendampingan kepada 80 petugas pengkajian kebutuhan pascabencana dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana; (3) pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana Prioritas Nasional yang diikuti oleh 120 orang; (4) pembangunan tiga sistem informasi bidang kebencanaan fokus layanan peringatan dini; (5) operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi dan intensitas hujan di wilayah Jabodetabek; dan (6) peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana melalui penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Semarang, Jawa Tengah.

Sementara itu, Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) difokuskan pada empat sektor prioritas terdampak yaitu sektor kelautan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Keberhasilan penanganan dampak perubahan iklim ditunjukkan dengan persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim terhadap PDB. Hingga tahun 2024, pemerintah Indonesia berhasil menekan potensi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim sebesar 1,16 persen PDB, lebih tinggi dibandingkan dengan target sebesar 1,15 persen PDB. Capaian ini merupakan hasil dari implementasi berbagai intervensi aksi PBI yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di lokasi prioritas PBI yang tersebar di 482 kabupaten/kota.

Grafik 10.7
Persentase Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat Dampak Perubahan Iklim terhadap PDB (%) Tahun 2020-2024



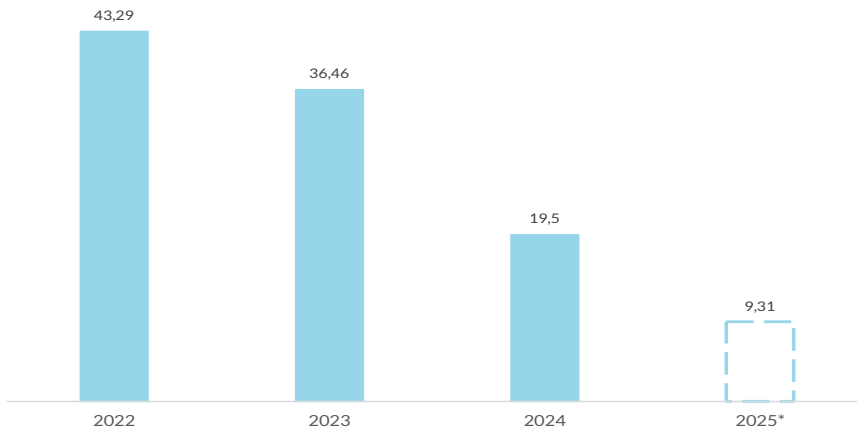
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Keterangan : *angka sementara 2024

Intervensi PBI di sektor kelautan dan pesisir pada tahun 2025 dilakukan melalui berbagai aksi, antara lain: (1) penyelenggaraan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) di Kabupaten Indramayu, Takalar, dan Kota Banda Aceh dengan total peserta 180 nelayan; (2)

pembangunan infrastruktur pengaman pantai sepanjang 9,31 km dengan prioritas pada pulau terluar dan garis pantai kritis; serta (3) penyiapan pembangunan *giant sea wall* di Pesisir Utara Jakarta.

Grafik 10.8
Capaian Pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Tahun 2022–2025 (Km)

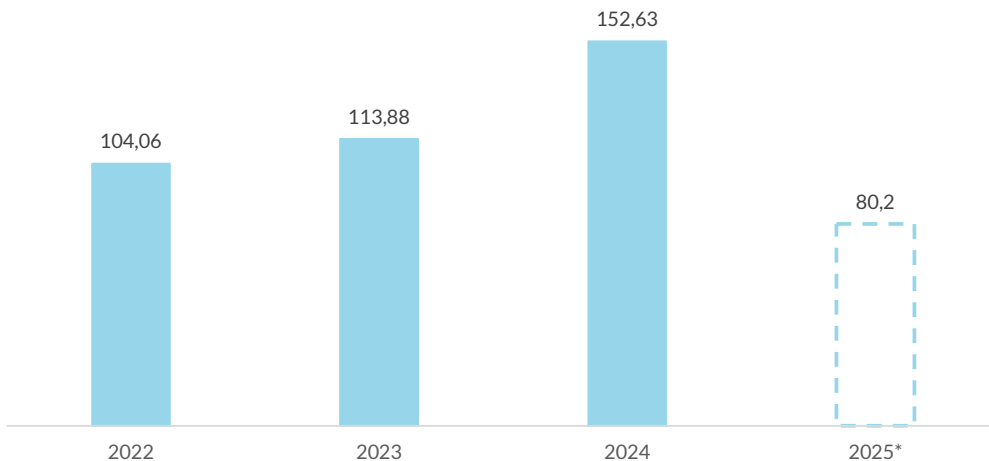


Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2025
Keterangan : *Target 2025

Intervensi PBI yang dilakukan pada sektor air, antara lain: (1) operasi modifikasi cuaca guna mengurangi intensitas curah hujan dalam rangka penanganan banjir dan cuaca ekstrem di Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan memiliki tingkat akurasi keberhasilan sebesar 96 persen. Penurunan

potensi curah hujan paling signifikan terjadi di Jawa Barat sebesar 60,42 persen; dan (2) pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 80,2 km dengan prioritas pada kawasan Pantura Jawa dan kawasan perkotaan.

Grafik 10.9
Capaian Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Tahun 2022–2025 (Km)



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2025
Keterangan : *Target 2025



10.4.2 Tantangan dan Upaya

Penanggulangan bencana di Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks, mencakup aspek geografis, sosial, maupun kelembagaan, antara lain: (1) secara geografis, Indonesia berada pada kawasan rawan bencana, seperti bencana geologi dan hidrometeorologi; (2) dari sisi sosial dan ekonomi, sejumlah daerah masih perlu diperkuat kapasitasnya dalam mitigasi dan respons bencana; dan (3) peningkatan koordinasi antarinstansi serta memaksimalkan sumber daya yang ada untuk memastikan upaya penanggulangan bencana berjalan lebih efektif.

Serangkaian upaya mitigasi yang terus dilakukan untuk penanggulangan bencana, diantaranya (1) penguatan sistem peringatan dini dan penyusunan peta risiko bencana yang terintegrasi hingga ke tingkat lokal; (2) peningkatan budaya sadar bencana melalui kurikulum sekolah dan pelatihan masyarakat; (3) peningkatan kapasitas institusi penanggulangan bencana melalui pelatihan dan standarisasi prosedur; serta (4) pembentukan desa tangguh bencana.

Sementara itu, tantangan penanganan dampak perubahan iklim, di antaranya (1) kolaborasi intervensi yang bersifat spesifik dan rinci untuk setiap wilayah; (2) meningkatnya kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologis, pergeseran musim, dan periode ulang kejadian variasi iklim; (3) sebagian besar aksi ketahanan iklim yang diimplementasikan tidak dapat dihitung langsung penurunan kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim; (4) kolaborasi intervensi terhadap mitigasi dampak perubahan iklim, serta (5) skema pembiayaan dalam mendukung program penanganan dampak perubahan iklim.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penanganan dampak perubahan iklim, yaitu (1) penguatan perencanaan berbasis iklim di tingkat nasional dan daerah serta implementasi aksi PBI di lokasi prioritas PBI; (2) peningkatan kapasitas adaptasi sektor-sektor prioritas yang terdampak; (3) pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi aksi ketahanan iklim untuk memastikan efektivitas intervensi dan mendorong pengurangan risiko secara terukur; (4) sinergi intervensi yang dilakukan oleh berbagai sektor; serta (5) penguatan pembiayaan campuran dari pemerintah, swasta, dan lembaga internasional.

80



Sumber: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

BAB 11

Penutup



Patung Jenderal Soedirman
Sumber: Kementerian Sekretariat Negara



BAB 11

Penutup

Indonesia Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju merupakan semangat pembangunan yang akan terus digelorakan menuju Indonesia Emas 2045. Tahun 2025 merupakan awal pelaksanaan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang menjadi fondasi bagi transformasi Indonesia menuju negara maju.

Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu bertahan dan tetap tumbuh. Kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan capaian positif di tengah eskalasi dari tensi geopolitik dan perang dagang yang menjadi warna atas rentannya perekonomian global. Keberhasilan ini menunjukkan terjaganya stabilitas ekonomi dan sistem fiskal serta keuangan nasional yang tetap resilien.

Indonesia berada di kategori *Upper Middle-Income Countries* (UMIC) sejak tahun 2022 yang ditandai dengan peningkatan *Gross National Income* per kapita Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu,

tingkat inflasi menunjukkan tren menurun sejak 2022 hingga semester I 2025, sehingga tingkat inflasi Indonesia lebih rendah dibandingkan negara berkembang lainnya.

Kinerja investasi meningkat seiring penguatan hilirisasi industri. Program Hilirisasi Industri menjadi fondasi bagi kemandirian ekonomi nasional untuk memperkuat daya saing dan posisi Indonesia dalam perdagangan global. Di sisi lain, Indonesia juga terus terlibat aktif dalam kancah perdagangan internasional dengan berbagai kebijakan berupa (1) strategi perluasan ekspor melalui perluasan pasar ekspor tradisional dan nontradisional; dan (2) peningkatan iklim investasi melalui optimalisasi *Online Single Submission* (OSS) dan *Indonesia National Single Window* (INSW), serta pemberian insentif fiskal maupun nonfiskal.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif, salah satunya ditandai dengan UMKM dan Koperasi yang terus bergerak ke arah yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan

Bab 11.

dengan upaya pemberdayaan UMKM serta pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbasis komunitas, yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi UMKM dan Koperasi terhadap PDB.

Indonesia berkomitmen menuju swasembada pangan dan energi sebagai upaya menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan dan Rasio Elektrifikasi menunjukkan upaya pemerintah dalam mendorong ketersediaan pangan dan meningkatkan volume penggunaan listrik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam dua dekade terakhir, kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan menunjukkan capaian positif. Hal tersebut menunjukkan ketangguhan sistem perlindungan sosial nasional serta efektivitas kolaborasi dan integrasi berbagai intervensi pemerintah yang semakin adaptif dan berbasis data.

Transformasi BUMN pada tahun 2025 dilaksanakan melalui pembentukan BPI-Danantara. Melalui Danantara, Indonesia tidak hanya membangun lembaga pengelola investasi yang transparan dan kredibel secara global, tetapi juga menjadikannya kendaraan transformasional untuk mendukung hilirisasi, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia diharapkan dapat memperkuat jati diri sehingga memiliki daya saing untuk tetap bertahan dan tumbuh. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) terus dilakukan sehingga Indonesia dapat melangkah menuju negara maju.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) konsisten menunjukkan tren positif yang mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah yang konsisten dengan prinsip keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kedaulatan bangsa.

Fokus pembangunan di bidang pendidikan diharapkan mampu memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berbagai terobosan intervensi seperti Sekolah Rakyat, digitalisasi pendidikan, dan Sekolah Unggul Garuda diharapkan menjadi fondasi bagi penciptaan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Usia Harapan Hidup menjadi salah satu indikator keberhasilan bidang kesehatan, baik dari aspek promotif, preventif, maupun kuratif. Penyelenggaraan JKN meningkatkan akses dan mendukung peningkatan derajat kesehatan. Terobosan kebijakan seperti MBG, Cek Kesehatan Gratis, penuntasan TBC dan penurunan stunting diharapkan mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Inisiasi Program MBG diharapkan dapat mengakselerasi sektor pendidikan dan kesehatan secara terpadu sejak dalam kandungan hingga menjadi SDM yang sehat, cerdas, dan tangguh. Selain itu MBG juga berperan dalam mendorong ekonomi melalui ekosistem pangan lokal menuju swasembada dan kedaulatan pangan.



Sumber: Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka menjaga sumber daya alam Indonesia yang lestari dan berkelanjutan, pengelolaan sampah harus terintegrasi dari hulu ke hilir. Selain itu, perubahan perilaku dan penguatan tata kelola sampah harus menjadi budaya masyarakat Indonesia. Keberlanjutan negara sangat ditentukan oleh hubungan yang selaras antara manusia dan lingkungan.

Pemerintah terus berbenah sehingga birokrasi bukan hanya tentang pelayanan publik, namun juga menjadi penggerak pembangunan.

Pembenahan tersebut berimplikasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pembangunan yang berkesinambungan terus didorong melalui berbagai kebijakan. Komitmen, integritas, dan kerja keras menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat, memperkuat pilar demokrasi, menciptakan kehidupan sosial yang inklusif dan harmonis, serta mengakselerasi transformasi menuju Indonesia yang maju, adil, dan berkelanjutan.



**Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju**



**Pindai Kode QR
untuk mengunduh
Lampiran Pidato Presiden 2025**